



| Kabupaten Banyuwangi



Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN 2025–2029



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DAN
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran;
16. Kegiatan adalah sekumpulan Tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan RPJMN.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran umum daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Penjabaran lebih lanjut atas RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 6

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam RKPD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, tetap berlaku sampai dengan masa perencanaannya selesai.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Di tetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANYUWANGI,



IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Di undangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



GUNTUR PRIAMBODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER 163-4/2025



5.3 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025-2030, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2030 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2030. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini dan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2025-2030 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

BUPATI BANYUWANGI



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS



DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud Dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Dokumen	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Evaluasi Capaian Pembangunan Rpjmd Kabupaten Banyuwangi Periode 2021-2026	II-1
2.1.2 Aspek Geografi Dan Demografi	II-7
2.1.2.1 Posisi Dan Peran Strategis Daerah	II-7
2.1.2.2 Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-16
2.1.2.3 Berketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan	II-28
2.1.2.4 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-32
2.1.2.5 Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	II-37
2.1.2.6 Demografi	II-41
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-46
2.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-46
2.1.3.2. Kesehatan Untuk Semua	II-64
2.1.3.3. Pendidikan Kualitas Yang Merata	II-67
2.1.3.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif	II-71
2.1.3.5. Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju	II-72
2.1.3.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, Dan Masyarakat Inklusif	II-76
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-80
2.1.4.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-80
2.1.4.2. Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi	II-81
2.1.4.3 Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	II-87



2.1.4.4. Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-91
2.1.4.5. Stabilitas Ekonomi Makro	II-94
2.1.4.6. Transformasi Digital	II-97
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum	II-97
2.1.5.1. Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	II-97
2.1.5.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	II-100
2.1.5.3. Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-102
2.1.5.4. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	II-103
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II-164
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II-166
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan Apbd	II-166
2.2.1.2 Neraca Daerah	II-183
2.2.2 Kebijakan Penggunaan Anggaran Dan Analisis Pembiayaan	II-195
2.2.2.1 Proporsi Pendapatan Daerah	II-195
2.2.2.2 Proporsi Belanja Daerah	II-210
2.2.2.3 Analisis Pembiayaan	II-225
2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan	II-233
2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah	II-233
2.2.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	II-243
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis	II-246
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-246
2.3.2 Isu Strategis Daerah	II-250
2.3.2.1 Telaah Rpjmn Tahun 2025 - 2029	II-250
2.3.2.2 Telaah Rpjmd Jawa Timur Tahun 2025-2030	II-264
2.3.2.3 Telaah Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2045	II-268
2.3.2.4 Telaah Rtrw Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2044	II-276
2.3.2.5 Telaah Klls Kabupaten Banyuwangi 2025 - 2029	II-283
2.3.2.6 Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi	II-287
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	III-2



3.1.1 Visi Dan Misi	III-2
3.1.2 Tujuan Dan Sasaran Rpjmd 2025 - 2029	III-8
3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-19
3.2.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rpjmd 2025 - 2029	III-19
3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Tahun 2025 - 2029	III-44
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
4.1 Program Perangkat Daerah.....	VI-2
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VI-55
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Pedoman Transisi.....	V-2
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.3 Penutup	V-4



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Periode 2021-2026	II-1
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020-2024.....	II-2
Tabel 2.3 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	II-8
Tabel 2.4 Luas dan Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi	II-11
Tabel 2.5 Kondisi Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	II-12
Tabel 2.6 Kondisi Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.....	II-12
Tabel 2.7 Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.....	II-13
Tabel 2.8 Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Banyuwangi	II-17
Tabel 2.9 Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Banyuwangi.....	II-19
Tabel 2.10 Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.....	II-21
Tabel 2.11 Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Banyuwangi	II-23
Tabel 2.12 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Banyuwangi Eksisting	II-25
Tabel 2.13 Proyeksi Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Banyuwangi.....	II-27
Tabel 2.14 Potensi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Banyuwangi.....	II-37
Tabel 2.15 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Kabupaten Banyuwangi.....	II-38
Tabel 2.16 Potensi Luas Bahaya Bencana di Kabupaten Banyuwangi	II-38
Tabel 2.17 Kondisi Demografi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024	II-42
Tabel 2.18 Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029	II-44
Tabel 2.19 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024	II-51
Tabel 2.20 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi	II-54
Tabel 2.21 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share	II-55
Tabel 2.22 Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-69
Tabel 2.23 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-71
Tabel 2.24 Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.....	II-77
Tabel 2.25 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel 2.26 Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-87



Tabel 2.27 Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 ...	II-89
Tabel 2.28 Perkembangan FDR di Kabupaten Banyuwangi.....	II-91
Tabel 2.29 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2024	II-99
Tabel 2.30 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2025.....	II-101
Tabel 2.31 Indeks Rasa Aman di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2021.....	II-101
Tabel 2.32 Capaian Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-105
Tabel 2.33 Capaian Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024	II-106
Tabel 2.34 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.35 Capaian SPM urusan Perkim Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024	II-114
Tabel 2.36 Capaian Penyelenggaraan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Sosial Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024	II-118
Tabel 2.37 Capaian SPM urusan Sosial Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024	II-129
Tabel 2.38 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-123
Tabel 2.39 capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024	II-132
Tabel 2.40 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023	II-134
Tabel 2.41 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024.....	II-136
Tabel 2.42 Kinerja Urusan Persandian di Perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023	II-141
Tabel 2.43 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-144
Tabel 2.44 Komoditi Hasil Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.45 Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-154
Tabel 2.46 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020-2024	II-161
Tabel 2.47 Kinerja Unsur Pengawasan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-163
Tabel 2.48 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2024.....	II-169
Tabel 2.49 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024 ...	II-172
Tabel 2.50 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 2020-2024.....	II-176



Tabel 2.51 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-178
Tabel 2.52 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-182
Tabel 2.53 Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-184
Tabel 2.54 Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-190
Tabel 2.55 Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-196
Tabel 2.56 Predikat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-200
Tabel 2.57 Predikat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-202
Tabel 2.58 Predikat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-204
Tabel 2.59 Predikat Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-205
Tabel 2.60 Predikat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	II-207
Tabel 2.61 Ruang Fiskal di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-210
Tabel 2.62 Proporsi Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-211
Tabel 2.63 Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023	II-217
Tabel 2.64 Capaian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-220
Tabel 2.65 Capaian Belanja Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-221
Tabel 2.66 Capaian Belanja Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-222
Tabel 2.67 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024	II-224
Tabel 2.68 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024	II-226
Tabel 2.69 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024.....	II-227
Tabel 2.70 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2022.....	II-229
Tabel 2.71 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024	II-230
Tabel 2.72 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2029	II-232



Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2.73 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2030	II-237
Tabel 2.74 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2030	II-245
Tabel 2.75 Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi.....	II-246
Tabel 2.76 Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	II-253
Tabel 2.77 Target Sasaran Utama Visi Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	II-269
Tabel 2.78 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024–2044.....	II-280
Tabel 2.79 Isu pendek (shortlist issue) KLHS RPJMD	II-284
Tabel 2.80 Linearitas Isu Strategis RPJMN, KLHS dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi...	II-294
Tabel 3.1 Keselarasan untuk mendukung tercapainya Asta Cita dan Misi Provinsi Jawa timur	III-6
Tabel 3.2 Sasaran dan Target RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2030	III-16
Tabel 3.3 Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Banyuwangi	III-29
Tabel 3.4 Skoring Penentuan Urgensi Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Banyuwangi	III-32
Tabel 3.5 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029.....	III-34
Tabel 3.6 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029.....	III-46
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyuwangi 2025-2030.....	IV-55
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyuwangi 2025-2029	IV-57
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Banyuwangi 2025-2029.....	IV-60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen	I-8
Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Banyuwangi	II-8
Gambar 2.2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi.....	II-10
Gambar 2.3 Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Banyuwangi Eksisting	II-18
Gambar 2.4 Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Banyuwangi Proyeksi.....	II-20
Gambar 2.5 Daya Dukung Lahan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi Eksisting	II-22
Gambar 2.6 Daya Dukung Lahan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi Proyeksi	II-24
Gambar 2.7 Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Banyuwangi.....	II-26
Gambar 2.8 Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Banyuwangi Proyeksi	II-28
Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-29
Gambar 2.10 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-30
Gambar 2.11 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2.13 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-33
Gambar 2.14 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Ton/hari) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-34
Gambar 2.15 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-35
Gambar 2.16 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Banyuwangi 2022-2024	II-36
Gambar 2.17 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-40
Gambar 2.18 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-41
Gambar 2.19 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029	II-45
Gambar 2.20 Proyeksi Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029.....	II-45
Gambar 2.21 Proyeksi Angka Ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029	II-46
Gambar 2.22 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-47



Gambar 2.23 Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-49
Gambar 2.24 Klasifikasi Sektor PDRB Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhannya	II-49
Gambar 2.25 PDRB per Kapita di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-57
Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-58
Gambar 2.27 Indeks Gini Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	II-60
Gambar 2.28 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-61
Gambar 2.29 Garis Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-62
Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Manusia Hasil Long Form SP2020 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.31 Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-64
Gambar 2.32 Prevalensi Stunting di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024.....	II-66
Gambar 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-67
Gambar 2.34 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-68
Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-70
Gambar 2.36 Indeks Harmoni Sosial di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024.....	II-73
Gambar 2.37 Indeks Budaya Lokal di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024	II-74
Gambar 2.38 Indeks Kepedulian Sosial di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024	II-75
Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024	II-76
Gambar 2.40 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 ..	II-78
Gambar 2.41 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 ..	II-79
Gambar 2.42 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-80
Gambar 2.43 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2023	II-81
Gambar 2.44 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-82
Gambar 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-84
Gambar 2.46 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2.47 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-92



Kabupaten Banyuwangi

Gambar 2.48 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-94
Gambar 2.49 Tingkat Inflasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-95
Gambar 2.50 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	II-96
Gambar 2.51 Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-98
Gambar 2.52 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-99
Gambar 2.53 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-100
Gambar 2.54 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024	II-102
Gambar 2.55 Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 ..	II-104
Gambar 2.56 Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 ..	II-108
Gambar 2.57 Capaian Indikator HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-110
Gambar 2.58 Capaian Indikator Urusan PUPR Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023	II-113
Gambar 2.59 Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak dan Terjangkau di Kab. Banyuwangi Tahun 2019-2023	II-115
Gambar 2.60 Proporsi Rumah Tangga terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja di Kab. Banyuwangi Tahun 2019-2024.....	II-116
Gambar 2.61 Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-117
Gambar 2.62 Persentase Pelayanan PPKS di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024	II-120
Gambar 2.63 Kinerja Uruasan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024	II-121
Gambar 2.64 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-124
Gambar 2.65 Capaian Indikator Urusan Pertanahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023.....	II-126
Gambar 2.66 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-127
Gambar 2.67 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-128
Gambar 2.68 Capaian Indikator Urusan PMD di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024	II-130
Gambar 2.69 Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-133
Gambar 2.70 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-135



Gambar 2.71 Kinerja Urusan Koperasi UM di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-138
Gambar 2.72 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024	II-139
Gambar 2.73 Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-140
Gambar 2.74 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-142
Gambar 2.75 Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024....	II-145
Gambar 2.76 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-146
Gambar 2.77 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-147
Gambar 2.78 Length of Stay di Kabupaten Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-148
Gambar 2.79 Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-151
Gambar 2.80 Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-153
Gambar 2.81 Persentase Peningkatan Nilai Penjualan/Omzet IKM di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-155
Gambar 2.82 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024	II-156
Gambar 2.83 Kinerja Unsur Pendukung (Sekretariat DPRD) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-158
Gambar 2.84 Kinerja Unsur Perencanaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.	II-159
Gambar 2.85 Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-160
Gambar 2.86 Kinerja Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-162
Gambar 2.87 Kinerja Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-164
Gambar 2.88 Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II-168
Gambar 2.89 Komponen Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II-175
Gambar 2.90 Rasio Likuiditas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-191
Gambar 2.91 Rasio Solvabilitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-193
Gambar 2.92 Rasio Aktivitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-194



Gambar 2.93 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-196
Gambar 2.94 Pergeseran Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-198
Gambar 2.95 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-199
Gambar 2.96 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-202
Gambar 2.97 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II- 203
Gambar 2.98 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-205
Gambar 2.99 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-207
Gambar 2.100 Rasio PAD Terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 ...	II-208
Gambar 2.101 Rasio Ruang Fiskal di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-209
Gambar 2.102 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-212
Gambar 2.103 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-214
Gambar 2.104 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-215
Gambar 2.105 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-216
Gambar 2.106 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-219
Gambar 2.107 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Pendidikan terhadap Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024	II-221
Gambar 2.108 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Kesehatan terhadap Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.....	II-222
Gambar 2.109 Periodeisasi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJPN 2025-2045.	II-251
Gambar 2.110 Fokus Agenda Pembangunan Nasional 2025-2029.....	II-252
Gambar 2.111 Visi Misi Presiden	II-256
Gambar 2.112 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ...	II-258
Gambar 2.113 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029	II-259
Gambar 2.114 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Jawa	II-260



Kabupaten Banyuwangi

Gambar 2.115 Alur Pikir Pembangunan Wilayah Jawa dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM	II-261
Gambar 2.116 Arah Pembangunan Wilayah Jawa Timur	II-261
Gambar 2.117 Visi-Misi dan Sasaran Pembangunan Jawa Timur	II-267
Gambar 2.118 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur	II-268
Gambar 2.119 Misi RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2025-2045	II-270
Gambar 2.120 Tahapan Kebijakan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	II-270
Gambar 2.121 Isu paling Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi.....	II-285
Gambar 3.1 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah	III-5
Gambar 3.2 Cascading Pencapaian Tujuan 1	III-9
Gambar 3.3 Cascading Pencapaian Tujuan 2	III-11
Gambar 3.4 Cascading Pencapaian Tujuan 3	III-12
Gambar 3.5 Cascading Pencapaian Tujuan 4	III-14
Gambar 3.6 Pentahapan RPJMD Tahun 2025-2029	III-26
Gambar 3.7 Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Banyuwangi.....	III-33



BAB I

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan politis adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi hasil pemilihan tahun 2024 adalah pasangan **Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Mujiono** yang dilantik tanggal 20 Februari 2025 sesuai surat keputusan Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Visi dan misi bupati dan wakil bupati harus diterjemahkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 serta memperhatikan RPJMN 2025-2029.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDG`s, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Banyuwangi juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu periodisasi RPJMD, RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-1 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045. Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi pada periode ini merupakan tahapan pertama dari capaian RPJPD Kabupaten Banyuwangi.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi harus menggunakan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*). Pendekatan pertama yakni **“Pendekatan Teknokratik”** yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 direpresentasikan melalui penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan akademis dan ilmiah, analisis data dan informasi sebagai upaya dalam melihat objektifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kabupaten Banyuwangi.

Pendekatan kedua yakni **“Pendekatan Partisipatif”** yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD, segala proses dan tahapan dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dilingkup Kabupaten Banyuwangi. Praktisnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 dapat direpresentasikan melalui stakeholder yang melibatkan Akademisi, masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Komunitas, maupun masyarakat ekonomi atau private sector di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan ketiga yakni **“Pendekatan Politis”** yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD dilaksanakan proses penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kaitannya dengan tahapan ini, secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 melalui Tujuan dan Sasaran yang direpresentasikan dengan indikator dan targetnya. Penerjemahan Visi dan Misi Bupati Banyuwangi melalui tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan agar, berhasil atau tidaknya pemerintah dapat terukur melalui IKU atau indikator tujuan. Selain itu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang diterjemahkan melalui visi dan misi Bupati



terpilih juga menjadi pedoman perangkat daerah dalam menentukan program pembangunan.

Terakhir pendekatan keempat yakni **“Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up”**, yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Praktisnya penetapan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan sebagai muara seluruh rencana pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Banyuwangi yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Banyuwangi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 ini berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, disusun melalui enam tahapan, yaitu:

- a. Persiapan penyusunan RPJMD;
- b. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. Penyusunan rancangan RPJMD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. Penetapan.

Berbagai poin-poin tahapan sebagaimana di atas telah dilaksanakan. Selanjutnya penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2025-2029. RENSTRA Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD, setiap Perangkat



Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa RENJA Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 merujuk pada sejumlah dasar hukum sebagaimana berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 14. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam



- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10).

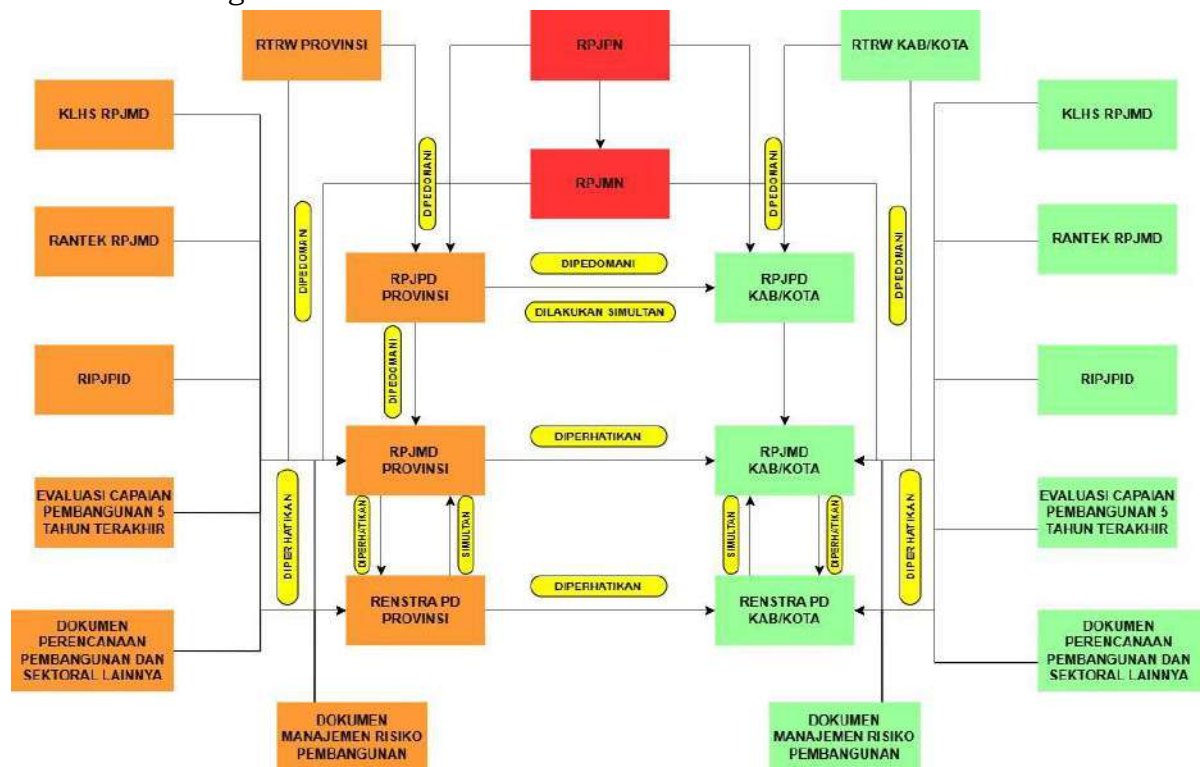
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Secara tersurat dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa sebelum disusunnya RPJMD baik di Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun dulu Rancangan Teknokratis RPJMD yang berujung terhadap munculnya isu strategis sebagai pedoman pembangunan daerah.

Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan rancangan dokumen RPJMD sesuai platform politik dari Bupati/Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang

terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Banyuwangi memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2025-2029. Pada prinsipnya, melalui arahan pembangunan nasional tahun 2025-2029 yang dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2025-2045 periode ke I menjadi acuan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Penyelarasan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur



dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan kewilayahan dan seluruh urusan (sektoral) lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

3. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 Tahap I. Dengan demikian dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Banyuwangi juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 Tahap I.
4. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi tahun 2024-2044. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2025- 2029.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakatnya merupakan tempat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan terhadap pencapaian TPB di daerah. Dukungan Pemkab dalam TPB secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya melalui rencana kuadran identitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
6. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya seperti dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Kabupaten Banyuwangi 2025 – 2029.
7. RPJMD Kabupaten Banyuwangi mempedomani dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) sebagai bentuk penyelarasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, secara substantif keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan provinsi, berserta dokumen KLHS dan RTRW dibahas sebagai bahan telaah isu. Maka keselarasan substansi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat di bab II.3 permasalahan dan isu strategis.



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025- 2029 adalah menjabarkan visi misi program untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2045-2045.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025- 2029 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2025- 2029;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Banyuwangi tahun 2025- 2029;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2025- 2029;
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2025- 2029;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Inmendagri yang terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
- 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH



2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 PEDOMAN TRANSISI

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

5.3 PENUTUP



BAB II

Gambaran Umum Daerah



BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE 2021-2026

Analisis evaluasi capaian pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 menjadi langkah krusial dalam memastikan penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 berbasis pada evaluasi empiris. Evaluasi capaian pembangunan ini digunakan sebagai instrumen pengukuran efektivitas implementasi kebijakan serta tingkat pencapaian indikator pembangunan. Hal ini bisa dijadikan landasan yang objektif dalam memastikan kesinambungan program yang telah terbukti efektif serta merumuskan langkah korektif guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah di masa mendatang.

Dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, misi kepala daerah terpilih telah dilakukan transformasi menjadi misi pembangunan sebagaimana berikut:

MISI PEMBANGUNAN

1. Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
2. Membangun SDM unggul berkarakter dan harmonisasi social yang kondusif;
3. Membangun layanan publik dan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Periode 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2020)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Capaian Kinerja RPJMD
1	Pertumbuhan Ekonomi	-3,58	5,34	4,68	87,64%
2	Persentase Penduduk Miskin	8,06	7,01	6,54	107,19%
3	Indeks Pembangunan Manusia	70,62	72,59	74,31	102,36%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	8,03	92,01	94,87	103,10%

Sumber: Diolah, 2025



Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020-2024

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1,1	PDRB Sektor Unggulan	-3,5	2,99	3,26	3,57	3,88
1,2	Tingkat inflasi	1,74	1,58	6,06	2,15	1,73
1,3	Gini Ratio	0,316	0,373	0,329	0,351	0,312
1,4	Pendapatan Perkapita (Rp. Juta)	50,13	54,73	57,56	60,66	64,69
1,5	Pendidikan					
1.5.1	Indeks Pendidikan	0,6	0,61	0,62	0,62	0,62
1.5.2	Rata-rata Lama Sekolah	7,16	7,42	7,66	7,76	7,78
1.5.3	Harapan Lama Sekolah	12,8	13,1	13,11	13,12	13,14
1,6	Kesehatan					
1.6.1	Indeks Kesehatan	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78
1.6.2	Umur Harapan Hidup	73,35	73,41	73,6	73,93	74,13
1.6.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	5,1	5,07	5,06	5,05	5,04
1.6.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	19,18	20,1	18,1	21,9	17,6
1.6.5	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	79,7	260,6	119,3	135	160,3
2	ASPEK PELAYANAN UMUM					
Pelayanan Urusan Wajib						
2,1	Terkait Pelayanan Dasar					
2.1.1	Pendidikan					
2.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	81,92	82,53	81,92	98,16	93,31
2.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan	96,33	99,28	98,78	96,33	99,52
2.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	12,67	13,38	14,52	26,01	37,57
2.1.2	Kesehatan					



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	19,18	20,1	18,1	21,9	17,6
2.1.3	Pekerjaan umum dan penataan ruang					
2.1.3.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	82,74	84,32	85,92	85,13	85,9
2.1.3.2	Persentase ketersediaan air irigasi	85	88	90,11	87,9	91
2.1.3.3	Persentase ketersediaan air bersih	86,41	90,74	95,91	97,44	97,58
2.1.3.4	Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya	20,83	29,17	37,5	45,83	54,17
2.1.4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman					
2.1.4.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	82,74	84,32	85,92	85,13	85,9
2.1.4.2	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	4,34%	4,52%	4,70%	4,88%	5,06%
2.1.5	Ketenteraman. ketertiban umum. dan perlindungan masyarakat					
2.1.5.1	Indeks Kepatuhan pada Peraturan Negara	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.2	Indek Resiko Bencana	137,92	127,8	120,26	114,14	109,28
2.1.5.3	Indeks ketahanan & keselamatan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.4	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran (wilayah manajemen kebakaran (WMK) / jumlah luas kabupaten x 100%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.6	Sosial					
2.1.6.1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	63	64,5	66	67,5	69
2.1.6.2	Indeks Kepedulian Sosial	82,19	82,23	84,59	85,79	84,69
2.1.6.3	Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	72,24	73	73,04	73,19	83,56
2.2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar					
2.2.1	Tenaga Kerja					
2.2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,34	5,42	5,26	4,75	4,03



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.2.1.2	Tingkat Kesempatan Kerja	94,66	94,8	95	95,16	95,32
2.2.1.3	Persentase perlindungan tenaga kerja penerima upah pada perusahaan	49,76	50,86	52,14	53,33	54,52
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Perempuan	3,1	3,24	3,3	3,46	3,57
2.2.2.2	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	78	79	79	80	83
2.2.3	Pangan					
2.2.3.1	Persentase daerah rentan rawan pangan	12%	13%	14%	13%	13%
2.2.3.2	Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Unggulan	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.4	Pertanahan					
2.2.4.1	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.5	Lingkungan Hidup					
2.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,66	70,61	71,2	72,99	72,22
2.2.5.2	Rasio sampah daerah yang tertangani	61%	61,04%	61,06	61,12	61,18
2.2.6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
2.2.6.1	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	86,09	86,5	87,4	89,5	91
2.2.6.2	Persentase pengolahan data kependudukan yang sesuai dengan data konsolidasi kemendagri	91,54	92,5	93	94	95,05
2.2.7	Pemberdayaan masyarakat dan Desa					
2.2.7.1	Indeks Desa Membangun	0,8007	0,8274	0,8587	0,877	0,8903
2.2.7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Desa	87	89,09	90,01	90,62	91,33
2.2.8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.2.8.1	Angka kelahiran total	2,1	2,25	2,4	2,47	2,56
2.2.9	Perhubungan					



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.2.9.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	79,32	79,58	80,25	81,49	81,92
2.2.9.2	Rasio konektivitas kabupaten	0,793	0,778	0,786	0,806	0,817
2.2.10	Komunikasi dan informatika					
2.2.10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,27	3,53	3,9	4,5	4,77
2.2.11	Koperasi. usaha kecil. dan menengah					
2.2.11.1	Persentase koperasi berkualitas	11,94	12,53	54,26	53,31	53,59
2.2.11.2	Persentase UKM terhadap UMKM	7,68	13,39	8,37	8,81	8,92
2.2.12	Penanaman modal					
2.2.12.1	Laju Pertumbuhan Investasi	7,42	7,47	7,52	7,54	7,56
2.2.12.2	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	4,2 (Triliun)	1,2 (Triliun)	2,99 (Triliun)	4,89 (Triliun)	4,53 (triliun)
2.2.13	Kepemudaan dan olahraga					
2.2.13.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,016	0,02	0,022	0,023	0,25
2.2.13.2	Persentase atlet berprestasi	9	10	10	12	22
2.2.14	Statistik					
2.2.14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100
2.2.15	Persandian					
2.2.15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	100	100	100	100
2.2.16	Kebudayaan					
2.2.16.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,58	57,25	58,63	63,79	68,31
2.2.17	Perpustakaan					
2.2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5,60	29,08	29,80	65,58	70,70
2.2.17.2	Persentase minat baca	57	57	58	59	60
2.2.18	Kearsipan					
2.2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip	59,52	59,87	60	61,47	62
Pelayanan Urusan Pilihan						



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.3.1	Pertanian					
2.3.1.1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	0,13	0,14	0,17	0,18	0,22
2.3.1.2	Rata-rata persentase peningkatan produksi pertanian unggulan	3	3	3	3	3
2.3.2	Kelautan dan perikanan					
2.3.2.1	Persentase peningkatan produksi perikanan	3,58	3,58	3,58	3,59	3,59
2.3.2.2	Konsumsi ikan (kg/ kap/ th)	36,6	61,5	66,6	69,7	70,0
2.3.3	Pariwisata					
2.3.3.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	3	3	3	3	3
2.3.4	Perdagangan					
2.3.4.1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	-6,58	7,13	7,13	6,54	6,54
2.3.4.2	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	106,32	109,29	112,26	115,23	118,2
2.3.4.3	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	59,09	68,18	77,27	86,36	95,45
2.3.5	Perindustrian					
2.3.5.1	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	5,1	5,64	6,1	6,67	7,1
2.3.5.2	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	-13,16	4,5	1,7	4,34	4,41
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
3.1	Purchasing Power Parity (PPP)	0,76	0,77	0,78	0,78	0,79
3.2	Nilai SAKIP	83,86	83,97	84,1	84,23	90,13
3.3	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP (Review SAKIP Inspektorat)	28,5	28,5	26,25	26,34	27,69
3.4	Indeks Reformasi Birokrasi	77	78,11	81,14	88,03	92,84
3.5	Persentase pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100	83	85	90	95
3.6	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.7	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.8	Indeks Profesionalitas ASN	76,15	76,9	77,28	90,19	90,19
3.9	Indeks Inovasi Daerah	11,54	84,91	96,3	86,94	98,86
3.10	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	83,4	87	88	89	90
3.11	Indeks relasi antar manuasia	63	64,5	66	67,5	69
3.12	Indeks etika dan budi pekerti	63	64,5	66	67,5	69
3.13	Tingkat konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	0	0	0	0	0

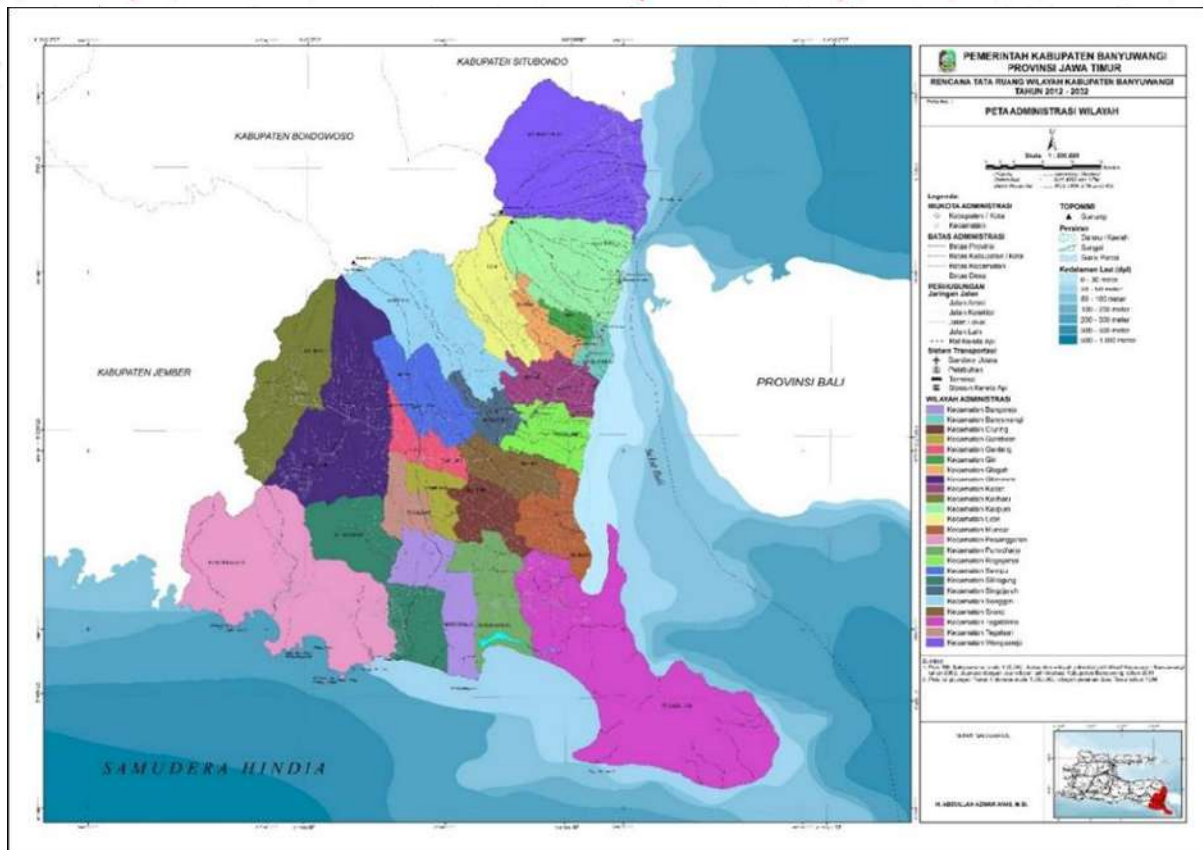
2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.2.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

A. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa dengan luas ±359.316 Km². Kabupaten Banyuwangi secara astronomis terletak pada koordinat antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38'. Batas administratif wilayah Kabupaten Banyuwangi meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas PUCKPP Kab. Banyuwangi Tahun 2024-2044

Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan dan 189 desa dan 28 kelurahan. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Tiga kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat terdiri dari 14 desa, Kecamatan Wongsorejo terdiri dari 12 desa, dan Kecamatan Singojuruh terdiri dari 11 desa. Secara lebih lengkap, berikut di bawah ini disajikan dalam tabel yang merupakan rincian Kecamatan dan luas total area Kecamatan.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1.	Pesanggrahan	43.397
2.	Siliragung	18.936
3.	Bangorejo	12.086
4.	Purwoharjo	11.827
5.	Tegaldlimo	53.557
6.	Muncar	14.600
7.	Cluring	7.061
8.	Gambiran	4.778



No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
9.	Tegalsari	5.190
10.	Glenmore	29.542
11.	Kalibaru	18.723
12.	Genteng	5.248
13.	Srono	7.564
14.	Rogojampi	4.316
15.	Blimbingsari	4.445
16.	Kabat	7.044
17.	Singojuruh	4.407
18.	Sempu	11.421
19.	Songgon	20.301
20.	Glagah	4.454
21.	Licin	12.705
22.	Banyuwangi	2.557
23.	Giri	2.019
24.	Kalipuro	19.837
25.	Wongsorejo	33.301
Kabupaten Banyuwangi		359.316

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi 2024-2044

B. Topografi

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40o, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagaian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas:

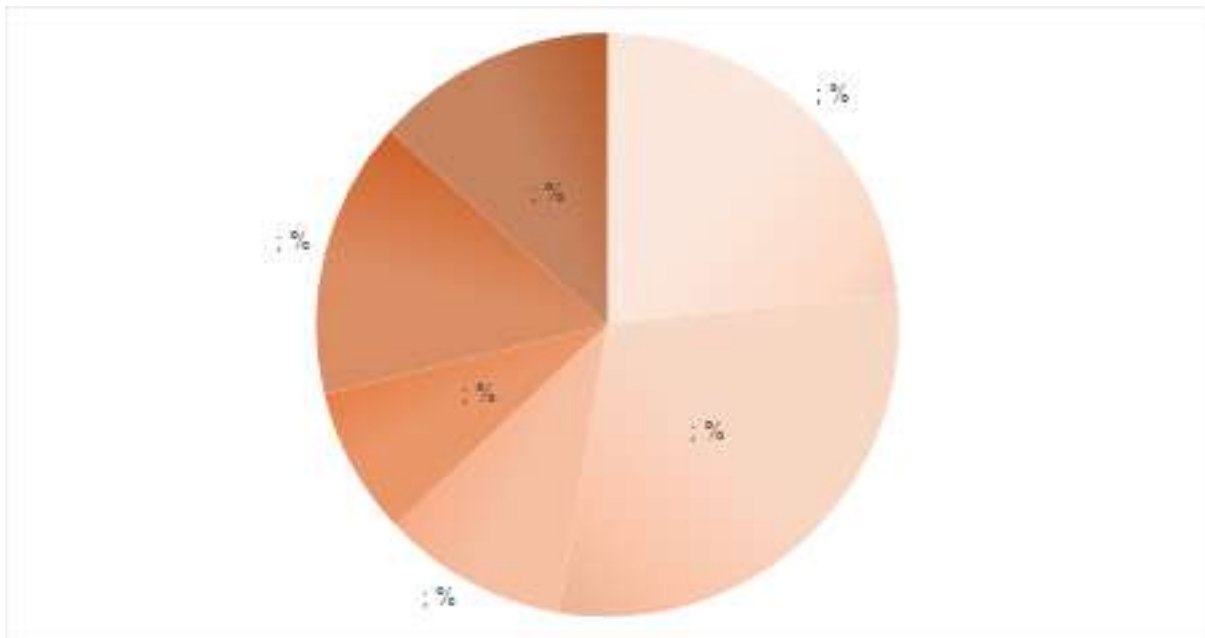
1. Ketinggian 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran;
2. Ketinggian 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran;



3. Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari;
4. Ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran;
5. Ketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru;
6. Ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

C. Geologi

Kondisi geologi merujuk pada posisi atau lokasi suatu daerah atau wilayah dalam konteks lempeng bumi. Setiap wilayah memiliki karakteristik geologi yang berbeda, dan karakteristik ini memainkan peran penting dalam pembentukan ciri khas lahan di wilayah tersebut. Jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi, yang didasarkan pada struktur geologi, memiliki berbagai susunan atau struktur geologi yang beragam sebagaimana berikut:



Gambar 2.2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui sebagian besar luas tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan strukturnya adalah berjenis hasil gunung api kuartir muda sebesar 29.43% dengan total luas 170.310,50 Ha, alluvium 23.27% dengan total luas 134.525,00 Ha, miosen falses semen 15.43%



seluas 89.177,25 Ha, miosen falsen batu gamping 13.41% seluas 77.536,50 Ha, hasil gunung api kuartar tua 10.26% dengan luas 59,283.00 Ha dan andesit 8.20 dengan total luas 47.417,75 Ha. Sedangkan berdasarkan keadaan jenis tanahnya, Kabupaten Banyuwangi memiliki jenis tanah diantaranya podsolik, aluvium, lithosol, gambut, lathosol, dan andesit. Adapun luas dan sebaran jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Luas dan Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi

Jenis Tanah	Luas		Persebaran Jenis Tanah
	Ha	Persentase (%)	
Podsolik	348,684.8	60.4	Terdapat pada seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Cluring, Purwoharjo dan Muncar
Aluvium	138,490.9	24	• Kecamatan Wongsorejo • Kecamatan Kalipuro • Kecamatan Glagah • Kecamatan Songgon • Kecamatan Glenmore • Kecamatan Gambiran • Kecamatan Bangorejo • Kecamatan Cluring • Kecamatan Muncar • Kecamatan Purwoharjo • Kecamatan Tegaldlimo.
Lithosol	39,031.9	6.8	• Kecamatan Kalibaru • Kecamatan Glenmore • Kecamatan Pesanggaran
Gambut	37,433.7	6.5	
Lathosol	14,109.3	2.4	• Kecamatan Purwoharjo • Kecamatan Tegaldlimo
Andesit	47,417.8	8.2	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

D. Klimatologi

Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudra Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selama tahun 2024, musim penghujan di Kabupaten Banyuwangi terjadi pada bulan Desember-April. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu 2.4 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 9 hari, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret



mencapai 295.6 mm dengan jumlah hari hujan terbanyak di Bulan Maret yaitu 23 hari.

Tabel 2.5 Kondisi Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	24	29	36.5	41	73	93
Februari	23.1	28.1	34.2	57	79	97
Maret	23.9	28	32.8	56	81	94
April	24.4	28.3	33.4	57	81	91
Mei	24	27.9	32.3	60	81	92
Juni	22.3	26.9	32.3	58	81	94
Juli	21.6	26.3	30	56	78	100
Agustus	21.6	26.5	31.7	49	75	91
September	22.2	27.6	33.4	44	74	93
Oktober	24.0	28.5	33.6	52	74	91
November	25.6	29.4	33.3	66	72	82
Desember	25	27.8	30.9	66	79	91

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa suhu maksimum Kabupaten Banyuwangi di tahun 2024 berada di angka 36.5°C dan suhu minimum berada di angka 21.6°C. Berikutnya untuk kondisi kelembaban tertinggi berada di angka 100% di bulan Juli, sedangkan terendah pada angka 41% di bulan Januari.

Tabel 2.6 Kondisi Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Bulan	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)
	Rata-Rata	Rata-Rata
Januari	3,5	1009,9
Februari	3,3	1010,8
Maret	3,2	1009,8
April	3,4	1009,3
Mei	4,2	1010,6
Juni	3,9	1012,0
Juli	4,5	1012,3
Agustus	4,2	1012,9
September	4,2	1011,7



Bulan	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)
	Rata-Rata	Rata-Rata
Oktober	4,6	1011,7
November	3,7	1009,1
Desember	3,6	1007,5

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Banyuwangi di tahun 2024 paling tinggi terjadi di bulan Oktober, yang mencapai 4,6 knot. Sedangkan rata-rata kecepatan angin terendah terjadi di bulan Maret, yaitu 3,2 knot. Rata-rata tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 1012,9 mbar, sedangkan rata-rata tekanan udara terendah terjadi di bulan Desember sebesar 1007,5 mbar

Tabel 2.7 Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	82,4	16	4,7
Februari	292,8	15	5,3
Maret	295,6	23	4,6
April	128,2	16	5,4
Mei	20,2	14	6,9
Juni	88,4	10	5,7
Juli	40,8	9	6,3
Agustus	2,4	9	7,4
September	11,0	6	7,0
Oktober	117,6	10	7,6
November	43,4	9	6,8
Desember	285,2	20	2,6

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Jumlah curah hujan tertinggi Kabupaten Banyuwangi terjadi di bulan Maret mencapai 295,6 mm/tahun di tahun 2024. Kemudian untuk jumlah hari hujan terbanyak adalah 23 hari yang terjadi di bulan Maret. Selanjutnya untuk penyinaran matahari tertinggi terjadi di bulan Oktober sebanyak 7,6 jam.

E. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam adalah kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan



kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, potensi-potensi yang dapat diidentifikasi untuk pengembangan adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pariwisata. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Banyuwangi memiliki peluang besar untuk terus berkembang di sektor ekonomi berbasis alam.

Banyuwangi memiliki peluang besar untuk terus berkembang di sektor ekonomi berbasis alam karena kekayaan sumber daya alamnya yang beragam. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, hingga pertambangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sektor ekonomi berbasis alam di Banyuwangi memiliki prospek cerah:

1. Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan
 - Banyuwangi merupakan daerah agraris dengan tanah yang subur, cocok untuk produksi padi, kopi, kakao, dan berbagai komoditas lain.
 - Produk unggulan seperti kopi Arabika Ijen Raung memiliki nilai ekspor tinggi.
 - Dengan peningkatan teknologi pertanian dan dukungan pemerintah, produktivitas dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional.
2. Peluang dalam Sektor Perikanan dan Kelautan
 - Banyuwangi memiliki pelabuhan ikan terbesar di Jawa Timur, yaitu Pelabuhan Muncar, yang menjadi pusat industri perikanan.
 - Budidaya udang dan bandeng di tambak semakin berkembang, membuka peluang ekspor ke luar negeri.
 - Pengolahan hasil laut seperti ikan asin, kerupuk ikan, dan produk olahan lainnya dapat meningkatkan nilai tambah bagi nelayan.
3. Pemanfaatan Wisata Alam untuk Ekonomi Berkelanjutan
 - A. Destinasi wisata seperti Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, dan Taman Nasional Alas Purwo menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
 - B. Sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan konsep ekowisata dan wisata berbasis budaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
 - C. Homestay, restoran, dan usaha kecil menengah (UKM) di sekitar kawasan wisata dapat berkembang pesat.
4. Potensi Energi dan Pertambangan
 - Tambang emas di **Gunung Tumpang Pitu** menjadi salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
 - Potensi panas bumi dari Gunung Ijen juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.



- Pengolahan hasil tambang seperti pasir besi dan belerang dapat meningkatkan industri lokal.
5. Pengelolaan Hutan dan Produk Kehutanan
- Hutan di Banyuwangi menghasilkan kayu jati dan mahoni yang berkualitas tinggi.
 - Selain sebagai sumber ekonomi, hutan juga dapat dikelola untuk ekowisata dan penelitian lingkungan.

Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tepat, Banyuwangi dapat meningkatkan sektor ekonomi berbasis alam secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah dalam hal infrastruktur, regulasi, dan pengelolaan lingkungan akan sangat berpengaruh dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestariannya.

F. Kontribusi Banyuwangi Terhadap Kawasan Sekitar

Kabupaten Banyuwangi memiliki kontribusi dalam ruang kepentingan ekonomi Jawa Timur. Secara ekonomi, Banyuwangi berkontribusi signifikan dalam mendukung ketahanan pangan, pariwisata, dan perdagangan antarwilayah. Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan Banyuwangi tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga menopang suplai pangan ke wilayah tapal kuda, Madura, dan bahkan ekspor melalui Pelabuhan Tanjungwangi. Demikian pula sektor pariwisata, dengan Kawah Ijen sebagai ikon wisata internasional, menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan mobilitas wisatawan lintas kabupaten dan provinsi.

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Deliniasi KSP (Kawasan Strategis Provinsi) yang berada di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Rencana Tata Wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi Kawasan Agropolitan Regional yaitu Sistem Agropolitan Ijen di Kabupaten Banyuwangi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) agropolitan ijen yang merupakan kawasan agropolitan ijen berada di Kecamatan Licin berupa pengembangan pertanian tanaman pangan hortikultura, peternakan, perkebunan dan pariwisata dengan wilayah penunjang Kecamatan Glagah, Kalipuro serta Songgon dan merupakan kawasan agropolitan regional.

Sistem agropolitan Ijen didukung oleh:

- a. Wilayah Outlet: Kota Surabaya dengan dukungan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Perak
- b. Pusat Distribusi Regional: Kabupaten Jember dengan infrastruktur pendukung pasar agrobis



- c. Pusat Koleksi Regional: Kabupaten Jember dengan infrastruktur pendukung pasar regional
- d. Penghasil/Pengumpul Bahan Baku yakni Pengembangan sarana dan prasarana penunjang system agropolitan.

Dari sisi infrastruktur, Kabupaten Banyuwangi tepatnya di perkotaan Banyuwangi juga menjadi salah satu daerah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi yang merupakan kawasan permukiman dan berfungsi untuk melayani lingkup kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Selain itu Kabupaten Banyuwangi juga masuk dalam rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau kepentingan teknologi tinggi pada Kawasan Pengembangan Potensial Panas Bumi yaitu Belawan-Ijen di Kabupaten Banyuwangi yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi.

2.1.2.2 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Daya dukung dan daya tampung sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Daya dukung mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas tanpa merusak ekosistem, sementara daya tampung merujuk pada jumlah maksimum populasi dan aktivitas yang dapat ditampung tanpa menyebabkan degradasi lingkungan. Memahami kedua konsep ini memastikan bahwa pembangunan tidak melampaui kapasitas lingkungan, sehingga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan untuk dinikmati oleh generasi saat ini dan mendatang. Berikut merupakan daya dukung dan daya tampung di Kabupaten Banyuwangi yang meliputi sektor lahan pertanian, fungsi lindung, permukiman dan kawasan penyangga resapan air.

A. Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras (tanaman pangan) guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras (pangan). Berdasarkan hasil analisa daya dukung lahan pertanian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa wilayah di Kabupaten Banyuwangi masih masuk dalam kategori daya dukung lahan pertanian “Surplus”, dimana dari 25 kecamatan terdapat 17 kecamatan dalam kondisi Surplus. Sedangkan pada tahun proyeksi 2030, Kabupaten Banyuwangi masih masuk dalam kategori daya dukung lahan pertanian “surplus” namun mengalami penurunan nilai yaitu menjadi 1,068 dimana 2 kecamatan mengalami penurunan status menjadi “defisit” yaitu Kecamatan Gambiran dan Genteng. Secara lebih lengkap, berikut merupakan hasil analisis perhitungan daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi menurut KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029:



Tabel 2.8 Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Banyuwangi

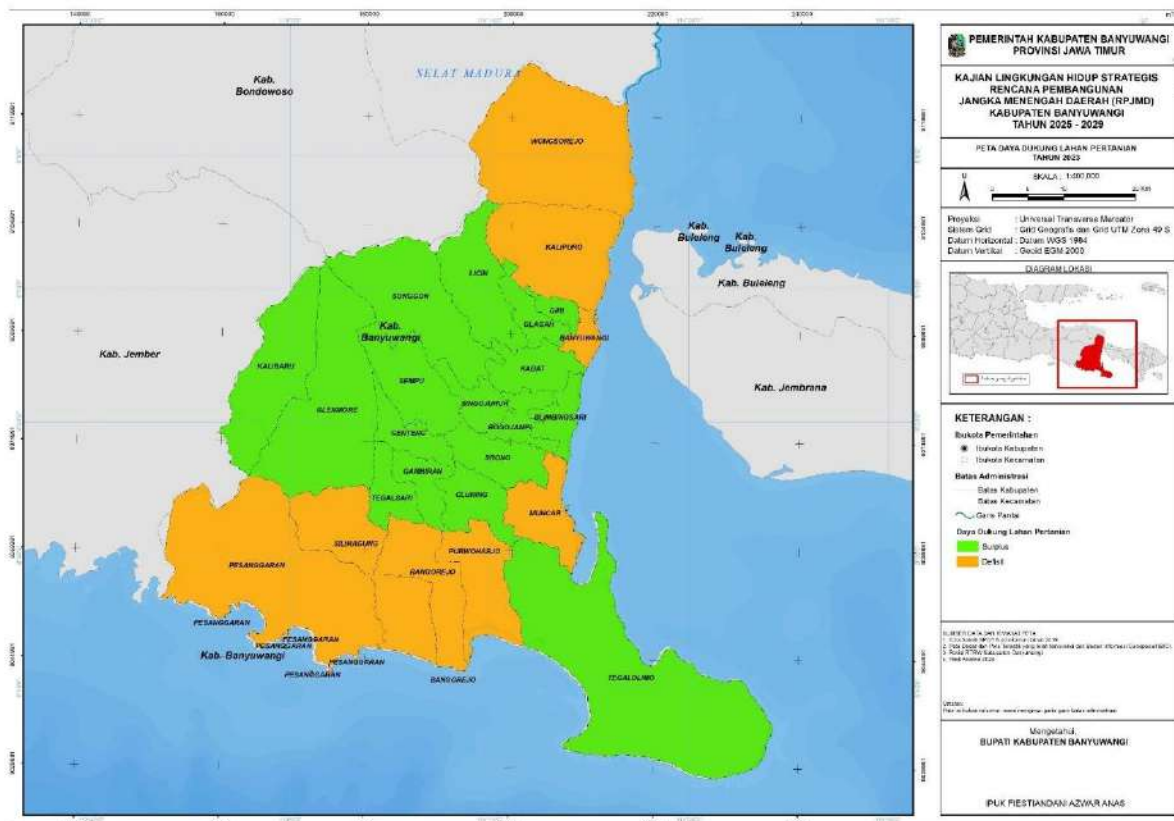
Kecamatan	Penduduk* (2023)	Luas Panen (Ha)	Produksi Beras (Ton)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	Daya Dukung	Ket
Pesanggaran	57,697	1,522	6,925	0.026	0.453	DEFISIT
Siliragung	50,873	2,281	9,591	0.045	0.711	DEFISIT
Bangorejo	68,330	2,426	11,527	0.036	0.637	DEFISIT
Purwoharjo	71,764	1,166	5,605	0.016	0.295	DEFISIT
Tegaldlimo	68,724	4,069	20,142	0.059	1.106	SURPLUS
Muncar	140,910	4,738	23,183	0.034	0.621	DEFISIT
Cluring	80,980	6,592	30,097	0.081	1.402	SURPLUS
Gambiran	69,093	4,035	18,605	0.058	1.016	SURPLUS
Tegalsari	54,163	3,746	17,437	0.069	1.215	SURPLUS
Glenmore	78,397	6,744	31,381	0.086	1.511	SURPLUS
Kalibaru	67,949	4,347	19,819	0.064	1.101	SURPLUS
Genteng	97,480	6,235	28,395	0.064	1.099	SURPLUS
Srono	101,177	6,818	31,383	0.067	1.171	SURPLUS
Rogojampi	57,923	7,149	32,460	0.123	2.115	SURPLUS
Blimbingsari	57,277	5,052	22,945	0.088	1.512	SURPLUS
Kabat	66,311	8,977	38,818	0.135	2.209	SURPLUS
Singojuruh	53,300	9,246	41,391	0.173	2.930	SURPLUS
Sempu	87,972	8,035	36,717	0.091	1.575	SURPLUS
Songgon	59,382	9,495	40,625	0.160	2.582	SURPLUS
Glagah	38,208	5,196	21,614	0.136	2.135	SURPLUS
Licin	30,575	4,908	21,570	0.161	2.662	SURPLUS
Banyuwangi	120,781	1,005	4,117	0.008	0.129	DEFISIT
Giri	32,387	2,888	12,059	0.089	1.405	SURPLUS
Kalipuro	86,773	1,482	6,117	0.017	0.266	DEFISIT
Wongsorejo	81,589	1,855	8,426	0.023	0.390	DEFISIT
Kabupaten Banyuwangi	1,780,015	120,007	540,951	0.067	1.147	SURPLUS

Sumber: Dinas LH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029



Dari hasil perhitungan tabel Daya Dukung dan daya tampung Kabupaten Banyuwangi di atas menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki skor 1,147. Angka tersebut memiliki skor >1 dengan mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh sawah dan ladang padi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Dari 25 kecamatan yang dihitung, sebanyak 17 kecamatan memiliki skor >1 dengan skor tertinggi diperoleh di Kecamatan Singojuruh (2.930) dan 8 kecamatan memiliki skor <1 dengan skor terendah diperoleh di Kecamatan Banyuwangi (0.129).

Hal Ini menunjukkan bahwa 17 dari 25 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi cukup mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri. Kecamatan Singojuruh mempunyai lahan panen komoditas padi terluas dan produksi tertinggi se-kabupaten sehingga berdampak terhadap ketersediaan pangan. Kecamatan dengan daya dukung rendah mempunyai tingkat produksi rendah sedangkan jumlah penduduknya relatif tinggi. Kondisi tersebut merupakan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan. Sebaran wilayah daya dukung lahan pertanian (pangan) di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Gambar 2.3 Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Banyuwangi Eksisting

Sumber : Data Diolah dari Dinas LH, 2024

Data Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) di Kabupaten Banyuwangi, selain adanya kondisi eksisting yang telah tersedia, terdapat proyeksi daya dukung lahan pertanian. Proyeksi daya dukung lahan pertanian Kabupaten Banyuwangi

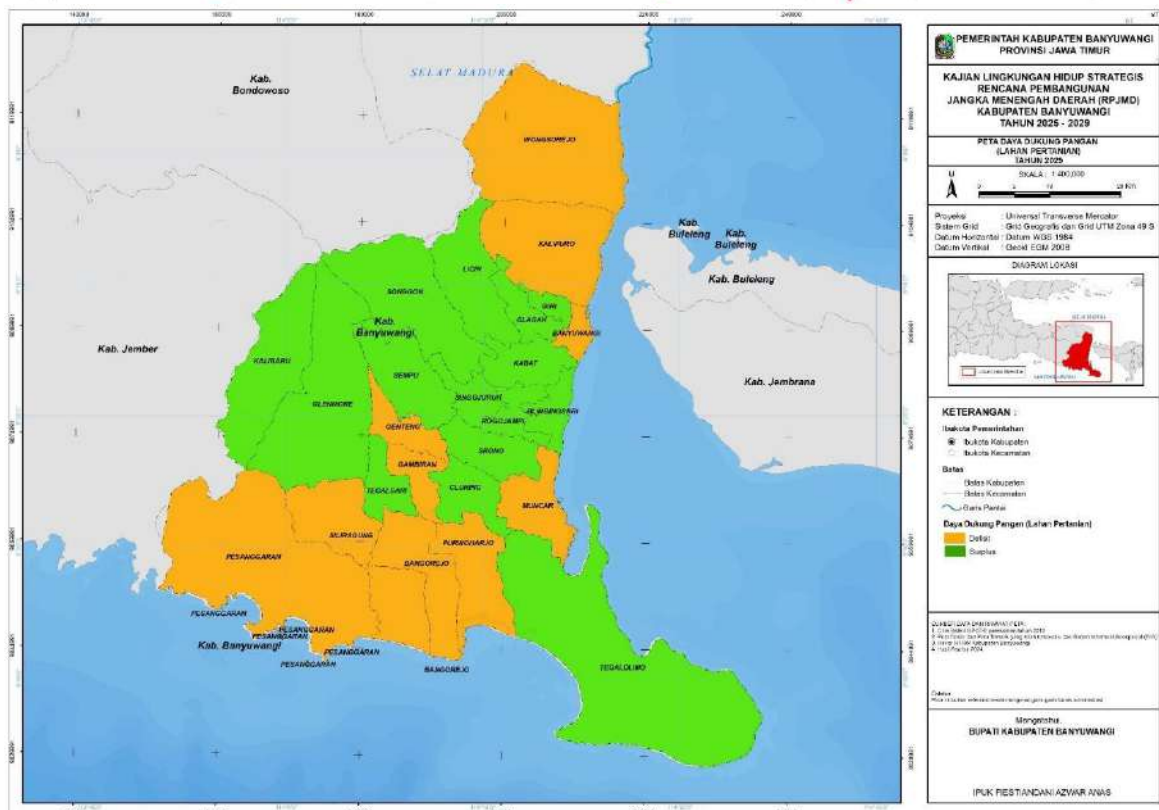


tahun 2025-2029, mempertimbangkan ketersediaan pangan yang dengan menganalisis data historis terkait produksi dan konsumsi pangan serta pertumbuhan penduduk. Maka, proyeksi daya dukung lahan pertanian Kabupaten Banyuwangi diperoleh bahwa ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh sawah dan ladang padi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Pada tahun 2029, terdapat 15 dari 25 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi cukup mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri, adapun data secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan	Penduduk* (2029)	Luas Panen (Ha)	Produksi Beras (Ton)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	Daya Dukung	Ket
Pesanggaran	69,156	1,522	6,925	0.024	0.405	DEFISIT
Siliragung	122,240	2,281	9,591	0.042	0.672	DEFISIT
Bangorejo	57,969	2,426	11,527	0.033	0.596	DEFISIT
Purwoharjo	81,958	1,166	5,605	0.016	0.283	DEFISIT
Tegaldlimo	69,928	4,069	20,142	0.058	1.076	SURPLUS
Muncar	98,658	4,738	23,183	0.031	0.580	DEFISIT
Cluring	32,778	6,592	30,097	0.076	1.309	SURPLUS
Gambiran	38,670	4,035	18,605	0.056	0.977	DEFISIT
Tegalsari	79,344	3,746	17,437	0.062	1.094	SURPLUS
Glenmore	67,112	6,744	31,381	0.079	1.393	SURPLUS
Kalibaru	68,770	4,347	19,819	0.061	1.041	SURPLUS
Genteng	87,821	6,235	28,395	0.058	0.995	DEFISIT
Srono	30,944	6,818	31,383	0.063	1.099	SURPLUS
Rogojampi	142,612	7,149	32,460	0.116	1.986	SURPLUS
Blimbingsari	58,394	5,052	22,945	0.081	1.385	SURPLUS
Kabat	72,631	8,977	38,818	0.125	2.045	SURPLUS
Singojuruh	58,623	9,246	41,391	0.161	2.719	SURPLUS
Sempu	89,035	8,035	36,717	0.083	1.433	SURPLUS
Songgon	51,488	9,495	40,625	0.156	2.526	SURPLUS
Glagah	53,944	5,196	21,614	0.124	1.941	SURPLUS
Licin	60,099	4,908	21,570	0.148	2.447	SURPLUS
Banyuwangi	102,399	1,005	4,117	0.008	0.123	DEFISIT
Giri	69,554	2,888	12,059	0.080	1.264	SURPLUS
Kalipuro	54,817	1,482	6,117	0.016	0.249	DEFISIT
Wongsorejo	82,575	1,855	8,426	0.020	0.347	DEFISIT
Kabupaten Banyuwangi	1,801,520	120,007	540,951	0.063	1.068	SURPLUS

Sumber: Dinas LH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029



Gambar 2.4 Daya Dukung Lahan Pertanian (Pangan) Kabupaten Banyuwangi Proyeksi

Sumber : Data Diolah dari Dinas LH, 2024

B. Daya Dukung Permukiman

Daya dukung lahan permukiman adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi jumlah penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, daya dukung lahan permukiman menunjukkan seberapa banyak orang yang dapat ditampung oleh suatu wilayah tanpa menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas hidup. Konsep ini melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan tidak melebihi kapasitas yang dapat ditopang oleh lingkungan antara lain ketersediaan sumber daya alam, kualitas lingkungan, infrastruktur yang ada, dan kapasitas layanan publik.

Untuk mengetahui daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

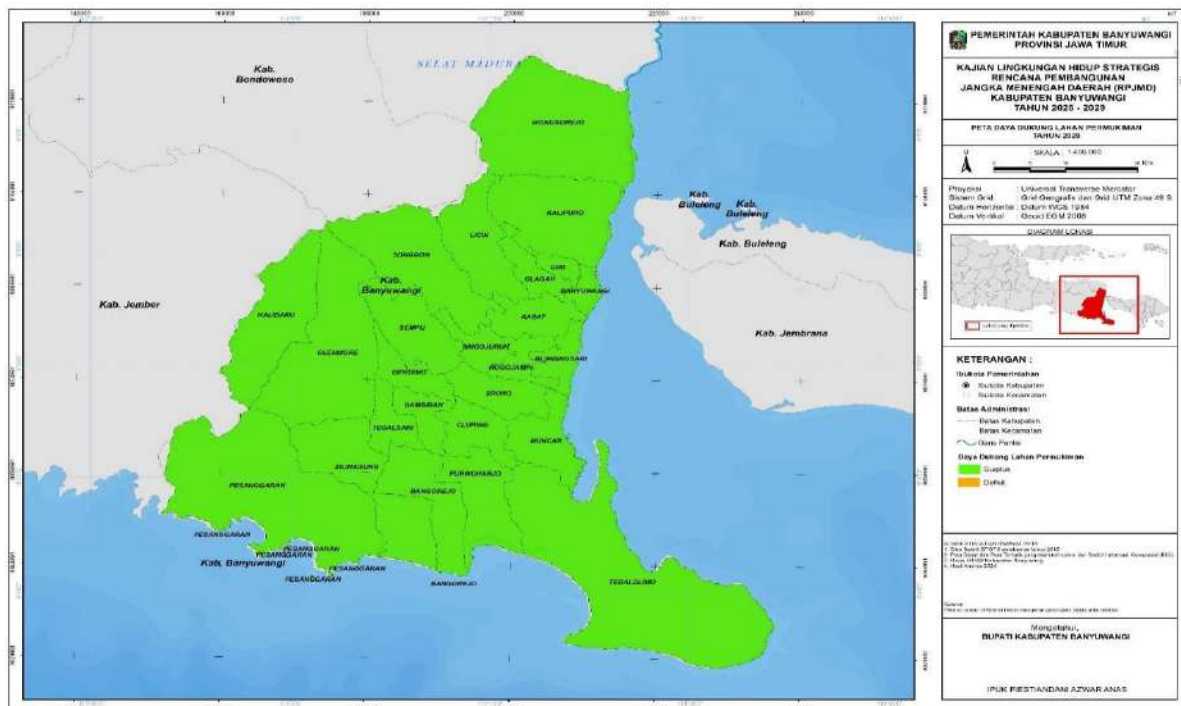


Tabel 2.10 Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk (2023)	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Ket
Pesanggaran	24,910,000	57,697	150	2.878	SURPLUS
Siliragung	27,000,000	50,873	150	3.538	SURPLUS
Bangorejo	34,030,000	68,330	150	3.320	SURPLUS
Purwoharjo	27,270,000	71,764	150	2.533	SURPLUS
Tegaldlimo	23,500,000	68,724	150	2.280	SURPLUS
Muncar	40,270,000	140,910	150	1.905	SURPLUS
Cluring	30,730,000	80,980	150	2.530	SURPLUS
Gambiran	21,120,000	69,093	150	2.038	SURPLUS
Tegalsari	19,530,000	54,163	150	2.404	SURPLUS
Glenmore	20,150,000	78,397	150	1.714	SURPLUS
Kalibaru	21,310,000	67,949	150	2.091	SURPLUS
Genteng	24,730,000	97,480	150	1.691	SURPLUS
Srono	41,290,000	101,177	150	2.721	SURPLUS
Rogojampi	15,230,000	57,923	150	1.753	SURPLUS
Blimbingsari	22,660,000	57,277	150	2.637	SURPLUS
Kabat	39,620,000	66,311	150	3.983	SURPLUS
Singojuruh	15,380,000	53,300	150	1.924	SURPLUS
Sempu	34,770,000	87,972	150	2.635	SURPLUS
Songgon	29,810,000	59,382	150	3.347	SURPLUS
Glagah	20,210,000	38,208	150	3.526	SURPLUS
Licin	20,560,000	30,575	150	4.483	SURPLUS
Banyuwangi	19,440,000	120,781	150	1.073	SURPLUS
Giri	10,870,000	32,387	150	2.238	SURPLUS
Kalipuro	54,480,000	86,773	150	4.186	SURPLUS
Wongsorejo	54,830,000	81,589	150	4.480	SURPLUS
Kabupaten Banyuwangi	693,700,000	1,780,015	150	2.598	SURPLUS

Sumber: Dinas LH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029

Dari hasil perhitungan tabel Daya Dukung permukiman Kabupaten Banyuwangi di atas menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki skor 2,598. Angka tersebut memiliki skor >1 dengan mengindikasikan bahwa kapasitas wilayah tersebut untuk menampung penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk yang ada saat ini sehingga wilayah tersebut memiliki potensi untuk pengembangan permukiman di masa depan. Sebanyak 25 kecamatan memiliki skor >1 dengan skor tertinggi diperoleh di Kecamatan Licin (4.483) dan 1 kecamatan memiliki skor <1 di Kecamatan Banyuwangi (1.073). Sebaran wilayah daya dukung permukiman di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Gambar 2.5 Daya Dukung Lahan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi Eksisting

Sumber : Data Diolah dari Dinas LH, 2024

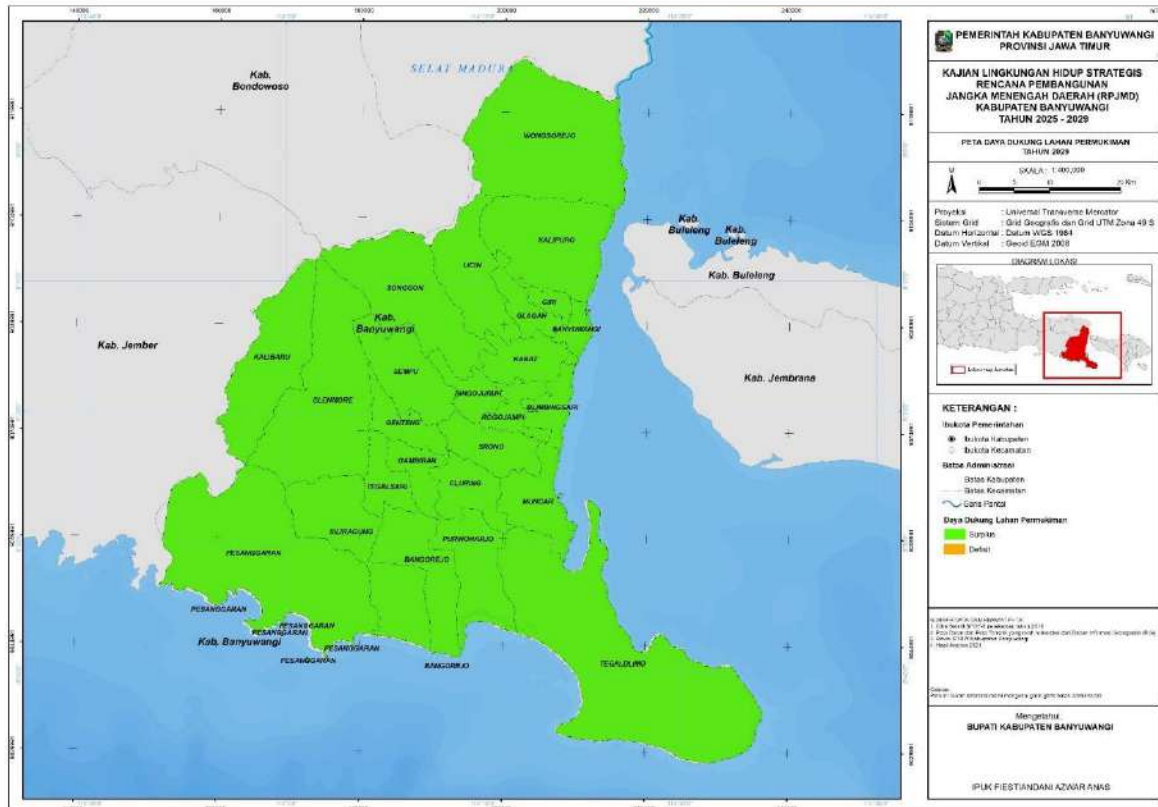
Data Daya Dukung Lahan Pemukiman di Kabupaten Banyuwangi, selain adanya kondisi eksisting yang telah tersedia, terdapat proyeksi daya dukung lahan pemukiman. Proyeksi daya dukung lahan pemukiman Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029, melibatkan analisis data historis dan tren pertumbuhan penduduk, serta evaluasi ketersediaan dan kualitas lahan yang ada. Data ini memberikan gambaran tentang pola pertumbuhan penduduk, kepadatan permukiman, serta distribusi dan kualitas lahan yang ada. Pada tahun 2029, terdapat 25 kecamatan memiliki skor >1 dengan skor tertinggi diperoleh di Kecamatan Licin (4,121), yang dalam kurun waktu 5 tahun tidak terdapat perubahan status dari daya dukung lahan “surplus” ke “defisit” adapun data secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.11 Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan	Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman (M2)	Jumlah Penduduk (2029)	Koefisien Luas Kebutuhan Ruang (M2/ Kapita)	Daya Dukung Permukiman	Ket
Pesanggaran	24,910,000	69,156	150	1.531	SURPLUS
Siliragung	27,000,000	122,240	150	2.554	SURPLUS
Bangorejo	34,030,000	57,969	150	1.646	SURPLUS
Purwoharjo	27,270,000	81,958	150	2.417	SURPLUS
Tegaldlimo	23,500,000	69,928	150	3.688	SURPLUS
Muncar	40,270,000	98,658	150	1.785	SURPLUS
Cluring	30,730,000	32,778	150	2.398	SURPLUS
Gambiran	21,120,000	38,670	150	3.275	SURPLUS
Tegalsari	19,530,000	79,344	150	3.206	SURPLUS
Glenmore	20,150,000	67,112	150	4.121	SURPLUS
Kalibaru	21,310,000	68,770	150	1.030	SURPLUS
Genteng	24,730,000	87,821	150	2.013	SURPLUS
Srono	41,290,000	30,944	150	3.921	SURPLUS
Rogojampi	15,230,000	142,612	150	3.988	SURPLUS
Blimbingsari	22,660,000	58,394	150	2.420	SURPLUS
Kabat	39,620,000	72,631	150	1.531	SURPLUS
Singojuruh	15,380,000	58,623	150	2.554	SURPLUS
Sempu	34,770,000	89,035	150	1.646	SURPLUS
Songgon	29,810,000	51,488	150	2.417	SURPLUS
Glagah	20,210,000	53,944	150	3.688	SURPLUS
Licin	20,560,000	60,099	150	1.785	SURPLUS
Banyuwangi	19,440,000	102,399	150	2.398	SURPLUS
Giri	10,870,000	69,554	150	3.275	SURPLUS
Kalipuro	54,480,000	54,817	150	3.206	SURPLUS
Wongsorejo	54,830,000	82,575	150	4.121	SURPLUS
Kabupaten Banyuwangi	693,700,000	1,801,520	150	1.030	SURPLUS

Sumber: Dinas LH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029



**Gambar 2.6 Daya Dukung Lahan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi
Proyeksi**

Sumber : Data Diolah dari Dinas LH, 2024

C. Daya Dukung Sumber Daya Air

Daya dukung sumber daya air pada dasarnya mengadopsi istilah daya dukung lingkungan sebagai kemampuan lingkungan atau suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan air bagi populasi didalamnya (penduduk dan kegiatan budidaya) dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan sumberdaya air yang tersedia. Daya dukung sumberdaya air suatu wilayah merupakan parameter yang memperlihatkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan maksimal wilayah menyediakan air bagi penduduk dalam jumlah tertentu beserta kegiatannya. Apabila daya dukung untuk suatu wilayah telah terlampaui, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak bisa mendapatkan air dalam jumlah yang memadai sehingga terjadilah gejala krisis air atau defisit air.

Untuk mengetahui daya dukung sumber daya air Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.



Tabel 2.12 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Banyuwangi Eksisting

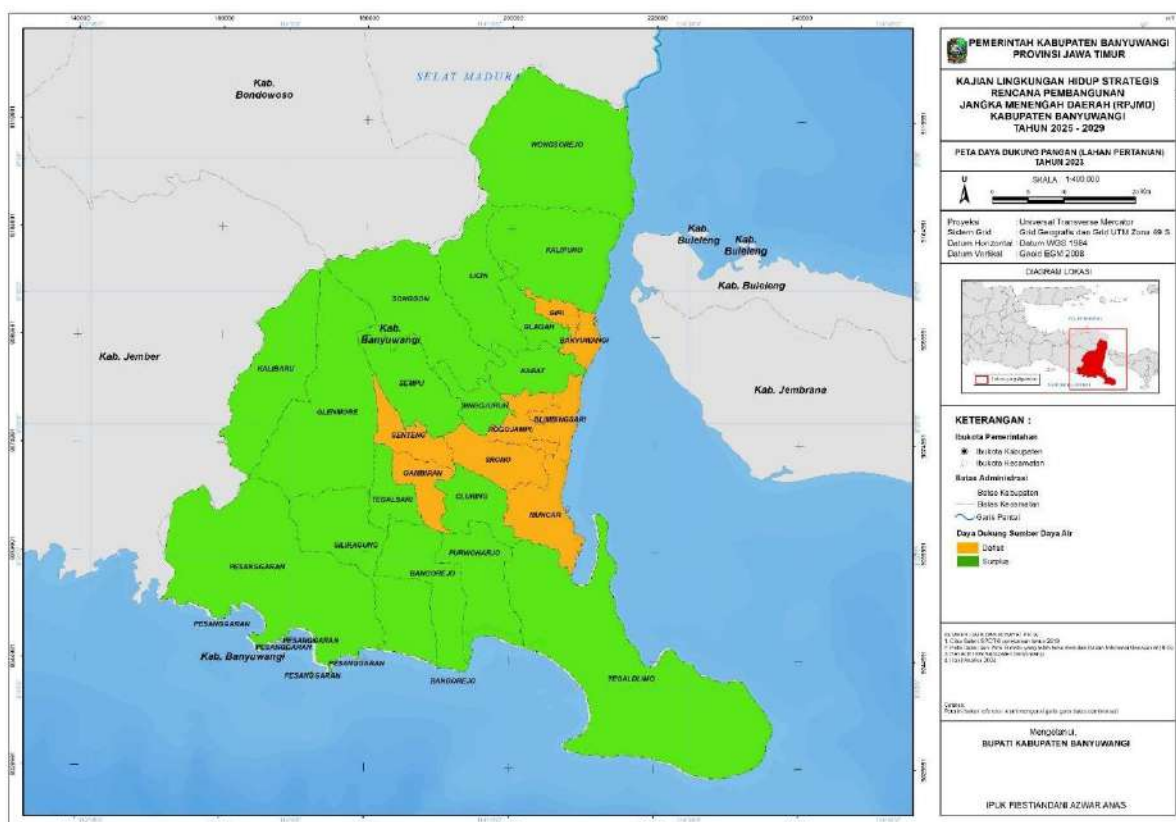
Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/ Tahun)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/ Tahun) Tahun 2023	Daya Dukung Air	Keterangan
Pesanggaran	35,071,349,667	2,904,318,350	12.07558726	SURPLUS
Siliragung	14,983,949,837	2,645,395,144	5.664163206	SURPLUS
Bangorejo	9,568,821,544	3,577,885,185	2.67443505	SURPLUS
Purwoharjo	9,285,185,661	3,752,286,299	2.474540832	SURPLUS
Tegaldlimo	43,902,652,112	3,622,196,996	12.12044849	SURPLUS
Muncar	6,938,075,489	7,349,944,554	0.94396297	DEFISIT
Cluring	5,590,522,593	4,215,223,749	1.326269476	SURPLUS
Gambiran	3,799,176,191	3,625,562,597	1.047885973	DEFISIT
Tegalsari	4,109,182,689	2,868,991,150	1.432274439	SURPLUS
Glenmore	24,165,202,648	4,084,932,592	5.915691901	SURPLUS
Kalibaru	14,895,019,511	3,514,763,040	4.237844583	SURPLUS
Genteng	4,154,973,767	5,041,301,271	0.824186761	DEFISIT
Srono	5,989,416,254	5,283,611,322	1.13358381	DEFISIT
Rogojampi	3,417,781,224	3,183,383,073	1.073631777	DEFISIT
Blimbingsari	3,535,602,713	3,023,363,814	1.169426814	DEFISIT
Kabat	5,577,624,567	3,369,807,351	1.655176094	SURPLUS
Singojuruh	3,489,239,905	2,753,600,568	1.267155427	SURPLUS
Sempu	9,121,770,466	4,583,636,888	1.990072663	SURPLUS
Songgon	16,786,182,714	3,128,083,709	5.36628309	SURPLUS
Glagah	3,542,998,901	1,975,636,798	1.793345267	SURPLUS
Licin	10,138,539,990	1,586,609,783	6.390065218	SURPLUS
Banyuwangi	2,024,689,272	6,406,185,171	0.316052255	DEFISIT
Giri	1,598,347,916	1,723,128,693	0.92758476	DEFISIT
Kalipuro	15,637,042,973	4,549,781,052	3.436878126	SURPLUS
Wongsorejo	27,157,784,134	4,155,285,833	6.535719858	SURPLUS
Kabupaten Banyuwangi	284,481,132,740	92,924,914,982	3.061408588	SURPLUS

Sumber: Dinas LH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029



Secara umum status daya dukung sumber daya air di Kabupaten Banyuwangi berada pada kondisi “Surplus” dengan nilai 3,061. Kebutuhan air penduduk Kabupaten Banyuwangi mencapai 92,924,914,982 m³ per tahun dengan asumsi berdasarkan jumlah penduduk tahun 2023. Hasil antara ketersediaan dan kebutuhan air akan dibandingkan untuk mengetahui kondisi daya dukung eksisting. Jumlah kebutuhan lebih besar dibandingkan ketersediaan sehingga daya dukung air Kabupaten Banyuwangi surplus. Hal yang harus menjadi perhatian bahwa perhitungan ini hanya melihat sudut pandang penyerapan air hujan, padahal sumber air masyarakat tidak hanya mengandalkan air tanah dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, sumber air di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berasal dari wilayahnya sendiri tetapi bisa dari daerah lain. Walaupun begitu, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan dalam rangka penyediaan air.

Sebaran daya dukung lahan sumberdaya air di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Gambar 2.7 Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Data Diolah dari Dinas LH, 2024

Data Daya Dukung Sumberdaya Air di Kabupaten Banyuwangi, selain adanya kondisi eksisting yang telah tersedia, terdapat proyeksi daya dukung sumberdaya air. Proyeksi daya dukung sumberdaya air Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029, memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah akan berada dalam kondisi surplus, dengan nilai daya dukung mencapai 2,90. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air di wilayah tersebut diperkirakan jauh

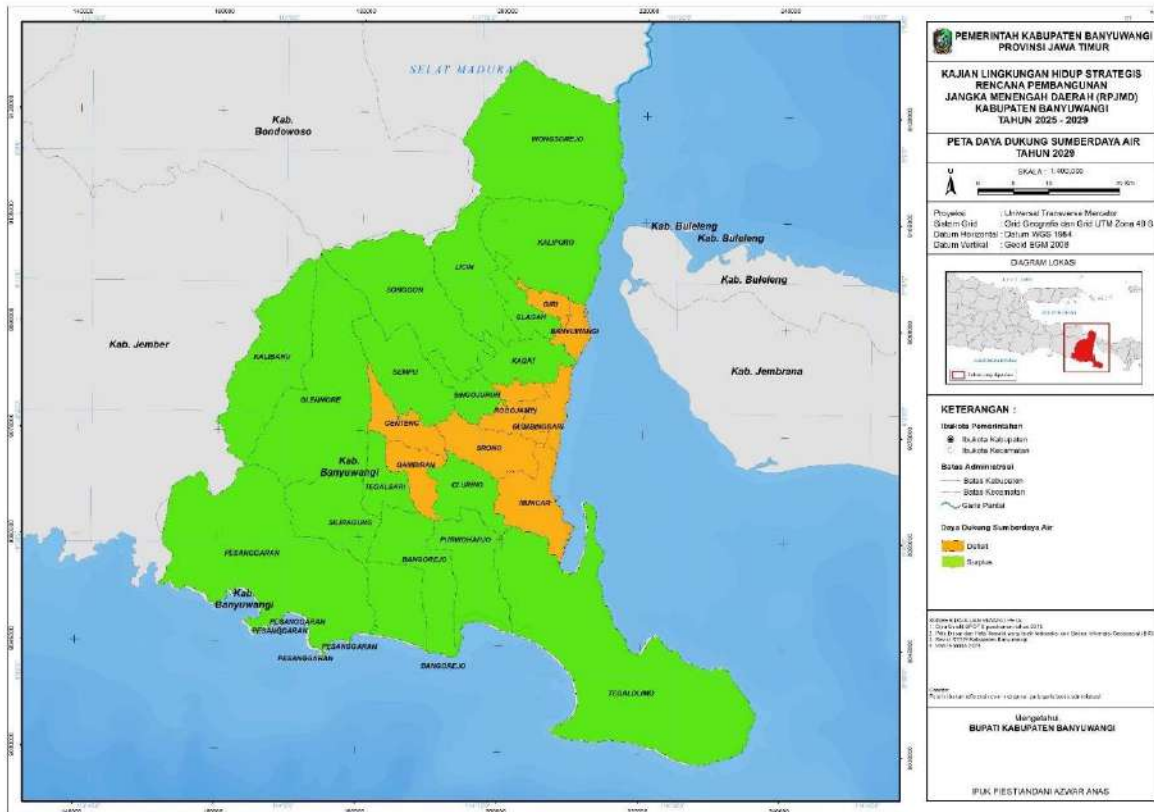


melebihi kebutuhan yang ada, memberikan peluang besar bagi pengembangan berbagai sektor. Kondisi surplus air ini mencakup hampir seluruh wilayah kabupaten, yang berarti bahwa air akan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan. adapun data secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13 Proyeksi Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/ Tahun)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/ Tahun) Tahun 2029	Daya Dukung Air	Keterangan
Pesanggaran	35,071,349,667	3,007,018,734	11.7	SURPLUS
Siliragung	14,983,949,837	2,735,369,576	5.5	SURPLUS
Bangorejo	9,568,821,544	3,706,791,016	2.6	SURPLUS
Purwoharjo	9,285,185,661	3,856,105,424	2.4	SURPLUS
Tegaldlimo	43,902,652,112	3,740,619,246	11.7	SURPLUS
Muncar	6,938,075,489	7,534,112,714	0.9	DEFISIT
Cluring	5,590,522,593	4,366,917,969	1.3	SURPLUS
Gambiran	3,799,176,191	3,978,825,905	1.0	DEFISIT
Tegalsari	4,109,182,689	2,991,091,313	1.4	SURPLUS
Glenmore	24,165,202,648	4,212,738,560	5.7	SURPLUS
Kalibaru	14,895,019,511	3,608,198,623	4.1	SURPLUS
Genteng	4,154,973,767	5,230,701,746	0.8	DEFISIT
Srono	5,989,416,254	6,098,839,174	0.98	DEFISIT
Rogojampi	3,417,781,224	3,670,230,772	0.9	DEFISIT
Blimbingsari	3,535,602,713	3,730,811,567	0.9	DEFISIT
Kabat	5,577,624,567	3,407,060,068	1.6	SURPLUS
Singojuruh	3,489,239,905	2,858,919,335	1.2	SURPLUS
Sempu	9,121,770,466	4,810,715,127	1.9	SURPLUS
Songgon	16,786,182,714	3,261,933,662	5.1	SURPLUS
Glagah	3,542,998,901	2,032,837,292	1.7	SURPLUS
Licin	10,138,539,990	1,625,792,536	6.2	SURPLUS
Banyuwangi	2,024,689,272	6,642,292,847	0.3	DEFISIT
Giri	1,598,347,916	1,786,615,281	0.9	DEFISIT
Kalipuro	15,637,042,973	4,706,537,813	3.3	SURPLUS
Wongsorejo	27,157,784,134	4,243,294,577	6.4	SURPLUS
Kabupaten Banyuwangi	284,481,132,740	97,844,370,877	2.907	SURPLUS

Sumber: Dinas LH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029

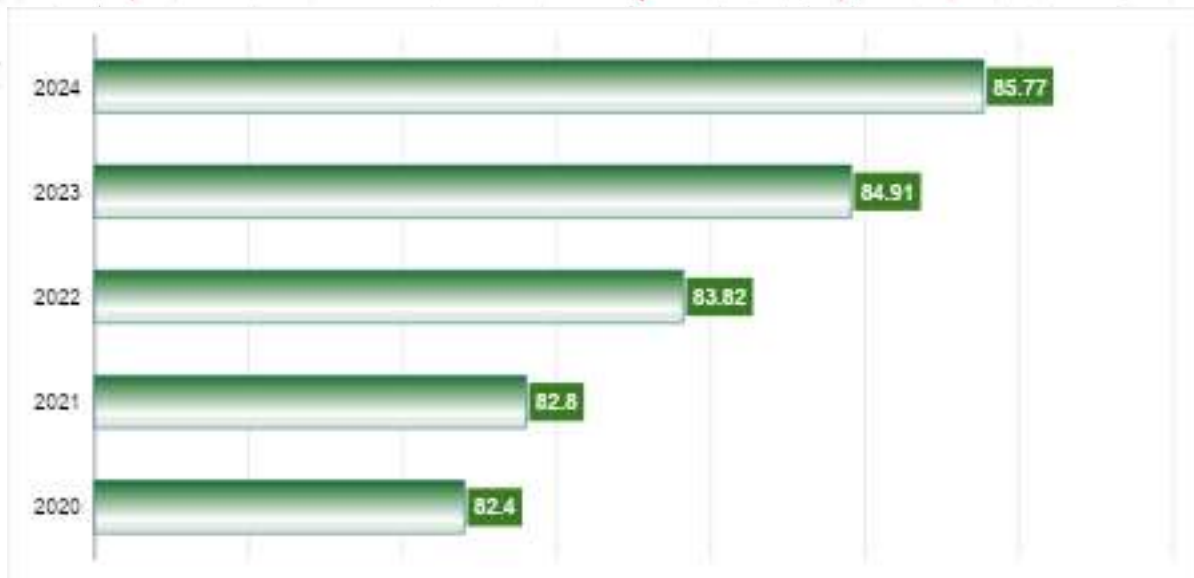


Gambar 2.8 Daya Dukung Sumberdaya Air Kabupaten Banyuwangi Proyeksi
Sumber : Data Diolah dari Dinas LH, 2024

2.1.2.3 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

A. Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. Tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, dalam hal ini pada lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan capaian skor Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024:



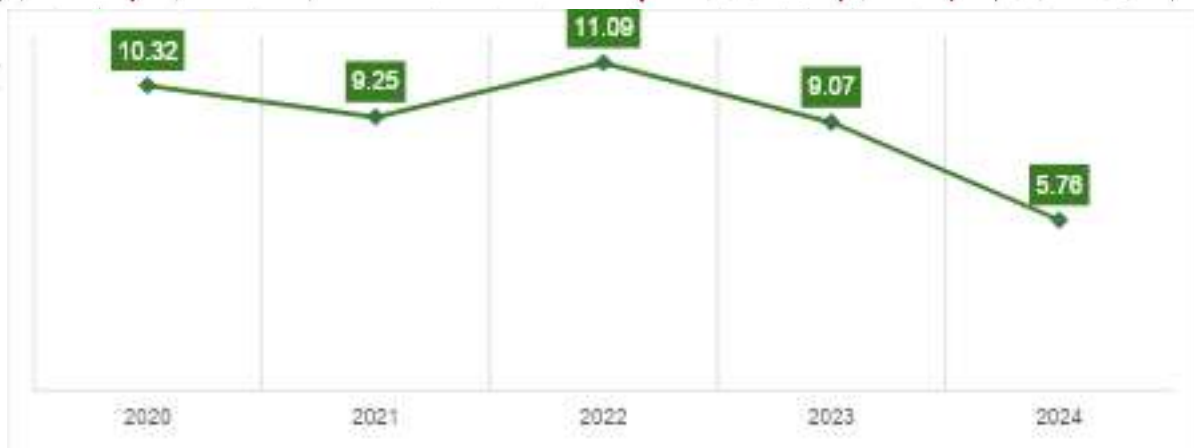
Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan data terbaru, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Kenaikan nilai terjadi di setiap tahunnya. Peningkatan indeks ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi didorong oleh berbagai upaya strategis yang dilakukan secara berkesinambungan di sektor pertanian. Produksi tanaman pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai mengalami peningkatan berkat penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien dan dukungan sarana produksi yang memadai. Selain itu, pengembangan sistem pertanian organik turut berkontribusi dalam menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem pertanian yang ramah lingkungan. Upaya ini diperkuat melalui peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan petani, baik melalui pelatihan, pendampingan lapangan, maupun akses terhadap inovasi pertanian modern, sehingga produktivitas dan kualitas hasil pertanian dapat terus meningkat dan pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan daerah secara menyeluruh.

B. Prevalensi Ketidalcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidalcukupan konsumsi pangan adalah persentase penduduk yang tidak mendapatkan cukup energi (kalori) dari makanan yang mereka konsumsi dalam sehari. Dalam kata lain, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan minimum energi harian, yang dibutuhkan untuk beraktivitas, bekerja, belajar, dan hidup sehat. Berikut merupakan capaian ketidalcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024:



Gambar 2.10 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan perbaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Angka prevalensi turun dari 10,32 persen pada tahun 2020 menjadi 5,76 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menggambarkan peningkatan kondisi konsumsi pangan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan energi minimum. Artinya, semakin sedikit penduduk yang mengalami asupan pangan di bawah standar kecukupan gizi.

Meski demikian, data menunjukkan bahwa sempat terjadi lonjakan pada tahun 2022, dengan prevalensi naik menjadi 11,09 persen. Kenaikan ini patut dicermati sebagai indikasi kemungkinan gangguan pada sisi ketersediaan atau akses pangan, yang bisa saja dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gejolak harga, distribusi pasca pandemi, atau gangguan produksi pertanian. Namun demikian, respons kebijakan yang cepat dan tepat tampaknya telah mendorong perbaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, ditunjukkan dengan turunnya angka menjadi 9,07 persen pada 2023, dan kembali menurun tajam menjadi 5,76 persen pada 2024.

Penurunan hampir setengah dalam dua tahun terakhir (2022–2024) menjadi indikasi positif bahwa upaya penanggulangan rawan pangan telah berjalan efektif. Hal ini juga memperkuat sinyal bahwa intervensi pangan yang berbasis komunitas, penguatan cadangan pangan, serta promosi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) memberikan dampak nyata terhadap perbaikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Di sisi lain, capaian ini menjadi bukti penting bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan, tetapi juga dari pemenuhan gizi dan keterjangkauan konsumsi.



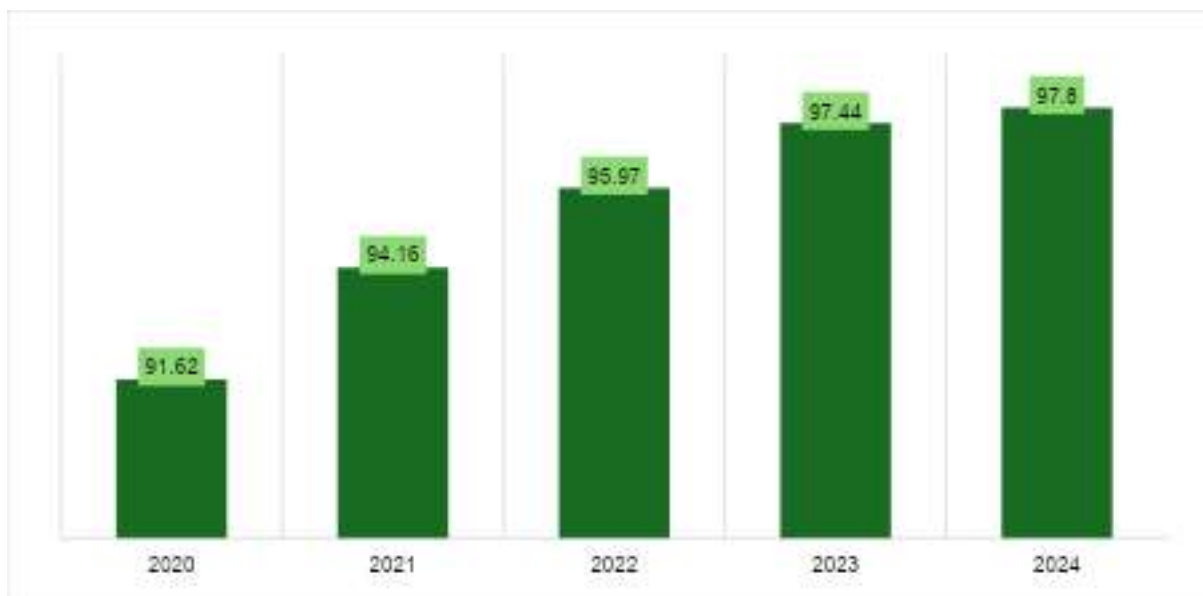
C. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Akses terhadap air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia. Ketersediaan sumber air minum menjadi indikator krusial dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup warga. Akses terhadap air minum layak ini mempertimbangkan beberapa komponen seperti Jenis sumber air minum layak (air ledeng, kran umum atau hydrant, sumur bor atau pompa terlindung, sumur gali terlindung, mata air terlindung, dan penampungan air hujan), Keterjangkauan (jarak dan lokasi akses), Ketersediaan, serta Kualitas Air. Dari beberapa komponen tersebut, kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut:

% Akses Air Minum

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman/layak}}{\text{Total rumah tangga}} \times 100\%$$

Berikut merupakan capaian rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak dalam rentang tahun 2020-2024 di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.11 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dengan angka tertinggi sebesar 97,8% pada tahun 2024. Salah satu tantangan utama yang mempengaruhi ketersediaan air minum layak di Banyuwangi adalah mencakup distribusi layanan air bersih yang belum merata, terutama di wilayah perdesaan, keterbatasan infrastruktur, serta potensi pencemaran sumber air. Oleh karena itu, berdasarkan standar SDGs, akses air minum layak idealnya mencapai 100% untuk

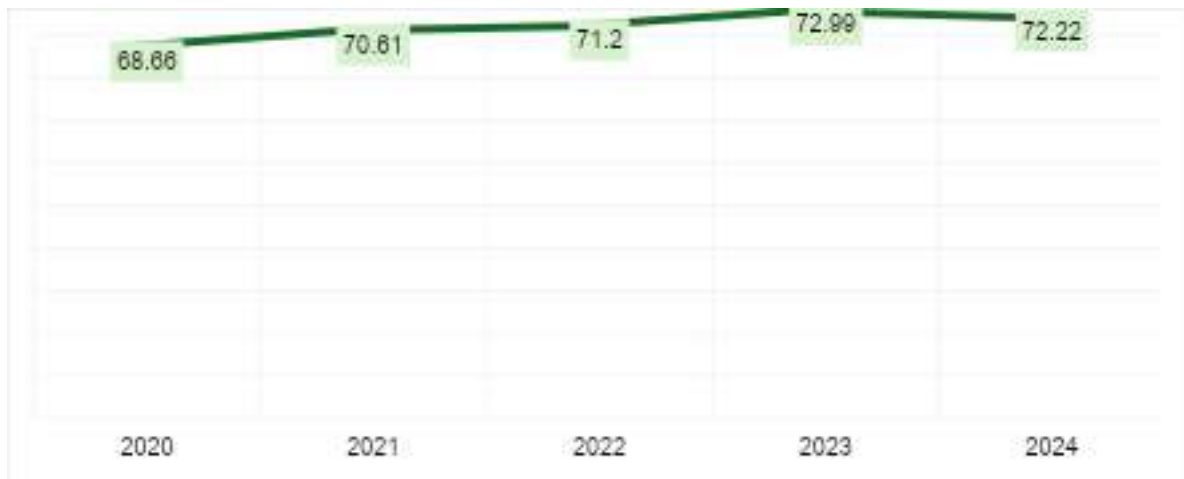


mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan terutama di daerah yang masih menghadapi kendala dalam penyediaan air bersih. Meskipun capaian Kabupaten Banyuwangi selama periode ini sudah cukup baik dengan rata-rata di atas 90%, fluktuasi angka ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam penyediaan air bersih.

2.1.2.4 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebuah angka atau skor yang menunjukkan seberapa baik kondisi lingkungan di suatu daerah. IKLH mencerminkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan, yang sangat penting bagi kesehatan manusia, kelestarian alam, dan keberlanjutan pembangunan. Semakin tinggi nilainya, berarti lingkungan di daerah tersebut semakin bersih, sehat, dan layak untuk ditinggali. Berikut merupakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024:



Gambar 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 2025

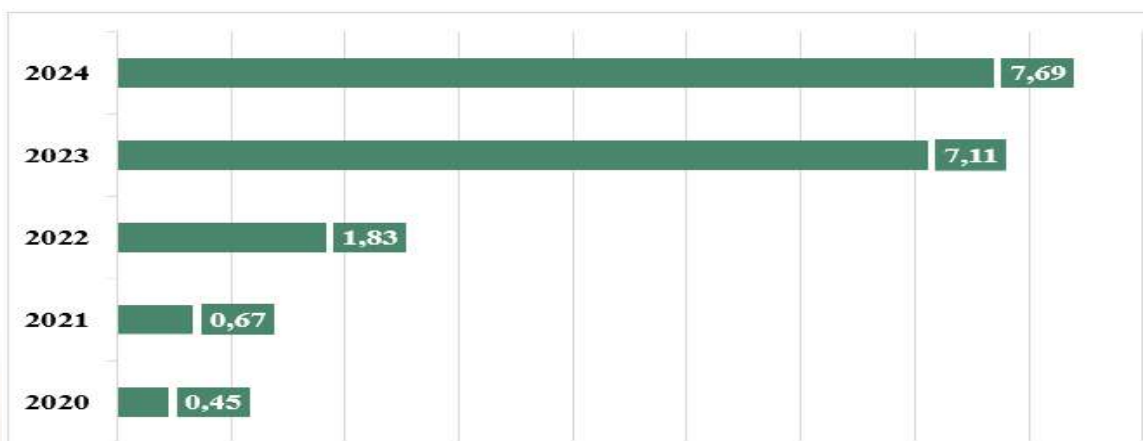
Berdasarkan data tahun 2020-2024 yang telah digambarkan pada grafik di atas, Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Capaian pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan pada ketiga indeks komposit IKLH yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Lahan. Dari penurunan dari ketiga indeks komposit dari IKLH, yang paling berpengaruh terhadap capaian penurunan IKLH, ada di Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan. Di Kabupaten Banyuwangi, pada pengambilan sampel kualitas air terindikasi mengalami pencemaran dan masih adanya sanitasi yang buruk dalam pengelolaan limbah domestik, sehingga nilai IKA juga berimbas sehingga mengalami penurunan. Selain itu, faktor dari penurunan capaian IKLH adalah adanya peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan terjadinya pembukaan lahan baru dan terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tanaman semusim di Kabupaten Banyuwangi.



Meskipun demikian, secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir capaian IKLH menunjukkan tren positif yang mencerminkan berbagai inisiatif Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Peningkatan ini juga tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung capaian IKLH tersebut, seperti yang paling utama adalah potensi alam dan ekowisata yang mendukung konservasi dan mendorong kebijakan pelestarian lingkungan, selanjutnya yaitu komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggapi berbagai isu lingkungan dengan secara proaktif progresif dalam merumuskan kebijakan lingkungan, lalu tentunya dengan dukungan dari berbagai stakeholder dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Tantangan yang akan dihadapi Banyuwangi ke depan yaitu meningkatnya sektor pariwisata dapat menyebabkan ancaman bagi hutan, ataupun wilayah konservasi lainnya. Selaras dengan hal tersebut, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan kondisi di mana rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, seperti toilet yang terhubung ke tangki septik yang dibangun sesuai standar dan disedot secara berkala, atau melalui sistem perpipaan terpusat yang dikelola oleh Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Adapun cara perhitungan untuk rumah tangga dengan akses sanitasi aman membutuhkan beberapa data antara lain yaitu Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N dengan dibagi Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian dikali 100%. Adapun capaian rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sanitasi [aman](#) ~~amanlayak~~ di Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.13 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024



Sumber: [Dinas PU CKPPBPS Kabupaten Banyuwangi](#), 2025

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Banyuwangi meningkat dari 0,4577,44% pada 2020 menjadi 781,69 77% pada 2024. Meskipun tren ini positif, pencapaian 100% sanitasi amanlayak sesuai target SDGs Tujuan Keenam yaitu Akses prevalensi Air Bersih dan Sanitasi pada tahun 2030 masih sulit tanpa percepatan signifikan. Diperlukan dorongan melalui investasi infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan dukungan program pemerintah agar akses sanitasi aman dapat mencapai target lebih cepat. Selain itu, dalam pengelolaan air limbah domestik perlu dikelola dengan baik, dikarenakan saat ini hanya ada satu IPLT (Instalasi Pengelolaan Limbah Terpusat) dalam keadaan rusak/tidak optimal yang berada di Kertosari, maka belum dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

C. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah mengacu pada jumlah atau volume sampah yang berhasil dikumpulkan dan diproses di berbagai fasilitas pengelolaan sampah, sehingga mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pengolahan timbulan sampah di fasilitas pengelolaan merupakan langkah krusial dalam manajemen sampah yang berkelanjutan. Berikut merupakan capaian pengolahan timbulan sampah di fasilitas pengolahan sampah pada Kabupaten Banyuwangi periode 2021-2024:



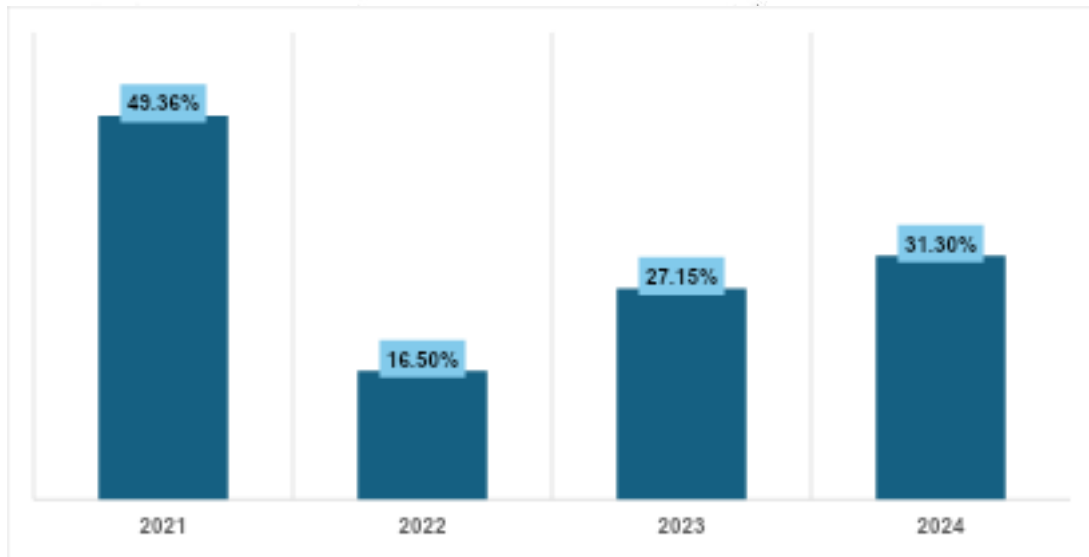
Gambar 2.14 Timbulan Sampah dan Sampah Terkelola (Ton/hari) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: [Kemen LHK Republik Indonesia](#), 2025

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren fluktuatif, namun menurun apabila dibandingkan dengan capaian 2021. Pada tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi menghasilkan timbulan sampah terolah sekitar 306.271 ton per tahun. Menurun apabila dibandingkan dengan capaian 2021 yang menghasilkan sekitar 457,297 ton per tahun. Meskipun demikian, tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir ditunjang



oleh keberadaan tempat pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya di bawah ini akan disajikan data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Banyuwangi :



Gambar 2.15 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

Sumber: Kemen LHK Republik Indonesia, 2025

Berdasarkan data di atas, Persentase Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Meskipun memiliki kecenderungan meningkat, dengan capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi masih perlu untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang akan semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah bekerjasama dengan NGO lingkungan dalam pengelolaan persampahan.

Upaya lain dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pengembangan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Hingga Oktober 2024, tercatat sebanyak 26 unit TPS3R telah beroperasi di berbagai kecamatan. Salah satu fasilitas strategis yang menjadi model adalah TPS3R Balak di Desa Balak, Kecamatan Songgon, yang mulai beroperasi pada September 2023. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan sebesar 84 ton sampah per hari dan melayani sekitar 250.000 jiwa atau 55.491 rumah tangga di enam kecamatan sekitarnya. Pendirian TPS3R Balak merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Pemerintah Norwegia dalam kerangka program Banyuwangi Hijau, yang mengintegrasikan pendekatan lingkungan dan tata kelola limbah yang modern.

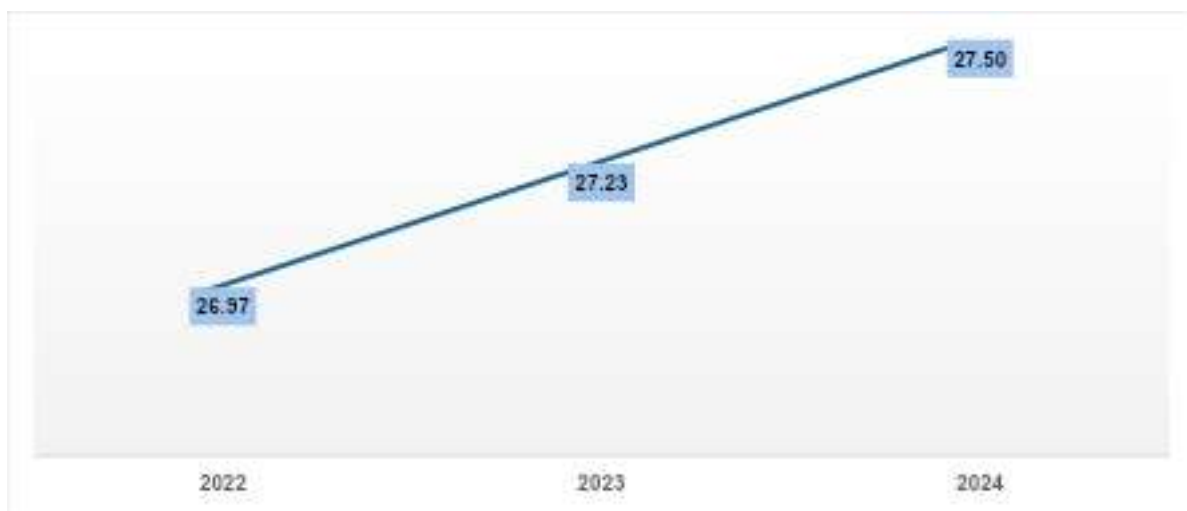
Selain itu, TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar menjadi representasi keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Fasilitas ini memperoleh penghargaan sebagai TPS3R Terbaik Nasional pada Maret 2024, dan memiliki



kemampuan untuk mengeksport produk daur ulang, khususnya plastik, ke negara-negara seperti Austria dan Malaysia secara rutin. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas model pengelolaan sampah yang mengedepankan partisipasi masyarakat serta integrasi ekonomi sirkular. Secara keseluruhan, pendekatan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan pentingnya dukungan multistakeholder, termasuk mitra internasional, dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang inovatif, berdaya guna, dan berkelanjutan secara ekologis maupun sosial.

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara menyeluruh dan rutin oleh penyedia layanan resmi (pemerintah daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk), mulai dari titik sumber (rumah tangga) hingga tempat pemrosesan akhir, sesuai standar operasional yang berlaku. Kriteria dari proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Cakupan pengumpulan 100% sampah rumah tangga yang dihasilkan, baik organik maupun anorganik, Frekuensi pengambilan minimal 2 kali per minggu (mengacu pada pedoman KLHK dan SPM sub-urusan persampahan), Pengumpulan dilakukan oleh petugas resmi atau unit layanan yang ditetapkan, Sampah diangkut ke TPS/TPST sebelum menuju TPA sesuai prosedur dan Tidak ada pembuangan liar atau pembakaran sampah oleh rumah tangga. Perhitungan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah mempertimbangkan antara jumlah rumah tangga yang mendapat layanan pengumpulan sampah dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga kemudian dikalikan 100%. Berikut capaian dari Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2022-2024:



Gambar 2.16 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Banyuwangi 2022-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 2025



Sesuai dengan grafik diatas, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang meningkat. Capaian ditahun 2022 sebesar 26,97% yang kemudian ditahun 2024 menjadi sebesar 27,50%. Peningkatan tersebut terjadi karena usaha pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani masalah persampahan yang salah satu caranya adalah dengan bekerjasama dengan NGO terkait lingkungan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang hingga Oktober 2024, tercatat sebanyak 26 unit TPS3R telah beroperasi di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu fasilitas strategis yang menjadi model adalah TPS3R Balak di Desa Balak, Kecamatan Songgon, yang mulai beroperasi pada September 2023.

2.1.2.5 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

A. Penurunan Intensitas Emisi GRK Kumulatif

Emisi gas rumah kaca (GRK) merujuk pada pelepasan gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu proses di mana radiasi inframerah dari permukaan bumi terperangkap oleh atmosfer bumi dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan. Diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sangat tinggi karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi baik dalam mengurangi risiko bencana alam, meningkatkan kualitas udara, dan melindungi sumber daya alam yang vital seperti hutan dan air serta serta mempromosikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang melalui investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi. Dengan demikian, daerah yang aktif dalam mengurangi emisi GRK dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Menurut data website AKSARA milik Kementerian PPN/Bappenas, Kabupaten Banyuwangi telah melakukan 74 (tujuh puluh empat) Total Kegiatan Aksi Pembangunan Rendah Karbon yang telah dilaksanakan. Dampak dari diterapkannya kegiatan ini adalah terjadi potensi penurunan emisi di Kabupaten Banyuwangi yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kabupaten Banyuwangi

Potensi Penurunan Emisi Kabupaten Banyuwangi (Ton CO ₂ EQ)	2020	2021	2022	2023	2024
	82,55720	107,00772	8.200,90583	22.341,02263	22.671,05701

Sumber: Bappenas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, potensi penurunan emisi Kabupaten Banyuwangi mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan potensi penurunan emisi mengindikasikan bahwa ada peluang besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai tindakan dan kebijakan yang efektif yang mencakup peningkatan efisiensi energi, peralihan ke sumber energi terbarukan, peningkatan manajemen limbah, reboisasi, serta penerapan teknologi rendah emisi di sektor industri dan transportasi. Capaian peningkatan ini juga menunjukkan bahwa dengan komitmen dan investasi yang tepat oleh Pemerintah Kabupaten



Banyuwangi yang pada gilirannya membantu mengurangi dampak perubahan iklim, meningkatkan kualitas udara, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan kontribusi potensi penurunan emisi di Kabupaten Banyuwangi per sektor:

Tabel 2.15 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Kabupaten Banyuwangi

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Energi	0%	0%	0,20%	0%	0%
Transportasi	0,19%	68,35%	0%	0,05%	0%
Hutan dan Lahan	99,81%	0%	0%	19,34%	0%
Pertanian	0%	0%	99,80%	78,21%	100%
Pesisir Laut	0%	0%	0%	0%	0%
Industri	0%	0%	0%	0%	0%
Persampahan	0%	31,65%	0%	2,30%	0%

Sumber: Bappenas, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dalam dua tahun terakhir sektor pertanian menjadi sektor yang paling berkontribusi dalam penurunan emisi di Kabupaten Banyuwangi melalui praktik yang lebih berkelanjutan, seperti pengelolaan pupuk yang efisien, pertanian ramah lingkungan, manajemen limbah ternak, agroforestri, serta rotasi tanaman dan penutup tanah. Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga berkontribusi signifikan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.

B. Indeks Risiko Bencana

Pemetaan potensi luas bahaya menurut jenis bencana di Kabupaten Banyuwangi menjadi langkah penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Informasi ini tidak hanya memberikan gambaran wilayah-wilayah yang rawan terhadap ancaman tertentu, tetapi juga menjadi dasar dalam penentuan prioritas penanganan dan alokasi sumber daya secara lebih tepat. Data mengenai sebaran dan cakupan potensi bahaya ini sangat berperan dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB), karena indeks tersebut dihitung berdasarkan kombinasi antara tingkat bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) daerah dalam menghadapi bencana. Berikut merupakan potensi luas bahaya di Kabupaten Banyuwangi menurut jenis bencana:

Tabel 2.16 Potensi Luas Bahaya Bencana di Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	Banjir	1.104	55.583	21.254	77.940	TINGGI
2	Banjir Bandang	14.377	16.668	20.863	51.907	TINGGI
3	Cuaca Ekstrem	230.612	65.578	174.649	470.839	TINGGI



No	Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
4	Gelombang Eksrim dan Abrasi	5.288	893	2.041	8.222	TINGGI
5	Gempa Bumi	308.890	233.553	35.797	578.240	SEDANG
6	Likuefaksi	0	105.744	9.686	115.430	SEDANG
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	6.330	48.538	268.086	322.955	TINGGI
8	Letusan Gunung Api					
	Ijen	26.166	1.375	747	28.289	TINGGI
	Raung	10.449	26.653	3.264	40.366	TINGGI
9	Kekeringan	0	491.247	86.993	578.240	TINGGI
10	Tanah Longsor	15.974	69.241	121.034	206.248	TINGGI
11	Tsunami	1.331	1.837	8.295	11.463	TINGGI

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026

Berdasarkan jenis bencana yang diidentifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, Kabupaten Banyuwangi memiliki kelas risiko tinggi pada 9 (sembilan) jenis bencana dan kelas risiko sedang pada 2 (dua) jenis bencana. Hal ini merupakan konsekuensi dari posisi geografis Kabupaten Banyuwangi yang dekat dengan Samudra Hindia dan Selat Bali, serta berada di sekitar gunung berapi aktif seperti Gunung Raung dan Gunung Ijen. Kondisi geografis yang bervariasi dengan iklim tropis dan curah hujan tinggi meningkatkan kerentanan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor.

Selanjutnya, berdasarkan potensi bencana tersebut disajikan nilai Indeks Risiko Bencana yang merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap Kabupaten/Kota di Indonesia, dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi. Berikut disajikan grafik indikator sektor Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.



*Hasil perhitungan menggunakan komponen perhitungan lama

Gambar 2.17 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren penurunan sepanjang periode 2020–2024, yang mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam mengurangi potensi dampak bencana. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan, tetapi juga sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana. Peningkatan kapasitas ini tercapai karena mekanisme kerja yang berasaskan Indeks Kinerja Daerah (IKD), khususnya melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana dan penanganan kedaruratan logistik. Peningkatan IKD berkontribusi langsung terhadap penurunan IRB karena semakin baik kesiapsiagaan dan ketersediaan sumber daya darurat, semakin kecil risiko kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana.

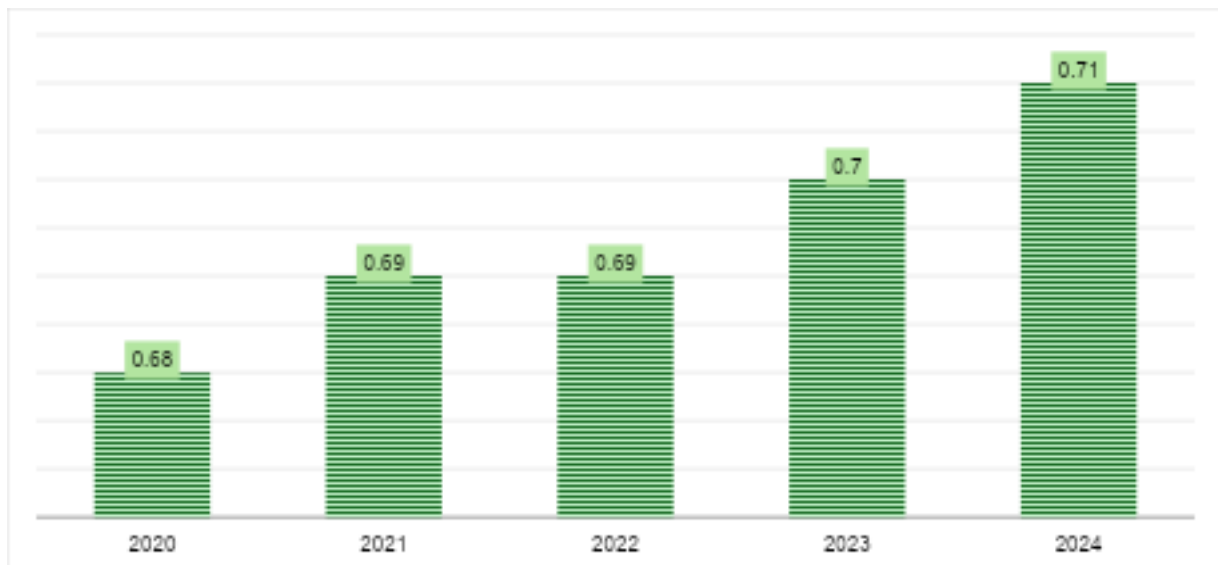
Lebih lanjut, penurunan IRB tersebut juga dipengaruhi oleh implementasi tujuh prioritas utama pengelolaan risiko bencana yang dijalankan secara konsisten. Prioritas tersebut mencakup penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi kebencanaan, penanganan kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi, penguatan penanganan darurat bencana, serta pengembangan sistem pemulihan pascabencana. Sinergi dari tujuh aspek ini memungkinkan adanya perencanaan yang lebih komprehensif, respon yang cepat dan terkoordinasi saat bencana terjadi, serta pemulihan yang lebih efektif. Dengan demikian, turunnya IRB bukan sekadar hasil dari penurunan frekuensi bencana, tetapi lebih kepada peningkatan kapasitas adaptif dan mitigatif yang terukur dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

C. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (selanjutnya disebut IKD) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesiapan suatu daerah dalam menghadapi dan mengelola



risiko bencana. Indeks ini mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan dari dampak bencana. Dalam lima tahun terakhir, berikut merupakan capaian skor Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024:



Gambar 2.18 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan grafik di atas, tren skor Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,68 pada tahun 2020 menjadi 0,7 pada 2023. Peningkatan IKD mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek ketahanan daerah terhadap bencana, yang bisa berasal dari penguatan kebijakan mitigasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau perbaikan infrastruktur kebencanaan. Hambatan yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi adalah cakupan luas wilayah Banyuwangi yang sangat luas sehingga dibutuhkan ekstra tenaga dalam penanganan bencana. Pengembangan sistem pemulihan bencana karena rehabilitasi yang berbentuk fisik sementara regulasinya dari segi administrasi yang panjang sehingga berpengaruh pada penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga dan mengoptimalkan investasi dalam sarana dan prasarana kebencanaan agar lebih adaptif terhadap ancaman yang terus berkembang diikuti peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana karena merupakan tanggung jawab bersama.

2.1.2.6 DEMOGRAFI

Kondisi demografi merupakan penjelasan terkait karakteristik populasi manusia dalam suatu wilayah yang di dalamnya mencakup aspek-aspek seperti jumlah penduduk, distribusi, struktur, dan dinamika populasi. Secara keseluruhan, kondisi demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik penduduk dalam suatu wilayah dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Berikut merupakan kondisi demografi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024:



Tabel 2.17 Kondisi Demografi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024	Rasio Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
Pesanggaran	58,1	21,15	100,14	72,4
Siliragung	51,3	10,10	101,94	539,1
Bangorejo	68,7	13,84	101,27	500,2
Purwoharjo	72,0	8,06	100,24	359,3
Tegaldlimo	69,1	7,19	101,34	51,5
Muncar	141,1	20,60	100,78	966,2
Cluring	81,2	11,09	100,26	833,3
Gambiran	69,5	10,20	98,97	1040,3
Tegalsari	54,7	16,36	101,39	838,0
Glenmore	79,1	11,17	97,92	187,4
Kalibaru	68,7	17,89	98,78	168,8
Genteng	98,1	28,33	101,04	1191,4
Srono	101,7	23,73	100,36	1009,5
Rogojampi	58,3	7,77	97,60	1201,0
Blimbingsari	57,4	8,20	97,86	855,4
Kabat	67,0	16,65	99,61	711,2
Singojuruh	53,6	7,42	98,84	894,5
Sempu	88,6	28,77	100,00	506,8
Songgon	59,6	5,36	100,61	197,4
Glagah	38,6	12,90	96,59	502,6
Licin	30,8	2,64	99,92	181,9
Banyuwangi	121,5	13,97	96,95	4033,4
Giri	32,9	14,88	97,61	1544,8
Kalipuro	87,8	24,61	99,45	283,1
Wongsorejo	82,6	29,62	98,78	177,7
Kabupaten Banyuwangi	1,791,8	14,90	99,59	309,9

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025



A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Laju ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta migrasi masuk dan keluar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,79 juta jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, yang mencatat jumlah penduduk sekitar 1,78 juta jiwa. Dari total penduduk tersebut, sekitar 64,08% atau 1,14 juta jiwa berada dalam kelompok usia produktif (15-59 tahun). Sementara itu, 19,17% adalah anak-anak (0-14 tahun), dan 16,75% merupakan kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas).

Pertumbuhan jumlah penduduk ini mencerminkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Di satu sisi, peningkatan populasi dapat mendukung potensi pasar tenaga kerja dan pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, kebutuhan terhadap infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga akan semakin meningkat. Fluktuasi pertumbuhan ini juga menunjukkan adanya pengaruh kuat dari kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pada dinamika populasi.

B. Rasio Penduduk

Rasio penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan variabel tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk usia produktif, atau jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang digunakan untuk menganalisis distribusi dan keseimbangan demografi dalam suatu wilayah. Secara keseluruhan, rasio penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah 99,59, menunjukkan keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Terdapat variasi antar kecamatan, dengan rasio penduduk terendah di Kecamatan Glagah (96,59) dan tertinggi di Kecamatan Siliragung (101,94). Dengan tren pertumbuhan penduduk yang konsisten dan tanpa adanya perubahan signifikan dalam faktor-faktor demografi, struktur penduduk Banyuwangi pada tahun 2025 kemungkinan akan mirip dengan data tahun 2024. Artinya, mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif, diikuti oleh anak-anak dan lanjut usia.

C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk yang tinggal di suatu wilayah per satuan luas, biasanya dinyatakan dalam jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²). Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi rata-rata 309,9 jiwa/km², dengan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Banyuwangi memiliki kepadatan tertinggi (4.033,4 jiwa/km²) karena menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, sementara Kecamatan Tegaldlimo memiliki kepadatan terendah (51,5 jiwa/km²) dikarenakan Tegaldlimo memiliki wilayah yang sangat luas, terutama karena sebagian besar wilayahnya merupakan bagian dari Taman Nasional Alas Purwo dan Tegaldlimo memiliki akses jalan yang lebih terbatas dibandingkan daerah lain yang lebih padat penduduknya seperti Banyuwangi Kota atau Genteng.

**D. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029**

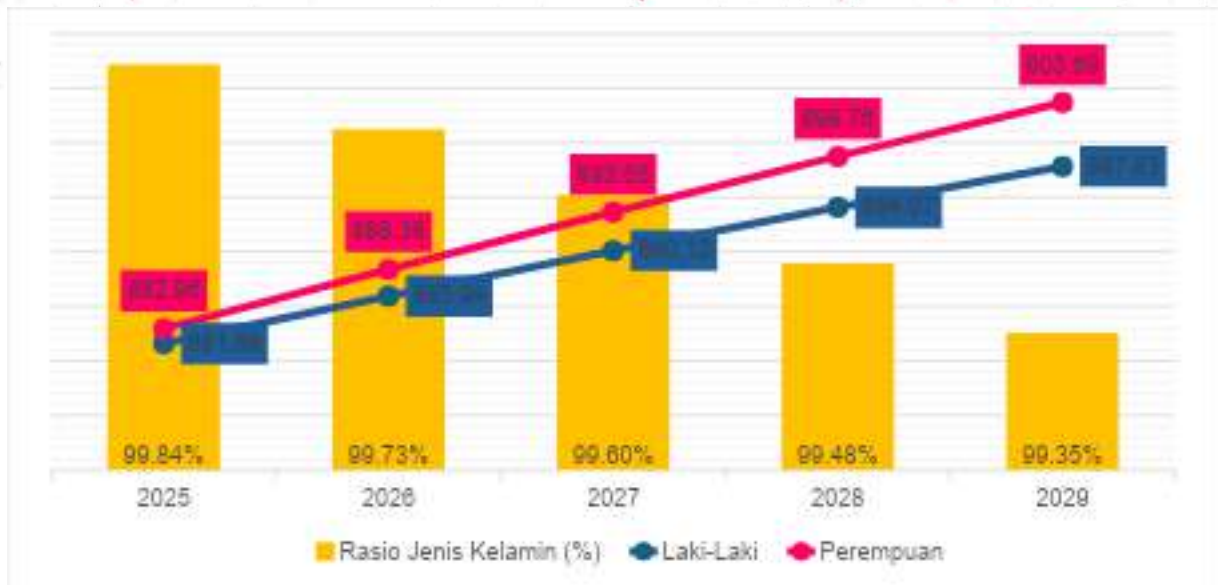
Proyeksi penduduk menjadi penting dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 karena menyediakan data krusial untuk menentukan kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan perumahan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran dalam rentang lima tahun mendatang. Berikut merupakan data perhitungan yang diolah berdasarkan hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur:

Tabel 2.18 Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk					
Laki-Laki	881,58	885,94	890,12	894,07	897,83
Perempuan	882,96	888,38	893,65	898,76	903,69
Rasio Jenis Kelamin (%)	99,84%	99,73%	99,60%	99,48%	99,35%
Jumlah Penduduk	1764,55	1774,34	1783,76	1792,83	1801,52
Laju Pertumbuhan (%)	0,58%	0,55%	0,53%	0,51%	0,48%
Kepadatan Penduduk (jiwa / km²)	491,12	493,84	496,46	498,99	501,41
Komposisi Penduduk					
0-14 Tahun	360,54	360,46	360,24	360,03	359,99
0-14 Tahun	1212,83	1215,55	1217,68	1219,14	1219,85
15-64 Tahun	191,18	198,33	205,84	213,66	221,68
65 + Tahun	45,49%	45,97%	46,49%	47,06%	47,68%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah).

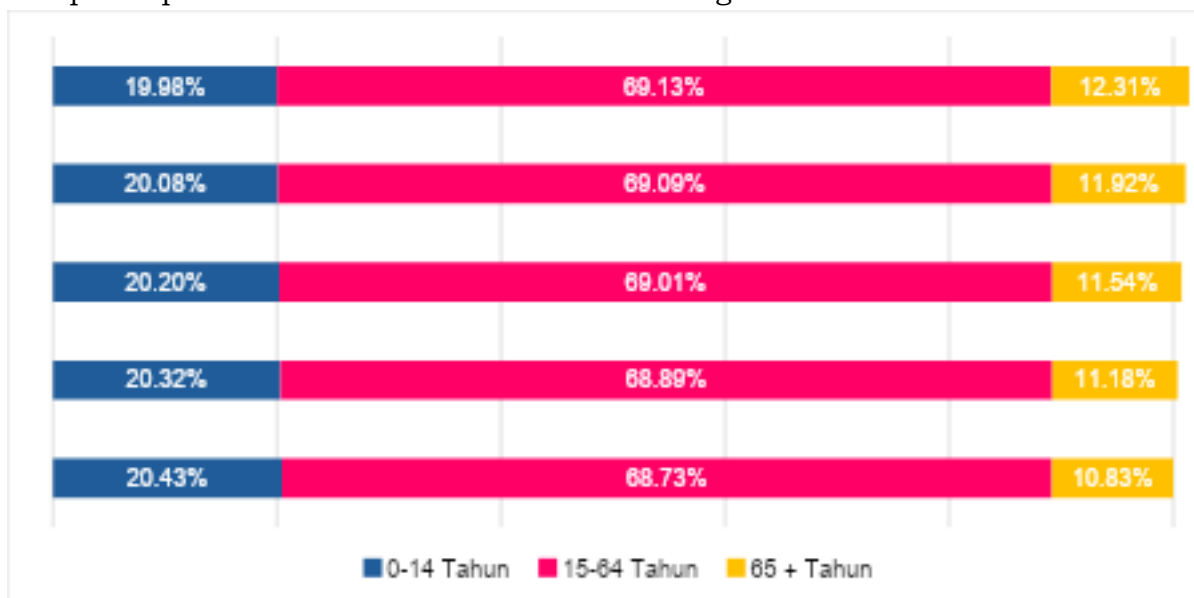
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam lima tahun ke depan, penduduk Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dari 1,764.55 jiwa pada tahun 2025 menjadi 1,801.52 jiwa pada tahun 2029, dengan laju pertumbuhan yang melambat dari 0,58% menjadi 0,48%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun total populasi terus bertambah, penambahan jumlah penduduk per tahun semakin kecil. Penurunan laju pertumbuhan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan tingkat kelahiran, peningkatan angka kematian, atau peningkatan migrasi keluar dari Kabupaten Banyuwangi. Fenomena ini juga bisa menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi sedang mencapai tahap stabilitas demografis di mana angka kelahiran dan kematian mendekati kesetimbangan. Perlambatan laju pertumbuhan ini dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup penduduk, seperti memperbaiki infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, tanpa harus menghadapi tekanan besar dari peningkatan jumlah penduduk yang terlalu cepat.



Gambar 2.19 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah).

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan sedikit menurun dari 99.84% pada tahun 2025 menjadi 99.35% pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sedangkan jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur adalah sebagai berikut:



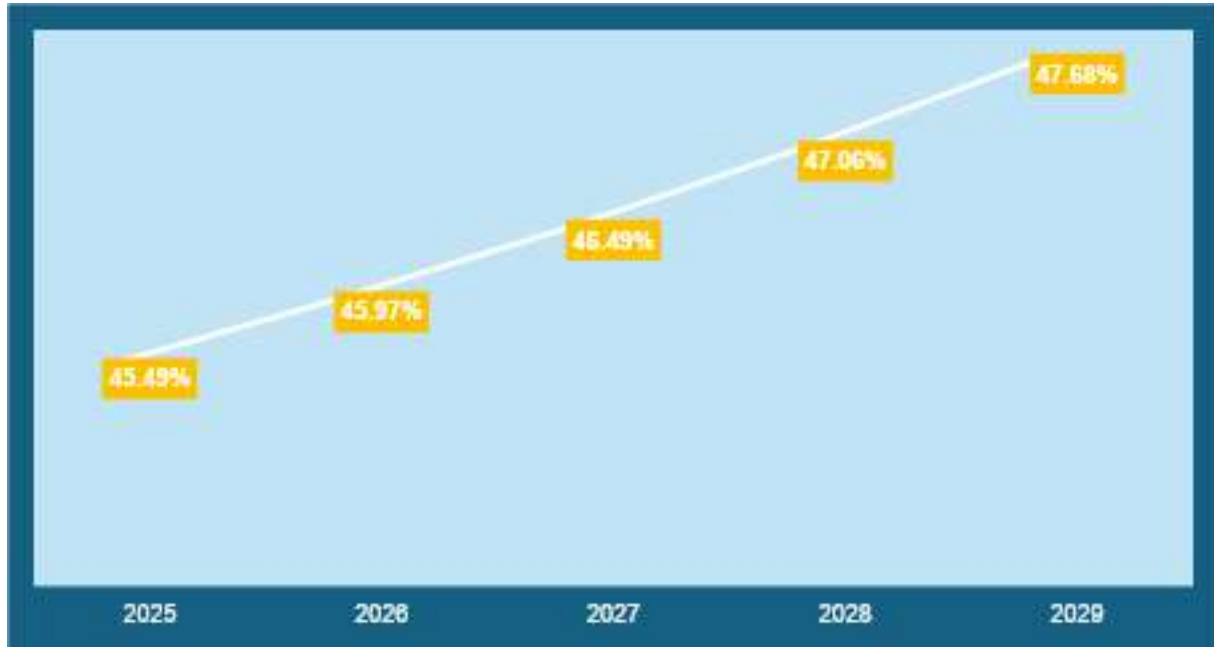
Gambar 2.20 Proyeksi Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah).

Berdasarkan grafik di atas, populasi anak-anak (0-14 tahun) diproyeksikan tetap stabil sekitar 360 ribu jiwa setiap tahun yang menunjukkan bahwa tingkat kelahiran relatif konstan dan tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah anak-anak. Pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan meningkat dari



1,191.18 jiwa pada tahun 2025 menjadi 1,221.68 jiwa pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan penambahan jumlah tenaga kerja potensial yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pada kelompok usia lanjut (65+ tahun) juga menunjukkan peningkatan dari 45.49% pada tahun 2025 menjadi 47.68% pada tahun 2029, menandakan meningkatnya harapan hidup dan jumlah penduduk lansia yang membutuhkan perhatian khusus dalam layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tren ini menghasilkan proyeksi angka ketergantungan sebagaimana berikut:



Gambar 2.21 Proyeksi Angka Ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah).

Berdasarkan grafik proyeksi di atas, angka ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi diprediksi meningkat dari 45,49% pada tahun 2025 menjadi 47,68% pada tahun 2029. Peningkatan ini diartikan bahwa beban ekonomi pada penduduk usia produktif semakin besar, karena mereka harus mendukung lebih banyak orang yang berada di usia non-produktif. Dampaknya mencakup peningkatan kebutuhan akan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta mempengaruhi dinamika tenaga kerja dan produktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta mengembangkan layanan kesehatan dan sosial untuk mendukung kelompok usia non-produktif dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

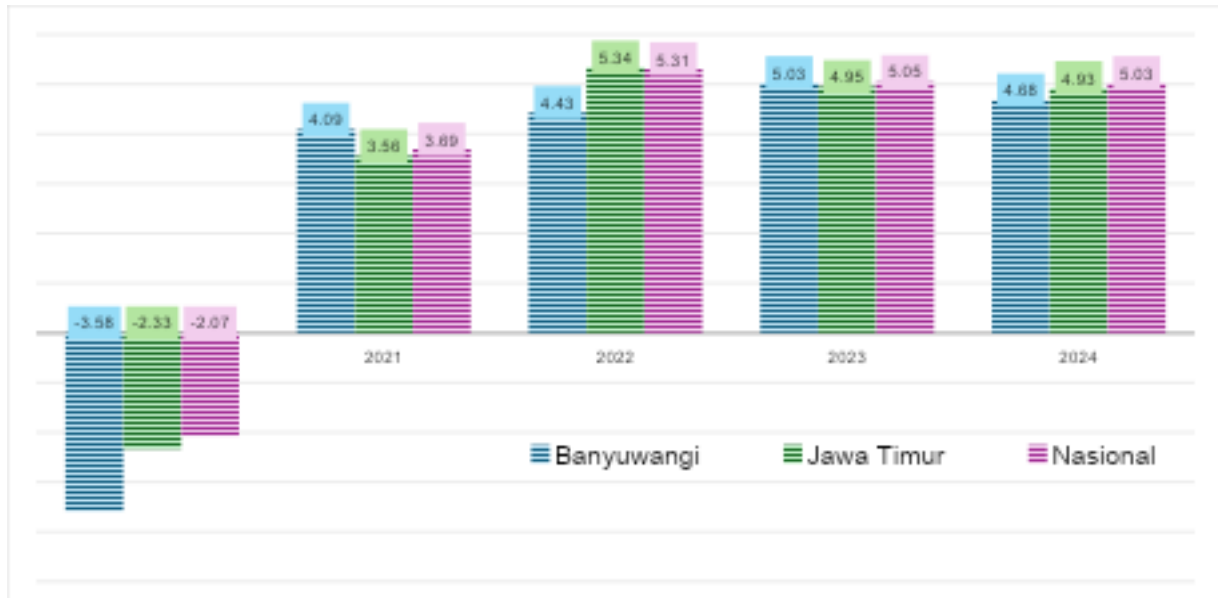
2.1.3.1. KESEJAHTERAAN EKONOMI

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur dinamika ekonomi suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke



tahun, yang mencerminkan tingkat ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi. Urgensi dari indikator ini terletak pada kemampuannya dalam memberikan gambaran mengenai daya tahan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal, efektivitas kebijakan pembangunan, serta daya saing suatu wilayah dibandingkan dengan skala yang lebih luas, seperti provinsi atau nasional. Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, pemantauan laju pertumbuhan ekonomi menjadi esensial untuk mengukur efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam menjaga momentum pertumbuhan. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2.22 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren pemulihan yang cukup signifikan setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tercatat -3,58%, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (-2,33%) dan nasional (-2,07%). Namun, pada tahun 2021, perekonomian Banyuwangi mulai pulih dengan pertumbuhan 4,09%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (3,56%) dan nasional (3,69%), menunjukkan pemulihan yang relatif lebih cepat di tingkat daerah. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi meningkat menjadi 4,43%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (5,34%) dan nasional (5,31%). Tahun 2023 mencatat pertumbuhan yang lebih baik di Banyuwangi, yaitu 5,03%, mendekati angka pertumbuhan nasional yang berada di 5,05% dan sedikit lebih tinggi dari Jawa Timur yang mencatat 4,95%. Sementara itu, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menurun menjadi 4,68%, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (4,93%) dan nasional (5,03%). Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi mampu pulih dengan cepat setelah krisis ekonomi akibat pandemi dan mempertahankan pertumbuhan yang cukup stabil. Meskipun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan Banyuwangi



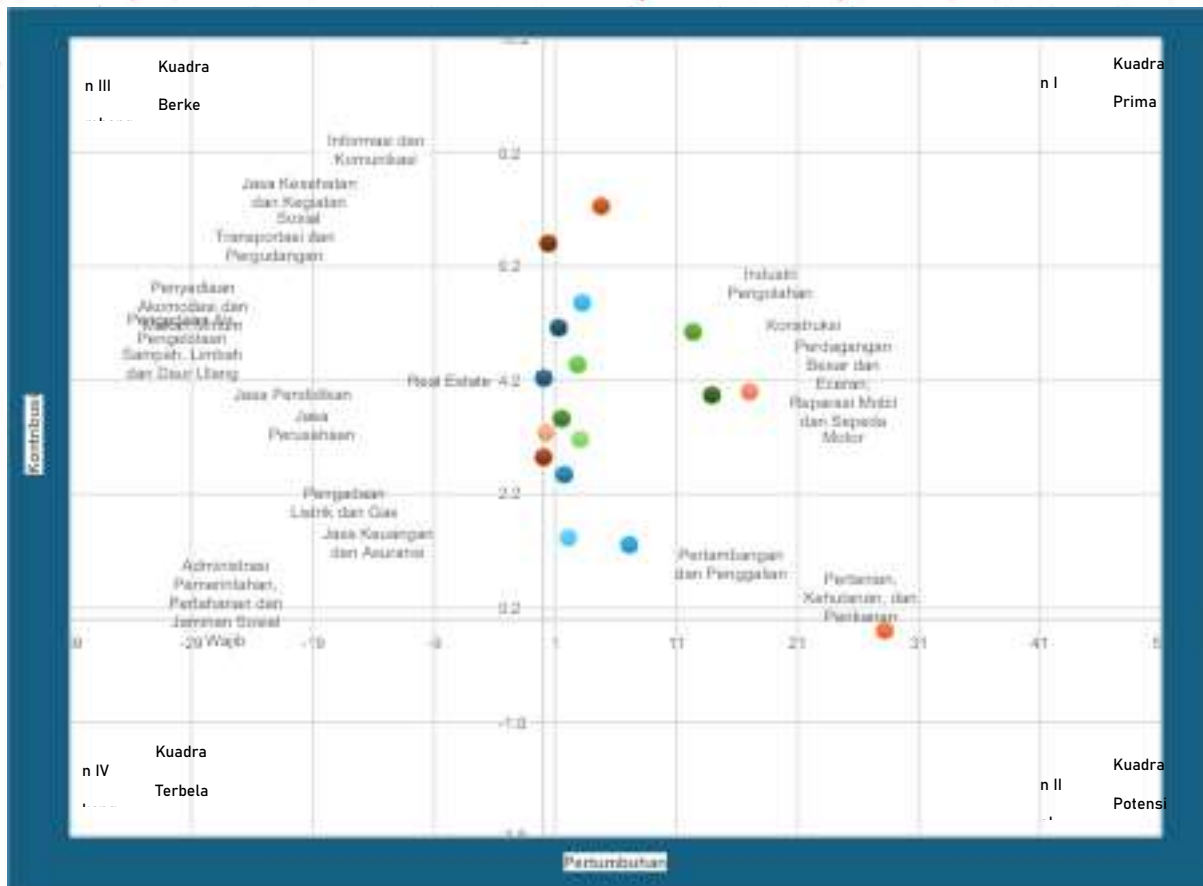
sedikit di bawah rata-rata provinsi dan nasional, capaian ini tetap mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang cukup resilient. Untuk menjaga tren pertumbuhan yang lebih kompetitif, diperlukan strategi penguatan sektor produktif, peningkatan investasi, serta akselerasi pengembangan infrastruktur dan inovasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Berdasarkan pada pertumbuhan dan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing sektor dalam PDRB, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis Tipologi Klassen untuk memahami pola serta struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Analisis ini dilakukan dengan menghitung rasio antara laju pertumbuhan setiap sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi terhadap laju pertumbuhan PDRB total Kabupaten Banyuwangi, serta membandingkan proporsi kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB dengan rata-rata kontribusi sektor terhadap total PDRB Kabupaten Banyuwangi. Melalui metode ini, sektor-sektor ekonomi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Tipologi Klassen mengelompokkan sektor-sektor ekonomi ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Sektor Prima: Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi serta kontribusi besar terhadap perekonomian daerah;
2. Sektor Potensial: Sektor yang memiliki kontribusi besar namun dengan laju pertumbuhan yang rendah;
3. Sektor Berkembang: Sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya terhadap PDRB masih rendah;
4. Sektor Terbelakang: Sektor yang memiliki laju pertumbuhan maupun kontribusi yang rendah.

Berdasarkan data pertumbuhan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Banyuwangi, klasifikasi sektor ekonomi berdasarkan Tipologi Klassen dapat divisualisasikan lebih lanjut melalui grafik atau matriks yang menggambarkan posisi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah. Analisis Tipology Klassen secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan matrix di bawah ini.



Gambar 2.23 Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025 (Diolah).

Kontribusi Sektoral Laju Pertumbuhan Sektoral	Kontribusi Besar ($Y_{\text{Sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$)	Kontribusi Kecil ($Y_{\text{Sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$)
Tumbuh Cepat ($r_{\text{Sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$)	Sektor Prima (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan)	Sektor Berkembang (Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Real Estate; Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan)
Tumbuh Lambat ($r_{\text{Sektor}} < r_{\text{PDRB}}$)	Sektor Potensial (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian)	Sektor Terbelakang (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas)

Gambar 2.24 Klasifikasi Sektor PDRB Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhannya

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025 (Diolah).



Analisis Tipologi Klassen PDRB Kabupaten Banyuwangi ini dilakukan dengan mengelompokkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektoral terhadap total PDRB Kabupaten Banyuwangi dalam periode 2020 hingga 2024. Dengan metode Tipologi Klassen, sektor-sektor ekonomi dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu Sektor Prima, Sektor Potensial, Sektor Berkembang, dan Sektor Terbelakang. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah serta sektor yang memerlukan perhatian lebih untuk peningkatan daya saing.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga sektor yang masuk dalam kategori Sektor Prima, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 17,80% dan pertumbuhan 3,50%, Konstruksi dengan kontribusi 14,87% dan pertumbuhan 2,75%, serta Industri Pengolahan dengan kontribusi 7,13% dan pertumbuhan 4,27%. Ketiga sektor ini memiliki kontribusi yang tinggi terhadap total PDRB Kabupaten Banyuwangi serta mengalami pertumbuhan yang relatif stabil di atas rata-rata PDRB, sehingga menjadi sektor utama yang mendorong perekonomian daerah.

Selanjutnya sektor yang masuk dalam kategori Sektor Potensial, yaitu sektor dengan kontribusi besar namun pertumbuhan rendah, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 27,38% dan pertumbuhan 1,35%, serta Pertambangan dan Penggalan dengan kontribusi 5,45% dan pertumbuhan 2,00%. Meskipun sektor-sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah, laju pertumbuhannya masih di bawah sektor unggulan lainnya.

Adapun Sektor Berkembang, yang memiliki pertumbuhan tinggi tetapi kontribusi relatif kecil, terdiri dari sektor Informasi dan Komunikasi dengan kontribusi 5,95% dan pertumbuhan 5,75%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan kontribusi 1,07% dan pertumbuhan 5,84%, Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi 2,88% dan pertumbuhan 8,84%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan kontribusi 2,30% dan pertumbuhan 4,45%, serta beberapa sektor lain seperti Real Estate (kontribusi 1,55%, pertumbuhan 3,55%), Jasa Pendidikan (kontribusi 4,65%, pertumbuhan 2,60%), Jasa Perusahaan (kontribusi 0,27%, pertumbuhan 3,02%), serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (kontribusi 0,09%, pertumbuhan 3,35%). Sektor-sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah namun masih mengalami tantangan dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing. Terakhir, sektor yang masuk dalam kategori Sektor Terbelakang, yaitu sektor dengan kontribusi dan pertumbuhan yang rendah, meliputi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (kontribusi 4,04%, pertumbuhan 1,10%), Jasa Keuangan dan Asuransi (kontribusi 1,91%, pertumbuhan 1,95%), serta Pengadaan Listrik dan Gas (kontribusi 0,03%, pertumbuhan 6,54%). Sektor-sektor ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat berkembang lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil klasifikasi ini, dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terutama berasal dari sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Sementara itu, sektor pertanian masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar tetapi dengan laju



pertumbuhan yang relatif lebih rendah. Upaya penguatan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan daya saing sektor berkembang dan sektor potensial menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya, dalam upaya mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis di Kabupaten Banyuwangi, diperlukan analisis mendalam untuk menentukan sektor-sektor unggulan. Salah satu metode yang digunakan adalah Analisis Location Quotient (LQ), yang bertujuan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi ke dalam kategori sektor basis (unggulan) dan sektor non-basis. Analisis Location Quotient (LQ) berfungsi untuk mengukur tingkat spesialisasi suatu sektor ekonomi di wilayah tertentu dengan membandingkan kontribusinya terhadap total perekonomian lokal dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat provinsi. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi sektor-sektor pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi konsentrasi relatif suatu sektor, yang dapat membantu dalam menetapkan sektor unggulan sebagai leading sektor bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Perhitungan Location Quotient (LQ) dilakukan dengan membandingkan proporsi output sektor tertentu di Kabupaten Banyuwangi dengan proporsi sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Analisis ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai wilayah analisis, serta data PDRB Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama sebagai wilayah acuan. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya diperoleh hasil perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) untuk masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.19 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024

No	Sektor PDRB	Tahun					Rata-Rata LQ	Ket
		2020	2021	2022	2023	2024		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,697	2,682	2,639	2,640	2,606	2,653	BASIS
B	Pertambangan & Penggalian	1,576	1,668	1,905	1,934	2,018	1,820	BASIS
C	Industri Pengolahan	0,403	0,419	0,417	0,423	0,430	0,418	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,197	0,189	0,189	0,159	0,151	0,177	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,677	0,675	0,701	0,686	0,700	0,688	NON BASIS
F	Konstruksi	1,400	1,417	1,432	1,446	1,466	1,432	BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,888	0,878	0,888	0,000	0,906	0,712	NON BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	1,012	0,979	0,970	0,959	0,972	0,978	NON BASIS



No	Sektor PDRB	Tahun					Rata-Rata LQ	Ket
		2020	2021	2022	2023	2024		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,486	0,490	0,519	0,526	0,528	0,510	NON BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	0,963	0,964	0,979	0,982	0,997	0,977	NON BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,718	0,716	0,717	0,727	0,731	0,722	NON BASIS
L	Real Estate	0,922	0,925	0,941	0,941	0,957	0,937	NON BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	0,310	0,308	0,307	0,306	0,308	0,308	NON BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,968	0,952	0,968	0,986	0,997	0,974	NON BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,285	1,289	1,293	1,286	1,307	1,292	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,637	0,632	0,645	0,645	0,646	0,641	NON BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,949	0,943	0,983	0,975	0,977	0,965	NON BASIS

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025 (Diolah).

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Banyuwangi dibandingkan dengan skala provinsi. Sektor dengan nilai LQ lebih dari 1 dikategorikan sebagai sektor basis, yang berarti sektor tersebut memiliki spesialisasi dan keunggulan dibandingkan wilayah lain serta berpotensi menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sementara itu, sektor dengan nilai LQ kurang dari 1 dikategorikan sebagai sektor non-basis, yang berarti kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih di bawah rata-rata provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024, terdapat empat sektor yang masuk kategori sektor basis. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai LQ tertinggi, yaitu 2,653, yang menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor dominan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah yang memiliki potensi besar dalam pertanian dan perikanan, baik dari segi produksi maupun distribusi. Sektor Pertambangan dan Penggalan dengan nilai LQ 1,820 juga menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian daerah, meskipun kontribusinya terhadap total PDRB lebih kecil dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor Konstruksi memiliki nilai LQ rata-rata 1,432, yang menunjukkan bahwa sektor ini berkembang lebih pesat di Banyuwangi dibandingkan dengan provinsi, seiring dengan pertumbuhan infrastruktur dan pembangunan yang semakin meningkat. Sektor Jasa Pendidikan dengan nilai LQ 1,292 menegaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki konsentrasi institusi pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di provinsi, menunjukkan peran penting sektor ini dalam pengembangan sumber daya manusia daerah.

Di sisi lain, terdapat beberapa sektor yang masuk dalam kategori non-basis karena memiliki nilai LQ di bawah 1. Sektor Industri Pengolahan (LQ 0,418), Pengadaan Listrik dan Gas (LQ 0,177), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (LQ 0,688), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil



dan Sepeda Motor (LQ 0,712), Transportasi dan Pergudangan (LQ 0,978), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (LQ 0,510), Informasi dan Komunikasi (LQ 0,977), Jasa Keuangan dan Asuransi (LQ 0,722), Real Estate (LQ 0,937), Jasa Perusahaan (LQ 0,308), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (LQ 0,974), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (LQ 0,641), serta Jasa Lainnya (LQ 0,965) masih belum menjadi sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa sektor seperti Transportasi dan Pergudangan (LQ 0,978), Informasi dan Komunikasi (LQ 0,977), dan Administrasi Pemerintahan (LQ 0,974) memiliki nilai yang cukup mendekati 1, yang berarti sektor-sektor ini memiliki kontribusi yang relatif kuat tetapi belum cukup signifikan untuk menjadi sektor basis.

Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan memiliki sektor unggulan yang masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalan, yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor primer. Selain itu, keberadaan sektor Konstruksi dan Jasa Pendidikan sebagai sektor basis menunjukkan adanya perkembangan dalam sektor infrastruktur dan peningkatan peran pendidikan dalam perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat menjadikan sektor basis ini sebagai fokus utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor non-basis agar lebih berkembang sehingga struktur ekonomi daerah menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.

Kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui berbagai metode, salah satunya adalah analisis shift share. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan membaginya ke dalam tiga komponen utama serta mengukur kontribusi dari masing-masing komponen tersebut (Curtis, 1972). Analisis shift share membandingkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur produktivitas dan daya saing suatu daerah. Dengan metode ini, dapat diketahui seberapa cepat atau lambat pertumbuhan suatu sektor ekonomi, serta sektor mana yang memberikan kontribusi terhadap daya saing daerah dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, analisis ini juga membantu memahami peranan dan pergeseran suatu sektor dalam perekonomian daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional.

Analisis shift share terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, regional share, yang mengukur dampak pertumbuhan ekonomi suatu daerah terhadap wilayah yang lebih luas dengan membandingkan perubahan agregat sektoral terhadap sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. Kedua, proportional shift, yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian daerah lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan perekonomian yang lebih luas. Terakhir, differential shift, yang bertujuan mengidentifikasi daya saing sektor ekonomi di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih besar.

Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, analisis shift share digunakan untuk mengukur kinerja sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dan membandingkannya dengan PDRB Provinsi Jawa Timur sebagai



wilayah acuan. Dengan metode ini, dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif serta sektor yang mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Adapun hasil perhitungan shift share sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi untuk periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

No	Sektor PDRB	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,697	2,682	2,639
B	Pertambangan & Penggalian	1,576	1,668	1,905
C	Industri Pengolahan	0,403	0,419	0,417
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,197	0,189	0,189
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,677	0,675	0,701
F	Konstruksi	1,400	1,417	1,432
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,888	0,878	0,888
H	Transportasi dan Pergudangan	1,012	0,979	0,970
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,486	0,490	0,519
J	Informasi dan Komunikasi	0,963	0,964	0,979
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,718	0,716	0,717
L	Real Estate	0,922	0,925	0,941
M,N	Jasa Perusahaan	0,310	0,308	0,307
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,968	0,952	0,968
P	Jasa Pendidikan	1,285	1,289	1,293
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,637	0,632	0,645
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,949	0,943	0,983
TOTAL		10.729,779	- 2.059,172	1.721,823

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025 (Diolah).

Berdasarkan hasil perhitungan Shift Share sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki Regional Share terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai 2,697, sedangkan sektor dengan Regional Share terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya mencapai 0,197. Total keseluruhan Regional Share menunjukkan bahwa pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi dipengaruhi oleh perubahan struktur perekonomian di tingkat provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor dengan Regional Share yang lebih tinggi memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah dan berkembang sejalan dengan perekonomian skala yang lebih luas.



Untuk komponen Proportional Shift, terdapat beberapa sektor yang menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,682), Pertambangan dan Penggalan (1,668), serta Konstruksi (1,417). Nilai ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian provinsi. Sebaliknya, beberapa sektor lain seperti Jasa Keuangan dan Asuransi (0,716), Real Estate (0,925), serta Administrasi Pemerintahan (0,952) memiliki nilai Proportional Shift yang lebih kecil, meskipun tetap positif. Artinya, sektor-sektor ini tetap bertumbuh, namun lebih lambat dibandingkan sektor lain yang memiliki nilai lebih besar.

Sedangkan pada komponen Differential Shift, sektor yang menunjukkan daya saing paling tinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,639), Pertambangan dan Penggalan (1,905), serta Konstruksi (1,432). Sektor-sektor ini memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi. Sementara itu, sektor seperti Pengadaan Listrik dan Gas (0,189), Jasa Perusahaan (0,307), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (0,717) memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan sektor lain, meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan positif.

Hasil analisis shift share digunakan untuk mengklasifikasikan sektor dengan pertumbuhan dan daya saing. Dengan melihat pada hasil analisis Shift Share, maka dapat dilakukan pengelompokan sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang secara lebih jelas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share

KUADRAN I (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing)	KUADRAN III (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing)
- o Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - o Pertambangan dan Penggalan - o Konstruksi - o Jasa Pendidikan	o Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
KUADRAN II (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing)	KUADRAN IV (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing)
- o Industri Pengolahan - o Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - o Transportasi dan Pergudangan - o Informasi dan Komunikasi - o Real Estate - o Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	- o Pengadaan Listrik dan Gas - o Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - o Jasa Keuangan dan Asuransi - o Jasa Perusahaan - o Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025 (Diolah).



Berdasarkan hasil analisis Shift Share, sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dapat diklasifikasikan ke dalam empat kuadran berdasarkan pertumbuhan dan daya saingnya. Sektor yang masuk dalam Kuadran I (Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing) mencakup Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; serta Jasa Pendidikan. Sektor-sektor ini memiliki pertumbuhan tinggi dan daya saing kuat, sehingga berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah. Di sisi lain, Kuadran III (Pertumbuhan Cepat tetapi Tidak Berdaya Saing) hanya diisi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang meskipun tumbuh cepat namun belum memiliki daya saing yang cukup dibandingkan sektor serupa di tingkat provinsi.

Sementara itu, sektor dalam Kuadran II (Pertumbuhan Lambat tetapi Berdaya Saing) seperti Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki daya saing tinggi tetapi pertumbuhannya relatif lambat, sehingga membutuhkan strategi penguatan inovasi dan investasi agar tidak stagnan. Sebaliknya, Kuadran IV (Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing) yang mencakup sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; serta Administrasi Pemerintahan perlu mendapatkan perhatian lebih karena selain bertumbuh lambat, sektor-sektor ini juga belum memiliki daya saing yang cukup kuat untuk berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengembangan sektor unggulan di Kuadran I harus terus dioptimalkan, sementara strategi perbaikan dan inovasi perlu dilakukan pada sektor di Kuadran III dan IV untuk meningkatkan daya saingnya.

Analisis shift-share pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tidak boleh berhenti pada identifikasi sektor unggulan, tetapi harus diterjemahkan menjadi rencana aksi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Empat sektor dengan pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi hasil analisis perlu diprioritaskan melalui kebijakan sektoral yang spesifik. Apabila sektor-sektor tersebut meliputi konstruksi, pariwisata, pertanian hortikultura, dan industri pengolahan, maka setiap sektor harus disiapkan peta jalan pengembangan lima tahunan yang memuat target PDRB sektoral, serapan tenaga kerja, dan kontribusi pajak daerah. Pada sektor konstruksi, langkah strategis dapat mencakup peningkatan penggunaan material lokal melalui penerapan kewajiban minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60–70% untuk proyek APBD/APBN, penguatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan bersertifikat yang difasilitasi Balai Latihan Kerja, serta percepatan proses perizinan melalui pembentukan construction service desk dengan target waktu pelayanan maksimal 14 hari kerja.

Pada sektor pariwisata, strategi difokuskan pada pengembangan destination branding berbasis ekowisata dengan standar internasional, pemberian insentif fiskal bagi investor yang mengutamakan tenaga kerja dan produk lokal, serta integrasi transportasi wisata melalui shuttle bus dan platform digital guna meningkatkan lama tinggal wisatawan. Sektor pertanian hortikultura memerlukan pembangunan pusat distribusi dan cold storage untuk menjaga stabilitas harga, penerapan skema contract farming antara petani dan industri pengolahan untuk



menjamin mutu, serta fasilitasi ekspor langsung melalui Pelabuhan Tanjungwangi guna menekan biaya logistik. Sementara itu, sektor industri pengolahan dapat diperkuat melalui pemberian insentif pengurangan pajak daerah bagi industri yang mengolah bahan baku lokal, pembangunan kawasan industri kecil-menengah dengan fasilitas bersama seperti laboratorium uji mutu dan gudang modern, serta pengembangan kemitraan antara UMKM dan industri besar untuk memperluas pasar. Keberhasilan pelaksanaan strategi ini diukur melalui indikator pertumbuhan PDRB sektoral, persentase serapan tenaga kerja lokal, kenaikan kontribusi pajak dan retribusi daerah, serta tingkat realisasi investasi di tiap sektor, dengan evaluasi tahunan yang disesuaikan terhadap dinamika ekonomi global, nasional, dan regional.

B. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah. Indikator ini menunjukkan nilai rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk jika total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menjadi penting karena mencerminkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas daerah, serta daya beli masyarakat. Kenaikan indikator ini menunjukkan peningkatan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh daerah, sementara penurunan dapat mengindikasikan perlambatan pertumbuhan atau tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan PDRB per kapita sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan dalam menentukan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan PDRB Per Kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.



Gambar 2.25 PDRB per Kapita di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025



PDRB per kapita Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp47.566,90, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp62.085,60 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan produktivitas daerah, serta keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan. Peningkatan paling signifikan terjadi dalam dua tahun terakhir, yaitu dari Rp53.822,40 pada 2022 menjadi Rp58.085,90 pada 2023, lalu meningkat lagi ke Rp62.085,60 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi utama Banyuwangi, seperti pertanian, industri, dan pariwisata, mengalami ekspansi yang positif. Tren ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perekonomian daerah yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun nilai PDRB per kapita meningkat, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini merata di seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya terpusat pada sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta penguatan sektor produktif agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator utama yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Indikator ini sangat penting karena mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja serta efektivitas kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Urgensi dari TPT terletak pada dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, karena tingginya tingkat pengangguran dapat berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan, berkurangnya daya beli masyarakat, serta tekanan terhadap program jaminan sosial. Oleh karena itu, pemantauan TPT menjadi krusial bagi pemerintah daerah dan nasional dalam merancang strategi yang tepat guna mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren penurunan selama periode 2020-2024. Pada awal periode, angka pengangguran di Banyuwangi relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional dan Provinsi. Peningkatan terjadi pada tahun 2021, yang mencerminkan dampak pemulihan ekonomi pasca-pandemi, namun tren ini kembali menurun secara konsisten dalam tahun-tahun berikutnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada 2023-2024, di mana TPT Banyuwangi turun menjadi 4,03%, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (4,19%) dan nasional (4,91%).

TPT mengalami penurunan bukan karena peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, melainkan disebabkan oleh turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Penurunan TPAK menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, mengalami penurunan. Akibatnya, meskipun jumlah pengangguran turun secara absolut, hal ini lebih disebabkan oleh berkurangnya jumlah pencari kerja daripada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penurunan TPT dalam konteks ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, melainkan perlu dicermati sebagai indikasi potensi menurunnya partisipasi produktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, penurunan TPT juga dapat dimaknai sebagai hasil dari membaiknya link and match antara sektor pendidikan dan industri, terutama terlihat dari meningkatnya keterhubungan antara lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Fenomena ini berkontribusi terhadap penurunan TPT secara struktural, karena semakin banyak lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja sesuai bidang keahliannya. Dengan demikian, perbaikan kualitas penyaluran tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi faktor penting dalam mendukung penurunan TPT secara lebih berkelanjutan.

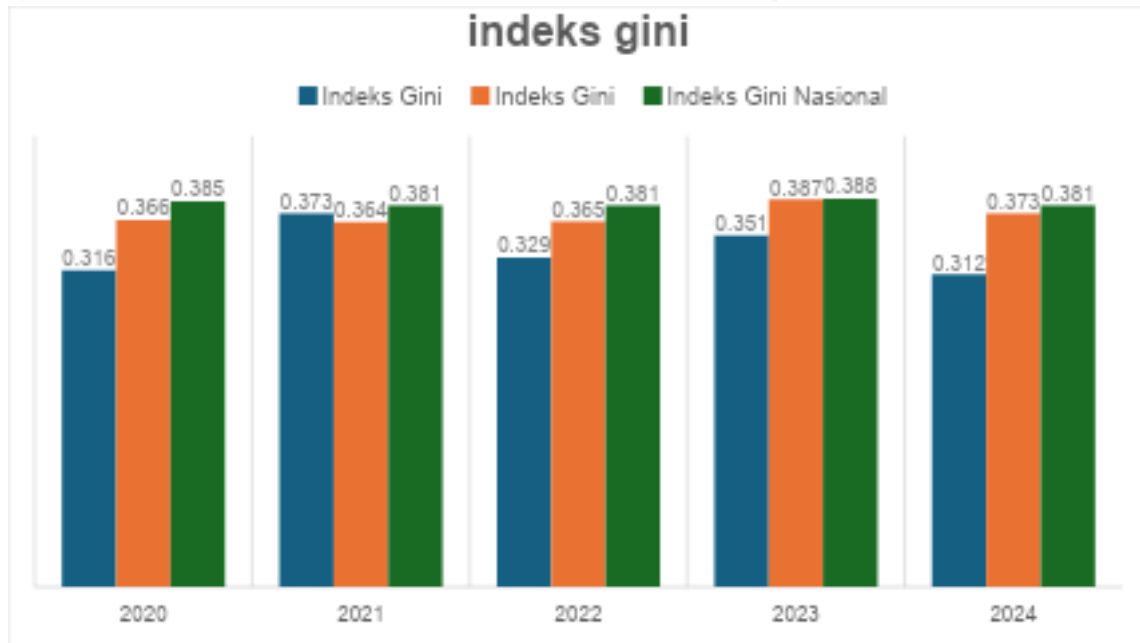
Meski demikian, penurunan TPT belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan tetap perlu menekankan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, penyediaan pekerjaan layak, serta penyesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan partisipasi angkatan kerja muda dan perempuan, agar penurunan pengangguran juga berdampak terhadap kelompok yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap kesempatan kerja.

D. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan semakin mendekati 1 menandakan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks ini memiliki urgensi yang besar dalam evaluasi kebijakan ekonomi dan sosial, karena ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, menurunnya mobilitas ekonomi, serta berkurangnya efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan Indeks Gini menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan pemerataan ekonomi serta



mengidentifikasi strategi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial. Untuk mengetahui Indeks Gini Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.27 Indeks Gini Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Indeks Gini Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024, dari 0,316 pada tahun 2020 menjadi 0,312 pada tahun 2024, dengan fluktuasi moderat di tahun-tahun tengah. Penurunan ini mencerminkan membaiknya tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2021, sempat terjadi kenaikan menjadi 0,373, bahkan sedikit melampaui rata-rata Jawa Timur. Namun sejak 2022, tren ketimpangan berbalik menurun secara konsisten, mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan secara lebih merata oleh berbagai kelompok masyarakat.

Kondisi ini menjadi capaian yang positif, apalagi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, yang justru mengalami peningkatan ketimpangan pada 2023 hingga mencapai indeks Gini tertinggi di periode tersebut (0,387), sebelum kembali turun menjadi 0,373 pada 2024. Selama periode 2022–2024, indeks Gini Banyuwangi selalu berada di bawah rata-rata provinsi, mencerminkan kinerja distribusi pendapatan yang lebih baik di tingkat kabupaten.

Penurunan indeks Gini di Banyuwangi pasca 2021 berpotensi erat kaitannya dengan membaiknya penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan kelompok menengah-bawah melalui UMKM dan sektor informal, serta berbagai program perlindungan sosial yang bersifat inklusif. Artinya, kebijakan ekonomi yang dijalankan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.



Namun demikian, nilai indeks Gini sebesar 0,312 pada tahun 2024 masih menandakan bahwa ketimpangan belum sepenuhnya hilang. Oleh karena itu, upaya ke depan perlu difokuskan pada peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi (modal, keterampilan, pasar), terutama bagi kelompok rentan, serta penguatan jaminan sosial dan inklusi keuangan yang mendorong mobilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

E. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan dilihat dari persentase penduduk miskin suatu daerah yaitu indikator utama yang menggambarkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditentukan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. Urgensi dari indikator ini terletak pada fungsinya sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun nasional. Penurunan angka kemiskinan mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan indikator ini sangat penting dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis. Berikut ini merupakan perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar 2.28 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

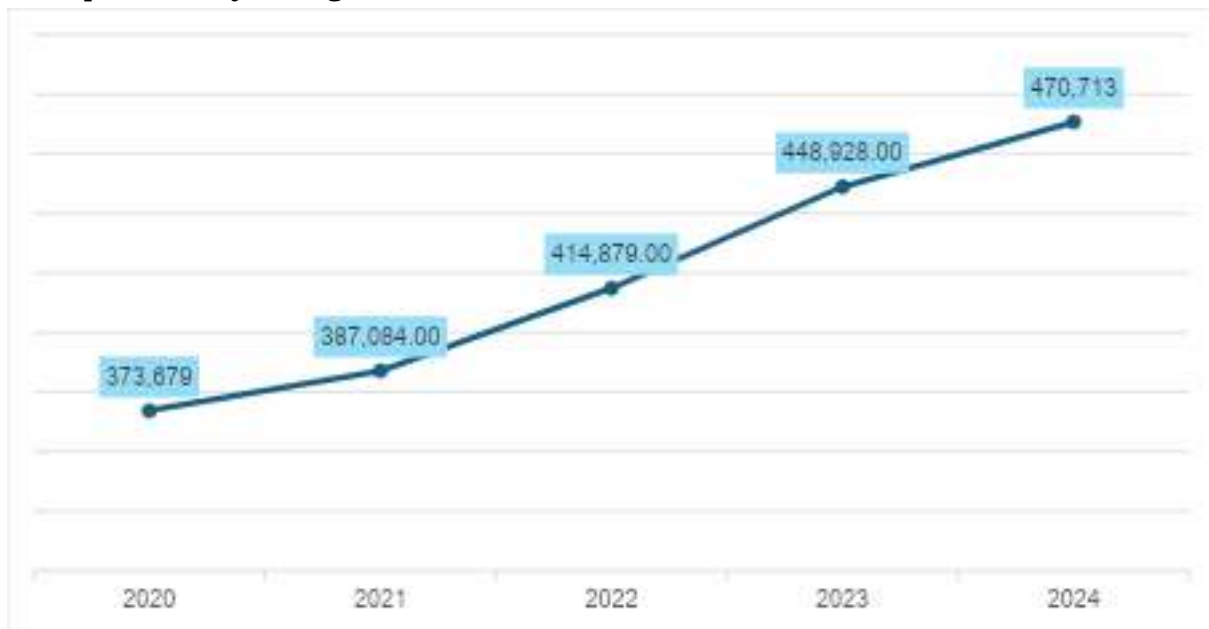
Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren penurunan selama periode 2020-2024, sejalan dengan tren yang terjadi di Jawa Timur dan tingkat nasional. Pada tahun 2020, angka kemiskinan Banyuwangi tercatat sebesar 8,06%, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (11,46%) dan nasional (10,19%). Persentase ini relatif stabil pada tahun 2021 di 8,07%, dan Jawa Timur mengalami penurunan menjadi 10,59%, dan nasional menurun ke



9,71%. Mulai tahun 2022, tren penurunan di Banyuwangi semakin terlihat dengan angka 7,51%, lebih baik dibandingkan Jawa Timur (10,49%) dan nasional (9,54%). Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dengan angka kemiskinan Banyuwangi turun menjadi 7,34%, sementara Jawa Timur 10,35%, dan nasional 9,36%. Penurunan semakin signifikan pada tahun 2024 dengan persentase 6,54% di Banyuwangi, sedangkan Jawa Timur 9,56%, dan nasional 9,03%.

Penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi lebih tajam dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur dan nasional. Ini menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat daerah. Namun, meskipun tren ini positif, perlu strategi yang lebih berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan tidak kembali menjadi rentan, terutama menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren penurunan, tantangan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat tetap ada, terutama terkait dengan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam dinamika kemiskinan adalah garis kemiskinan, yang mencerminkan perubahan biaya minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Berikut merupakan garis kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.



Gambar 2.29 Garis Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Data garis kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan biaya minimum yang diperlukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, termasuk pangan, sandang, dan perumahan. Peningkatan garis kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inflasi, perubahan pola konsumsi, serta peningkatan harga barang dan jasa esensial. Meskipun kenaikan garis kemiskinan dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam standar hidup dan daya beli masyarakat, hal ini juga menunjukkan perlunya



kebijakan ekonomi yang mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat miskin tetap terjaga. Oleh karena itu, strategi yang berfokus pada stabilitas harga, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan program perlindungan sosial menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Indikator ini menjadi sangat penting karena mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi murni seperti pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemiskinan. IPM juga digunakan sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik tingkat kesejahteraan dan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta pendapatan yang layak. Berikut ini merupakan data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Manusia Hasil Long Form SP2020

Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi mengalami tren peningkatan selama periode 2020-2024. Pada awal periode, IPM Banyuwangi berada di angka 71,85, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (73,04) dan

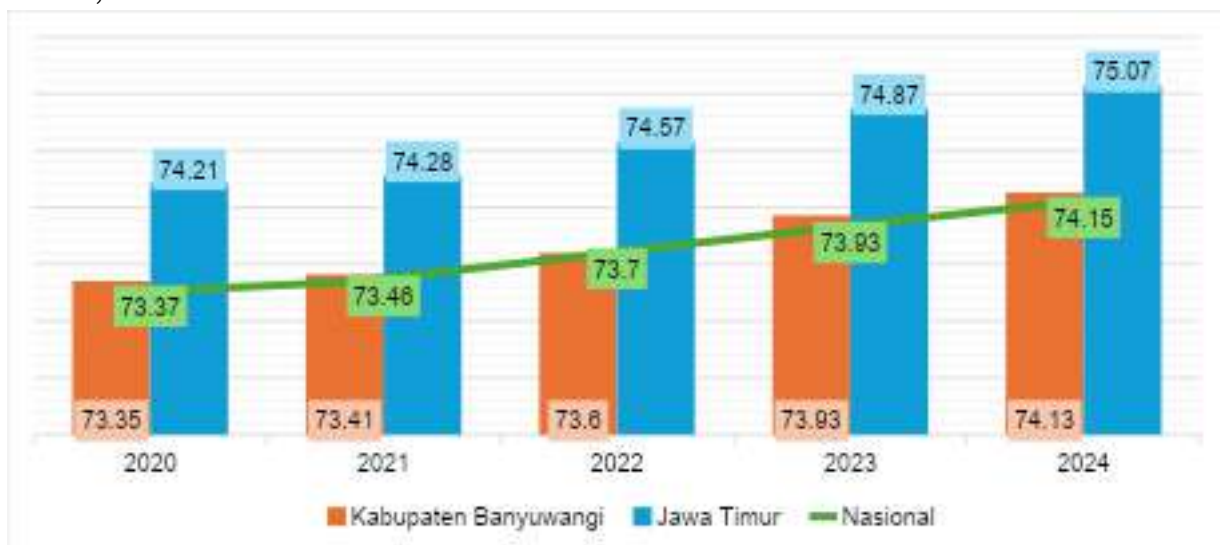


nasional (72,81). Tren kenaikan terus berlanjut setiap tahun, dengan peningkatan yang cukup stabil hingga mencapai 74,3 pada tahun 2024. Kenaikan IPM Banyuwangi menunjukkan perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, IPM Banyuwangi masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur dan nasional, yang masing-masing mencapai 75,35 dan 75,02 pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Banyuwangi, meskipun masih terdapat kesenjangan dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Untuk mendorong pertumbuhan IPM yang lebih cepat, diperlukan peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan berkualitas, serta penguatan daya beli masyarakat guna mempercepat kesejahteraan yang lebih merata.

2.1.3.2. KESEHATAN UNTUK SEMUA

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata lama hidup seseorang berdasarkan tren kesehatan dan mortalitas di suatu wilayah. Indikator ini sangat penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat, terutama terkait dengan akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi usia harapan hidup, semakin baik kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu daerah, yang mencerminkan efektivitas kebijakan di bidang kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, pemantauan UHH menjadi krusial bagi pemerintah dalam mengevaluasi program kesehatan serta merancang kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan data Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar 2.31 Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

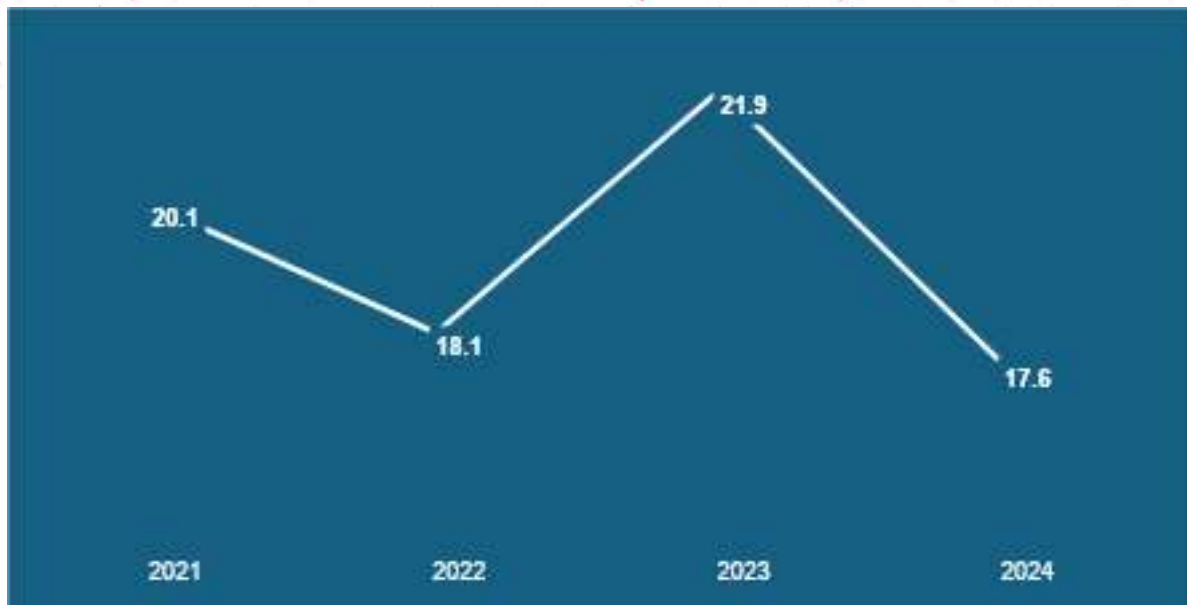


Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awal periode, UHH Banyuwangi berada di 73,35 tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan angka nasional (73,37 tahun) dan Jawa Timur (74,21 tahun). Tren kenaikan terus terjadi hingga tahun 2024, di mana UHH Banyuwangi mencapai 74,13 tahun, masih di bawah Jawa Timur (75,07 tahun) dan nasional (74,15 tahun). Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023-2024, mencerminkan perbaikan dalam akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Banyuwangi merupakan hasil dari sinergi berbagai program dan layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Target indikator UHH dapat tercapai berkat kontribusi dari empat bidang utama dan dua belas seksi yang menangani program kesehatan secara terintegrasi. Dukungan dari dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 45 Puskesmas, satu Laboratorium Kesehatan Daerah, dan satu Instalasi Farmasi Kabupaten juga menjadi faktor penting dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Kolaborasi lintas unit ini memastikan bahwa setiap aspek kesehatan masyarakat, mulai dari pencegahan, pelayanan kuratif, hingga penyediaan obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium, dapat berjalan optimal. Indikator-indikator program kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan menjadi bagian dari indikator kinerja eselon yang harus dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

B. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator penting dalam menilai status gizi dan kualitas kesehatan anak di suatu wilayah. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam periode panjang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Indikator ini memiliki urgensi tinggi karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan, produktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Pemerintah secara nasional dan daerah terus berupaya menekan angka stunting melalui intervensi gizi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pola asuh dan pola makan yang sehat. Oleh karena itu, pemantauan angka prevalensi stunting sangat penting untuk menilai efektivitas program kesehatan dan gizi yang telah dijalankan. Data Prevalensi Stunting Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024 disajikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2.32 Prevalensi Stunting di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Data prevalensi stunting di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya fluktuasi dalam periode 2021 hingga 2024. Terjadi penurunan pada tahun 2022 sebelum kembali mengalami peningkatan dalam tahun 2023 menjadi sebesar 21,9%, dan tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 17,6%. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Banyuwangi masih belum mencapai target yang ditetapkan, dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensi yang saling terkait. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya pemahaman yang seragam terkait strategi penanganan stunting di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, maupun masyarakat. Kurangnya koordinasi antarsektor menyebabkan integrasi program penanggulangan stunting tidak berjalan maksimal, sehingga intervensi gizi spesifik dan sensitif tidak terlaksana secara optimal di lapangan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman orang tua mengenai gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang balita, serta pola pengasuhan yang kurang baik, turut menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini.

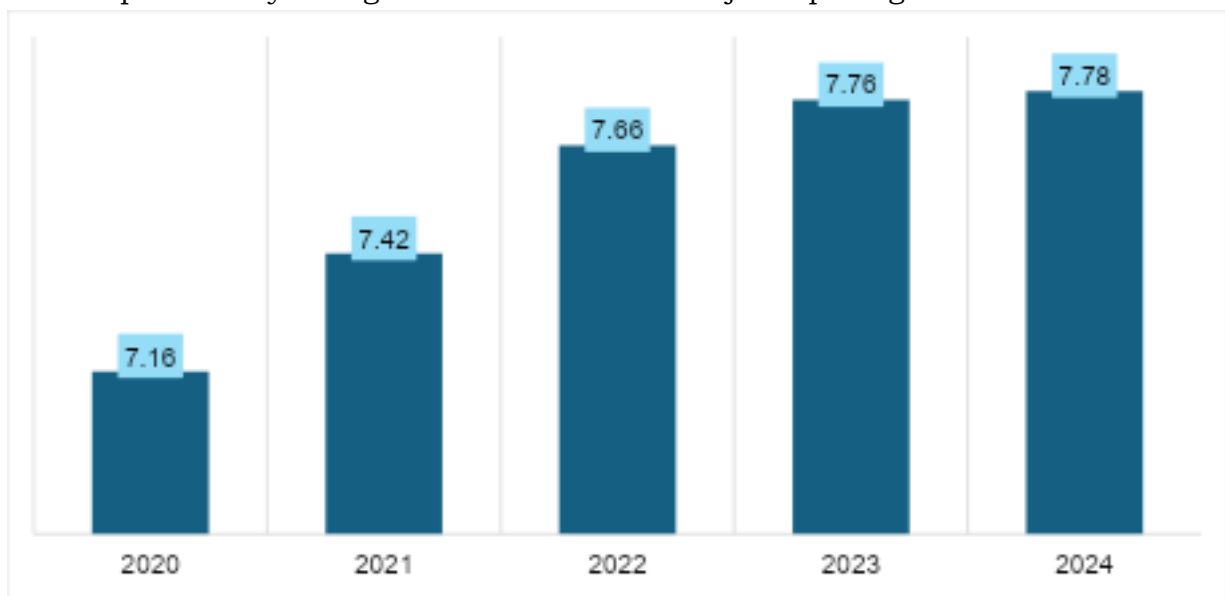
Faktor ekonomi juga berperan signifikan, di mana keterbatasan penghasilan keluarga menyebabkan alokasi anggaran rumah tangga untuk pemenuhan nutrisi anak tidak memadai. Masalah sanitasi dan kesehatan lingkungan yang belum terkelola dengan baik turut memperbesar risiko stunting, karena balita lebih rentan terhadap penyakit infeksi yang berdampak pada penyerapan gizi. Capaian indikator stunting tahun ini juga dipengaruhi oleh metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI), di mana hasil yang diperoleh sangat bergantung pada kualitas dan representativitas sampel yang diambil.



2.1.3.3. PENDIDIKAN KUALITAS YANG MERATA

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam suatu wilayah. Indikator ini menjadi penting karena mencerminkan tingkat aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Semakin tinggi angka RLS, semakin besar peluang masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan RLS menjadi penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan serta pembangunan sosial-ekonomi suatu daerah. Data terkait Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

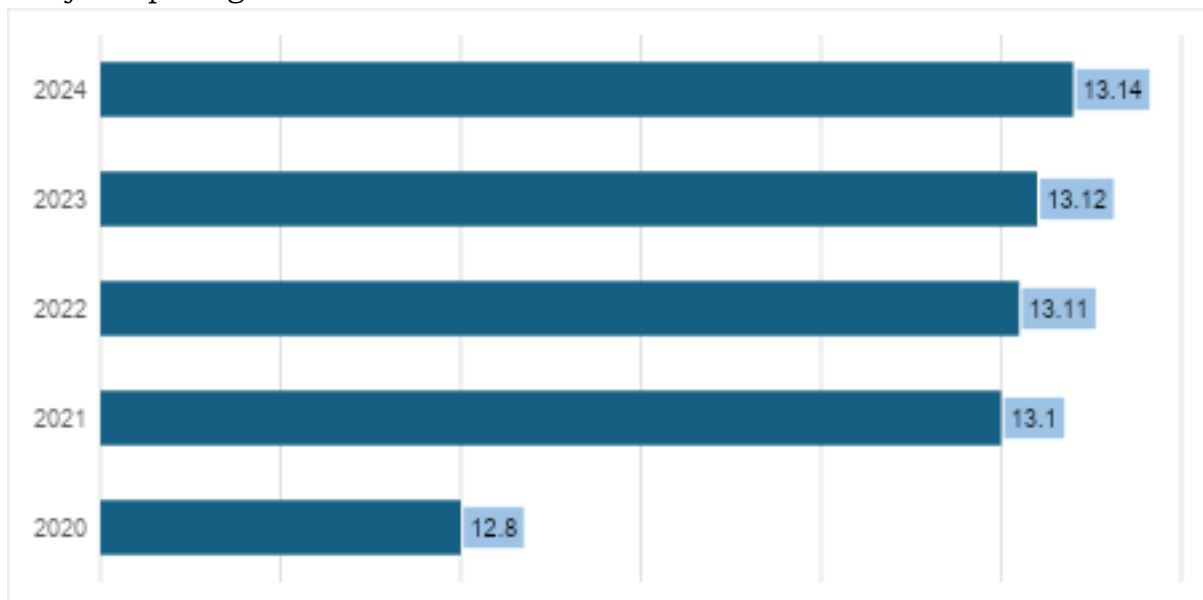
Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari 7,16 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,78 tahun pada tahun 2024. Peningkatan cukup stabil terjadi setiap tahun, dengan kenaikan signifikan pada 2021-2022 ketika angka RLS meningkat dari 7,42 tahun menjadi 7,66 tahun. Tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menempuh pendidikan formal. Meskipun demikian, angka RLS di Banyuwangi masih menunjukkan bahwa rata-rata penduduk belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP atau setara. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih intensif untuk mendorong peningkatan partisipasi pendidikan di jenjang menengah dan tinggi, seperti program beasiswa, penyediaan sekolah yang lebih merata, serta peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil agar RLS dapat terus meningkat secara signifikan.



B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (selanjutnya disebut HLS) menunjukkan rata-rata lama waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan formal sepanjang hidupnya, jika pola partisipasi sekolah saat ini terus berlanjut. Dalam konteks pembangunan, HLS merefleksikan aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan di suatu wilayah. Nilai HLS yang tinggi mengindikasikan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang merata tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat daya saing daerah secara sosial dan ekonomi. Data terkait HLS di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.34 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,8 tahun, dan terus meningkat hingga mencapai 13,14 tahun pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam sektor pendidikan, yang berarti anak-anak di Banyuwangi diproyeksikan akan menempuh pendidikan selama lebih dari 13 tahun—setara dengan jenjang SMA/MA/ sederajat. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan standar ideal menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), angka ideal HLS seharusnya berkisar 15 tahun atau lebih, yang mencakup pendidikan hingga perguruan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian HLS Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah target ideal tersebut.

Meski demikian, peningkatan tren capaian HLS di Kabupaten Banyuwangi telah berhasil didorong melalui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dikenal aktif mendorong transformasi digital dalam pendidikan, penguatan akses pendidikan melalui program



“Banyuwangi Mengajar”, serta peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, program beasiswa untuk siswa kurang mampu juga menjadi salah satu kunci meningkatkan partisipasi sekolah. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kualitas pendidikan juga meningkat seiring dengan lamanya anak-anak bersekolah.

C. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi mencerminkan kemampuan dasar siswa dalam membaca dan berhitung, yang menjadi fondasi penting bagi kualitas pendidikan. Peningkatan dua indikator ini menunjukkan sistem pendidikan yang lebih baik dan berdampak positif pada kesiapan siswa melanjutkan pendidikan serta memasuki dunia kerja. Hal ini turut berkontribusi pada terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan capaian angka literasi/numerasi di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2.22 Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Skor kemampuan Literasi SD	54.99	60.18	65.78	67.67
Skor kemampuan Numerasi SD	39.42	45.96	54.51	60,14
Skor kemampuan Literasi SMP	61.97	66.19	73.51	75,95
Skor kemampuan Numerasi SMP	54.21	55.81	64.52	65,59

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Data literasi dan numerasi Kabupaten Banyuwangi periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Skor kemampuan literasi di tingkat SD meningkat dari 54,99 pada tahun 2021 menjadi 67,67 pada tahun 2024, sedangkan skor numerasi SD naik dari 39,42 menjadi 60,14 pada periode yang sama. Tren serupa terlihat di tingkat SMP, di mana skor literasi naik signifikan dari 61,97 pada tahun 2021 menjadi 75,95 pada 2024, sementara skor numerasi meningkat dari 54,21 menjadi 65,59. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pembelajaran yang berdampak positif terhadap pemahaman membaca, menulis, berhitung, dan pemecahan masalah siswa.

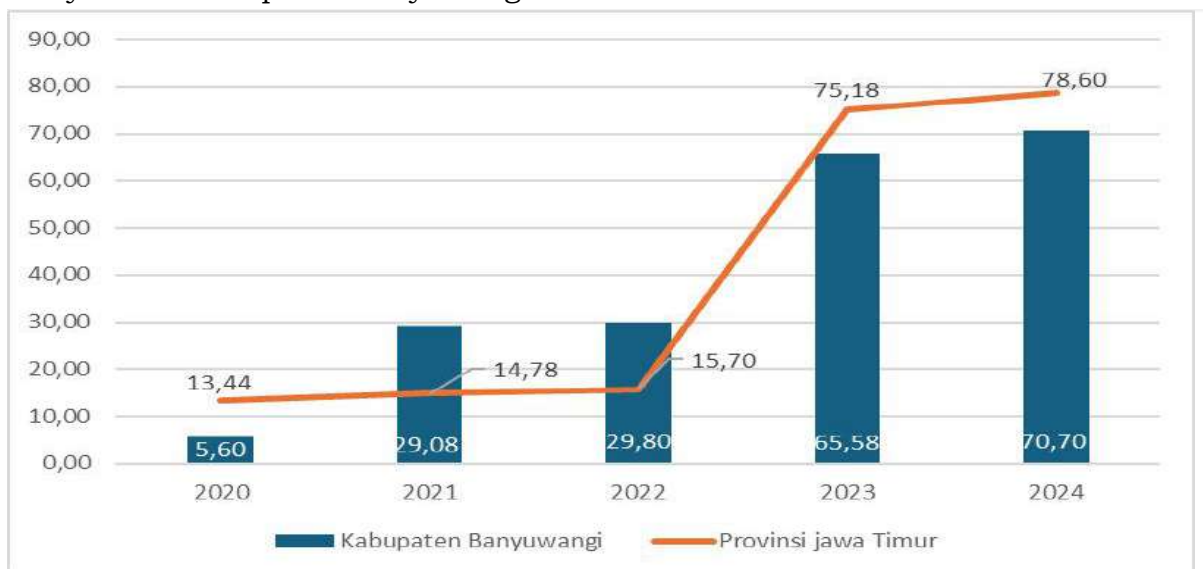
Faktor pendukung peningkatan literasi antara lain adanya pelatihan-pelatihan terkait pemanfaatan konten digital untuk pembelajaran. Guru dan siswa didorong untuk membuat karya-karya kreatif berbasis literasi yang kemudian dapat dipublikasikan melalui media sosial, sehingga menumbuhkan minat baca-tulis sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan produktif siswa. Pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik, membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.



Sementara itu, peningkatan numerasi tidak terlepas dari inovasi metode pembelajaran matematika yang dikembangkan melalui program "Gasing" (Gampang, Asyik, Menyenangkan). Metode ini dirancang agar pembelajaran matematika menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan menyenangkan bagi siswa. Pendekatan ini membantu mengurangi rasa takut terhadap matematika, meningkatkan keterampilan berhitung, serta kemampuan logika dan pemecahan masalah secara bertahap. Kombinasi antara pelatihan digital dalam literasi dan inovasi metode Gasing dalam numerasi menjadi strategi efektif yang berkontribusi terhadap kenaikan skor literasi dan numerasi di Kabupaten Banyuwangi.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan membaca, memahami, dan mengakses informasi dalam masyarakat. Indikator ini menjadi sangat penting karena literasi yang baik berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, serta memperkuat daya saing ekonomi suatu daerah. Literasi yang tinggi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja, kesejahteraan sosial, serta penguatan demokrasi melalui masyarakat yang lebih kritis dan terinformasi. Oleh karena itu, pemantauan indeks literasi sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan dan program peningkatan kapasitas masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini merupakan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.



Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan pola perkembangan yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Setelah mengalami peningkatan signifikan dari 5,6 pada tahun 2020 menjadi 29,08



pada tahun 2021, dan indeks ini melonjak tajam hingga mencapai puncaknya di angka 70,70 pada tahun 2024. Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 telah mencapai nilai maksimal pada aspek ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan yang dibina sesuai NSP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan anggota perpustakaan dibandingkan standar ideal yang ditentukan. Berdasarkan tren peningkatan di atas, dapat dilihat komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyediakan ruang dan penguatan literasi bagi masyarakatnya. Bila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur, IPLM Kabupaten Banyuwangi masih berada dibawah nilai Provinsi Jawa Timur. Masih terdapat sejumlah tantangan yang tersisa terutama terkait ketercukupan koleksi perpustakaan dan tingkat kunjungan masyarakat per hari diikuti belum sepenuhnya merata layanan perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih konsisten dan terarah dalam meningkatkan literasi, seperti penguatan perpustakaan digital, penyediaan akses bacaan yang lebih luas, serta integrasi literasi dalam berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi di Banyuwangi.

2.1.3.4. PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

A. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengakses layanan kesehatan melalui program JKN-KIS. Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani oleh biaya perawatan. Urgensi indikator ini terletak pada fungsinya sebagai bagian dari perlindungan sosial untuk menjamin kesejahteraan kesehatan masyarakat, mengurangi angka kesakitan, serta meningkatkan produktivitas penduduk. Dengan jumlah penerima yang fluktuatif, analisis terhadap tren PBI JKN menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas program ini dalam mencakup kelompok sasaran yang membutuhkan. Berikut ini merupakan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024:

Tabel 2.23 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	-	516.140	483.955	498.625	70.631
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Aktif	56.52%	47.08%	52.56%	68.47%	-

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Jumlah penerima bantuan iuran JKN di Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah penerima tercatat



sebanyak 516.140 orang, kemudian menurun cukup signifikan pada 2022 menjadi 483.955 orang. Namun, pada tahun 2023 jumlah penerima kembali meningkat menjadi 498.625 orang, menunjukkan adanya penyesuaian dalam cakupan bantuan sosial kesehatan. Di tahun 2024, jumlah penerima kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 70.631. Penurunan jumlah penerima pada di tahun 2022 dan 2024 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbaikan sistem verifikasi penerima manfaat, pergeseran status ekonomi masyarakat, atau adanya kebijakan pengurangan subsidi. Sementara itu, kenaikan kembali pada 2023 mengindikasikan adanya perluasan cakupan atau peningkatan kebutuhan terhadap bantuan kesehatan bagi kelompok rentan. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, program bantuan iuran JKN masih menjadi instrumen penting dalam menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Banyuwangi. Untuk memastikan efektivitas program ini, perlu ada evaluasi yang lebih mendalam terkait validasi penerima manfaat serta keberlanjutan pendanaan agar bantuan ini tetap tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung sistem kesehatan daerah.

Di sisi lain, persentase pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif program Jamsostek di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan fluktuasi selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 56,52%, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 47,08% pada tahun berikutnya. Setelah itu, terjadi pemulihan dengan kenaikan menjadi 52,56%, dan lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 68,47%, yang menunjukkan peningkatan kesadaran serta kepesertaan pekerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Kenaikan ini dapat mencerminkan keberhasilan program sosialisasi, perluasan cakupan kepesertaan, serta peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya, meskipun data terbaru belum tersedia untuk mengonfirmasi keberlanjutan tren positif ini.

2.1.3.5. BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A. Indeks Harmoni

Indeks Harmoni adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan, toleransi, dan kualitas hubungan sosial di suatu wilayah, yang mencerminkan kemampuan masyarakat hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Indeks ini memadukan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kondisi ekonomi, interaksi sosial, hingga penghargaan terhadap nilai budaya dan keberagaman. Pengukuran Indeks Harmoni menjadi penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang stabilitas sosial sebagai salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemantauan terhadap indeks ini menjadi kunci dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Harmoni terdiri dari empat dimensi utama, meliputi: **Dimensi Ekonomi**, yang menilai pemerataan dan inklusivitas pembangunan ekonomi; **Dimensi Sosial**, yang mengukur tingkat interaksi, solidaritas, dan kohesi sosial antarwarga; **Dimensi Budaya**, yang berfokus pada pelestarian kearifan lokal dan adaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan identitas; serta **Dimensi Keberagaman**, yang menilai tingkat toleransi dan penghargaan terhadap



perbedaan keyakinan. Keempat dimensi ini membentuk kerangka evaluasi yang komprehensif, menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis data, dan mendukung terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 2.36 Indeks Harmoni Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2025

Pada tahun 2025, capaian Indeks Harmoni Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 7,03 dari 9, yang masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Skor ini mencerminkan persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat terhadap berbagai aspek sosial di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun tergolong sangat baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam menjaga keseimbangan antarvariabel serta mengatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kohesivitas sosial dan dinamika masyarakat secara keseluruhan.

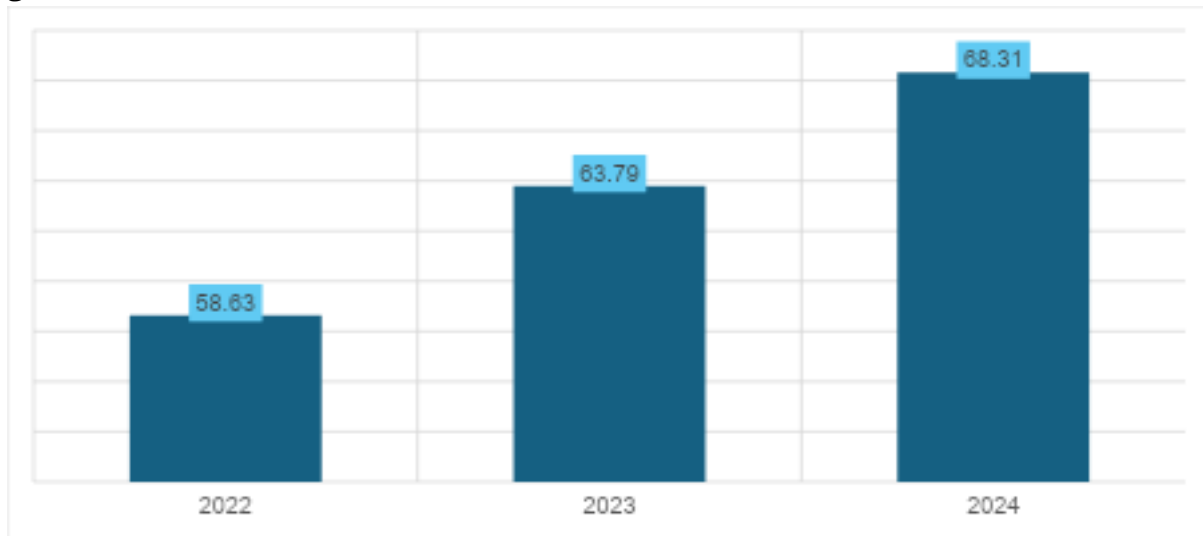
Pada tingkat dimensi, Dimensi Ekonomi memperoleh skor 6,81 yang masuk dalam kategori “Baik”, menunjukkan adanya tantangan dalam aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dimensi Sosial (7,00) kategori “Sangat Baik”, Dimensi Budaya (7,08) kategori “Sangat Baik”, dan Dimensi Keberagamaan (7,28) berada dalam kategori “Sangat Baik”, mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang relatif stabil dengan tingkat harmoni keagamaan yang tinggi.

B. Indeks Budaya Lokal

Indeks Budaya Lokal merupakan indikator yang mengukur tingkat pelestarian, partisipasi, serta keberlanjutan praktik budaya di suatu daerah. Indikator ini sangat penting karena mencerminkan sejauh mana masyarakat mempertahankan nilai-nilai budaya, tradisi, dan identitas lokal dalam kehidupan sehari-hari. Budaya lokal yang kuat dapat menjadi daya tarik wisata, meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap identitas daerah, serta memperkuat kohesi sosial. Pemantauan terhadap indeks ini membantu dalam



mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan budaya dan meningkatkan peran budaya dalam pembangunan daerah. Data Indeks Budaya Lokal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024 disajikan dalam grafik di bawah ini.



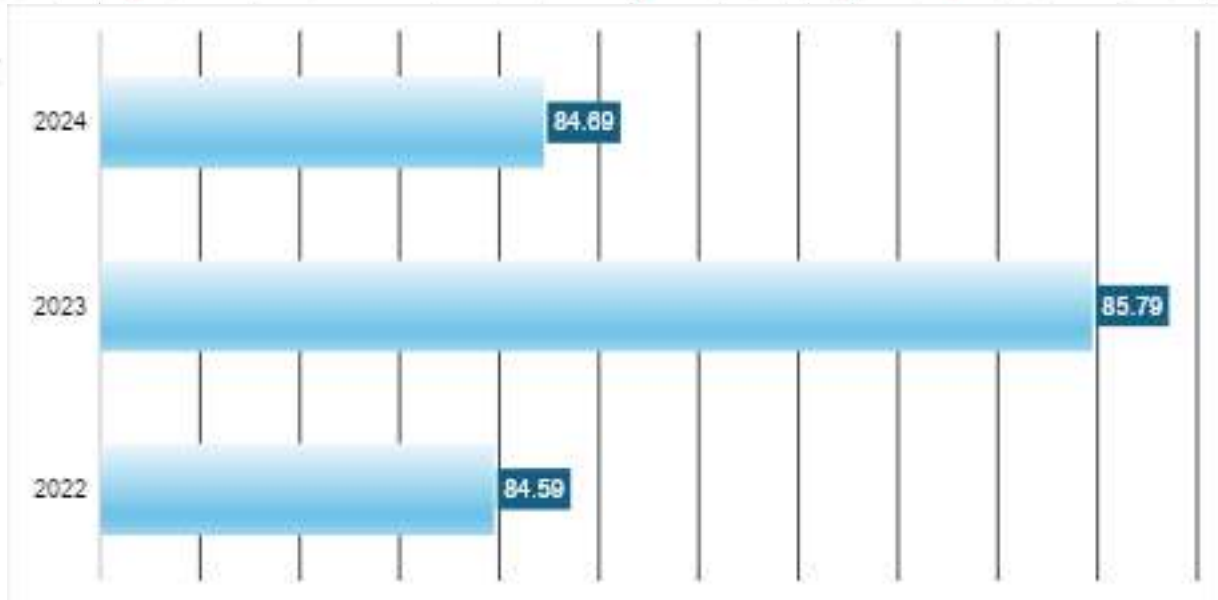
Gambar 2.37 Indeks Budaya Lokal di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025

Indeks Budaya Lokal di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan terbesar terjadi pada periode 2022-2023, yang mengindikasikan adanya penguatan dalam upaya pelestarian budaya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta efektivitas kebijakan yang mendukung ekosistem budaya lokal. Tren positif ini menunjukkan bahwa Banyuwangi semakin memperkuat budaya lokalnya, baik melalui program pelestarian, festival budaya, maupun peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks ini, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam mengembangkan budaya lokal, termasuk integrasi budaya dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, serta penguatan edukasi budaya bagi generasi muda agar warisan budaya tetap lestari di masa depan.

C. Indeks Kepedulian Sosial

Indeks Kepedulian Sosial merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial, solidaritas antarwarga, serta partisipasi dalam kegiatan berbasis komunitas. Indikator ini sangat penting karena mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap sesama, baik dalam bentuk gotong royong, bantuan sosial, maupun keterlibatan dalam program kesejahteraan sosial. Kepedulian sosial yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan ketahanan sosial, serta memperkuat jejaring sosial antarindividu dan kelompok. Oleh karena itu, pemantauan indeks ini menjadi penting dalam menilai efektivitas program sosial serta memastikan keberlanjutan pembangunan berbasis komunitas di suatu daerah.



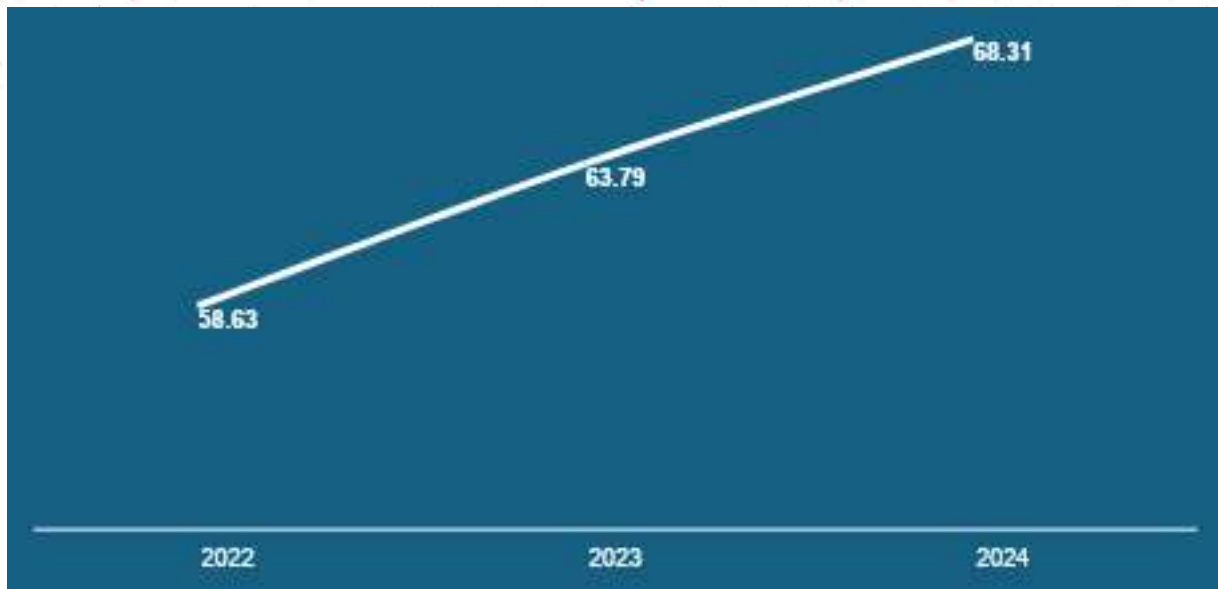
Gambar 2.38 Indeks Kepedulian Sosial di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025

Indeks Kepedulian Sosial di Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks ini tercatat sebesar 84,59, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 menjadi 85,79. Namun, pada tahun 2024, indeks ini sedikit menurun menjadi 84,69, meskipun masih berada dalam kategori tinggi. Kenaikan yang cukup tajam pada 2023 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, baik dalam bentuk filantropi, gotong royong, maupun dukungan terhadap kelompok rentan. Penurunan pada 2024, meskipun tidak terlalu besar, dapat mengindikasikan perlunya penguatan kembali program yang mendorong keterlibatan sosial masyarakat. Tren ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial di Banyuwangi masih terjaga dengan baik, tetapi perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa keterlibatan sosial tetap berkelanjutan. Program-program penguatan komunitas, peningkatan kesadaran sosial melalui edukasi, serta fasilitasi kegiatan sosial berbasis masyarakat perlu terus diperkuat agar indeks kepedulian sosial tetap stabil atau meningkat di tahun-tahun mendatang.

D. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator yang mengukur sejauh mana kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Indikator ini mencakup aspek pelestarian warisan budaya, penguatan ekosistem budaya, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kebudayaan, serta integrasi budaya dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan meningkatnya pembangunan kebudayaan, masyarakat dapat semakin terlibat dalam aktivitas budaya yang produktif, memperkuat rasa kebersamaan, serta meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan dan investor di sektor ekonomi kreatif. Berikut ini merupakan data Indeks Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024.



Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Tren pertumbuhan ini menunjukkan adanya upaya yang semakin kuat dalam pelestarian budaya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta integrasi budaya dalam sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan yang cukup konsisten dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan kebudayaan di Banyuwangi berjalan dengan baik, baik dalam bentuk program edukasi budaya, penguatan komunitas seni, maupun fasilitasi kegiatan budaya berbasis masyarakat. Namun, agar pertumbuhan ini tetap berkelanjutan, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap program budaya, memperkuat peran teknologi dalam promosi kebudayaan, serta mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif agar kebudayaan tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

2.1.3.6. KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A. Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Ukuran pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Berikutnya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja



anak, dan anak terlantar. IPA-IPHA-IPKA, merupakan dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. Berikut capaian IPA Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2023:

Tabel 2.24 Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2023

Tahun	IPA	IPHA	IPKA
2021	77.19	67.49	66.01
2022	61.88	63.87	63.84
2023	79.26	80.32	73.38

Sumber: Dinas Sosial PPKB & BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

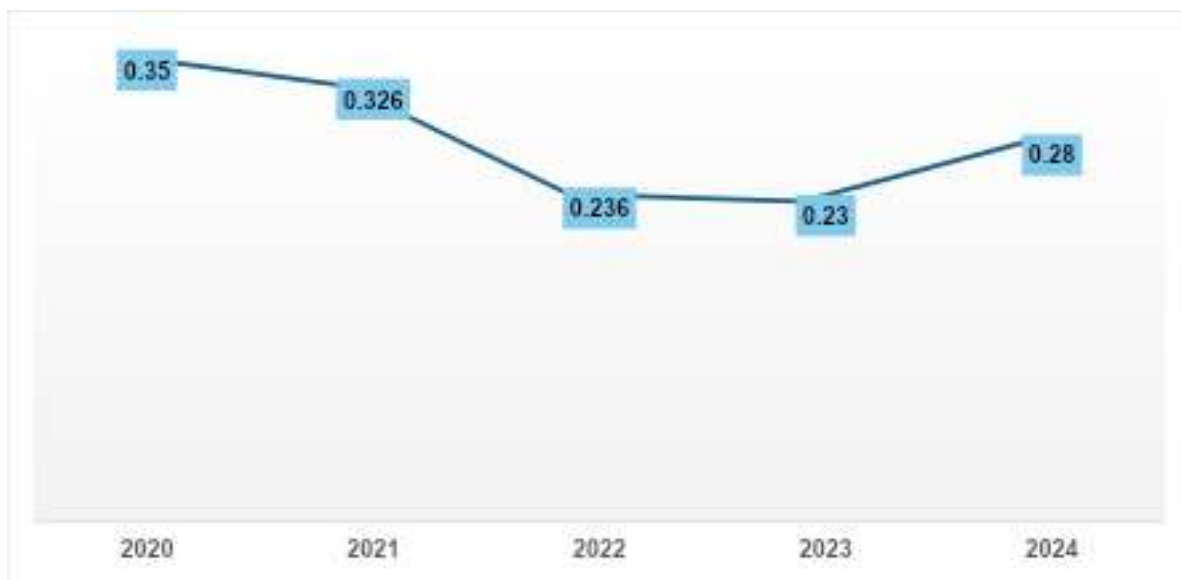
Pergerakan capaian IPA, IPHA, dan IPKA Kabupaten Banyuwangi tahun 2021–2023 menunjukkan adanya dinamika kebijakan yang cukup tajam, yang mencerminkan perubahan prioritas, efektivitas intervensi, dan kapasitas pelaksanaan program di lapangan. Penurunan signifikan IPA dan IPKA pada 2022, bersamaan dengan pelemahan IPHA, mengindikasikan bahwa aspek pemberdayaan gender dan perlindungan anak sempat mengalami tekanan. Faktor penyebabnya dapat mencakup keterbatasan daya dukung anggaran, berkurangnya jangkauan program lapangan, atau melemahnya koordinasi lintas sektor pada periode transisi kebijakan. Fenomena ini penting dicermati karena indeks-indeks tersebut sangat bergantung pada kesinambungan program dan komitmen aktor kelembagaan, sehingga setiap gangguan dapat langsung tercermin dalam capaian tahunan.

Pemulihan yang terjadi pada 2023, dengan lonjakan IPA, IPHA, dan IPKA yang melampaui capaian 2021, memberi sinyal bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan bersifat adaptif dan responsif terhadap evaluasi tahun sebelumnya. Kenaikan yang konsisten di ketiga indeks tersebut menunjukkan bahwa strategi yang ditempuh tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berhasil mengintegrasikan pendekatan holistik—misalnya penguatan regulasi, intensifikasi program pemberdayaan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, serta kemitraan dengan sektor nonpemerintah. Pola ini memperlihatkan bahwa ketika kebijakan dikelola dengan baik dan sumber daya didistribusikan secara tepat, capaian pembangunan sosial yang berperspektif gender dan ramah anak dapat dipacu secara signifikan, bahkan setelah periode penurunan.



B. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks ini merepresentasikan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang yang seharusnya dapat dinikmati secara setara oleh seluruh penduduk tanpa memandang gender. Angka IKG yang semakin kecil menunjukkan bahwa kesetaraan gender semakin tercapai. Oleh karena itu, pemantauan IKG menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender. Berikut ini disajikan data Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024.



Gambar 2.40 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banyuwangi pada periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan penurunan pada tiga tahun pertama, diikuti oleh kenaikan kembali pada 2024. Pada 2020 indeks tercatat sebesar 0,35, menurun menjadi 0,326 pada 2021 dan mencapai titik terendah sebesar 0,236 pada 2022. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender, baik dalam aspek partisipasi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Namun, penurunan yang tajam juga dapat mengindikasikan adanya kebijakan afirmatif atau intervensi program yang bersifat temporer sehingga dampaknya belum sepenuhnya stabil.

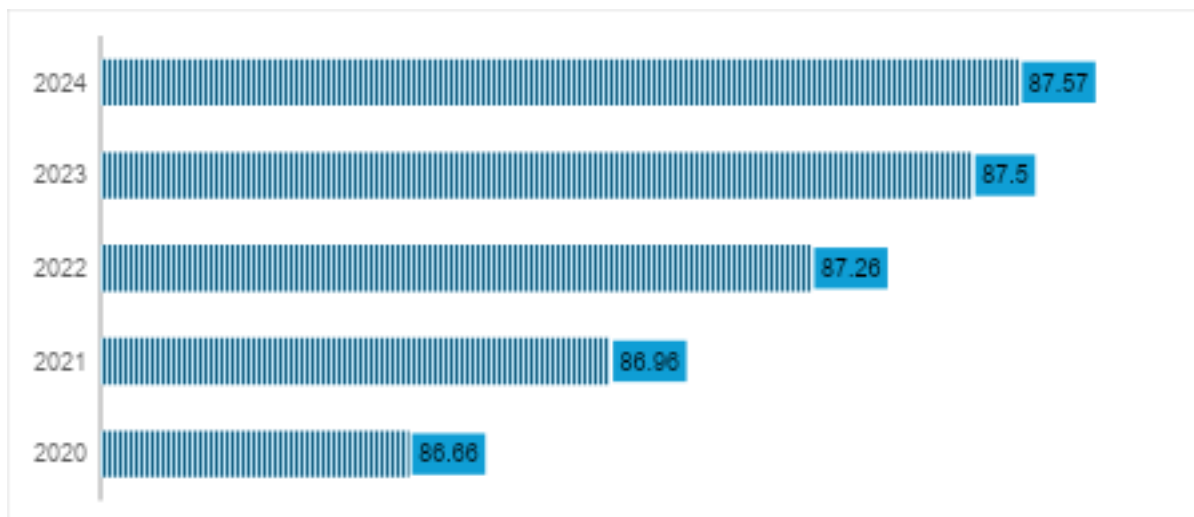
Memasuki 2023, indeks sedikit turun menjadi 0,23 sebelum meningkat kembali menjadi 0,28 pada 2024. Kenaikan pada 2024 dapat menunjukkan adanya tantangan baru atau pelemahan pada beberapa indikator penyusun, seperti partisipasi angkatan kerja perempuan, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, atau akses yang setara terhadap layanan publik.



Meskipun nilai indeks pada 2024 masih lebih rendah dibandingkan awal periode, tren kenaikan ini menjadi sinyal bahwa upaya pengurangan ketimpangan gender memerlukan strategi yang konsisten, terintegrasi lintas sektor, dan berkelanjutan agar capaian perbaikan dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan.

C. Indeks Pembangunan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan Indeks Pembangunan Gender yang telah diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) yang merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024:



Gambar 2.41 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya kesetaraan gender di Kabupaten Banyuwangi yang didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Setiap tahun, Pemerintah Banyuwangi menggelar “Rembuk Perempuan dan Anak” sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan perempuan dan anak dalam perencanaan program daerah yang diikuti oleh berbagai program unggulan pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Banyuwangi yaitu Program Kanggo Riko yang telah berhasil menyalurkan alat usaha khususnya bagi perempuan tulang punggung keluarga dan Program Warung Naik Kelas untuk pemilik warung kecil. Selain dari segi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan terus mengupayakan setiap perempuan di Kabupaten Banyuwangi untuk menempuh



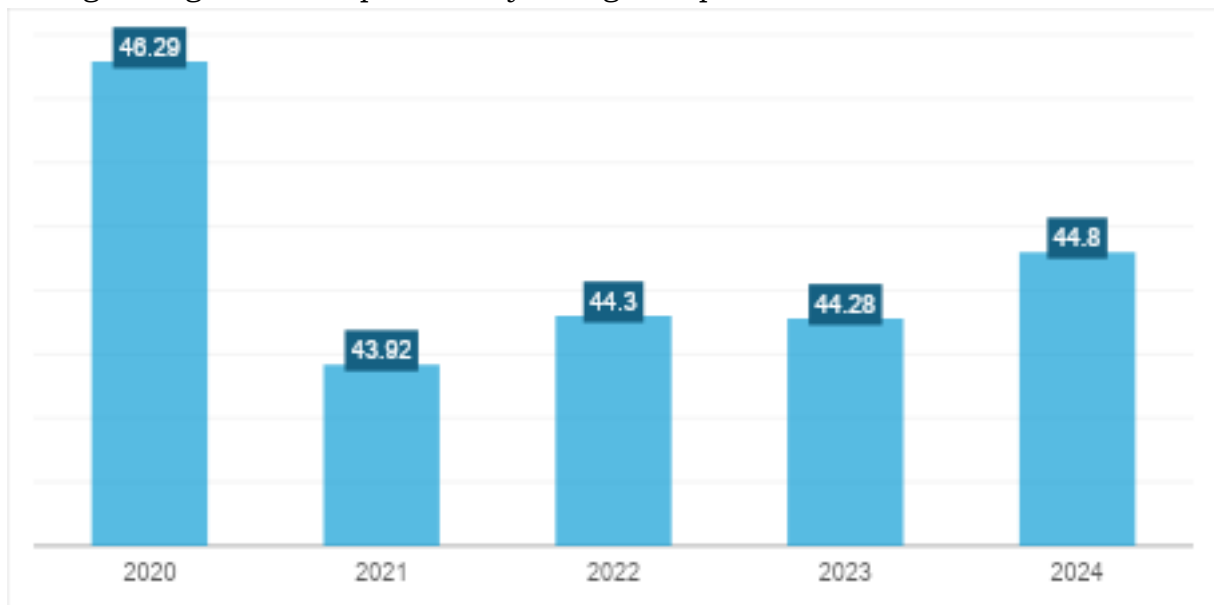
pendidikan di semua jenjang melalui Program Beasiswa Banyuwangi Cerdas yang mayoritas penerimanya adalah perempuan serta Program Posyandu Terintegrasi dan Ruang Rindu dalam layanan kesehatan. Peningkatan konsisten IPG Banyuwangi 2020–2024 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian budaya.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan adalah suatu indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, berikut merupakan capaian indikator Angka Ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi ada periode tahun 2020-2024.



Gambar 2.42 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terjadi tren yang fluktuatif terhadap angka ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi mendapat capaian tertingginya selama periode 2020-2024 dengan nilai sebesar 46,29. Fluktuasi capaian cenderung menurun ini terjadi mulai dari tahun 2021 dengan penurunan cukup signifikan menjadi sebesar 43,92, namun di tahun berikutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 44,3. Pada periode ini diakhiri dengan capaian sebesar 44,8, hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 44,28. Walaupun

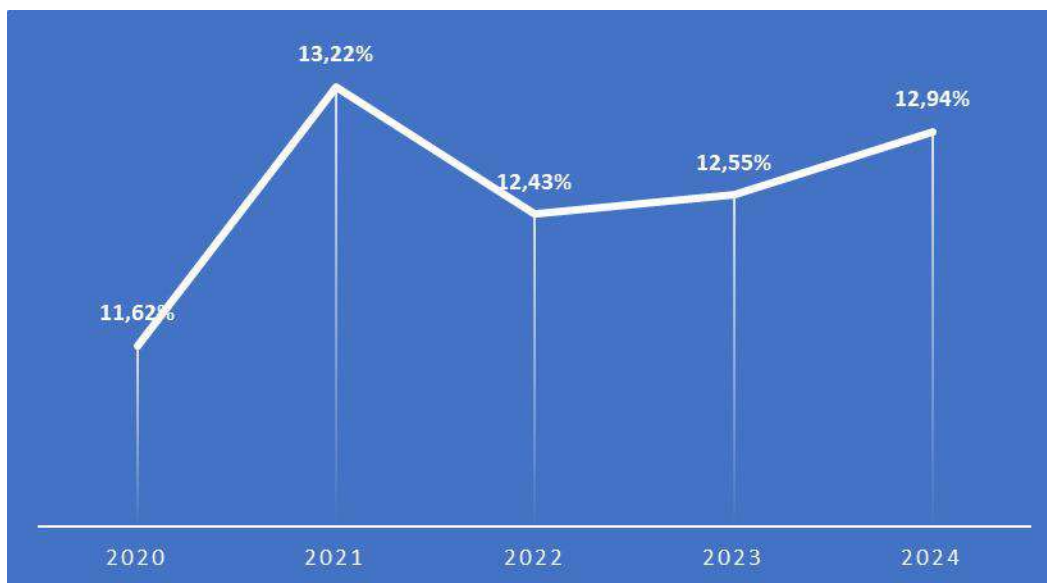


peningkatan terjadi, namun capaian pada tahun 2024 ini masih lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2020. Meskipun begitu, peningkatan ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk tidak produktif (usia anak-anak dan lanjut usia) yang bergantung pada penduduk usia produktif semakin bertambah. Hal ini dapat berpengaruh terhadap daya saing sumber daya manusia karena semakin banyak beban yang harus ditanggung oleh angkatan kerja. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka produktivitas daerah bisa menurun.

2.1.4.2. IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan merupakan perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu wilayah dalam hal ini yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian di daerah Kabupaten Banyuwangi. Indikator ini untuk mengukur nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Di bawah ini merupakan capaian rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021-2024:



Gambar 2.43 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Rasio/Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menguat. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 11,62 persen terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, dan meningkat menjadi



12,94 persen pada tahun 2024. Kenaikan kontribusi sebesar 1,32 poin persentase mencerminkan penguatan peran sektor ini dalam struktur ekonomi daerah, sekaligus menandai arah transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder yang lebih berbasis pada pengolahan dan nilai tambah.

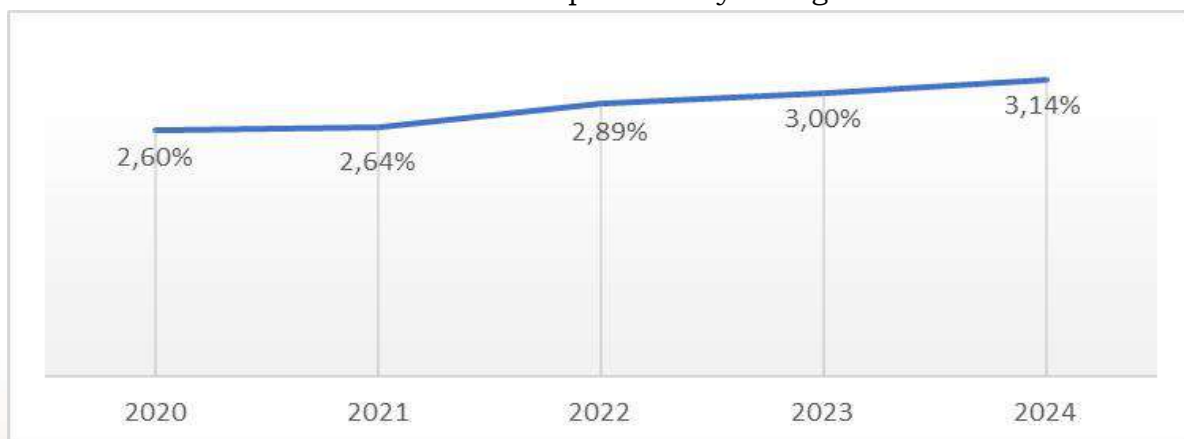
Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan di tingkat lokal semakin berkembang, baik melalui industri skala rumah tangga, industri kecil dan menengah, maupun unit-unit usaha yang terintegrasi dengan sumber daya lokal. Dukungan dari sektor pertanian dan perikanan sebagai penyedia bahan baku, serta keterlibatan koperasi dan UMKM dalam rantai produksi, turut memperkuat ekosistem pengolahan yang inklusif.

Lebih jauh, kecenderungan naiknya kontribusi ini juga menjadi sinyal bahwa kebijakan daerah yang mendorong hilirisasi mulai menunjukkan hasil. Hilirisasi tidak hanya dipahami sebagai pemrosesan produk primer, tetapi juga sebagai strategi memperpanjang rantai nilai di dalam wilayah, meningkatkan efisiensi distribusi, dan menciptakan diferensiasi produk unggulan Banyuwangi. Dalam konteks ini, sektor industri pengolahan menjadi tulang punggung bagi pengembangan agroindustri, industri perikanan olahan, serta produk turunan berbasis hasil alam lokal.

Ke depan, peran strategis sektor ini perlu diperkuat melalui dukungan terhadap peningkatan teknologi produksi, sertifikasi mutu, promosi pasar, serta integrasi dengan sektor perdagangan dan penanaman modal. Dengan arah tersebut, industri pengolahan tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam peningkatan nilai tambah lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan antarwilayah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

B. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh sektor Penyediaan Akomodasi serta Makan dan Minum terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar sumbangan sektor penginapan dan tempat makan terhadap seluruh ekonomi daerah. Berikut merupakan capaian rasio PDRB akomodasi makan dan minum di Kabupaten Banyuwangi di tahun 2021-2024:



Gambar 2.44 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025



Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan tren kontribusi yang terus meningkat terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi atas dasar harga berlaku selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 2,60 persen, kemudian meningkat menjadi 2,64 persen pada 2021, 2,89 persen pada 2022, 3,00 persen pada 2023, dan mencapai 3,14 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan dan penguatan peran sektor akomodasi dan makan minum dalam struktur perekonomian daerah pasca-pandemi.

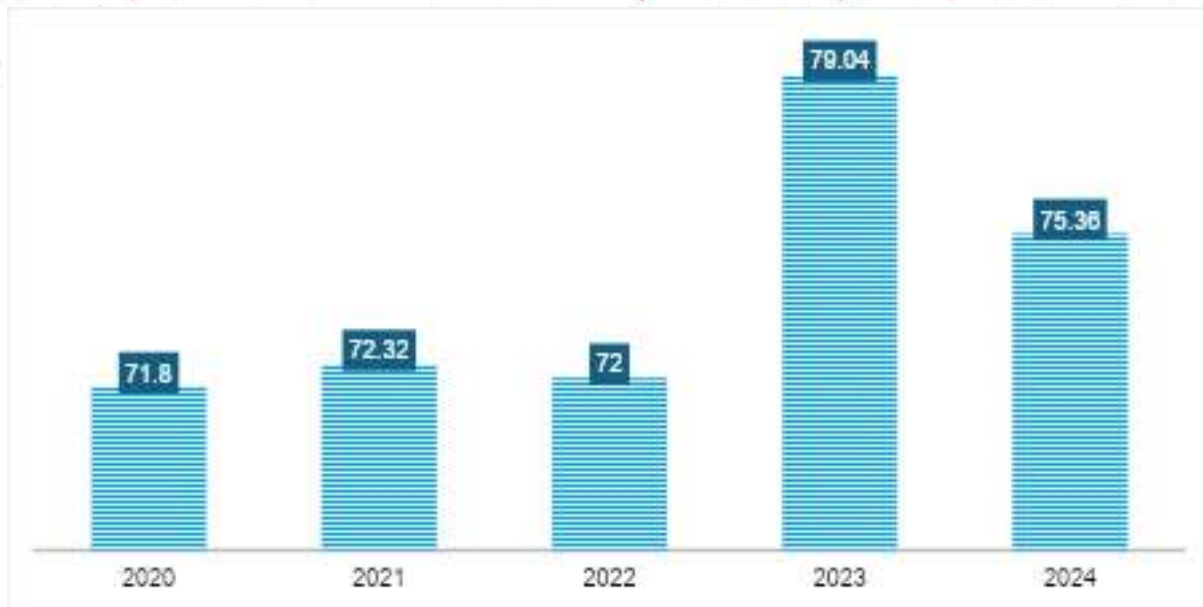
Dari sisi pertumbuhan atas dasar harga konstan (ADHK), sektor ini sempat mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 sebesar -13,85 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan mobilitas masyarakat dan aktivitas kepariwisataan. Namun demikian, pemulihan berlangsung cepat pada tahun-tahun berikutnya dengan pertumbuhan positif sebesar 4,31 persen (2021), 14,79 persen (2022), 7,29 persen (2023), dan 7,43 persen (2024). Laju pertumbuhan yang stabil ini menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya pulih, tetapi juga mengalami penguatan yang konsisten dalam kontribusinya terhadap ekonomi daerah.

Konsistensi peningkatan kontribusi dan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini memperlihatkan bahwa penyediaan akomodasi dan makan minum berkembang secara struktural dalam perekonomian Banyuwangi. Hal ini menjadi indikasi penting bagi perumusan kebijakan pengembangan sektor tersier, serta membuka ruang bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan akselerasi pertumbuhan wilayah berbasis jasa.

Lebih lanjut, peningkatan performa sektor ini juga mencerminkan membaiknya iklim usaha di bidang jasa, khususnya di kawasan-kawasan dengan potensi unggulan pariwisata dan ekonomi lokal berbasis pengalaman. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kualitas pelayanan, aksesibilitas, serta dukungan infrastruktur dan promosi daerah. Dengan penguatan berkelanjutan, sektor akomodasi dan makan minum memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi Banyuwangi menuju struktur yang lebih dinamis, inklusif, dan berorientasi jasa.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran atau sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya akan disajikan capaian realisasi TPAK di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga tahun 2024:



Gambar 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 75,36 persen, mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia kerja telah berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, baik bekerja maupun aktif mencari kerja. Angka ini menunjukkan peningkatan partisipasi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi dan mencerminkan pemulihan yang cukup baik dalam pasar tenaga kerja daerah. TPAK tertinggi tercatat pada kelompok penduduk dengan pendidikan SMA ke atas, yaitu sebesar 82,17 persen, diikuti oleh lulusan SMP sederajat sebesar 81,51 persen. Hal ini mengisyaratkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Sebaliknya, penduduk dengan pendidikan rendah menunjukkan partisipasi yang lebih terbatas. Kelompok penduduk dengan pendidikan SD sederajat hanya mencatatkan TPAK sebesar 64,23 persen, sedangkan kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah mencatatkan angka TPAK 75,70 persen, meskipun sebagian besar bekerja di sektor informal dan pertanian subsisten. Fenomena ini menunjukkan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan sebagai upaya jangka panjang dalam memperkuat struktur ketenagakerjaan, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta memperkecil kesenjangan produktivitas antar segmen penduduk usia kerja di Kabupaten Banyuwangi.

Selain menggambarkan tingkat partisipasi, struktur angkatan kerja menurut pendidikan juga mengungkap kecenderungan efisiensi tenaga kerja. Kelompok berpendidikan tinggi tidak hanya memiliki TPAK yang tinggi, namun juga menunjukkan rasio bekerja terhadap angkatan kerja yang relatif stabil, yaitu 97,47 persen untuk lulusan SMA ke atas. Artinya, sebagian besar dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas berhasil terserap ke dalam lapangan kerja. Ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan relevansi



keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menyongsong pertumbuhan sektor ekonomi modern dan transformasi digital di Banyuwangi.

D. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran untuk menilai seberapa kreatif dan inovatif sebuah daerah dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Berikut merupakan capaian Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024:

Tabel 2.25 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Skor	11.542	84,19	96,3	86,94	98,86
Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Banyuwangi secara konsisten mempertahankan capaian ada pada predikat “Sangat Inovatif”, bahkan hampir mendapatkan capaian sempurna pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 98,86, meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2023.

Terdapat perbedaan nilai Skor indeks di tahun 2020 dan di tahun 2021, perbedaan perhitungan Indeks Inovasi Daerah ini disebabkan oleh adanya perubahan metode penilaian dan penyesuaian indikator yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2020, penghitungan indeks masih berfokus pada kuantitas inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Sementara pada tahun 2021 hingga saat ini, penilaian mulai diarahkan tidak hanya pada jumlah inovasi, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan dampak nyata dari inovasi tersebut terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyesuaian instrument penilaian IID oleh kemendagri mengakibatkan Skor capaian indeks inovasi daerah di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun 2020. Namun secara Predikat dalam IID, Kabupaten Banyuwangi tetap meraih Predikat Sangat Inovatif.

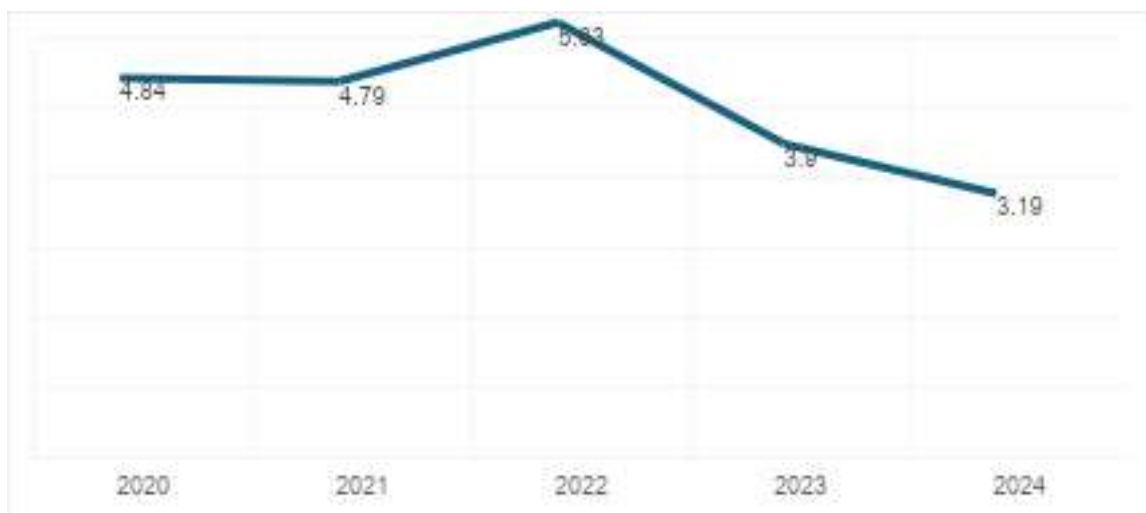
Peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi di berbagai sektor pelayanan publik. Keberhasilan peningkatan indeks inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari adanya konsolidasi yang kuat dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan kinerja inovasi setiap dinas berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi perubahan mekanisme perhitungan Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2021 dengan penyesuaian indikator dan metode penilaian, sehingga skala skor berbeda dari tahun sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan 2020. Setiap SKPD diwajibkan memenuhi capaian indikator inovasi melalui program dan kegiatan yang terukur, dengan penerapan



mekanisme reward and punishment berupa penambahan atau pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai bentuk motivasi dan pengendalian kinerja. Selain itu, monitoring dan evaluasi (monev) inovasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program yang dijalankan. Upaya ini juga diperkuat dengan kolaborasi antara Bappeda dan perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga (UNAIR), Stikes Banyuwangi, serta berbagai institusi pendidikan lainnya dalam pengembangan ide, riset, dan implementasi inovasi daerah. Sinergi lintas sektor ini mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif pada peningkatan indeks inovasi daerah setiap tahunnya.

E. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang berstatus sebagai wirausahawan terhadap total penduduk usia kerja di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, rasio kewirausahaan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan rasio ini melalui kebijakan fasilitasi permodalan, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan infrastruktur pendukung bagi pelaku usaha. Berikut akan disajikan capaian rasio kewirausahaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020-2024:



Gambar 2.46 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Rasio kewirausahaan Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif. Pada awal periode, capaian sebesar 4,84% sedikit menurun menjadi 4,79%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 5,63%. Namun, dua tahun terakhir mengalami



penurunan tajam menjadi 3,90% dan kembali turun menjadi 3,19%. Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam keberadaan dan keberlangsungan pelaku usaha di daerah. Peningkatan pada tahun ketiga diduga dipengaruhi oleh keberhasilan program pemberdayaan UMKM dan dorongan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Sebaliknya, penurunan pada dua tahun terakhir dapat mengindikasikan menurunnya daya tahan usaha akibat terbatasnya akses pembiayaan, melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya persaingan pasar, atau tantangan adaptasi teknologi di kalangan pelaku usaha kecil.

2.1.4.3. INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto atau yang familiar disebut PMTB adalah suatu ukuran seberapa banyak uang yang digunakan untuk membangun atau membeli barang-barang yang dipakai jangka panjang, seperti gedung, jalan, mesin, dan peralatan. Pada konsepnya, PMTB merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal yang tidak dikonsumsi, tetapi memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Singkatnya PMTB menunjukkan investasi fisik yang dilakukan dalam suatu wilayah. Berikut merupakan perkembangan dan struktur PMTB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024:

Tabel 2.26 Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

PMTB Kabupaten Banyuwangi 2020–2024

Satuan: miliar rupiah untuk PMTB | persen (%) untuk pertumbuhan & kontribusi | satuan rasio untuk ICOR

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
PMTB (ADHB)	26.168,07	27.381,00	28.964,32	31.567,46	34.123,39
PMTB (ADHK)	16.671,87	17.156,95	17.266,23	18.345,68	19.474,76
Pertumbuhan PMTB (ADHK) (%)	–	2,91	0,64	6,25	6,15
Kontribusi ke PDRB (ADHB) (%)	32,27	31,87	31,05	31,16	31,33
ICOR	–	7,88	7,02	6,29	6,84

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Kinerja investasi yang tercermin melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Nilai PMTB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp26,17 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp34,12 triliun pada tahun 2024, dengan kontribusi yang relatif stabil terhadap PDRB, yaitu sekitar 31–32 persen. Sementara itu, pertumbuhan riil PMTB (ADHK) menunjukkan variasi, dari pertumbuhan moderat



sebesar 2,91 persen di tahun 2021, stagnan di 0,64 persen tahun 2022, lalu kembali meningkat menjadi 6,25 persen di 2023 dan 6,15 persen pada 2024. Pergerakan ini menggambarkan dinamika optimisme pelaku ekonomi serta pengaruh kondisi eksternal terhadap realisasi investasi fisik, seperti bangunan, mesin, dan alat transportasi.

Efisiensi investasi yang ditunjukkan oleh rasio ICOR mengalami perbaikan dari 7,88 pada tahun 2021 menjadi 6,29 pada 2023, meskipun sedikit meningkat kembali menjadi 6,84 pada tahun 2024. Penurunan ICOR dalam periode 2021–2023 menandakan bahwa investasi yang dilakukan semakin produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain, semakin sedikit tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi. Namun, kenaikan ICOR di tahun 2024 mengindikasikan adanya penurunan efisiensi relatif, yang bisa disebabkan oleh keterlambatan dampak investasi terhadap output atau adanya alokasi ke sektor yang belum segera memberikan kontribusi terhadap PDRB. Kondisi ini menandakan pentingnya *quality investment* yang berorientasi pada sektor produktif bernilai tambah tinggi, terutama dalam konteks hilirisasi, transformasi industri, dan modernisasi infrastruktur.

Stabilnya kontribusi PMTB terhadap PDRB pada kisaran 31 persen selama periode 2020–2024 juga menunjukkan bahwa peran investasi fisik dalam struktur perekonomian daerah masih cukup konsisten. Namun, hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa akselerasi pertumbuhan belum sepenuhnya ditopang oleh ekspansi investasi baru secara proporsional. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi peningkatan kualitas investasi, terutama yang mendukung transformasi sektor unggulan seperti industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian berbasis teknologi. Sinergi antara arah investasi publik dan swasta perlu diperkuat, termasuk melalui penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung iklim usaha yang kondusif, agar efektivitas investasi benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net Ekspor Barang dan Jasa adalah selisih antara total nilai barang dan jasa yang dijual ke luar negeri (disebut ekspor) dengan total nilai barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri (disebut impor). Net ekspor digunakan untuk mengetahui apakah Kabupaten Banyuwangi lebih banyak menghasilkan dan menjual produk ke luar, atau justru lebih banyak membeli dari luar. Jika ekspor lebih besar dari impor, artinya net ekspor bernilai positif dan menunjukkan kelebihan atau surplus perdagangan. Sebaliknya, jika impor lebih besar dari ekspor, maka net ekspor bernilai negatif dan menunjukkan kekurangan atau defisit perdagangan. Indikator ini penting karena menunjukkan seberapa besar kontribusi produk wilayah lain terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan perkembangan dan struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023:



Tabel 2.27 Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

Net Ekspor Kabupaten Banyuwangi 2020–2024

Satuan: miliar rupiah untuk ADHB & ADHK | persen (%) untuk kontribusi

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor (ADHB)	-6.469,51	-5.436,72	-4.717,20	-5.092,79	-5.065,17
Net Ekspor (ADHK)	-3.230,45	-2.486,72	-1.457,18	-1.189,41	-1.473,19
Kontribusi ke PDRB (ADHB) (%)	-7,98	-6,33	-5,06	-5,03	-4,65

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), kinerja net ekspor Kabupaten Banyuwangi secara konsisten berada dalam posisi defisit, yang mencerminkan bahwa nilai impor barang dan jasa dari luar daerah terus melebihi nilai ekspor yang dihasilkan oleh daerah. Pada tahun 2020, defisit net ekspor atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp6,47 triliun dengan kontribusi negatif terhadap PDRB sebesar -7,98 persen. Meskipun terjadi perbaikan secara bertahap hingga defisit menyempit menjadi Rp5,07 triliun atau -4,65 persen terhadap PDRB pada tahun 2024, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi masih cukup terbuka dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi sendiri.

Jika dilihat berdasarkan nilai riil (ADHK), tren defisit net ekspor juga menunjukkan arah perbaikan. Defisit sebesar Rp3,23 triliun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp1,19 triliun pada tahun 2023, meskipun kembali melebar menjadi Rp1,47 triliun pada tahun 2024. Penurunan defisit tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kinerja perdagangan antarwilayah, baik karena peningkatan kapasitas produksi lokal maupun terkendalinya impor. Namun demikian, membesarnya kembali defisit pada tahun terakhir menunjukkan bahwa perbaikan tersebut belum sepenuhnya stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan sektor produksi lokal, terutama industri dan pertanian, masih perlu diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan input dalam negeri.

Ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan bagi Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan struktur ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya tahan. Oleh karena itu, arah pembangunan ekonomi ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas produksi lokal, khususnya melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang modal dan bahan baku dari luar daerah melalui strategi substitusi impor lokal juga menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan inklusif.



Selanjutnya, tren defisit net ekspor ini perlu dipandang sebagai sinyal untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang memiliki potensi untuk mengurangi impor dan mendorong ekspor antarwilayah. Investasi produktif yang diarahkan pada penguatan rantai pasok lokal, khususnya pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan neraca perdagangan daerah. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi strategi industrialisasi, tetapi juga sebagai fondasi bagi peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi Kabupaten Banyuwangi dalam jangka menengah hingga panjang.

C. Ekonomi Syariah

Perkembangan perekonomian nasional mengalami perubahan secara cepat dan tantangan semakin berat, diperlukan lembaga perbankan nasional yang dapat melayani berbagai kelompok ekonomi, salah satunya munculnya ekonomi syariah. Tiga pilar ekonomi syariah adalah Keadilan, Keseimbangan dan Kemaslahatan yang tercermin dari aktifitas ekonomi yang menghindari riba, maysir (tidak transparan), gharar (spekulasi), dzalim dan haram, dimana terjadi keseimbangan aktivitas di sektor riil dan finansial, pengelolaan risk dan return, aktivitas bisnis dan sosial, aspek spiritual dan material dan azas manfaat dan kelestarian lingkungan, serta melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, perlindungan jiwa, harta dan akal.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi memiliki sektor - sektor ekonomi unggulan yang membentuk struktur perekonomian di Kabupaten Banyuwangi, yaitu ada di sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel & Restoran serta sektor Jasa. Nilai ketiga sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB melebihi 50% dari total pembentukan PDRB Kabupaten Banyuwangi. Secara umum, sektor perdagangan, industri kecil, pertanian dan jasa-jasa di Kabupaten Banyuwangi memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian, termasuk yang berskala mikro dan kecil. Sehingga UMKM di sektor perdagangan dan industri kecil memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sasaran pasar bagi setiap lembaga pembiayaan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2015 yang memuat tentang pendirian PT BPR Syariah Kabupaten Banyuwangi, mulai berlaku sejak 23 September 2015, Salah satu ekonomi syariah yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi adalah adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan pembiayaan kepada pedagang atau pengusaha kecil serta menghimpun dana-dana dari masyarakat. Sasaran pada BPRS adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah. Pengertian pengusaha disini tidak terbatas pada bidang industri saja melainkan juga di bidang-bidang lainnya, seperti : pertanian, perdagangan, jasa dan lain sebagainya. Pada pembangunan BPRS di Kabupaten Banyuwangi, peningkatan sumber-sumber dana dapat diimbangi dengan peningkatan penyaluran dana pinjaman, sehingga FDR (*Finance to Deposit Ratio*) memiliki tren meningkat. Pada



akhir tahun ke-1 FDR (*Finance to Deposit Ratio*) tercatat sebesar 65,1%, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28 Perkembangan FDR di Kabupaten Banyuwangi

Keterangan	PYD	DPK	FDR
Tahun I	1.473.953	1.222.944	120,52%
Tahun II	1.920.453	1.418.315	135,40%
Tahun III	2.295.453	1.555.609	147,56%
Tahun IV	2.857.361	1.923.971	148,51%
Tahun V	3.419.743	2.671.613	128,00%

Sumber: Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2025

Maka, dari tabel data perkembangan FDR diatas, fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat dijalankan dengan baik oleh BPRS. Fungsi ini berjalan semakin baik, tercermin dari rasio FDR yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Selain dari FDR, dari nilai BEP (*Break Event Point*), BPRS dapat membukukan keuntungan bulanan (BEP bulanan) pada bulan ke-15 dan BEP kumulatif terjadi pada bulan ke-33.

2.1.4.4. PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik dan seberapa layak infrastruktur yang tersedia digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur yang dimaksud mencakup berbagai fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, dan jaringan internet. Indeks ini tidak hanya mengukur keberadaan infrastruktur, tapi juga kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti apakah jalanan mudah dilalui, apakah air mengalir lancar, apakah listrik sering padam, atau apakah sinyal internet stabil.

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 0,79 dibandingkan tahun 2022. Capaian IKLI di tahun 2022 mencapai di angka 85,92, namun menurun menjadi 85,13 di tahun 2023. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren penurunan dari 85,92 pada 2022 menjadi 85,13 pada 2023. Hasil survei menunjukkan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan merupakan infrastruktur yang cukup menentukan seberapa besar dan spesifik kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan LKJIP Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, bahwa capaian IKLI Kebinamargaan berada di angka 82,21, IKLI Keciaptakarya mencapai angka 84,44, lalu untuk IKLI Penataan Ruang tercapai sebesar 82,15, serta IKLI Perumahan dan Permukiman berada di angka 83,92.

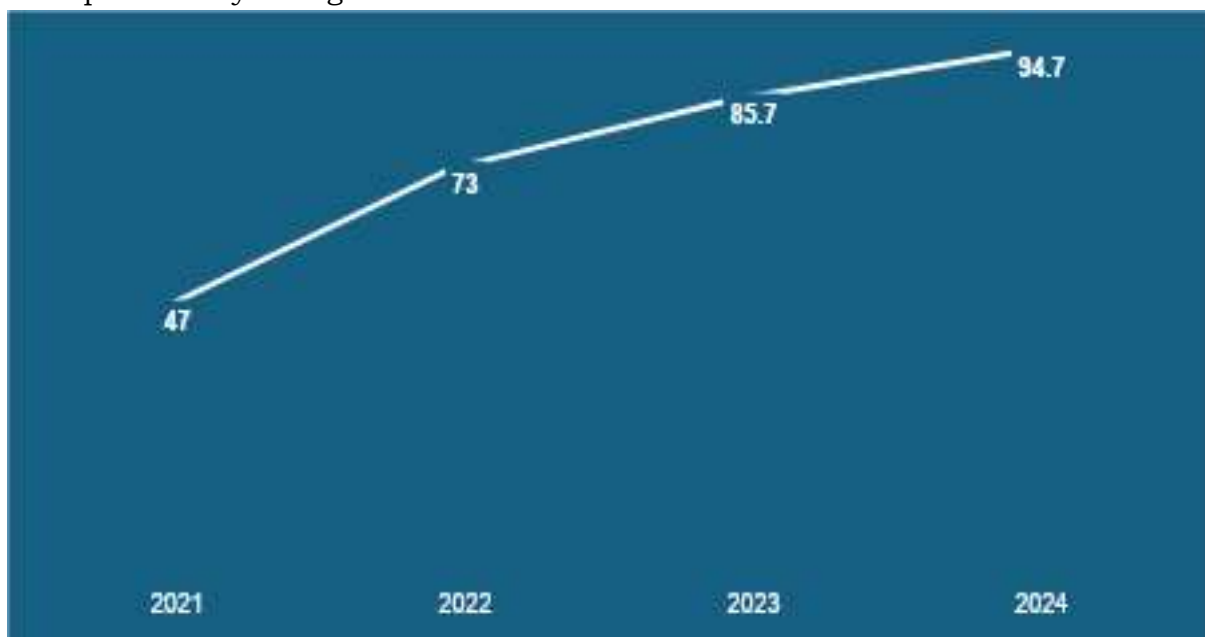
Permasalahan terkait dengan capaian IKLI ini di Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh cuaca hujan yang ekstrim serta tonase kendaraan yang melebihi kelas jalan menyebabkan kerusakan jalan yang semakin banyak di beberapa titik. Serta masih ada ruas jalan akses yang berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi



dan akses jalan menuju tempat pendidikan yang rusak belum tertangani secara baik dan merata. Selain itu juga disebabkan terbatasnya infrastruktur sistem drainase dan antisipasi banjir secara baik, karena usia saluran drainase/ gorong gorong menyebabkan kerusakan. Disamping itu saluran drainase gorong-gorong sudah tidak mampu lagi menampung limpahan air hujan karena dimensi saluran masih kurang memadai. Pemerintah telah mengupayakan untuk melakukan identifikasi ruas jalan, sistem drainase dan lainnya dengan cermat dan tepat dengan optimalisasi program pembangunan dan pengembangan jalan sistem irigasi maupun sistem drainase. Berikutnya juga melaksanakan pemeliharaan jalan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga parah, pelebaran jalan pada ruas jalan yang mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang melaluinya. Serta pemeliharaan drainase akan terus menjadi prioritas untuk dianggarkan dan dilaksanakan setiap tahunnya, terutama pada kawasan yang rawan genangan air. Sebagai antisipasi banjir, juga akan dilakukan secara rutin normalisasi saluran drainase dengan pengerukan sedimen (endapan waled) yang mengakibatkan dangkalnya saluran drainase.

B. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan. Tujuan utama dari konsep Desa Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut merupakan capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024:



Gambar 2.47 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2025



Capaian persentase desa mandiri menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2021 mulai 47%, dan menjadi 94,7% tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemberdayaan desa dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kemandirian desa. Meskipun demikian, capaian ini masih menyisakan tantangan dalam mewujudkan desa mandiri dari total desa mandiri yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang masih perlu diatasi. Perhitungan desa mandiri yang sebelumnya menggunakan Indeks Desa Mandiri, di tahun 2025 akan berganti metologi perhitungannya menjadi Indeks Desa. Indeks Desa kini tidak hanya mengukur ketertinggalan, kemandirian, dan keberlanjutan desa, tetapi juga memperkuat dimensi tata kelola, inklusi sosial, dan ketahanan terhadap krisis. Penyempurnaan ini bertujuan meningkatkan akurasi pemetaan kondisi desa serta efektivitas intervensi kebijakan pembangunan berbasis data.

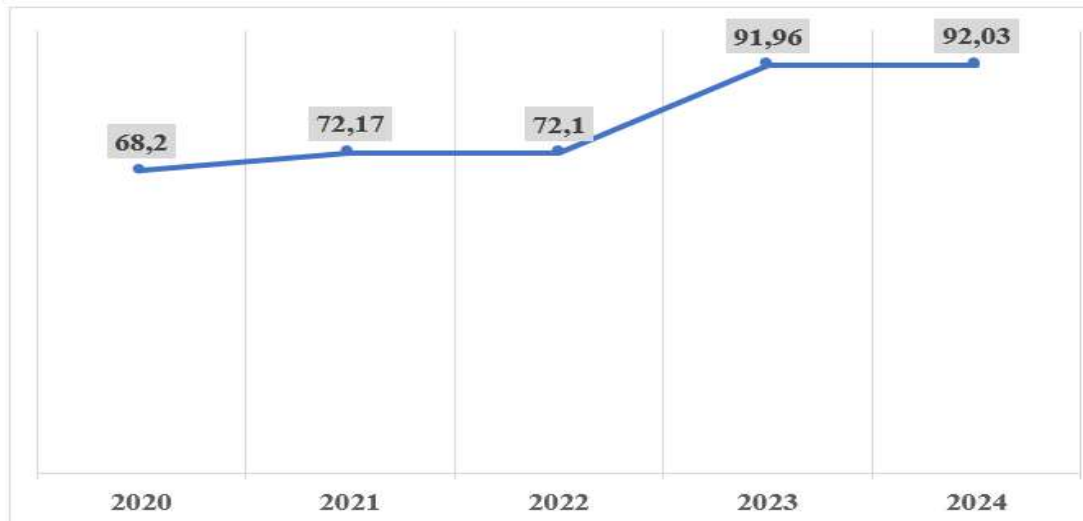
Peningkatan Indeks Desa Mandiri dapat dicapai melalui penguatan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi/lingkungan. Di Kabupaten Banyuwangi, secara umum memiliki aspek ketahanan ekonomi yang baik, yaitu desa memiliki basis produksi yang kuat, akses pasar yang mudah dijangkau, serta ketersediaan layanan lembaga keuangan yang terjangkau akan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, pada dimensi ketahanan sosial, faktor layanan dasar seperti pendidikan dengan jarak tempuh yang dekat, fasilitas kesehatan yang memadai dengan ketersediaan tenaga kesehatan, serta akses layanan yang mudah menjadi penentu penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong, keterlibatan dalam musyawarah desa, ketersediaan rumah layak huni melalui program bedah rumah yang dibiayai dana desa maupun dukungan Pemerintah Kabupaten, serta penyediaan akses internet gratis di balai desa dan jaringan fiber optic untuk mendukung kegiatan digitalisasi desa semakin memperkuat aspek sosial tersebut. Sementara itu, ketahanan lingkungan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan upaya pelestarian lingkungan. Dari ketiga dimensi tersebut, peningkatan Indeks Desa Mandiri paling terlihat dari kemajuan pada layanan sosial yang semakin inklusif, berkualitas, dan berbasis digital, sehingga mendukung terciptanya desa yang adaptif dan berdaya saing.

C. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak merujuk pada kondisi di mana keluarga menempati tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan dasar. Standar tersebut mencakup struktur bangunan yang kokoh, luas ruang yang memadai (minimal 7,2 m² per orang), akses terhadap air minum dan sanitasi layak, serta tidak berada di lokasi rawan bencana atau permukiman kumuh. Selain itu, hunian dianggap layak jika memiliki legalitas kepemilikan atau status penguasaan yang sah. Akses terhadap hunian layak merupakan bagian penting dari hak dasar warga negara dan menjadi indikator kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa komponen tersebut kemudian dilakukan perhitungan untuk memperoleh persentase dari rumah tangga dengan akses hunian layak, yang memperhitungkan antara Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak yang dibagi dengan Jumlah seluruh rumah tangga kemudian dikalikan 100%. Berikut



merupakan capaian indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Banyuwangi 2020-2024.



Gambar 2.48 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

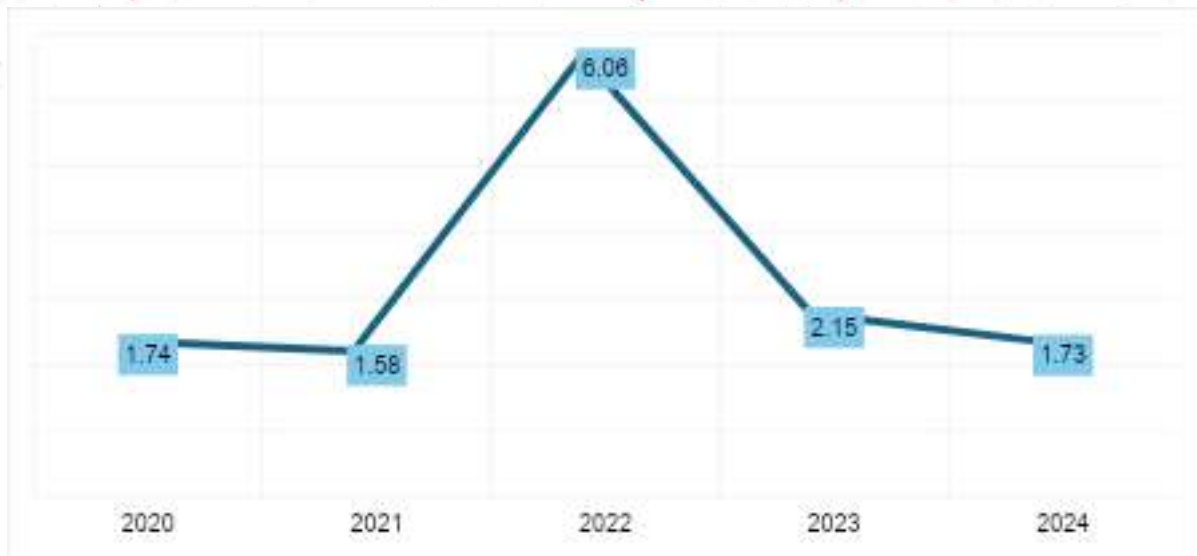
Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten banyuwangi, 2025

Berdasarkan grafik di atas, data hanya menunjukkan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar 68,2% pada tahun 2020, lalu naik kurang lebih 4% menjadi 72,17%. Ditahun 2023 capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Banyuwangi meningkat secara signifikan menjadi 91,96% dan di tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 92,03%. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan Banyuwangi dalam memperbaiki atau meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat Banyuwangi. Tantangan ke depan bagi Banyuwangi adalah memperbaiki akses hunian layak bagi masyarakat yang jauh dari pusat kota dan akses yang cukup sulit. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang tinggi meningkatkan kebutuhan terhadap hunian, sementara penyediaan rumah layak huni masih belum mampu mengimbangnya, terutama di kawasan perkotaan dan daerah padat penduduk.

2.1.4.5. STABILITAS EKONOMI MAKRO

A. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Inflasi menunjukkan seberapa besar daya beli uang menurun yang artinya, dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang dibanding sebelumnya. Di Kabupaten Banyuwangi, Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin merilis data inflasi untuk memantau stabilitas ekonomi daerah. Berikut perkembangan tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2020-2024:



Gambar 2.49 Tingkat Inflasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Selama periode 2020–2024, tingkat inflasi Kabupaten Banyuwangi cenderung terkendali dan berada dalam kisaran yang relatif stabil, mencerminkan kondisi harga yang cukup terjaga dan daya beli masyarakat yang relatif tidak mengalami tekanan ekstrem. Inflasi tercatat sebesar 1,74 persen pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi 1,58 persen pada tahun 2021. Kestabilan ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang/jasa, terutama pada kelompok kebutuhan pokok dan transportasi.

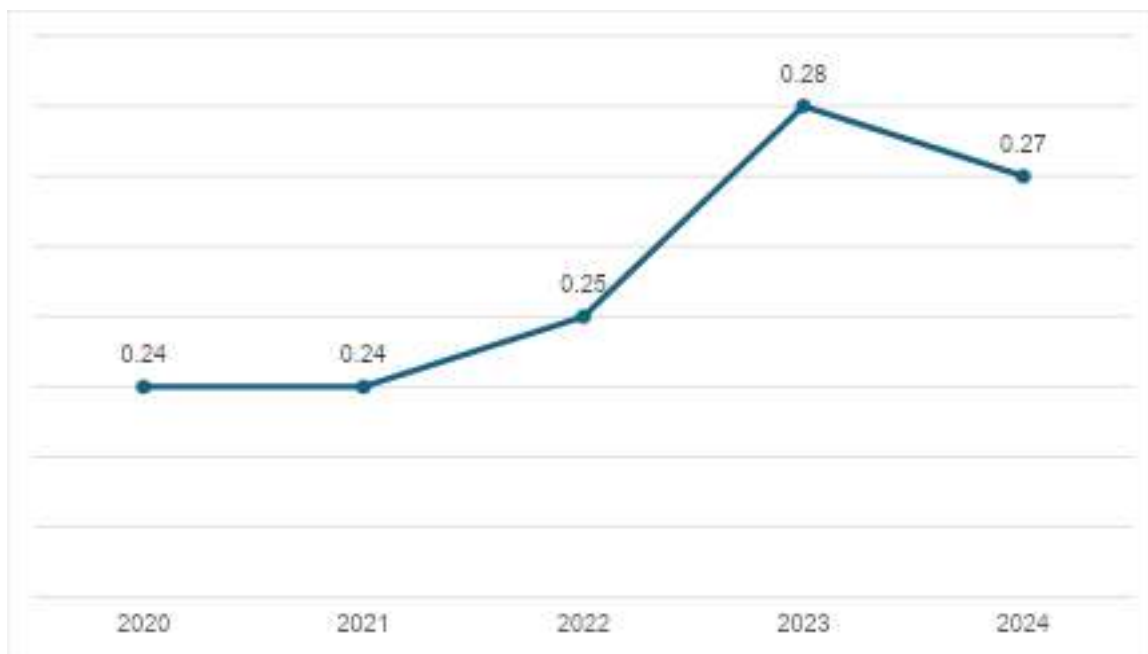
Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan, mencapai 6,06 persen. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari gejala eksternal pascapandemi COVID-19, kenaikan harga energi dan bahan pangan global, serta penyesuaian harga BBM yang berdampak pada inflasi nasional maupun daerah. Meski demikian, kondisi tersebut berhasil dikendalikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan inflasi menurun menjadi 2,15 persen di tahun 2023 dan kembali menyentuh 1,73 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta peran strategis sektor pertanian dan distribusi yang tetap stabil.

Stabilitas inflasi yang terjaga selama periode RPJMD ini merupakan fondasi penting bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif dan menjaga daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali juga mendukung keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan serta menjaga ritme konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama dalam struktur PDRB Kabupaten Banyuwangi. Ke depan, penguatan ketahanan pangan lokal, efisiensi rantai pasok, serta pengawasan harga-harga strategis di tingkat konsumen perlu terus diperkuat agar stabilitas inflasi tetap terjaga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



B. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya dari basis ekonomi lokal untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak tanpa membebani perekonomian secara berlebihan, sedangkan nilai yang rendah dapat mengindikasikan perlunya perbaikan kebijakan perpajakan, perluasan basis pajak, atau peningkatan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.50 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi tahun 2020–2024, terlihat tren fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan hingga 2023 sebelum sedikit menurun di 2024. Pada 2020 dan 2021, rasio pajak daerah terhadap PDRB berada di level yang sama, yakni 0,24, yang mencerminkan stabilitas namun juga menunjukkan belum adanya peningkatan signifikan pada penerimaan pajak daerah relatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tahun 2022 rasio meningkat menjadi 0,25, menandakan adanya perbaikan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi dan penguatan basis pajak.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada 2023 dengan rasio mencapai 0,28, yang dapat diartikan sebagai hasil dari implementasi kebijakan fiskal yang lebih efektif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, atau ekspansi sektor-sektor yang menjadi sumber pajak utama. Namun, pada 2024 rasio ini menurun sedikit menjadi 0,27, yang bisa mencerminkan perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan pertumbuhan PDRB, atau adanya penurunan kinerja pada sektor-sektor penyumbang pajak. Meski demikian, level rasio ini masih lebih tinggi dibandingkan tiga tahun pertama, menunjukkan bahwa kinerja fiskal daerah secara umum mengalami perbaikan dalam lima tahun terakhir, meskipun memerlukan strategi konsolidasi agar peningkatan yang telah dicapai dapat dipertahankan.



2.1.4.6. TRANSFORMASI DIGITAL

A. Indeks Masyarakat Digital

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1)Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi.

Pengukuran IMDI pertama dilakukan pada tahun 2022 dengan bersumber dari data primer dan berbagai data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei kepada 16.785 responden individu dan 9.694 responden perusahaan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pada skala nasional, diperoleh hasil IMDI sebesar 37,8 dari skala 1-100 dengan rincian nilai per pilar meliputi 40,24 untuk Infrastruktur dan Ekosistem; 49,35 untuk Keterampilan Digital; 22,06 untuk Pemberdayaan; serta sebesar 40,35 untuk Pekerjaan.

Hasil IMDI memperlihatkan masih diperlukan perbaikan di berbagai aspek terkait masyarakat digital, khususnya pada aspek pemberdayaan, sebagaimana tergambar dari pilar dan indikator pembentuknya. Pengukuran IMDI ke depannya akan dilakukan secara berkala, sehingga indeks ini dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memantau perkembangan masyarakat digital Indonesia dari tahun ke tahun. Hasil pengukuran indeks ini tidak ditujukan untuk membandingkan daya saing masyarakat digital antar daerah, melainkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan di level kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.

2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.5.1. REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merepresentasikan efektivitas kebijakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebagai daerah yang dikenal inovatif dalam tata kelola pemerintahan, Kabupaten Banyuwangi melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memastikan proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atasnya.

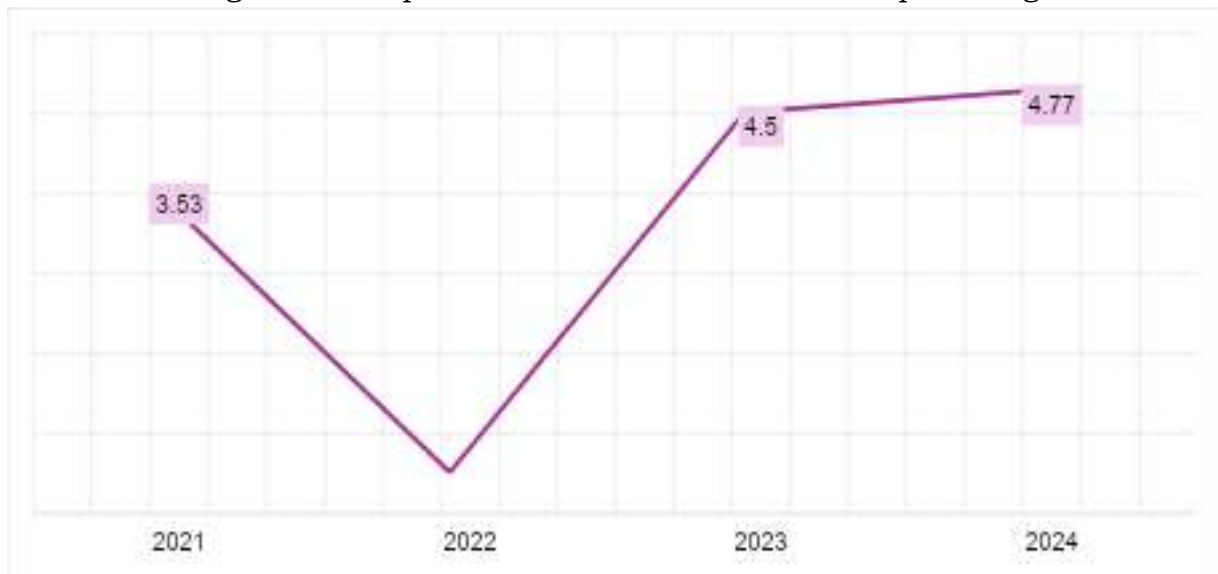
Berdasarkan penilaian mandiri, skor Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sebesar 86,92 atau dengan predikat A (Sangat Baik). Hal ini mengindikasikan adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola hukum baik dari segi perbaikan regulasi, kapasitas aparaturnya penegak hukum serta sistem pengawasan dan pelayanan publik berbasis hukum. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari inovasi Banyuwangi dalam



digitalisasi layanan hukum serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam tata kelola pemerintah dan layanannya. Indeks SPBE bertujuan untuk membangun pemerintahan yang transparan, bersih, efektif, dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi guna menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berikut merupakan capaian Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2021-2024 dengan kondisi pada tahun 2022 tidak dilakukan perhitungan:



Gambar 2.51 Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi, 2025

Tren capaian indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan signifikan dari 3,53 di tahun 2021 menjadi 4,77 dari skala 5 di tahun 2024 dengan predikat sebagai kabupaten terbaik untuk kategori kabupaten seluruh Indonesia. Kematangan SPBE ini berkorelasi positif pada peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik dan predikat Indeks Reformasi Birokrasi, dimana hal ini mengindikasikan adanya dampak positif transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan terhadap peningkatan dan kualitas layanan publik di Kabupaten Banyuwangi.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan mandat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2024:



Tabel 2.29 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2024

	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	4,58	4,59

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2025

Capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mendapatkan predikat A (Pelayanan Prima) baik dari segi penyelenggaraan layanan di lingkup pemerintah daerah dan Mal Pelayanan Publik. Pelayanan publik prima di Kabupaten Banyuwangi didorong oleh banyak faktor terutama adanya *godwill* yaitu iktikad atau kemauan baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi yang didukung iklim transformasi digital hingga ke pemerintah desa.

Keberhasilan peningkatan indeks pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh upaya penyesuaian standar pelayanan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, sehingga kualitas layanan yang diberikan selaras dengan ketentuan nasional dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kompetensi aparatur juga menjadi prioritas melalui berbagai program pelatihan yang berfokus pada profesionalisme, responsivitas, dan inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, penerapan sistem informasi terintegrasi melalui program Smart Kampung menjadi terobosan penting yang menghubungkan layanan pemerintah dengan masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Inovasi ini memungkinkan proses administrasi, pengaduan, dan pelayanan dasar dapat diakses secara digital, mendekatkan pemerintah dengan warga serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik daerah.

D. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat integritas yang mencerminkan risiko korupsi serta efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Indeks Integritas Nasional (IIN) dihitung berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian Indeks Integritas Nasional Tahun 2021-2024 di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.52 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, 2025

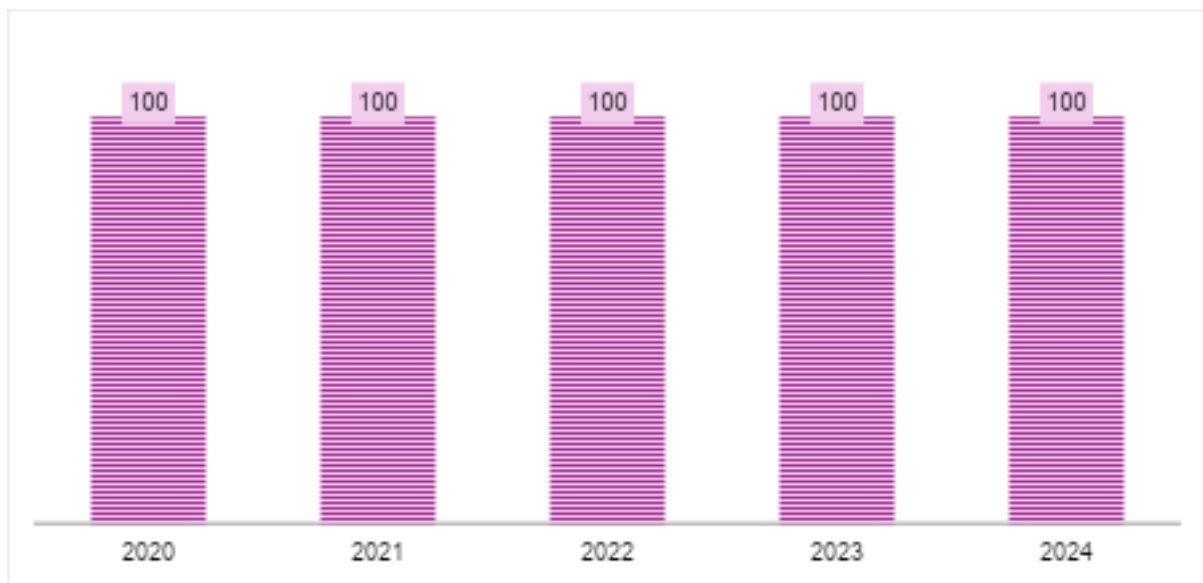


Tren capaian Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Banyuwangi mengalami tren fluktuatif dengan penurunan signifikan pada tahun terakhir. Capaian pada tahun 2021 menunjukkan predikat kuning (waspada) dan kembali melemah di tahun 2024 menjadi merah (rentan) dan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 67,83. Hasil SPI Tahun 2024 ini mencerminkan bahwa integritas pemerintahan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Kabupaten Banyuwangi memiliki peluang besar untuk berkembang dan berinovasi, namun tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud.

2.1.5.2. HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

A. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) merupakan proses pelaksanaan, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memastikan seluruh aturan yang telah disahkan oleh DPRD bersama kepala daerah dijalankan dengan benar dan ditaati oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi terkait. Dalam menciptakan stabilitas sosial-politik, berikut merupakan capaian persentase penegakan perda di Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir:



Gambar 2.53 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, 2025

Capaian penegakan Perda di Kabupaten Banyuwangi yang konsisten mencapai 100% selama periode 2020–2024 mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menegakkan hukum secara adil dan merata. Hal ini berkontribusi terhadap terwujudnya hukum yang berkeadilan, memperkuat ketahanan keamanan di tingkat lokal, serta mendukung demokrasi substansial melalui pelaksanaan regulasi yang efektif. Kinerja ini sekaligus menunjukkan



sinergi yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik.

Melihat konsistensi tinggi dalam penegakan Perda di Banyuwangi, penting pula untuk meninjau bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaan regulasi tersebut. Salah satu indikator yang merefleksikan dinamika sosial-politik dan ruang partisipasi publik adalah jumlah demonstrasi yang terjadi di daerah. Frekuensi aksi unjuk rasa dapat mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa aspirasinya terwadahi atau justru ada ketegangan akibat kebijakan yang dirasa tidak berpihak. Oleh karena itu, analisis terhadap jumlah demonstrasi menjadi pelengkap penting dalam menilai efektivitas penegakan perda, sekaligus mengukur sejauh mana prinsip keadilan, keamanan, dan demokrasi substansial benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan daerah.

Tabel 2.30 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2025

Jumlah Demonstrasi	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Politik	1	9	10	7	8
Bidang Ekonomi	0	0	1	0	0
Bidang Sosial Budaya	5	10	14	10	4
Total Unjuk Rasa	6	19	25	17	12

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, 2025

Jumlah demonstrasi di Banyuwangi mengalami fluktuasi, dengan puncaknya pada 2022 sebanyak 25 aksi dan menurun menjadi 12 aksi pada 2024. Aksi terbanyak terjadi di bidang sosial budaya, disusul bidang politik, sementara aksi di bidang ekonomi sangat minim. Penurunan ini mencerminkan membaiknya stabilitas sosial-politik dan efektivitas penegakan perda. Meski demikian, isu politik dan sosial budaya tetap perlu diantisipasi sebagai cerminan sensitivitas publik terhadap kebijakan daerah.

Pada subbab Hukum Berkeadilan, juga terdapat indikator terkait persentase capaian aksi HAM. Persentase Capaian Aksi HAM adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan sejauh mana pemerintah pusat atau daerah telah melaksanakan kegiatan/tindakan (*aksi*) yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sesuai target yang telah ditetapkan. Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai capaian hanya ditahun 2024 sebesar 82,90% dan indikator ini baru tersedia data hanya di tahun 2024.

B. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Masyarakat yang digunakan oleh pemerintah sebagai petunjuk atau tolak ukur dalam mengetahui sejauh mana tingkat rasa aman/nyaman/ketenteraman yang dirasakan warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari di lingkungannya. Berikut merupakan capaian Indeks Rasa Aman di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2021:

Tabel 2.31 Indeks Rasa Aman di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2021

	2020	2021
Indeks Rasa Aman	0,77	0,81

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Banyuwangi, 2021

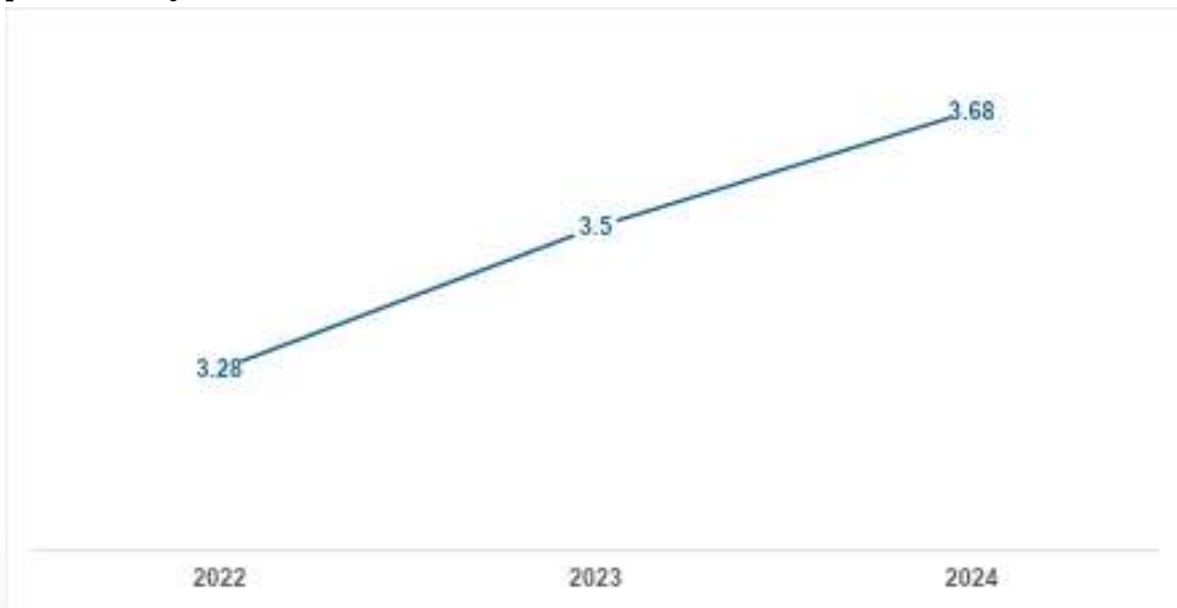


Hasil capaian pengukuran Indeks Rasa Aman di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren perkembangan yang baik yang menjadi bukti bahwa tingkat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sudah cukup terjamin. Data capaian berdasarkan hasil pengukuran terakhir dilakukan pada tahun 2021, dimana setelahnya tidak ada pengukuran. Namun kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar tetap dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dimana tren keberhasilan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta penyelenggaraan layanan dasar pada sub ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi telah mencapai target 100%. Hal ini berkorelasi positif pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, sekaligus menekan angka kriminalitas serta potensi gangguan sosial.

2.1.5.3. KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah (provinsi, kota, atau kabupaten) dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tidak hanya mengukur kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonominya seperti produktivitas dan nilai tambah, tetapi juga sejauh mana daerah tersebut mampu bersaing secara efektif dalam pasar yang kompetitif. Indeks Daya Saing Daerah mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah, serta seberapa mandiri dan produktifnya dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi penduduknya.



Gambar 2.54 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025



Dalam tiga tahun terakhir, secara umum tren capaian IDSD Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dari 3,28 di tahun 2022 menjadi 3,68 di tahun 2024. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata skor Provinsi Jawa Timur pada angka 3,88 di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, capaian IDSD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 berada diatas wilayah sekitar seperti Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, tetapi masih di bawah capaian skor Kabupaten Jember.

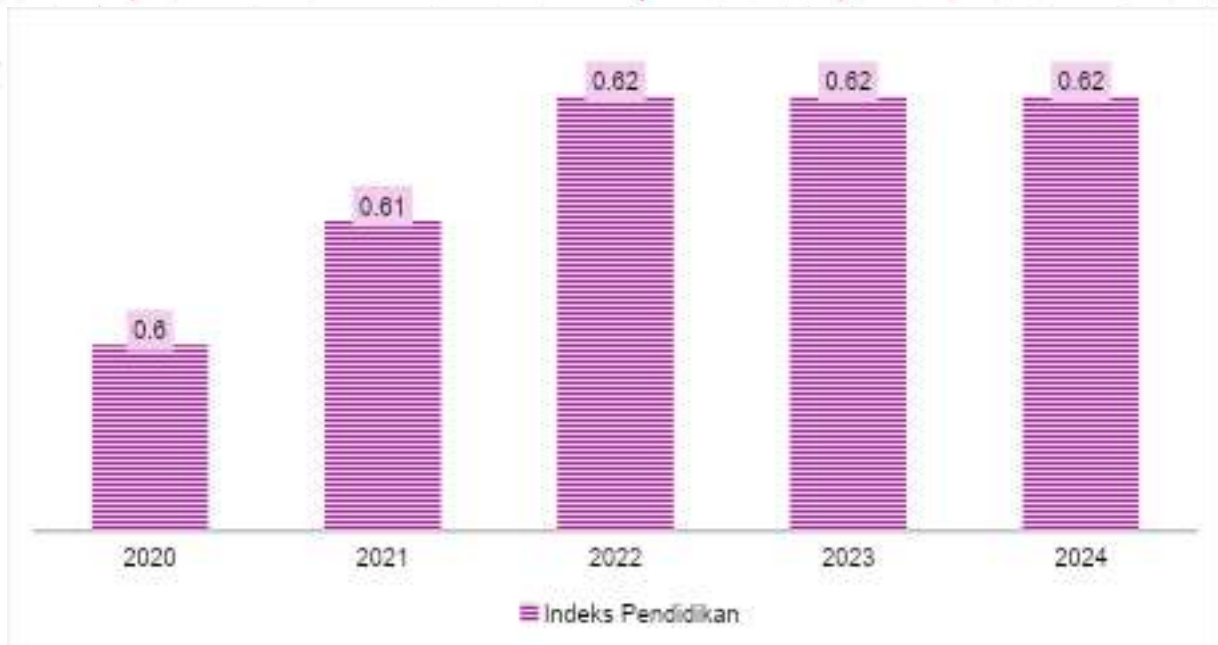
Penurunan skor IDSD pada tahun 2024 dapat diidentifikasi melalui capaian yang lemah pada dua (2) pilar IDSD yaitu yaitu sistem keuangan (Pilar 9) dan kapabilitas inovasi (Pilar 12). Pilar sistem keuangan memiliki tantangan dalam alokasi sumber daya dan investasi, yang tercermin dari rendahnya kredit usaha rakyat per penduduk, minimnya pembiayaan dari lembaga ventura bagi UMKM atau *start-up*, serta tingginya rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman. Sementara itu, kapabilitas inovasi masih terbatas dalam penelitian dan pengembangan formal yang seharusnya mendorong kolaborasi, kreativitas, serta penguatan ekosistem inovasi. Meskipun demikian, Banyuwangi tetap mempertahankan daya saing tertingginya pada pilar infrastruktur, institusi, dan stabilitas ekonomi makro. Keunggulan ini menjadi modal utama dalam memperkuat daya saing daerah, namun perlu diimbangi dengan peningkatan akses pembiayaan dan penguatan ekosistem inovasi agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.5.4. KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Pendidikan

Pendidikan adalah proses sistematis yang dirancang untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma budaya dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Lebih dari sekadar transfer informasi, pendidikan juga melibatkan pembentukan karakter, pengembangan kemampuan kritis, dan pemberdayaan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Pada unsur Pendidikan ini, terdapat satu indikator capaian dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini:



Gambar 2.55 Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan grafik diatas terkait indikator capaian pada Unsur Pendidikan, yaitu terkait Indeks Pendidikan. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia serta efektivitas sistem pendidikan. Pada Indeks ini, semakin tinggi Indeks Pendidikan, semakin maju dan berkualitas sistem pendidikan di suatu wilayah. Sesuai dengan grafik diatas, Indeks Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi ditahun 2020-2024 mengalami tren yang meningkat dengan capaian tertinggi ada di tahun 2022-2024 yaitu sebesar 0.62%. Sementara capaian terendah ada ditahun 2020, yaitu menjadi sebesar 0.60%.

Nilai Indeks Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kondisi stagnan karena kenaikan indikator penyusunnya, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Harapan lama sekolah yang relatif tetap menunjukkan bahwa proyeksi jumlah tahun pendidikan yang diharapkan bagi anak-anak belum mengalami percepatan, sedangkan rata-rata lama sekolah mencerminkan masih rendahnya capaian pendidikan penduduk usia dewasa yang belum banyak berubah. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan akses pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi di beberapa wilayah, kesenjangan partisipasi sekolah akibat faktor ekonomi maupun sosial, serta tantangan dalam mendorong angka putus sekolah agar terus menurun. Stagnasi ini menandakan perlunya upaya yang lebih intensif melalui perluasan akses pendidikan berkualitas, program kejar paket atau pendidikan kesetaraan bagi penduduk dewasa, serta kebijakan afirmatif yang dapat meningkatkan lama sekolah secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain Indeks Pendidikan, pada Unsur Pendidikan terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.32 Capaian Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

No	Indikator SPM	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	82.53	81.92	98.16	93.31
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99.28	98.78	96.33	99.52
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	13.38	14.52	26.01	37.57
4	Skor kemampuan Literasi SD	54.99	60.18	65.78	67.67
5	Skor kemampuan Numerasi SD	39.42	45.96	54.51	60.14
6	Skor kemampuan Literasi SMP	61.97	66.19	73.51	75.95
7	Skor kemampuan Numerasi SMP	54.21	55.81	64.52	65.59
8	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	79.19	80.44	88.30	89.32
9	Indeks Iklim Keamanan SD	72.74	84.75	71.7	76.74
10	Indeks Iklim Kebinekaan SD	64.18	92.2	75.48	74.07
11	Indeks Inklusivitas SD	70.52	78.39	58.39	61.39
12	Indeks Iklim Keamanan SMP	75.14	80.9	67.40	70.27
13	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	63	84.03	73.34	70.92
14	Indeks Inklusivitas SMP	66.41	74.45	56.67	57.84

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Kabupaten Banyuwangi periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi pada setiap indikator. Partisipasi anak usia dini (PAUD) mengalami fluktuasi, dengan capaian 82,53% di tahun 2021 dan meningkat tajam pada 2023 sebesar 98,16%, namun sedikit menurun menjadi 93,31% pada 2024. Faktor yang memengaruhi fluktuasi ini antara lain adanya lembaga PAUD yang tidak memperbarui data peserta didik akibat pergantian operator, serta keberadaan lembaga PAUD yang beroperasi tanpa izin atau izinnya kedaluwarsa sehingga tidak terdata resmi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen data dan penertiban administrasi lembaga PAUD agar angka partisipasi dapat mencerminkan kondisi riil.

Partisipasi pendidikan dasar relatif stabil di atas 96% dan mencapai 99,52% pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta pendirian lembaga pendidikan baru yang memperluas akses bagi anak usia sekolah. Sementara itu, partisipasi pendidikan kesetaraan meningkat signifikan dari 13,38% di tahun 2021 menjadi 37,57% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan layanan pendidikan alternatif bagi anak yang tidak berkenan mengikuti sekolah formal, sehingga diarahkan ke jalur pendidikan kesetaraan. Upaya ini menjadi strategi penting untuk menekan angka putus sekolah dan mendukung target wajib belajar di Kabupaten Banyuwangi.

Kualifikasi pendidik PAUD menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 79,19% pada 2021 menjadi 89,32% di tahun 2024, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendidik PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini melalui tenaga pengajar yang kompeten dan profesional. Peningkatan kualitas tenaga pendidik diharapkan dapat berpengaruh langsung



pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak sejak usia dini, yang menjadi dasar bagi keberhasilan pendidikan di jenjang berikutnya.

Indeks iklim sekolah baik di tingkat SD maupun SMP menunjukkan hasil yang relatif baik, terutama pada aspek keamanan sekolah, yang meningkat melalui sosialisasi sekolah ramah anak, program sekolah sehat dan aman, serta arahan kepada guru untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, bebas bullying, dan kekerasan. Meskipun indeks kebinekaan mengalami penurunan pada 2023–2024, hal ini lebih disebabkan oleh perubahan metode dan rumus perhitungan indikator. Sementara itu, indeks inklusivitas masih menunjukkan fluktuasi dan belum mencapai angka optimal, sehingga pemerintah terus mendorong sosialisasi kepada guru untuk memperlakukan anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas istimewa secara setara, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua peserta didik.

Selain beberapa SPM urusan pendidikan diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan pendidikan, posyandu mengampu tentang edukasi orang tua terkait stimulasi anak, literasi, numerasi seperti Layanan *screening* tumbuh kembang untuk anak PAUD, Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dasar dan pencegahan putus sekolah, Informasi pendaftaran dan bantuan pendidikan.

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan, sehingga urusan kesehatan ini diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Kinerja pada urusan kesehatan ini, digambarkan melalui capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian indikator SPM pada urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33 Capaian Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	88,70	87,10	94,82	80,65	65,93
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	99,00	99,00	97,44	89,75	66,74
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	97,9	92,20	89,16	91,04	69,24



No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	61,4	73,70	77,85	90,59	78,21
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	56,10	37,40	81,60	91,97	99,29
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	53,00	83,00	96,82	98,77	100,36
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %	30,70	28,40	71,98	68,55	87,60
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	54,00	71,00	80,09	90,95	88,07
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %	64,00	76,00	84,59	92,20	96,19
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	60,00	62,00	83,72	95,32	86,15
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %	44,79	33,29	91,03	106,27	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100 %	92,00	87,00	100,77	97,84	84,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan tabel diatas, capaian SPM urusan Kesehatan di kabupaten Banyuwangi tahun 2022-2024, di beberapa jenis pelayanan mengalami penurunan di tahun 2024 pada indikator Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita) belum optimalnya kunjungan ibu hamil di trisemester pertama di layanan kesehatan dan belum optimalnya penerapan standar pelayanan kesehatan neonatal dasar pada fasilitas kesehatan. Mengoptimalkan pelayanan Kesehatan ibu dan anak dengan melakukan pendampingan Puskesmas Asuhan Spesialistik (PAS) oleh dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak.

Pada indikator Pelayanan kesehatan penderita hipertensi capaian tahun 2024 mengalami penurunan karena kurangnya kepatuhan minum obat kurang karena merasa sudah sembuh. Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan edukasi pada keluarga selaku pendamping minum obat dan penguatan inovasi Kampung Cerdik. Pada indikator pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)



berat mengalami penurunan dari tahun 2023 hal ini disebabkan masih adanya penolakan dari keluarga ODGJ dalam hal penanganan dari petugas Puskesmas. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat untuk melaksanakan pendampingan dan monitoring kondisi pasien ODGJ, dengan pemantauan Puskesmas setempat.

Pada indikator Pelayanan Kesehatan dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) pada tahun 2024 mengalami penurunan hal ini disebabkan belum optimalnya penjangkauan populasi kunci. Upaya yang dilakukan menguatkan jejaring dengan lintas sektor terkait penanggulangan HIV dalam penjangkauan populasi kunci. Selain beberapa SPM urusan kesehatan diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Pada urusan kesehatan, posyandu mengampu tentang imunisasi, pemantauan tumbuh kembang balita, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan, pemberian vitamin/gizi tambahan. Layanan kesehatan berupa Skrining kesehatan anak usia sekolah, Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Deteksi penyakit menular dan tidak menular. Selain melalui capaian indikator SPM, kinerja urusan kesehatan juga direpresentasikan oleh indikator lainnya, indikator tersebut antara lain yaitu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2.56 Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Pada grafik kinerja urusan kesehatan diatas, diperoleh dua indikator selain capaian SPM, yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk. Capaian pada indikator Persentase Balita Gizi Buruk cenderung memiliki tren menurun yang sebelumnya ditahun 2020 memiliki capaian sebesar 1.19. Capaian indikator tersebut mengalami penurunan hingga ditahun 2024 menurun menjadi sebesar 0.19. Tren gizi buruk di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan penurunan yang signifikan berkat berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan secara terintegrasi. Pencegahan gizi buruk dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk penggerakan dan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan skrining masalah gizi akut melalui kunjungan balita ke posyandu secara rutin. Penanganan kasus dilakukan melalui rujukan balita dengan gizi buruk ke rumah sakit untuk mendapatkan tata laksana yang tepat, seperti pemberian makanan padat gizi berupa Pangan Olahan untuk



Keperluan Medis Khusus (PKMK), konseling pola makan sesuai usia balita, serta pengobatan terhadap penyakit penyerta. Selain itu, peningkatan kolaborasi lintas program, sektor terkait, mitra pembangunan, dan pihak swasta turut memperkuat upaya pencegahan melalui kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, serta monitoring dan evaluasi berkala. Sinergi berbagai pihak ini menjadi kunci utama dalam menekan angka gizi buruk dan meningkatkan status gizi balita di daerah tersebut.

Desa Siaga adalah desa yang masyarakatnya memiliki kesiapan, kemampuan, dan kemauan untuk mencegah serta mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Ini berarti desa tersebut mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan sendiri, serta memiliki sistem untuk menghadapi keadaan darurat. Capaian desa siaga aktif di Kabupaten Banyuwangi selama kurun 5 (lima) tahun terakhir selalu meningkat. Tahun 2020 capaian desa siaga : 22,58%, tahun 2021 : 31,79%. Tahun 2022 : 36,40, tahun 2023 : 37,33 dan tahun 2024 : 49,77%

Di sisi lain, indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyuwangi masih mengalami kenaikan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan masih belum optimal, sehingga penanganan dini tidak berjalan maksimal. Selain itu, sebagian proses persalinan belum mengikuti standar medis yang telah ditetapkan, berpotensi meningkatkan risiko komplikasi pada ibu maupun bayi. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu di puskesmas juga belum merata di seluruh wilayah, menyebabkan adanya kesenjangan pelayanan antarwilayah. Faktor lain yang berpengaruh adalah masih kurang optimalnya peran dokter puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, baik dalam hal pemantauan kehamilan berisiko maupun penanganan kasus gawat darurat obstetri.

Sebagai langkah strategis untuk menurunkan AKI dan mencapai target indikator, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Pencegahan Angka Kematian Ibu dan Bayi (PENAKIB). Upaya ini diiringi dengan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui pengadaan dan perbaikan sarana serta prasarana layanan kesehatan ibu. Selain itu, dilakukan penataan standar jumlah dokter spesialis di seluruh fasilitas kesehatan agar sesuai kebutuhan pelayanan, disertai peningkatan akses terhadap pelayanan spesialis yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter subspesialis fetomaternal di Kabupaten Banyuwangi, guna memberikan penanganan yang lebih komprehensif pada kehamilan berisiko tinggi, sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin.

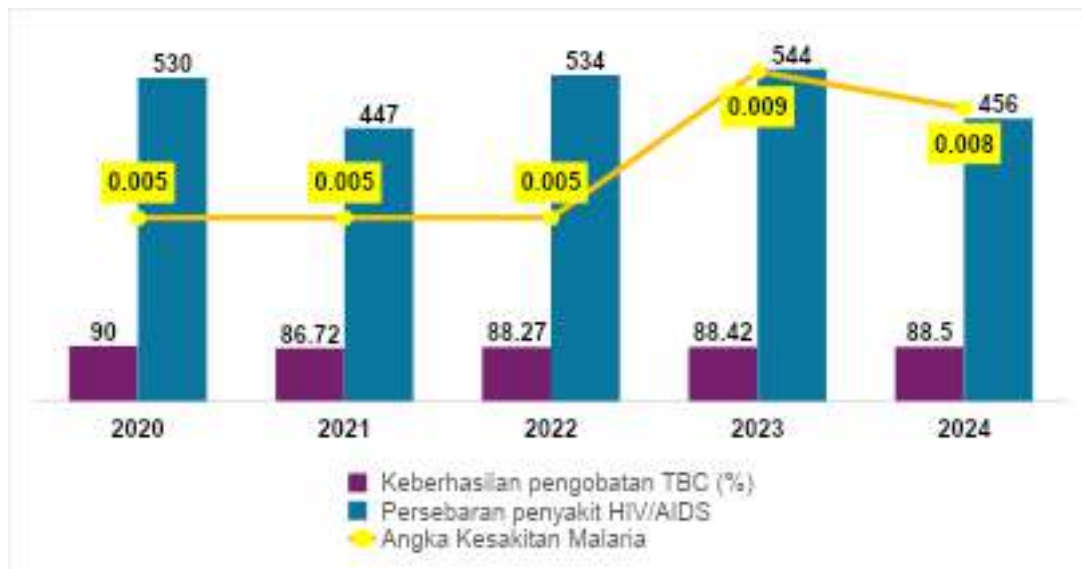
Selain terdapat dua indikator kinerja dan SPM pada urusan kesehatan, terdapat penyakit yang memiliki capaian yang perlu diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan yaitu terkait HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria. Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data temuan kasus TBC terkonfirmasi selama empat tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan.



- Tahun 2021 tercatat 2.342 kasus,
- Tahun 2022 meningkat menjadi 3.012 kasus,
- Tahun 2023 kembali naik menjadi 3.103 kasus,
- Tahun 2024 jumlah kasus mencapai 3.255 kasus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dan pelaporan kasus TBC semakin membaik, namun sekaligus menegaskan bahwa penularan TBC di masyarakat masih berlangsung cukup tinggi. Secara peringkat, pada tahun 2024 Kabupaten Banyuwangi menempati urutan ke-9 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dengan jumlah kasus TBC terkonfirmasi. Hal ini menjadi peringatan bahwa Banyuwangi masih termasuk wilayah dengan beban TBC yang tinggi di provinsi.

Tingginya kasus AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM), telah menjadi perhatian penting dunia hingga saat ini. Ketiga penyakit ini juga sering kali diasosiasikan sebagai penyakit yang erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketidak-seimbangan sosial yang terjadi di masyarakat, dari konteks kebijakan politik pemerintah ketiga kasus ini juga dapat menjadi indikator bahwa negara tidak dapat memberikan fasilitas kesehatan yang mumpuni bagi masyarakatnya. Maka, jumlah HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2.57 Capaian Indikator HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan gambar grafik diatas, untuk indikator Keberhasilan Pengobatan TBC di Kabupaten Banyuwangi, mengalami tren yang fluktuatif, yang capaian ditahun 2022-2024 mengalami peningkatan dengan capaian akhir sebesar 88,50%. Berdasarkan data capaian pengobatan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Banyuwangi selama periode 2020–2024, tingkat keberhasilan pengobatan rata-rata mencapai 88,39%. Meskipun terjadi tren kenaikan pada tahun 2024, capaian tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 90%. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ketidakpatuhan pasien dalam



mengonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara teratur, tingginya angka putus pengobatan, serta kematian pasien selama masa terapi. Faktor-faktor tersebut mengindikasikan masih adanya tantangan besar dalam mengoptimalkan penanganan TBC, terutama pada aspek pendampingan pasien dan pemantauan kepatuhan pengobatan agar tidak menimbulkan kasus resistensi obat di kemudian hari.

Selain TBC, kasus HIV juga menjadi salah satu perhatian utama di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2024, tercatat kasus baru HIV mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaran kasus tertinggi berada di Kecamatan Banyuwangi, Srono, Kalipuro, Muncar, dan Rogojampi. Tingginya angka di Kecamatan Banyuwangi diperkirakan terkait dengan ketersediaan layanan tes HIV yang lebih luas serta keberadaan populasi kunci yang berisiko tinggi di wilayah tersebut. Penurunan kasus baru ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program pencegahan dan deteksi dini, meskipun secara keseluruhan Kabupaten Banyuwangi masih menjadi salah satu penyumbang kasus HIV terbesar di Jawa Timur.

Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Banyuwangi masih menghadapi tantangan pada aspek kesinambungan pengobatan bagi Orang dengan HIV (ODHIV). Hingga tahun 2024, cakupan pengobatan antiretroviral (ARV) baru mencapai 72%, angka yang masih cukup rendah jika dibandingkan dengan target yang diharapkan. Rendahnya capaian ini sebagian besar disebabkan oleh karakteristik kasus baru yang teridentifikasi dalam stadium awal tanpa gejala penyerta. Banyak ODHIV yang merasa sehat sehingga menunda atau menolak memulai terapi ARV, padahal pengobatan dini berperan penting dalam menekan perkembangan virus dan mencegah penularan lebih lanjut.

Annual Parasite Incidence (API) malaria di Kabupaten Banyuwangi sempat mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2024 meskipun belum sepenuhnya mencapai target nasional API < 1. Berdasarkan data Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam 18 kabupaten dengan angka API $\leq 0,01$, sementara 9 kabupaten lainnya memiliki angka lebih tinggi, dan 11 kabupaten berhasil mencatatkan nol kasus malaria. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian malaria di Banyuwangi relatif efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam mempertahankan angka kasus yang stabil rendah sesuai target nasional.

Sebagai wilayah yang telah memperoleh sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2015, Kabupaten Banyuwangi saat ini berada pada tahap pemeliharaan eliminasi untuk mencegah terjadinya kasus baru maupun reintroduksi malaria. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan surveilans rutin untuk pemantauan kasus, pelaksanaan survei reseptivitas guna mendeteksi potensi penularan kembali, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan agar mampu memberikan tata laksana kasus malaria secara cepat dan efektif. Strategi ini diharapkan dapat menjaga status eliminasi malaria sekaligus mendorong Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah bebas malaria yang berkelanjutan di Jawa Timur.



3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Cipta karya merupakan Urusan Wajib dasar yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Pada dasarnya pembangunan infrastruktur sangatlah luas dimana infrastruktur dapat berkaitan dengan segala aspek kehidupan namun infrastruktur yang sangat berdampak pada kemajuan daerah serta dapat merepresentasikan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan infrastruktur dan sarana prasarana publik antara lain adalah pembangunan jalan. Hal ini tentunya menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengingat Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah yang sangat besar dan terbentang dari utara hingga selatan pada ujung timur Pulau Jawa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa terdapat 2 target pencapaian SPM bidang pekerjaan umum. Adapun capaian indikator SPM urusan pekerjaan umum secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Jenis Layanan Dasar	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	86,4	100	100	100	100
Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	92,1	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2025

Capaian SPM pada urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 4 tahun (2020-2023) memiliki capaian yang telah mencapai target untuk ditahun 2021-2023 yaitu sebesar 100% atau telah berpredikat Tuntas Paripurna. Seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi telah tersediakan kebutuhan pokok air minum untuk sehari-hari dari berbagai sumber air minum serta terlayani pengolahan air limbah domestiknya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan SPM tahun 2023, yakni terkait pembangunan SPALD-T yaitu sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Tidak adanya lahan untuk membangun SPALD-T di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan diikuti peran warga yang sangat kurang pengetahuan terkait manfaat terbangunnya SPALD-T di wilayah masing-masing menjadi hal yang perlu dijadikan perhatian kedepannya.

Selain beberapa SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, posyandu mengampu tentang edukasi dan informasi akses air minum aman serta sanitasi layak seperti Sosialisasi pengelolaan air bersih rumah tangga dan Edukasi pengelolaan limbah rumah tangga. Adapun



capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur jalan dapat dilihat melalui indikator dibawah ini:



Gambar 2.58 Capaian Indikator Urusan PUPR Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PUCKPP & Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan grafik di atas, kondisi jalan baik mengalami peningkatan yang menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan jalan di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2023 upaya ini juga semakin digalakkan dimana Pembangunan jalan menjadi bagian dari gerakan “Banyuwangi Rebound” dengan target pembangunan jalan mencapai 222 Kilometer, diluar jalan provinsi yang telah ditetapkan melalui SK Gub Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya, yang di Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang ruas jalan provinsi sepanjang 117,274 Kilometer. Namun dalam periode kedepan berbagai kondisi dan permasalahan akan muncul dengan berbagai dinamika utamanya dengan adanya tantangan perubahan iklim, Perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca tidak menentu akan berdampak kepada ketahanan jalan sehingga dengan jumlah curah hujan akan berdampak kepada kerusakan jalan yang lebih cepat disisi lain penggunaan jalan yang semakin banyak, dan tuntutan masyarakat yang terus menerus perlu diakomodir secara berkesinambungan melalui perkembangan teknologi yang semakin maju dalam perbaikan jalan.

Persentase ketersediaan air irigasi dari kurun waktu berangsur juga mengalami tren positif, dengan capaian tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 90,11%. Data diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya selama ini mendapatkan hasil yang positif meskipun mengalami penurunan di tahun berjalan. Hambatan yang masih terjadi adalah terkait faktor alam seperti cuaca tidak menentu sehingga dapat mengurangi debit air hingga 25% di musim kemarau, adanya konflik kepentingan antar petani karena kekeringan, adanya korsda (pembagian wilayah air) serta adanya internalisasi dengan petani



agar mengurangi konflik antar petani. Untuk menanggulangi hal tersebut maka akan dilakukan beberapa tindakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Dinas PU Pengairan dengan melakukan beberapa monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan terkait urusan pengairan. Namun ada beberapa hal yang menghambat ketercapaian atau ketersediaan air bersih di Kabupaten Banyuwangi yaitu adanya faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi sehingga menyebabkan ketersediaan air berkurang. Selain itu juga adanya sumber mata air yang inaktive karena ketersediaan air dalam tanahnya habis.

Pada Sub Pengairan, irigasi atau pengairan adalah suatu usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi, setelah air itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pengairan mengandung arti memanfaatkan dan menambah sumber air dalam tingkat tersedia bagi kehidupan tanaman. Namun tidak dapat dipungkiri usaha yang telah dilakukan oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi dalam mengupayakan irigasi bagi lahan pertanian yang ada di antaranya melalui pembangunan jaringan irigasi, pembangunan embung (*long storage*), serta kegiatan normalisasi sungai seperti pengerukan sedimen yang dapat meningkatkan debit air. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, diperlukan inklusif dan merata, terutama di mana sumber daya air terbatas. Pada musim kekeringan, misalnya, banyak daerah pertanian tidak ditanami karena air diperlukan tidak cukup. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, perlu diterapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Penggunaan sumber daya tenaga hidrolik disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar berikutnya adalah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penyediaan tempat tinggal hunian yang layak tentu menjadi salah satu aspek dasar kebutuhan manusia. Pemerintah daerah harus memperhatikan bagaimana masyarakat dapat tinggal layak walaupun kondisi perekonomian mereka berada dalam kondisi yang buruk. Harga Tanah, Aset bahkan material bangunan setiap tahunnya terus mengalami kenaikan sehingga persoalan ini ke depan menjadi tantangan utamanya bagi masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada periode 5 tahun (2022-2024) direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut ini:

Tabel 2.35 Capaian SPM urusan Perkim Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

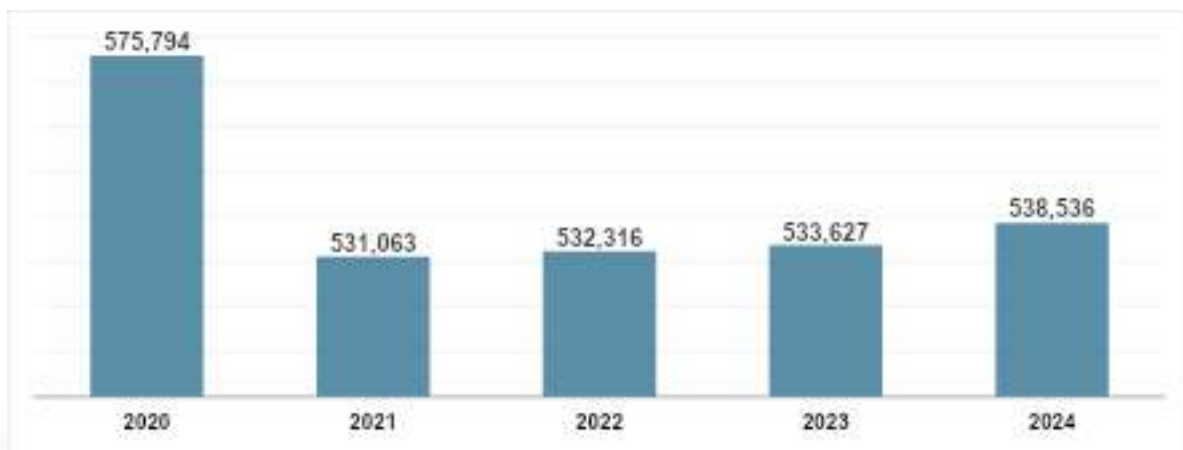
Jenis Layanan Dasar	Tahun		
	2022	2023	2024
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2025



Capaian SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi telah berpredikat Tuntas Paripurna, artinya sudah mencapai target 100% sejak tahun 2022-2024. Seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi telah terlayani layanan penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni melalui bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana, rehabilitasi rumah bagi korban bencana, pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana, dan pembangunan baru dilokasi baru/ relokasi bagi korban bencana. Yang masih perlu menjadi perhatian terkait pelaksanaan SPM sub indikator ini adalah terkait permasalahan dalam pelaksanaannya dengan dasar Perbup Nomor 31 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kab. Banyuwangi. Dimana terdapat tahapan- tahapan yang harus disesuaikan untuk pelaksanaannya, contoh salah satunya untuk bencana yang terjadi pada tahun 2023 saat ini akan bisa diproses atau baru bisa ditindak lanjuti pada waktu perubahan anggaran kegiatan tahun 2023 / PAK, sehingga masyarakat yang terkena bencana tersebut biasanya sudah terbantu dari desa/ CSR. Sedangkan untuk indikator SPM terkait Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100%, karena jumlah yang harus dilayani memang 0 artinya tidak ada penduduk yang terkena relokasi program pemerintah.

Selain beberapa SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, posyandu mengampu tentang informasi dan pendampingan rumah layak huni, seperti adanya Sosialisasi program rumah layak huni dan bantuan perbaikan rumah dan Edukasi tentang lingkungan sehat di permukiman. Kinerja urusan perumahan dan permukiman juga direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

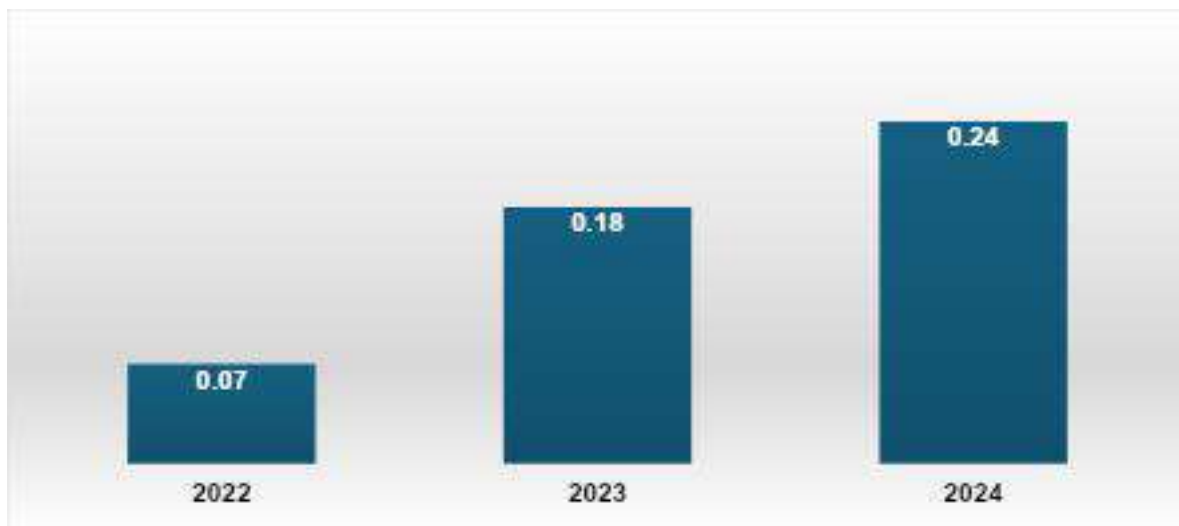


Gambar 2.59 Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak dan Terjangkau di Kab. Banyuwangi Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2025



Berdasarkan capaian diatas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun secara konsisten memberikan anggaran terhadap peningkatan layanan RTLH yang terjangkau sehingga masyarakat yang memiliki daya beli rendah terhadap rumah yang layak huni dapat turut serta pada program yang telah di jalankan oleh pemerintah dan dapat tinggal di rumah yang layak. Berdasarkan angka capaian maka sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memberikan layanan RTLH terjangkau sebanyak 533627 Rumah yang dilakukan secara bertahap sehingga apabila dirata-rata Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan 40 RTLH terjangkau pada setiap tahunnya. RTLH sendiri memiliki standarisasi dimana kondisi rumah tersebut harus memenuhi aspek dan indikator sehingga dapat dikategorikan layak. Terlepas pada penyediaan RTLH itu sendiri secara umum masyarakat Kabupaten Banyuwangi memerlukan pengolahan sanitasi yang baik sehingga hal ini dapat memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. Terdapat beberapa hambatan dalam indikator ini seperti rendahnya daya beli rumah tangga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan akses terhadap KPR subsidi terbatas (minimnya perbankan yang menyasar sektor informal), sehingga jumlah Rumah Tangga Hunian Layak dan Terjangkau mengalami penurunan.



Gambar 2.60 Proporsi Rumah Tangga terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja di Kab. Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2025

Data diatas menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif berada pada rentang capaian 0,07 sampai dengan 0,24. Pengelolaan Lumpur Tinja itu sendiri dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yakni (1) Pengurasan, dilakukan dengan mengeluarkan lumpur tinja pada tangki atau fasilitas sanitasi. (2)Pengangkutan, Mengangkut Lumpur Tinja dari lokasi pengurasan menuju tempat pengolahan. (3)Pengolahan, Mengolah lumpur tinja menjadi produk yang aman dan bermanfaat. Diantaranya kompos, biogas dan lain sebagainya. (4) Pemanfaatan, memanfaatkan produk hasil pengolahan untuk keperluan masyarkat misal pertanian, irigasi dan energi. Proporsi capaian diatas perlu ditingkatkan kedepannya mengingat pada



RPJPN juga disoroti tentang penggunaan EBT (energi baru dan terbarukan) sehingga dengan pengelolaan yang maksimal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat secara linear berperan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional. Pengelolaan air limbah domestik perlu dikelola dengan baik, dikarenakan saat ini hanya ada satu IPLT (instalasi Pengelolaan Limbah Terpusat) yang berada di Kertosari maka belum dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial memiliki tiga sub urusan yaitu sub tantribum yang diampu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, sub kebakaran diampu oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi dan sub bencana diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada urusan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial memiliki beberapa indikator serta Standar Pelayanan Minimal yang dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.



Gambar 2.61 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Satpol PP, BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Pada grafik Indikator pada urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial, terdapat tiga indikator yaitu Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani dimana capaian dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dan telah mencapai target mulai tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Tercapainya capaian indikator tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya terdapat inovasi *first 4 minutes response time* di Kabupaten banyuwangi, adanya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang paham Perda. Sementara indikator kedua adalah Persentase Penanganan Pasca Bencana yang memiliki tren fluktuatif dengan capaian terendah ada ditahun 2023 yaitu sebesar 89.52%. Namun, ditahun 2024, capaian ini



mengalami peningkatan kembali dan telah mencapai target menjadi 100%. Indikator terakhir pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial adalah mengenai waktu tanggap (*Response Time*) penanganan kebakaran dimana tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 12, yang sebelumnya ditahun 2020 memiliki capaian sebesar 15. Kemudian ditahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 12.63. Dari beberapa indikator tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan capaian seperti keterlambatan masyarakat yang menghubungi pemadam kebakaran, terjadinya kemacetan yang menyebabkan terhambatnya mobilitas pemadam kebakaran, keterbatasan jumlah personil, kelayakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang kurang, adanya sistem baru dalam penanganan pemadam, dan hanya terdapat 3 pos pemadam yaitu di wilayah Genteng, Srono, dan Bango. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan *-Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36 Capaian Penyelenggaraan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Sosial Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Sub-Urusan Trantibum						**
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sub-Urusan Kebencanaan						
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Sub-Urusan Kebakaran						
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP, BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan tabel SPM unsur Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial, terdapat dua indikator didalamnya. Antara lain yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Kedua indikator tersebut pada SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial telah mencapai target ditahun 2022-2024 yaitu sebesar 100%. Selain beberapa SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024



tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial, posyandu mengampu tentang informasi kesiapsiagaan bencana dan keamanan lingkungan, seperti Edukasi penanggulangan kebakaran, banjir, dan bencana lainnya dan Simulasi evakuasi dan keselamatan anak.

6) Sosial

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi merupakan gabungan antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dari perubahan tersebut, maka terbentuklah Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 sebagai acuan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Kinerja urusan sosial direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana berikut:

Tabel 2.37 Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian (%)		
		2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100	100	100

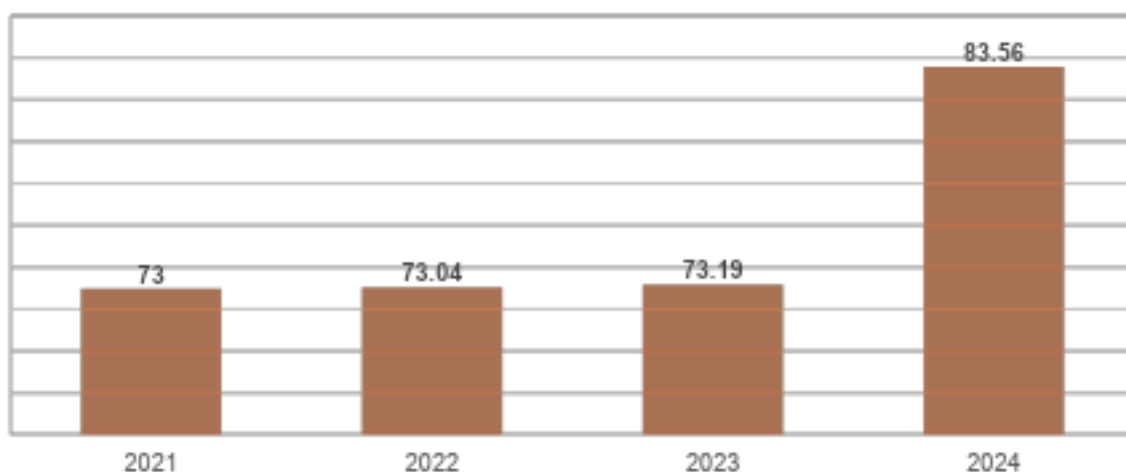
Sumber: Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kelima indikator SPM urusan sosial di Kabupaten Banyuwangi telah mencapai angka 100%. Artinya seluruh indikator terkait kelompok rentan baik itu penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar. Selain itu juga bagi korban bencana di Kabupaten Banyuwangi telah mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial yang mencapai 100% dipengaruhi oleh mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Sebelum menentukan kuota penerima manfaat, pihak Dinas Sosial terlebih dahulu melakukan asesmen mendalam untuk memetakan kondisi masyarakat yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial, seperti anak terlantar, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar. Pendekatan ini memastikan bahwa alokasi kuota program disesuaikan secara tepat sasaran dengan jumlah penerima manfaat yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Dengan demikian, setiap individu yang masuk dalam kategori rentan sosial dapat terakomodasi seluruhnya, sehingga pelaksanaan program rehabilitasi sosial berjalan efektif, tanpa adanya kesenjangan layanan, dan capaian SPM dapat terpenuhi secara maksimal. Selain beberapa SPM urusan Sosial diatas, terdapat tambahan SPM tentang posyandu yang diusulkan melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada urusan kesehatan saja, seluruh urusan wajib pelayanan dasar diharapkan mendukung pencapaian posyandu. Pada urusan Sosial, posyandu mengampu tentang perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, seperti Pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial, Layanan konseling keluarga, dan Informasi akses fasilitas sosial untuk lansia dan disabilitas.

Selain indikator SPM, kinerja urusan sosial dapat direpresentasikan oleh indikator capaian indikator PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya termasuk (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.



Gambar 2.62 Persentase Pelayanan PPKS di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025



Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Banyuwangi mengalami tren kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terdapat 26 jenis yang masuk dalam kategori PPKS. Faktor penghambat yang perlu dijadikan perhatian adalah terkait data PPKS yang terus bergerak sehingga diperlukannya integrasi data untuk memudahkan intervensi, masih belum adanya shelter /wadah untuk menampung PPKS terlantar serta bencana yang tidak mengetahui prediksi. Keberhasilan penanganan persoalan PPKS pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh komponen dalam masyarakat (stakeholder), yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama antar berbagai pihak dalam rangka memberikan pelayanan kepada PPKS tersebut.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Tenaga Kerja

Pelayanan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi. Secara tupoksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk memberikan pelayanan diberbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk pencarian kerja, pelatihan keterampilan, perlindungan hak-hak pekerja, dan layanan terkait lainnya. Berikut merupakan capaian kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.63 Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Capaian kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, khususnya dalam penurunan angka sengketa hubungan industrial dan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Berdasarkan grafik, terjadi penurunan tajam angka sengketa antara pengusaha dan pekerja dari 45 kasus pada tahun 2020 menjadi hanya 17 kasus di tahun 2024. Pada masa pandemi



COVID-19, tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat tajam akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan penurunan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi ini memicu tingginya potensi konflik, baik antara pekerja dan pemberi kerja maupun antarpekerja, karena meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, ketidakpastian penghasilan, serta tekanan psikologis yang dihadapi oleh rumah tangga terdampak. Memasuki periode pascapandemi, perekonomian berangsur pulih dengan dibukanya kembali berbagai sektor usaha, peningkatan aktivitas produksi, dan bertambahnya lapangan kerja baru. Normalisasi kondisi ini berkontribusi pada penurunan tingkat konflik di dunia kerja, karena peluang kerja mulai membaik, stabilitas penghasilan meningkat, dan hubungan industrial secara bertahap kembali harmonis.

Tren positif juga ditunjukkan oleh capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, dari 56,8% pada 2020 menjadi 62,87% pada 2024. Hal ini merupakan capaian signifikan, karena memperlihatkan bahwa perempuan di Banyuwangi semakin aktif dalam sektor ekonomi dan produktif. Peningkatan ini juga beriringan dengan berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendampingan UMKM perempuan, hingga peningkatan akses terhadap sektor informal dan ekonomi kreatif. Sementara itu, TPAK laki-laki tetap tinggi dan stabil, dengan angka tertinggi sebesar 89,83% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam pasar kerja masih kuat, tetapi perbedaan gender dalam partisipasi angkatan kerja mulai menyempit. Beberapa program inovatif Pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut memperkuat capaian ini, seperti pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja, program padat karya, hingga kerja sama dengan sektor swasta untuk penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan digital yang memudahkan pencari kerja dalam mengakses lowongan, pelatihan, dan peluang magang, sebagai respons terhadap transformasi digital.

Selain upaya dalam penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga terus mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan pekerja formal dan informal. Program jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang aman dan berkeadilan. Dalam hal ini, target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) menjadi komitmen yang tengah diupayakan, yakni menjamin seluruh pekerja—baik Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU)—memperoleh perlindungan kerja yang layak. Segmen BPU mencakup kelompok pekerja rentan seperti buruh tani, nelayan, pedagang kecil, serta elemen penting dalam ekosistem desa seperti perangkat desa, anggota BPD, RT/RW, kader kesehatan, dan kader pembangunan.

Berdasarkan data, capaian UCJ Kabupaten Banyuwangi pada akhir tahun 2024 diperkirakan mencapai 18,74 persen, dihitung dari jumlah peserta aktif sebanyak 195.458 jiwa dari total 1.042.983 penduduk yang bekerja. Meskipun belum mencapai target nasional universal coverage, capaian ini menunjukkan komitmen dan kemajuan awal yang signifikan. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus memperkuat integrasi lintas sektor serta memperluas kepesertaan melalui berbagai skema subsidi, kemitraan, dan edukasi, guna memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial yang adil dan menyeluruh.



2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi serta membangun tata kelola melalui kebijakan yang inklusif dan berperspektif gender. Kinerja urusan PPKB direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

Tabel 2.38 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Implementasi PPRG	%	N/A	23	25.09	30.63	41
Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah	118	92	96	226	98

Sumber: Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan data kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kabupaten Banyuwangi, terdapat perkembangan dalam implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persentase implementasi PPRG menunjukkan peningkatan dari 23% pada 2021 menjadi 41% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Namun, angka tersebut masih menunjukkan bahwa lebih dari 60% program belum sepenuhnya responsif gender, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Jumlah penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak mengalami fluktuasi signifikan. Pada 2023, tercatat 226 kasus, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 96 kasus. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam perlindungan perempuan dan anak di Banyuwangi. Sebagai respons, pemerintah daerah bersama kepolisian membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan tersebut. Meskipun terdapat kemajuan dalam implementasi PPRG, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan perlunya penguatan program perlindungan dan pemberdayaan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesetaraan gender di Banyuwangi.

Peningkatan skor pada indikator perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi dipengaruhi oleh adanya alokasi anggaran khusus serta penyelenggaraan pelatihan terkait Pengarusutamaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang memperkuat kapasitas aparaturnya dalam merancang program yang lebih sensitif terhadap isu gender dan perlindungan anak. Selain itu,



sosialisasi dan advokasi terkait penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong pelaporan kasus secara tepat waktu. Namun demikian, kenaikan skor tidak selalu menunjukkan kondisi yang sepenuhnya membaik, begitu pula sebaliknya, karena angka tersebut sangat bergantung pada jumlah kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti. Semakin banyak laporan yang masuk dapat menaikkan skor penanganan kasus, tetapi hal ini juga menandakan tingginya kasus yang terjadi di lapangan, sehingga interpretasi capaian indikator ini perlu dilihat secara lebih komprehensif.

3) Pangan

Pangan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Maka, kondisi pangan di masa depan sangat berpengaruh bagi pemerintah karena di beberapa kondisi, urusan pangan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan populasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan dinamika ekonomi global. Perkiraan pertumbuhan populasi global, meningkatnya permintaan pangan akan menjadi tantangan utama. Urusan pangan memiliki kinerja capaian yang didasarkan pada beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.64 Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Pada grafik diatas, terdapat tiga indikator kinerja capaian pada urusan Pangan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu yang pertama adalah Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Unggulan yang mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Ditahun 2022, Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Unggulan mengalami penurunan menjadi sebesar 282.63 yang kemudian ditahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 311.23. Penurunan



yang terjadi ditahun 2022 diakibatkan oleh bebernapa hal, diantaranya yaitu fluktuasi harga pangan yang tidak stabil membuat petani sulit merencanakan produksi, kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan produk pertanian, dan Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem dan serangan hama penyakit tanaman yang menyebabkan gagal panen atau menurunkan kualitas hasil pertanian.

Indikator kinerja capaian urusan pangan kedua adalah terkait Skor PPH Ketersediaan, dimana pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam menjamin ketahanan pangan daerah, untuk mengukur sejauh mana kualitas pangan daerah dapat dilihat melalui keragaman pangan yang tersedia. Oleh karenanya dalam mengevaluasi sejauh mana ketersediaan pangan berdasarkan keragaman pangan perlu diukur melalui indikator Skor PPH Ketersediaan. Nilai yang diukur melalui indikator ini adalah susunan kesediaan keragaman pangan yang didasarkan atas proporsi upaya berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi dan kualitas maupun kuantitas pangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yakni sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi masyarakat pangan. Sesuai dengan grafik diatas, pada Skor PPH Ketersediaan di Kabupaten Banyuwangi mengalami tren yang meningkat, dimana tahun 2020, Skor PPH Ketersediaan memiliki nilai sebesar 95 yang kemudian ditahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 95.63. Kondisi ini menunjukkan semakin beragamnya pangan yang tersedia di wilayah Kabupaten Banyuwangi seiring berjalannya waktu.

Selain dihitung Skor PPH dari sisi Ketersediaannya, Skor PPH juga dihitung dari tingkat konsumsinya. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka semakin beragam serta semakin terpenuhi nilai gizi dan cita rasa masyarakat dalam suatu wilayah, dan berlaku sebaliknya. Skor pola konsumsi pangan mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan dan seimbang. Skor PPH Konsumsi di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang fluktuatif, dimana capaian tahun 2024 memiliki nilai tertinggi dan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar 96.67 yang sebelumnya ditahun 2023 memiliki nilai sebesar 91.40. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah tahun, semakin beragam serta semakin terpenuhi nilai gizi dan cita rasa masyarakat Kabupaten Banyuwangi, meskipun ditahun-tahun tertentu memiliki capaian yang menurun. Namun, secara keseluruhan, capaian Skor PPH Konsumsi di Kabupaten Banyuwangi, memiliki beberapa tantangan, yaitu dominasi konsumsi beras di masyarakat sehingga konsumsi pangan lain seperti jagung, ubi, kedelai masih rendah dan masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya diversifikasi pangan dan konsumsi gizi seimbang.

4) Pertanian

Urusan bidang pertanian melaksanakan tugas penyiapan bahan yang berhubungan dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya terkandung dengan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan serta penyusunan laporan pada Bidang Pertanian. Bidang pertanian sendiri memiliki tugas untuk melaksanakan penatausahaan



pertanahan, fasilitas pemanfaatan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Salah satu indikator dalam urusan bidang pertanahan Kabupaten Banyuwangi ini adalah banyaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan tiap tahunnya. Berikut kondisi capaiannya:



Gambar 2.65 Capaian Indikator Urusan Pertanahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

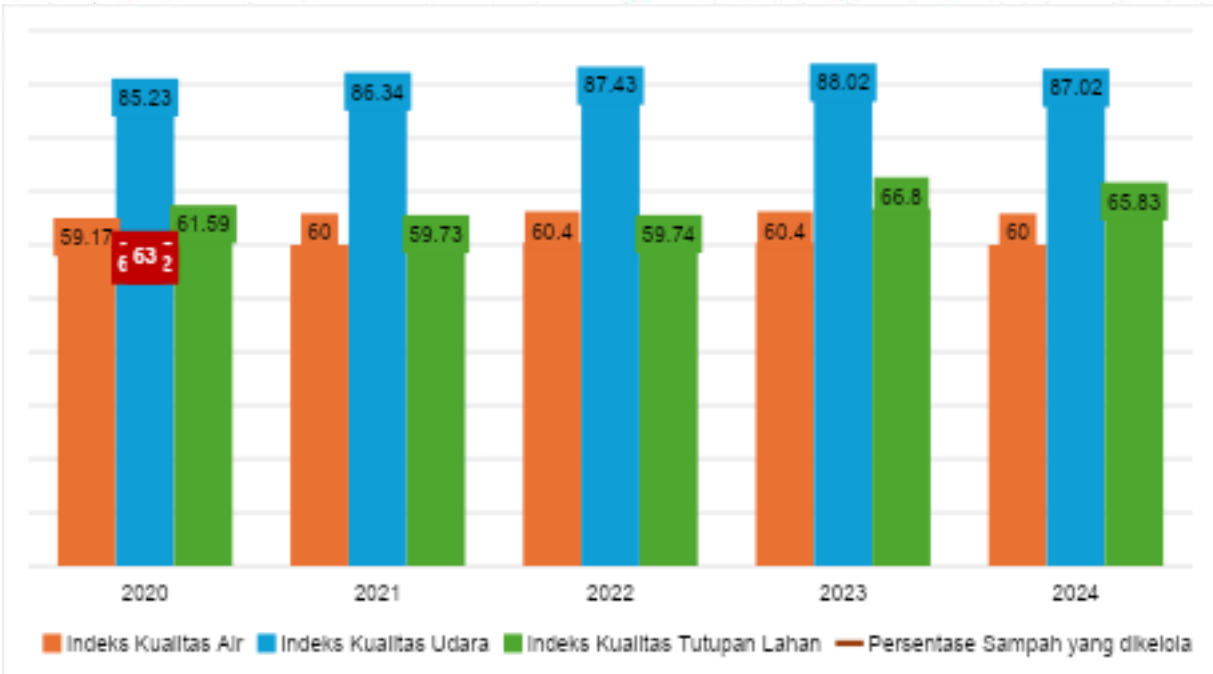
Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi Tahun, 2025

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banyuwangi terbanyak terjadi di tahun 2021 dengan total 70.021 sertifikat. Sedangkan jumlah paling sedikit terjadi di tahun 2024 yaitu yang hanya 4.058 sertifikat. Jumlah ini sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 65.622 sertifikat, lalu sedikit menurun menjadi 35.867 sertifikat di tahun 2023.

Terkait dengan urusan pertanahan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah berupaya untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang terjadi dibidangnya. Seperti di tahun 2023, terdapat 8 konflik pertanahan di lingkup Kabupaten Banyuwangi. 1 konflik sudah terselesaikan hingga akhir, namun sisanya sebanyak 7 konflik masih dalam proses penyelesaian. Proses fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan ini akan tergantung dengan tingkat ringan atau susahya konflik pertanahan yang terjadi.

5) Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Kinerja urusan lingkungan hidup secara garis besar direpresentasikan oleh capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, dimana komposit di dalamnya terdiri atas berikut:



Gambar 2.66 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 2025

Capaian komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dengan peningkatan pada beberapa indikator. Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami perbaikan dari 85,23 pada 2020 menjadi 87,02 pada 2024 yang menunjukkan peningkatan hingga mendekati standar kualitas udara di atas nilai 90. Di sisi lain, Indeks Kualitas Air berfluktuasi, dengan angka tertinggi 60,4 pada 2022-2023, tetapi kembali turun ke 60 pada 2024. Nilai ini masih tergolong rendah dibandingkan nilai standar ideal >70, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas air akibat potensi pencemaran atau kurang optimalnya pengelolaan limbah. Sementara itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami peningkatan dari 59,37 pada 2021 menjadi 65,83 pada 2024. Meski mengalami perbaikan, capaian ini belum mencapai standar ideal di atas nilai 75 yang menunjukkan keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan tutupan lahan. Secara keseluruhan, upaya lebih lanjut dalam pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan maupun penurunan, yaitu faktor air yang berkualitas meningkat, pembangunan pengelolaan limbah domestik, penggalakan penanaman pohon kembali, sampel kualitas air yang terindikasi mengalami pencemaran, peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan terjadinya pembukaan lahan baru, masih ada sanitasi yang buruk dalam pengelolaan limbah domestik, dan terjadinya alih fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tanaman semusim.

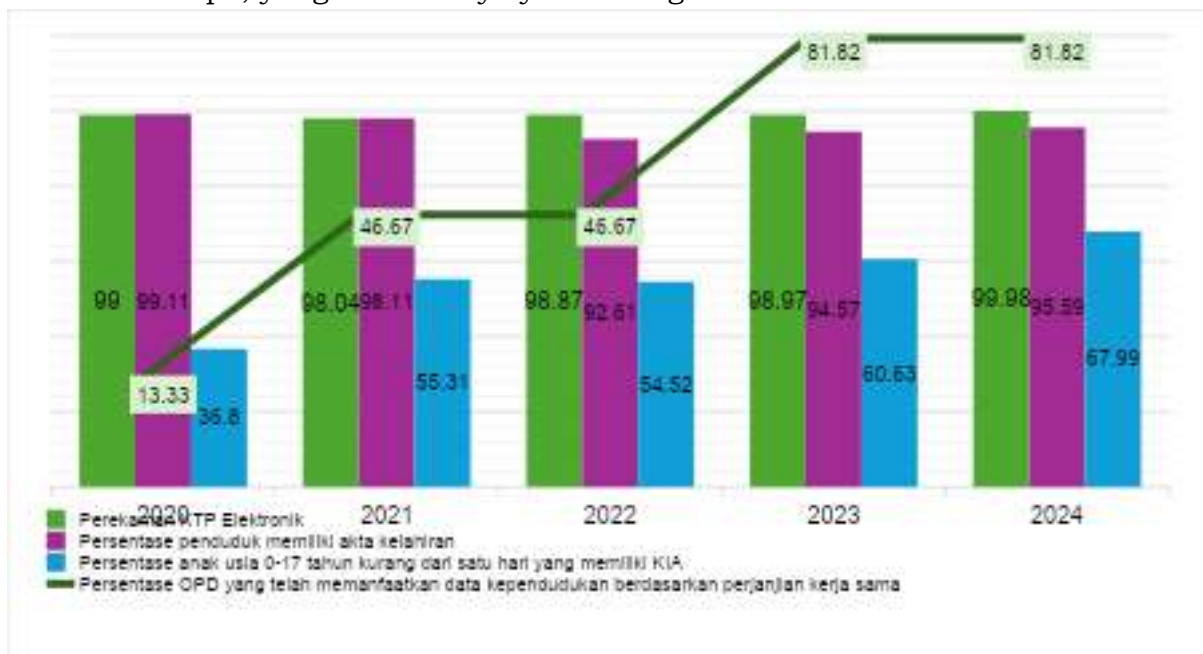
Dari aspek persampahan, persentase sampah yang dikelola mengalami tren peningkatan, dari 61% pada 2020 menjadi 63% pada 2024. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyuwangi harus dijadikan perhatian mengingat



angkanya masih belum optimal untuk memastikan semua sampah terkelola dengan baik. Dari peningkatan tersebut, terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan, yaitu antara lain penambahan sarpras dengan membangun TPS3R di Balak dan menjalin kemitraan dengan beberapa NGO dalam pengelolaan persampahan. Sementara terdapat faktor lain selain faktor yang mempengaruhi peningkatan, yaitu sarpras pengangkutan sampah yang kurang optimal dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah yang masih kurang.

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan wajib non dasar bagi masyarakat. Sesuai dengan dinamika penduduk di setiap daerah, perlunya rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Maka terdapat beberapa indikator untuk mencapai capaian kinerja pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diantaranya yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.67 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, salah satu indikator pada capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perekaman KTP Elektronik dimana capaian pada tahun 2020-2024 mengalami tren yang menurun, namun penurunan tersebut terjadi secara tidak signifikan. Penurunan terjadi ditahun 2021 menjadi sebesar 98.04% yang sebelumnya ditahun 2020 sebesar 99%. Salah satu faktor penurunan dari capaian kinerja ini adalah kurangnya kesadaran bagi pemilih pemula untuk segera melakukan perekaman. Namun, capaian pada urusan ini mengalami peningkatan kembali hingga ditahun 2024 menjadi sebesar



99.98%. Peningkatan capaian terjadi karena adanya pembaruan peralatan rekam di seluruh kecamatan sehingga lokasi perekaman semakin dekat dengan masyarakat.

Sementara indikator kedua adalah Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran, dimana dari tahun 2020 hingga 2024 indikator ini memiliki tren yang fluktuatif. Penurunan terjadi ditahun 2021 menjadi sebesar 98.11% yang sebelumnya ditahun 2020 memiliki capaian sebesar 99.11%. Dimana penurunan tersebut diakibatkan salah satunya adalah adanya Pandemi Covid-19 yang saat itu meningkat, selain adanya Pandemi Covid-19, penurunan terjadi disebabkan oleh belum terintegrasinya data kependudukan sebelum adanya SIAK. Namun, ditahun 2022 hingga 2024, capaian pada indikator ini mengalami peningkatan hingga ditahun 2024 mencapai 95.59%.

Indikator ketiga adalah terkait dengan Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang dari Satu Hari yang Memiliki KIA, yang pada indikator ini memiliki capaian dengan tren mengalami peningkatan. Ditahun 2020, indikator Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang dari Satu Hari yang Memiliki KIA memiliki capaian sebesar 36.80% yang kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi sebesar 55.31% yang kemudian ditahun 2024 menjadi sebesar 67.99%. Peningkatan secara signifikan terjadi salah satunya dikarenakan adanya kerjasama pelayanan dengan PKM dan RS sehingga bayi baru lahir dapat secara langsung mengurus Akta Kelahiran melalui PKM atau RS.

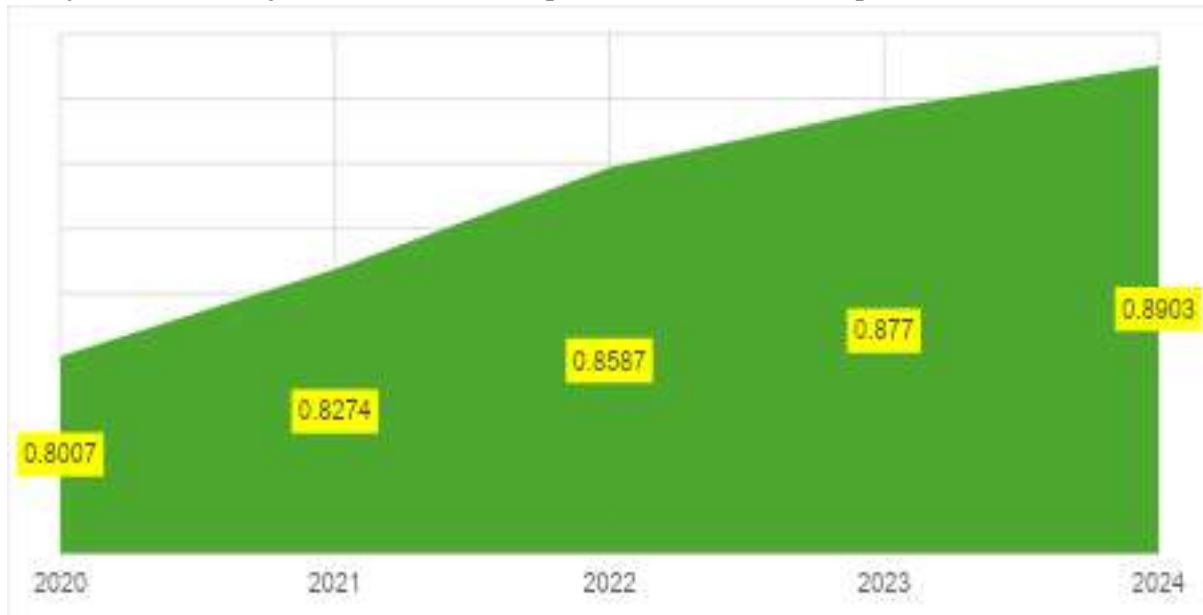
Indikator terakhir atau indikator keempat adalah terkait Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, dimana indikator ini dari tahun 2020-2024 juga mengalami tren kenaikan yang signifikan. Ditahun 2021, kenaikan terjadi hingga capaian pada indikator ini berada di angka 46.67% yang sebelumnya ditahun 2020 capaian ini berada di angka 13.33%. Kenaikan secara signifikan kembali terjadi ditahun 2023 hingga mencapai 81.82% dan ditahun 2024 memiliki capaian yang sama dengan capaian tahun 2023. Kenaikan secara signifikan pada indikator Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama terjadi karena adanya kebutuhan dari OPD terhadap data kependudukan.

Keberhasilan peningkatan kinerja pada urusan kependudukan di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh berbagai upaya strategis yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Pemerintah daerah secara rutin melakukan sosialisasi melalui media radio dan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. Selain itu, program jemput bola yang menysasar desa-desa dan sekolah-sekolah mempercepat proses perekaman data kependudukan, termasuk pembuatan KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudahan pengurusan dokumen adminduk juga semakin meningkat dengan tersedianya fasilitas pencetakan KTP dan KIA di setiap kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dispendukcapil. Kombinasi strategi komunikasi publik, layanan proaktif, dan desentralisasi fasilitas pelayanan ini menjadi faktor kunci dalam mendorong capaian positif pada urusan kependudukan di Kabupaten Banyuwangi.



7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) merupakan salah satu urusan pelayanan wajib non-dasar yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Urusan PMD merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup berbagai kegiatan seperti pengembangan potensi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, serta penguatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat. Kinerja urusan PMD direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar 2.68 Capaian Indikator Urusan PMD di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2025

Indeks desa membangun atau dapat disebut juga dengan (IDM) merupakan indeks komplit yang terbentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi yang ada di desa. Data Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, tumbuh dari 0,8007 hingga mencapai 0.8903. Meskipun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan, terdapat indikasi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa. Tren kenaikan ini didukung oleh komitmen dari pimpinan daerah melalui pembentukan regulasi yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020-2024 untuk pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar AlasPurwo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2021



tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Sukomade Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025.

Meskipun demikian, terdapat hal-hal yang masih menjadi penghambat dalam setiap komposit Indeks Desa Membangun. Pada dimensi ekonomi, belum optimalnya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dapat diidentifikasi sebagai potensi penghambat, mengingat peran Bumdes dalam pengembangan ekonomi lokal. Perlu perhatian khusus terhadap Bumdes Bersama yang masih mengalami kendala ego sektoral, karena kolaborasi yang efektif di antara Bumdes dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi pembangunan desa. Kawasan perdesaan, seperti Selingkar Ijen, Selingkar Sukomade, dan Alaspurwo, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis pengembangan masyarakat dan ekowisata. Namun, stagnansi yang terjadi di dua kawasan perdesaan baru menyoroti perlunya tindak lanjut dari Badan Kerjasama Antar Desa terhadap Rencana Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan (RPKP) untuk memastikan kelanjutan program pembangunan.

Pada dimensi sosial, masih adanya keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah, khususnya di Sukomade, menjadi tantangan penting yang perlu diatasi untuk memastikan kesetaraan dalam akses infrastruktur dasar. Selain itu, potensi konflik sosial yang minim, kecuali pada saat pemilihan kepala desa, memberikan gambaran positif tentang stabilitas sosial di tingkat desa. Sedangkan pada dimensi lingkungan meskipun bukan menjadi kewenangan daerah, yang perlu diperhatikan adalah terkait minimnya pengolahan sampah perdesaan. Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan progres positif dalam pembangunan desa di Kabupaten Banyuwangi. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan peran Bumdes, mengatasi kendala infrastruktur, dan memastikan kelanjutan inisiatif pembangunan di kawasan perdesaan. Langkah-langkah ini dapat membantu memperkuat fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa capaian indeks desa membangun di Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi meningkat signifikan. Di tahun awal yaitu 2019 masih tercapai sebesar 0,769, semakin bertambah seiring berjalannya waktu, hingga menjadi 0,8770 di tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Banyuwangi terus diupayakan tiap tahunnya.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah upaya terstruktur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatur pertumbuhan jumlah penduduk suatu wilayah. Keluarga berencana diarahkan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikut merupakan capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023:



Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Cakupan KB Aktif	73,55	73,49	70	74,17	71,66
2	Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 21 Tahun	8,47	10,23	11,9	11,66	11,66
3	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKL, BKR) dan UPPKS	97,53	98,25	82	97,98	91,64
4	Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,1	2,50	2,20	2,02
5	Age Spesific Fertly Rate (ASFR)	21,99	18,98	18,05	N/A	N/A
6	Unmeet Need	10,92	9,59	19,34	N/A	6,67

Sumber: Dinas Sosial PP dan KB Kabupaten Banyuwangi, 2025

Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian serius. Persentase cakupan KB aktif meningkat dari 70% pada 2022 menjadi 74,17% di 2023, mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam program KB. Cakupan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Banyuwangi masih berada di atas 70%, yang menunjukkan tingkat partisipasi yang baik meskipun mengalami sedikit penurunan dalam beberapa periode terakhir. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kenaikan angka Usia Kawin Pertama (UKP) di bawah 21 tahun yang mengalami tren naik sejak 2020, dari 8,47% menjadi 11,66% pada 2023. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko pernikahan dini dan berdampak pada kualitas hidup perempuan dan anak.

Terkait pernikahan pertama di bawah usia 21 tahun, terdapat ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi, di mana Dinas Sosial tidak selalu memberikan rekomendasi, namun terdapat kasus yang tetap disetujui oleh Kementerian Agama. *Total Fertility Rate (TFR)* juga sempat naik tajam menjadi 2,50 pada 2022, sebelum turun kembali ke 2,20 pada 2023, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam kendali angka kelahiran. Indikator *Total Fertility Rate (TFR)* menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata angka kelahiran sekitar dua, didukung oleh pelaksanaan sosialisasi program KB yang berjalan efektif. Pada indikator *Age-Specific Fertility Rate (ASFR)*, terlihat adanya penurunan angka kelahiran pada perempuan usia 15–19 tahun, yang menjadi sinyal positif keberhasilan program edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga bagi remaja.

Sementara itu, keberlangsungan kegiatan kelompok Tribina menunjukkan fluktuasi yang cukup besar karena sangat bergantung pada ketersediaan anggaran desa. Apabila alokasi anggaran tidak tersedia, kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan optimal, yang berdampak pada konsistensi pelaksanaan program di tingkat akar rumput. Persentase kelompok Tribina dan UPPKS yang sempat turun drastis pada 2022 (82%) juga menjadi sinyal lemahnya intervensi berbasis komunitas, meskipun kembali membaik di tahun berikutnya. Ditambah lagi, angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) melonjak drastis pada 2022 ke angka 19,34%, menandakan masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan akses layanan KB yang merata dan berkualitas. Angka *unmet need* atau kebutuhan



ber-KB yang tidak terpenuhi juga menunjukkan perbaikan seiring peningkatan kualitas sosialisasi dan akses layanan KB yang lebih luas. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kendala koordinasi dan keterbatasan anggaran di tingkat lokal, capaian program KB dan pengendalian kelahiran di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren positif dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat.

9) Perhubungan

Adanya Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi memerlukan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang handal dan berkualitas, infrastruktur perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Maka perlunya peningkatan pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang handal dan berkualitas, diantaranya melalui pembangunan sistem jaringan perhubungan yang terintegrasi, pengembangan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan umum massal (Mass Rapid Transit) di wilayah aglomerasi perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan, serta peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka, terdapat beberapa capaian kinerja yang mendukung peningkatan pelayanan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.69 Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terlihat dari tren penurunan angka kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk dari 32,77 pada tahun 2020 menjadi 30,87 pada 2023. Penurunan angka kecelekaan terjadi karena adanya sinergitas dengan kepolisian, penambahan dan pemeliharaan fasilitas jalan



(Rambu, Traffic, dll), dan adanya sosialisasi keselamatan secara dini. Selain itu, kinerja rasio konektivitas yang merupakan ukuran tingkat konektivitas lalu lintas, atau dengan kata lain, sejauh mana wilayah Kabupaten Banyuwangi terhubung dengan wilayah lain melalui jaringan transportasi meningkat secara konsisten, mencapai 0,817 pada 2024. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan manajemen rekayasa lalu lintas yang lebih efektif, adanya penambahan dan pemeliharaan fasilitas jalan, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, dan bertambahnya jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan baru. Sementara itu, V/C rasio jalan mengalami fluktuasi namun menunjukkan efisiensi pemanfaatan jalan dengan nilai 0,325 di tahun 2024, yang berarti kapasitas jalan masih dalam batas ideal. Adanya support angkutan perintis oleh KSPN, angkutan wisata gratis dan angkutan sekolah gratis menjadi faktor keberhasilan dari indikator V/C rasio jalan. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang terkait V/C rasio jalan seperti mudahnya masyarakat mendapat kredit kendaraan, angkutan umum di Banyuwangi kurang layak, dan jaringan angkutan yang masih belum menjangkau seluruh daerah.

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu	Buah	14	23	46	22
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum bis yang masuk daerah selama 1 (satu) tahun	Orang	92275	74276	97561	106889
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum bis yang keluar daerah selama 1 (satu) tahun	Orang	127428	229012	296904	332942
4	Jumlah arus penumpang angkutan umum pesawat udara yang masuk daerah selama 1 (satu) tahun	Orang	112216	57405	107131	151157
5	Jumlah arus penumpang angkutan umum kapal laut yang keluar daerah selama 1 (satu) tahun	Orang	5013505	4294484	5385140	6501047
6	Jumlah arus penumpang angkutan umum kapal laut yang masuk daerah selama 1 (satu) tahun	Orang	4900147	1374951	5629701	6243368

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, 2025



Dari segi pengguna transportasi, tahun 2020–2023 menunjukkan bahwa semua moda mengalami penurunan tajam pada 2021 akibat pandemi, terutama transportasi udara dan laut. Namun, terjadi pemulihan signifikan pada 2022 dan 2023, dengan lonjakan penumpang di seluruh moda, terutama kapal laut yang mendominasi arus penumpang. Jumlah penumpang keluar daerah konsisten lebih tinggi dari yang masuk, menandakan Kabupaten Banyuwangi berperan sebagai pengirim pelaku mobilitas. Sementara itu, dari segi jumlah pemasangan rambu lalu lintas masih fluktuatif dan belum konsisten setiap tahunnya. Berdasarkan hal di atas, masih terdapat sejumlah isu dan tantangan yang muncul harus segera direspons, seperti menurunnya penggunaan angkutan umum dan meningkatnya kendaraan pribadi, perlunya pengembangan kendaraan listrik dan optimalisasi uji emisi, serta pentingnya perbaikan trayek dan aksesibilitas transportasi publik yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Banyuwangi juga perlu mendorong angkutan wisata gratis bagi turis, mengelola pergerakan kendaraan besar melalui sistem *shuttle*, menumbuhkan kembali aktivitas penerbangan domestik maupun internasional, serta mengantisipasi pembangunan jalan tol dengan pengembangan pelabuhan dan ASDP. Untuk mendukung keselamatan, uji KIR kendaraan perlu diperkuat, dan digitalisasi lalu lintas melalui ATCS serta pemanfaatan teknologi AI untuk mobilitas dan keamanan menjadi keharusan. Dengan pendekatan terpadu yang memperhatikan inovasi, keberlanjutan, dan partisipasi swasta, Banyuwangi dapat membangun sistem transportasi masa depan yang aman, ramah lingkungan, dan inklusif.

10) Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika memiliki peranan sentral dalam pembentukan masyarakat modern yang terkoneksi secara digital yang diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi. Kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar 2.70 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2025



Indikator di atas merupakan komposit dalam penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Indeks Tata Kelola SPBE Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan sebesar 2,03 dalam rentang lima tahun dan telah mencapai nilai 4,6 dari skala 5 di tahun 2024. Hal ini didukung aspek perencanaan melalui dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang adaptif. Tren positif juga ditunjukkan oleh Indeks Layanan SPBE yang mencapai nilai 5 dari skala 5 di tahun 2024. Hal ini menjadikan domain layanan merupakan kekuatan terbesar dalam penilaian SPBE. Adanya peningkatan pada aspek SPBE salah satunya terkait tingkat koordinasi antar PD yang sudah baik, pemerataan infrastruktur yang sudah masif, dan pemakaian aplikasi untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah.

11) Penanaman Modal

Urusan penanaman modal merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 hingga tahun 2023:

Tabel 2.41 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Minat investasi	Rp (Triliun)	3.4	6.54	6.34	7.69	6.50
Realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp (Triliun)	4,2	1,2	2,99	4,89	4,54
Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan	%	95	77.1	80.6	95.5	83,05

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

Indikator jumlah minat investasi digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan investor dalam menanamkan modal di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah daerah secara aktif mendukung upaya ini melalui pengembangan infrastruktur, seperti jalan, fasilitas publik, dan kelistrikan di kawasan wisata minat khusus, dengan tujuan meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat potensi investasi. Sejak 2017, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang insentif penanaman modal, yang mencakup pengurangan, pembebasan pajak dan retribusi daerah, serta pemberian bantuan berupa dana stimulan atau modal.

Namun demikian, data menunjukkan bahwa minat investasi di Kabupaten Banyuwangi ini masih menunjukkan pola yang fluktuatif. Hal ini perlu menjadi



perhatian pemerintah agar tidak terjadi penurunan pada masa mendatang. Belum adanya peta potensi investasi, dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk hal tersebut dikurangi karena adanya tahun politik. Diperlukan adanya tim percepatan yang berfungsi untuk menampung semua investor yang datang, lalu menghubungkan dengan perangkat daerah terkait agar mempermudah investor dalam hal komunikasi. Penetapan Banyuwangi sebagai wilayah prioritas pengembangan Jawa Timur oleh pemerintah pusat pada tahun 2019 turut mendorong peningkatan investasi, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk indikator kedua yaitu Realisasi investasi mengalami peningkatan signifikan dari realisasi sebesar Rp1,2 triliun pada 2021 menjadi Rp4,89 triliun di tahun 2023, selanjutnya mengalami penurunan di tahun terakhir 2024 sebesar Rp.4,53 triliun, meskipun tidak terlalu signifikan akan tetapi tetap perlu perhatian dari pemerintah Banyuwangi. Diperlukan adanya solusi dari pemerintah Banyuwangi terhadap ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, yang akan berdampak terhadap perubahan kebijakan internasional, serta tantangan sektor infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu, diperlukan adanya integrasi antara peraturan daerah tentang tata ruang kabupaten sistem OSS (*Online Single Submission*).

Pelayanan investasi dan proses perizinan yang cenderung kompleks memerlukan standar operasional prosedur (SOP) yang sistematis dan terukur. Oleh karena itu, indikator tingkat kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan terhadap SOP menjadi penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan urusan penanaman modal. Berdasarkan data, indikator ini juga menunjukkan tren membaik dalam dua tahun terakhir, mencapai 95,5% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan dengan capaian 83,05%. Diperlukan evaluasi terkait penurunan capaian tersebut. Berkaitan dengan penurunan capaian di tahun 2021, disebabkan oleh adanya peralihan terkait sistem, peraturan, dan persyaratan baru, disertai dengan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Banyuwangi dan pada akhirnya berdampak terhadap ketidaktauan masyarakat atau pemohon layanan yang masih membawa persyaratan lama.

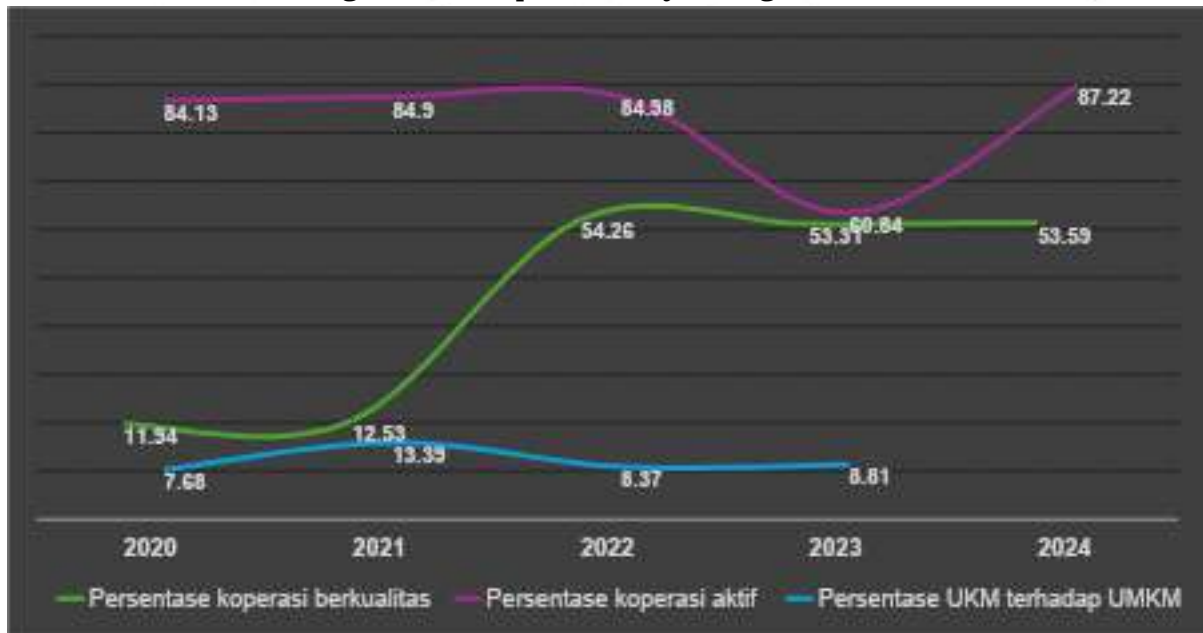
Investasi memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Arus investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan dan teknologi. Dengan tren realisasi investasi yang terus terjaga, Kabupaten Banyuwangi memiliki peluang besar untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan iklim investasi yang kondusif perlu terus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

12) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Koperasi UM dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Koperasi dan usaha mikro merupakan elemen kunci dalam menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, terutama bagi individu



dengan tingkat ekonomi yang terbatas di Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan capaian indikator yang merepresentasikan kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.71 Kinerja Urusan Koperasi UM di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi UM dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Koperasi merupakan alat yang sangat efisien dalam mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memperkuat keberlanjutan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Banyuwangi tumbuh secara fluktuatif dalam lima tahun terakhir dari 84,13% di tahun 2020 menjadi 87,22% di tahun 2023 dengan pertumbuhan tertinggi menjadi 84,98% di tahun 2023. Artinya, terdapat sekitar 874 dari total 1.002 koperasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang berstatus aktif dengan 83 koperasi berstatus sehat. Tren persentase koperasi berkualitas juga menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 11,94% menjadi 53,59% di tahun 2024, artinya hampir separuh jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat dikategorikan dalam status berkualitas. Tantangan yang dihadapi adalah adanya pertumbuhan lembaga keuangan yang pesat mengancam eksistensi koperasi, sementara kelembagaan koperasi masih lemah. Selain itu, pengembangan kompetensi SDM dan manajemen perkoperasian belum optimal, sehingga kualitas kelembagaan koperasi tetap rendah.

Dari sektor usaha mikro, kinerja direpresentasikan dengan capaian persentase UKM terhadap UMKM yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini didorong oleh kurangnya fasilitasi, pendampingan, dan data usaha mikro menghambat pengembangan dan peningkatan skala usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tantangan dalam pengembangan usaha mikro berkaitan dengan persaingan yang semakin ketat yang diperparah dengan belum optimalnya jaringan kemitraan dan pendampingan. Selain itu, banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB, menghambat akses mereka terhadap modal.



Dalam mendukung capaian Asta Cita dan berkontribusi terhadap Prioritas Nasional, Pemerintah Kab Banyuwangi mendorong pembentukan serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai sebagai arah kebijakan jangka menengah yang berkelanjutan. Kabupaten Banyuwangi memiliki 217 Desa/ Kelurahan yang terdiri dari 28 Kelurahan dan 189 Desa, seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi telah membentuk koperasi merah putih dan berbadan hukum. Langkah konkrit yang telah dilakukan oleh daerah yakni melalui penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan koperasi yang berbasis pada potensi unggulan wilayah guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, serta integrasi pendanaan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pemanfaatan Dana Desa secara optimal untuk memperkuat peran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan bagian dari urusan wajib non dasar. Urusan ini menjadi wewenang pemerintah daerah dalam rangka mengatur, mengembangkan dan mengawasi kegiatan di bidang pemuda dan olahraga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas, kompetensi dan prestasi pemuda dan olahraga. Penyelenggaraan urusan ini dapat diukur keberhasilannya melalui indikator persentase pemuda terlatih menjadi wirausaha mandiri/ persentase pemuda terampil. Berikut capaian indikator tersebut:



Gambar 2.72 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, 2025

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan olahraga yang tercermin melalui indikator diatas menggambarkan bahwa pemerintah dalam urusan tersebut masih perlu ditingkatkan melihat capainnya yang masih di bawah target. Adapun permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan urusan ini cukup kompleks, salah satu permasalahan yang ada adalah jumlah pemuda yang difasilitasi pelatihan menurun, lalu terkait pendataan dan pendaftaran penduduk usia muda yang berwirausaha, dinamika perubahan jaman yang sangat cepat



memberikan satu keunggulan dimana dalam bekerja masyarakat tidak dibatasi oleh wilayah, pada kasus ini pemuda Kabupaten Banyuwangi yang bekerja pada sektor informal telah memiliki pekerjaan akan tetapi jenis pekerjaan yang dijalankan tidak tertera pada kolom pendaftaran, banyak generasi muda yang sudah bekerja dan terikat dengan berbagai perusahaan multinasional bahkan pendapatan yang mereka dapatkan jauh melebihi UMR Kabupaten Banyuwangi. Capaian indikator persentase prestasi olahraga pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian terdapat beberapa tantangan dan kendala pemerintah dalam menyelenggarakan sub urusan keolahragaan. Permasalahan yang paling *urgent* dibutuhkan adalah adanya pemberhentian *coaching* clinic dan peradanya perubahan formulasi penghitungan di tahun 2024 menjadi indikator jumlah medali yang diperoleh minimal di tingkat provinsi. Selanjutnya untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang lengkap menjadi sebuah tantangan di Kabupaten Banyuwangi.

14) Statistik

Urusan Statistik merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyediakan data statistik terkait dengan kondisi, perkembangan, dan karakteristik daerah yang mencakup berbagai aspek, seperti statistik penduduk, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Banyuwangi diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Berikut ini ialah capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2020-2024:



Gambar 2.73 Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2025

Dalam rentang tahun 2022-2024, persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah konsisten capaiannya di angka 100%. Pemanfaatan data statistik yang valid



dan akurat dalam perencanaan pembangunan menjadikannya lebih terukur, dan mampu memetakan mengetahui trend yang akan terjadi pada masa mendatang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Akan tetapi, faktanya di lapangan masih ditemukan penyelenggaraan statistik daerah di Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya sesuai dengan standar statistik nasional. Selain itu tantangan pengelolaan data statistik sektoral juga didukung adanya perkembangan *Artificial Intelligence (AI)* yang mampu mempelajari pola dan menentukan jawaban berdasarkan data yang ada, sehingga kedepannya data informasi dan statistik daerah akan sangat penting dalam mendukung efektifitas serta ketepatan *Artificial Intelligence (AI)*.

15) Persandian

Urusan persandian merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah yang sering kali diatur secara ketat oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, dan biasanya dilakukan oleh lembaga atau unit khusus dalam pemerintahan yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. Kinerja urusan persandian dalam rentang tahun 2022-2024 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

Tabel 2.42 Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2025

Indikator ini kemudian berganti nama menjadi Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dan menunjukkan capaian yang konsisten sebesar 100% di tahun 2022-2023. Capaian ini dimaksimalkan dengan adanya pemantauan yang terus-menerus terhadap jaringan dan sistem informasi penting untuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan atau ancaman keamanan yang mungkin. Sistem deteksi intrusi dan pemantauan aktivitas pengguna dapat membantu mengidentifikasi serangan cyber atau kebocoran data dengan cepat.

Meskipun demikian, data mencatat bahwa setiap tahun sejak tahun 2021, terjadi peretasan sebanyak 10 kali. Poin positif dalam upaya penanggulangan serangan siber adalah terbentuknya Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai sarana pengaduan informasi insiden siber dari masyarakat. Masih terdapat tantangan berupa kompleksitas infrastruktur IT yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama jika terdapat sistem yang tersebar atau berbeda-beda, dapat membuat sulit untuk mengimplementasikan kebijakan dan kontrol keamanan yang konsisten di seluruh organisasi ditambah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan informasi. Penting untuk diapresiasi bahwa langkah-langkah proaktif

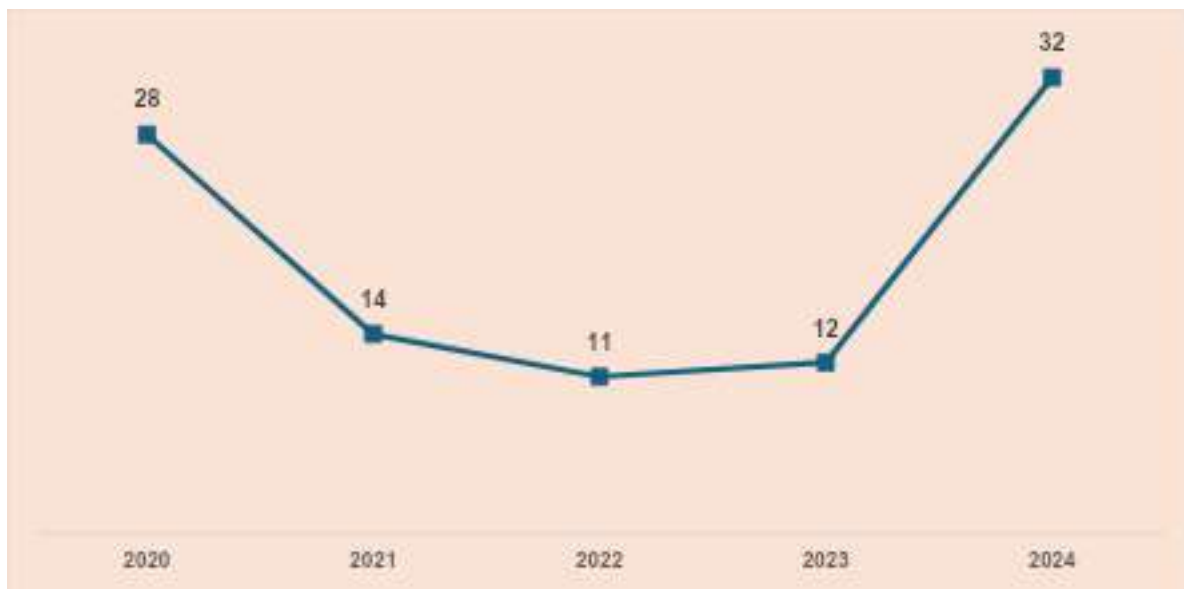


seperti pembentukan CSIRT menunjukkan komitmen untuk menghadapi ancaman siber dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengamanan informasi. Faktor pendorong tersebut mencerminkan kesadaran dan responsifnya pemerintah daerah terhadap kebutuhan akan ketahanan siber yang meningkat.

Secara keseluruhan, pencapaian target 100% pada indikator kinerja urusan persandian Kabupaten Banyuwangi menunjukkan komitmen dan upaya dalam penyelenggaraan urusan persandian, tantangan serangan siber yang terus berlanjut menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus, pengembangan strategi keamanan informasi yang lebih baik, dan kolaborasi dengan masyarakat melalui CSIRT untuk menciptakan ekosistem siber yang aman dan andal di Kabupaten Banyuwangi.

16) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan bagian penting dari identitas suatu masyarakat. Melalui bahasa, tradisi, seni, dan nilai-nilai budaya, masyarakat mengenali diri mereka sendiri dan menghargai warisan budaya yang telah ada sejak lama. Ini membantu mempertahankan dan merawat akar-akar budaya yang penting bagi sebuah daerah. Pembangunan pada urusan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata sebagai berikut:



Gambar 2.74 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2025

Budaya lokal yang dikembangkan menjadi sebuah daya tarik menjadi salah satu cara pelestarian kebudayaan melalui sektor pariwisata. Mengingat kebudayaan memiliki potensi ekonomi yang besar. Seni, kerajinan, musik, dan kuliner tradisional dapat menjadi aset penting dalam industri pariwisata dan



perdagangan internasional. Ini memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2019 sebanyak 36 budaya lokal. Kemudian pada tahun berikutnya secara berturut-turut terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 capaiannya menurun menjadi 28 budaya lokal, lalu tahun berikutnya turun kembali dan hanya sebanyak 14 budaya lokal. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2023 angkanya juga terus menurun menjadi 12 budaya lokal saja. Penurunan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19, meskipun begitu, Pemerintah Banyuwangi telah berusaha melakukan inovasi dengan melaksanakan pertunjukan secara *hybrid* sebagai ajang dari mempertahankan sektor pariwisata Banyuwangi sekaligus juga menjadi promosi skala nasional dan internasional. Ditahun 2024, Jumlah Budaya Lokal yang dikembangkan meningkat secara signifikan menjadi sebesar 32 budaya. Beberapa festival budaya lokal tidak dapat diselenggarakan dengan baik sehingga hal tersebut juga menghambat perkembangan budaya lokal untuk menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi.

Selain jumlah budaya lokal di Kabupaten Banyuwangi, terdapat Jumlah Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang antara lain yaitu Kesenian Rengganis yaitu teater tradisional hasil akulturasi, Tari Gandrung, Tari Seblang, Tari Janger, Tradisi Kebo-Keboan, dan Mocoan Lontar Yusuf yaitu tradisi membaca naskah lontar Yusuf yang berisi kisah nabi Yusuf. Selain itu, pada urusan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi ini terdapat tenaga kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan yang hanya berjumlah 1 orang saja.

Dalam beberapa tahun kedepan, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam membangun kebudayaan masyarakat, yaitu 1) Inkonsistensi regulasi pengembangan kebudayaan, 2) Globalisasi dapat membawa ancaman terhadap budaya daerah. Ini karena pengaruh globalisasi yang kuat, seperti arus informasi, teknologi, perdagangan internasional, dan budaya populer, dapat menggeser atau merendahkan budaya-budaya lokal, 3) Masyarakat lokal kaya akan nilai agama dan kebudayaan yang berkaitan erat, namun budaya yang dibangun haruslah adaptif dan mendukung budaya pembangunan. Penting untuk memastikan bahwa pengembangan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dilakukan dengan menghormati dan melestarikan integritas budaya asli, serta memberikan manfaat yang adil kepada komunitas lokal. Ini dapat menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan pemahaman antarbudaya, sambil memastikan bahwa warisan budaya tetap terjaga.

17) Perpustakaan

Urusan perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kewenangan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan data capaian kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024:



**Tabel 2.43 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	56	58	61,22	63,31	88,73
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	29.035	22.104	88.797	84.372	53.514

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan dua indikator utama, yaitu Tingkat Kegemaran Membaca dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan, terlihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam pengembangan literasi masyarakat. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca menunjukkan tren positif yang meningkat dari 56 pada tahun 2020 menjadi 88,73 pada tahun 2024, menandakan adanya peningkatan minat baca di masyarakat. Namun demikian, peningkatan ini belum sepenuhnya sejalan dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang cenderung fluktuatif—mengalami penurunan tajam pada 2021, kemudian meningkat drastis di 2022, namun kembali mengalami penurunan di 2023. Capaian kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 sebesar 88,73, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah Banyuwangi dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat

Tantangan utama yang dihadapi adalah fenomena alih media baca menjadi tantangan baru dalam dunia literasi. Pergeseran dari media cetak ke digital mendorong Dinas untuk melakukan transformasi layanan, termasuk peningkatan akses terhadap e-book, jurnal digital, dan platform literasi daring., selain itu kualitas bahan bacaan yang masih kurang variatif yang berdampak rendahnya minat baca masyarakat yang masih bersifat selektif, disebabkan oleh kurangnya variasi koleksi buku, terutama buku-buku keagamaan dan bahan bacaan untuk kalangan difabel. Hal ini membuat pelayanan perpustakaan menjadi kurang inklusif dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, inovasi seperti Literasi Cafe yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan menjadi langkah positif untuk menciptakan suasana membaca yang nyaman dan menarik, sekaligus menjawab perubahan preferensi masyarakat terhadap tempat membaca yang lebih santai dan interaktif. Beberapa perpustakaan digital di beberapa daerah mulai menunjukkan peningkatan partisipasi, namun hal ini membutuhkan dukungan infrastruktur, seperti akses internet yang merata dan literasi digital masyarakat yang memadai.

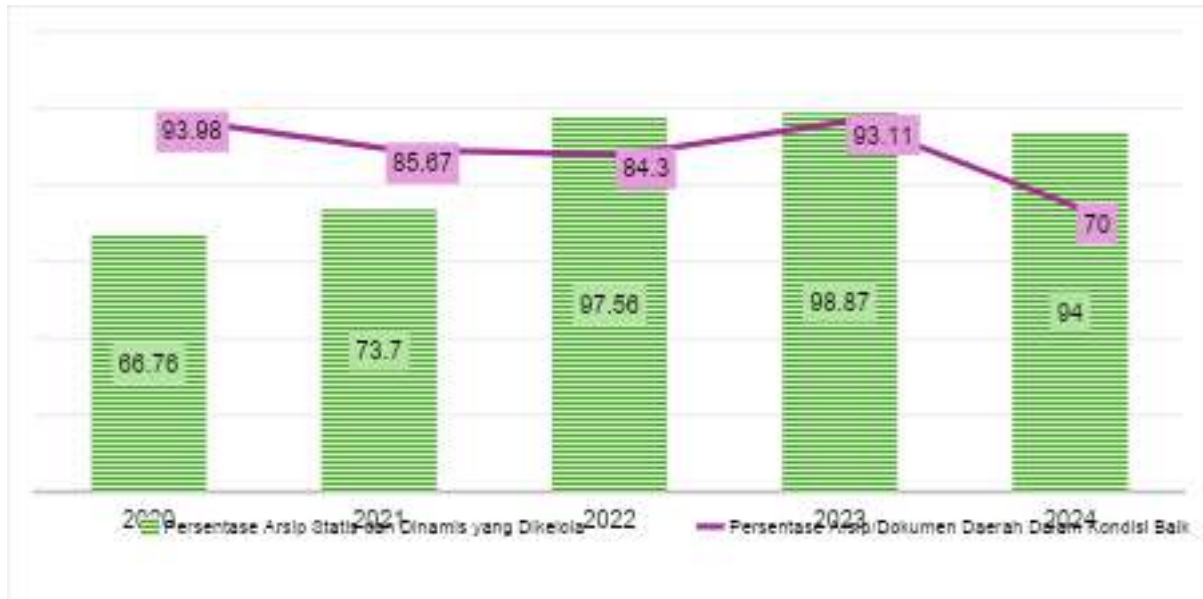
Dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam nilai kegemaran membaca, Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi tantangan struktural dalam hal koleksi, akses, dan inklusivitas layanan perpustakaan. Diperlukan strategi literasi yang adaptif terhadap perkembangan digital serta pemenuhan kebutuhan bacaan yang lebih beragam dan merata agar transformasi literasi benar-benar dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

18) Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kewenangan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi yang



bertujuan untuk memastikan setiap informasi terdokumentasi dengan rapi, memudahkan akses bagi kepentingan administrasi maupun publik, serta mencegah potensi kehilangan data yang dapat berdampak pada pelayanan masyarakat. Kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024 direpresentasikan pada realisasi indikator berikut:



Gambar 2.75 Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Berdasarkan grafik realisasi di atas, dapat diketahui bahwa kinerja indikator urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir tahun 2024. Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola meningkat dalam lima tahun terakhir dari 66,76% menjadi 94%, capaian ini didorong oleh peranan teknologi dalam mempercepat digitalisasi, aksesibilitas, serta efisiensi manajemen arsip dengan adanya aplikasi Srikandi yang merupakan kolaborasi lintas K/L yang hadir untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Hal ini juga selaras dengan meningkatnya Persentase Arsip/Dokumen daerah dalam kondisi baik hingga tahun 2023, meskipun mengalami penurunan di tahun 2024. Tantangan yang dihadapi oleh beberapa perangkat daerah yang masih menyimpan arsip/dokumen daerah adalah ketidaksediaan *record center* disertai kurangnya sumber daya arsiparis. Selain itu, arsip yang bersifat dinamis seperti dokumen keuangan masih digunakan dalam aktivitas sehari-hari sehingga diperlukan langkah konkret dalam penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Indikator lain pada urusan Kearsipan adalah terkait Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan. Nilai hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 407 Tahun tentang Nilai Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024. Adapun hasil dari Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Banyuwangi ini



memiliki kategori B (BAIK), yang dibandingkan dengan hasil nilai pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1) Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Letak wilayah Banyuwangi yang berada pada ujung Pulau Jawa menyebabkan wilayah ini memiliki sebagian batas wilayah berupa lautan. Sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai memiliki profesi pekerjaan sebagai nelayan. Maka, pada urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2.76 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai grafik indikator capaian pada urusan Kelautan dan Perikanan, terdapat tiga indikator, yang pertama adalah cakupan bina kelompok nelayan yang memiliki tren fluktuatif ditahun 2020-2024. Faktor-faktor yang perlu untuk ditingkatkan lagi hingga mempengaruhi capaian antara lain perlindungan keselamatan kerja nelayan perlu ditingkatkan, kelembagaan kelompok nelayan yang masih perlu ditingkatkan, dan keterampilan individu nelayan yang perlu untuk dioptimalkan. Berbeda dengan indikator cakupan bina kelompok nelayan yang memiliki tren fluktuatif, indikator angka konsumsi ikan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024). Kenaikan secara signifikan terjadi ditahun 2021 yaitu sebesar 61.52% yang sebelumnya ditahun 2020 sebesar 36.63%. Kenaikan terjadi setiap tahun hingga ditahun 2024 capaian angka



konsumsi ikan mencapai 70%. Kenaikan yang terjadi di Angka Konsumsi Ikan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti perhitungan yang mengalami perubahan sehingga menjadikan meningkatnya nilai indikator, adanya sosialisasi, pelatihan, dan kampanye terkait gerakan gemar makan ikan di Kabupaten Banyuwangi, dan adanya kebijakan dari daerah untuk mewajibkan menyediakan menu ikan di hotel-hotel Kabupaten Banyuwangi. Indikator ketiga adalah produksi perikanan yang juga memiliki tren yang fluktuatif, yang dimana ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 61,77%. Setelah mengalami penurunan ditahun 2022, ditahun 2023-2024 kembali mengalami peningkatan hingga ditahun 2024 capaian indikator produksi ikan menjadi sebesar 97,38% dan merupakan capaian tertinggi pada capaian indikator produksi ikan. Meskipun mengalami peningkatan, terdapat beberapa tantangan yang masih harus dihadapi seperti adanya pengaruh iklim terutama untuk perikanan tangkap, lahan yang terbatas untuk budidaya perikanan air payau, pelaku usaha menyesuaikan dengan kondisi pasar global, dan masih kurangnya minat masyarakat untuk budidaya perikanan air tawar.

2) Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Berikut capaian kinerja indikator program urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020-2024:



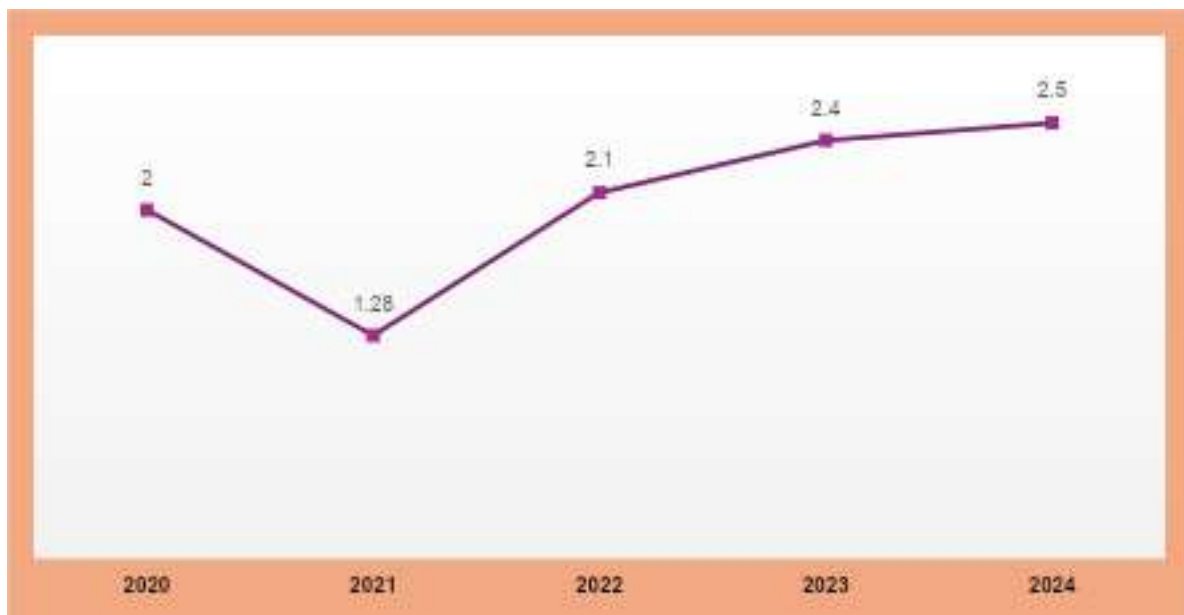
Gambar 2.77 Jumlah Kunjungan Wisatawan yang Menginap di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kunjungan wisatawan yang menginap diklasifikasikan menurut asal yaitu mancanegara dan nusantara. Jumlah wisatawan



mancanegara di Kabupaten Banyuwangi mengalami perkembangan yang fluktuatif, di mana capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 64.575 jiwa. Kondisi tren serupa juga terjadi pada kunjungan wisatawan nusantara atau domestik, dimana capaian kunjungan tertinggi di tahun 2023 sebesar 540.683 jiwa lalu mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 512.117 jiwa. Tren kenaikan angka kunjungan ini terjadi karena adanya komitmen menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah melalui massifnya promosi wisata di segala platform juga bekerja sama dengan *influencer* local yang ada di Banyuwangi, aksesibilitas dan akomodasi pariwisata sudah memadai serta adanya kalender event di Banyuwangi. Selain itu, banyaknya event kebudayaan, olahraga, dan lain sebagainya juga menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Banyuwangi. Meskipun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti seperti belum adanya lisensi untuk tour guide dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang ada saat ini tidak terkelola dengan baik.



Gambar 2.78 Length of Stay di Kabupaten Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

Indikator selanjutnya yang merepresentasikan kinerja urusan pariwisata adalah *length of stay* atau lama kunjungan wisata di Kabupaten Banyuwangi yang perkembangannya dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Setelah adanya pandemi Covid-19, lama kunjungan wisata di Kabupaten Banyuwangi mulai menunjukkan kenaikan dimana angka terakhir tahun berjalan (2024) ada pada 2,5 hari. Capaian ini berawal dari usaha Pemerintah Banyuwangi dengan memperbanyak *homestay* yang memadai untuk mengakomodir para wisatawan, lalu membaginya dalam 3 kelas. Meskipun secara target telah melampaui, namun masih ada beberapa hal yang menjadi isu permasalahan antara lain terkait destinasi pariwisata berpotensi kehilangan daya tariknya karena kurangnya pembaruan dalam fasilitas, atraksi, atau program-program kreatif yang dapat menarik perhatian wisatawan. Secara keseluruhan, iklim pariwisata di Kabupaten



Banyuwangi terus mengalami tren pertumbuhan yang positif yang dibuktikan oleh capaian indikator Indeks Daya Saing Pariwisata yang telah mencapai capaian kinerja sebesar 105% dengan realisasi sebesar 3,15. Selain indikator terkait kunjungan wisata di Kabupaten Banyuwangi, kinerja urusan pariwisata juga direpresentasikan oleh jumlah pembinaan terhadap destinasi wisata maupun pelaku industri wisata yang ada di Banyuwangi. Data tahun 2023, terdapat 151 destinasi wisata yang telah dibina dan dikembangkan diikuti dengan pelatihan terhadap 280 pelaku wisata yang ada di Banyuwangi. Peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan cenderung menarik lebih banyak wisatawan karena menawarkan beragam pilihan dan pengalaman baru. Begitu pula dengan pelatihan terhadap pelaku industri wisata, meskipun belum maksimal tetapi menjadi langkah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku wisata di Banyuwangi yang berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan.

Pada urusan Pariwisata, selain terdapat indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banyuwangi dan Length Of Stay, juga terdapat indikator yang menggambarkan perkembangan sektor pariwisata yaitu Pertumbuhan PDRB Pariwisata. Indikator ini didefinisikan secara operasional sebagai laju pertumbuhan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang erat kaitannya dengan aktivitas pariwisata. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) tidak merilis lapangan usaha khusus “pariwisata” dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah menjumlahkan beberapa sektor yang paling merepresentasikan kegiatan wisata, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Lainnya.

Pemilihan empat sektor tersebut didasarkan pada kerangka Tourism Satellite Account (TSA) yang direkomendasikan oleh UNWTO dan OECD, di mana pariwisata dipahami sebagai industri lintas sektor. Aktivitas wisatawan selalu berdampak langsung pada konsumsi akomodasi dan makan-minum, pemanfaatan jasa transportasi, belanja di sektor perdagangan, serta penggunaan jasa hiburan, rekreasi, dan jasa penunjang lainnya. Dengan demikian, sektor-sektor ini menjadi proksi paling relevan untuk mengukur kontribusi dan pertumbuhan pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Penggunaan indikator ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika ekonomi pariwisata di Banyuwangi secara lebih komprehensif. Pertumbuhan PDRB Pariwisata tidak hanya mencerminkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana aktivitas wisata mampu mendorong perputaran ekonomi lokal melalui konsumsi, perdagangan, dan jasa. Indikator ini sekaligus menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas strategi pembangunan pariwisata daerah yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Banyuwangi, PDRB Pariwisata memiliki tren yang meningkat, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.79 PDRB Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2025

Perkembangan PDRB Pariwisata Banyuwangi dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan dinamika yang sejalan dengan kondisi makroekonomi nasional dan pemulihan sektor wisata pascapandemi. Pada tahun 2020, PDRB Pariwisata mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -8,51%, yang merefleksikan dampak langsung pembatasan mobilitas dan penurunan drastis kunjungan wisatawan akibat pandemi COVID-19.

Memasuki 2021, sektor ini mulai pulih dengan pertumbuhan 5,82%, didorong oleh relaksasi kebijakan perjalanan, inovasi atraksi wisata, serta peningkatan promosi digital. Pemulihan berlanjut secara lebih kuat pada 2022 dengan pertumbuhan mencapai 9,63%, menandai kembalinya kepercayaan wisatawan dan membaiknya aktivitas perdagangan, akomodasi, transportasi, serta jasa hiburan.

Pada 2023, PDRB Pariwisata masih tumbuh cukup tinggi yaitu 7,71%, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah memasuki fase konsolidasi, di mana pemulihan pascapandemi telah bergeser menuju penguatan kualitas layanan dan diversifikasi produk wisata.

Selanjutnya pada 2024, pertumbuhan PDRB Pariwisata tercatat 6,75%. Angka ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata telah kembali ke jalur pertumbuhan yang stabil, dengan kontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi daerah. Pola pertumbuhan tersebut juga menegaskan bahwa pariwisata di Banyuwangi bukan hanya bersifat musiman, tetapi telah menjadi salah satu motor penting perekonomian lokal yang resilien menghadapi gejolak eksternal.

Terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pada indikator ini, meskipun indikator ini mengalami tren yang meningkat. Faktor penghambat pada indikator ini adalah sektor ini sangat bergantung pada musim wisata. Fluktuasi jumlah wisatawan berdasarkan musim dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan bagi pelaku usaha di sektor ini. Sementara faktor pendorong pada indikator ini adalah usaha penyediaan akomodasi dan makanan



minuman tersebar di berbagai kecamatan, seperti Banyuwangi, Muñcar, Rogojampi, Kalipuro, dan Srono dan Kabupaten Banyuwangi memiliki infrastruktur transportasi yang lengkap, termasuk layanan angkutan darat dan kereta api, Pelabuhan Ketapang dan Tanjungwangi di laut, serta Bandara Blimbingsari di udara. Ketersediaan moda transportasi yang lengkap memudahkan distribusi ekonomi dan aksesibilitas wisatawan ke daerah ini. Lebih dari itu, capaian ini juga didukung oleh jumlah wisatawan yang semakin meningkat setiap tahun sehingga usaha kuliner seperti restaurant dan UMKM setempat juga ikut terangkat.

3) Pertanian

Urusan Pertanian mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan bahan pangan, serat, dan produk lainnya dari alam. Selain itu, Fungsi urusan pertanian mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mendukung produksi pangan, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan. Di Kabupaten Banyuwangi urusan pertanian merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Dinas Pertanian dan Pangan. Adapun capaian urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 2. 79 Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, capaian kinerja pada urusan pertanian dan pangan adalah Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Hektar dimana ditahun 2020-2024 mengalami tren yang meningkat. Ditahun 2020, capaian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Hektar adalah sebesar 66.24% yang kemudian setiap tahun hingga tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 66.43%. Peningkatan capaian pada urusan pertanian, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu Optimalisasi fungsi Rumah Pupuk Alternatif (RUPA) yang memberikan percontohan penggunaan pupuk alternatif bagi petani di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi,



Memberikan bantuan Pupuk Organik Cair (POC) untuk 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, dan fasilitasi penyediaan komponen yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan fungsi maupun kualitas prasarana di sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.

Peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2020–2024 didorong oleh pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang mencakup penerapan praktik pertanian organik guna menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Upaya ini diimbangi dengan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian serta para petani melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan transfer pengetahuan mengenai teknologi budidaya padi yang lebih efektif. Selain itu, perbaikan kualitas sarana produksi seperti penyediaan bibit unggul yang adaptif terhadap kondisi lokal, penggunaan pupuk yang tepat, serta ketersediaan obat-obatan tanaman yang berkualitas turut berperan penting dalam meningkatkan hasil panen. Sinergi antara penguatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan sarana produksi ini menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan produktivitas padi secara berkelanjutan di daerah tersebut.

4) Peternakan

Urusan peternakan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang berbasis agribisnis. Urusan peternakan adalah bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, serta pengawasan sektor peternakan untuk mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan peternak, dan keberlanjutan lingkungan. Pada urusan ini, terdapat beberapa hasil komoditi peternakan ditahun 2020-2024, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44 Komoditi Hasil Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
Daging Sapi Potong	3.018.250	3.633.596	3.541.222	3.678.096	3.239.967
Susu Sapi Perah	1.571.912	1.564.915	1.181.700	1.645.626	3.538.430
Ayam Petelur	11.916.323	14.007.066	12.638.523	16.858.472	14.034.651

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan tabel diatas, berbagai hasil komoditi peternakan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024 untuk komoditi daging sapi potong memiliki tren yang fluktuatif, dengan capaian tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 3.239.967 yang sebelumnya tahun 2023 memiliki capaian sebesar 3.678.096. Sementara untuk komoditi susu sapi perah mengalami tren yang fluktuatif dengan capaian terendah ada di tahun 2022 dengan komoditi sebesar 1.181.700. Sementara di tahun 2024, hasil komoditi peternakan mengalami peningkatan secara signifikan menjadi sebesar 3.538.430. Komoditi ketiga adalah ayam petelur yang memiliki jumlah paling besar diantara kedua komoditi lainnya. Ditahun 2023, memiliki capaian komoditi paling tinggi yaitu sebesar 16.858.472 yang kemudian ditahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 14.034.651.



5) Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Kinerja urusan perdagangan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar 2. 80 Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Pada grafik diatas, disebutkan indikator capaian pada urusan perdagangan tahun 2020-2024. Terdapat dua indikator pada urusan perdagangan, yaitu yang pertama terkait Nilai Ekspor yang ditahun 2020-2024 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2021-2022 Nilai Ekspor mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi ada di tahun 2022 dengan nilai sebesar 977.7. Namun, ditahun 2023 mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar 171.34 yang kemudian ditahun 2024 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 196.084. Indikator kedua adalah Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang memiliki tren fluktuatif dengan peningkatan secara signifikan terjadi ditahun 2021 yaitu dengan capaian sebesar 7.13, yang sebelumnya ditahun 2020 memiliki capaian sebesar -6.58. Ditahun 2023, capaian mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 6.54. Penurunan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu struktur sektor perdagangan masih belum kuat, Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas, minimnya pengembangan jaringan kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder, belum optimalnya pengembangan pemasaran produk perdagangan, belum optimalnya pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian.

6) Perindustrian

Urusan perindustrian umumnya berkaitan dengan pengembangan sektor industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing. Pada urusan Perindustrian di Kabupaten Banyuwangi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja,



Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi. Adapun capaian indikator urusan perindustrian di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.45 Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Produksi IKM	365.214.367.915	1.367.449.004.113	1.370.733.847.113	1.387.457.432.122	1.390.485.965.122
2	Nilai Investasi IKM	162.716.518.700	1.346.249.521.927	1.347.133.371.927	1.352.327.433.947	1.352.918.683.947
3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	11,62%	12,32%	12,41%	12,55%	12,94%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan tabel diatas, realisasi kinerja pada urusan Perindustrian di Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari dua indikator, yaitu Nilai Produksi IKM dan Nilai Investasi IKM. Pada indikator Nilai Produksi IKM dari tahun 2020-2024, mengalami tren yang meningkat, dimana ditahun 2020 memiliki nilai sebesar Rp 365.214.367.915 yang kemudian setiap tahun meningkat hingga ditahun 2024 menjadi sebesar Rp 1.390.485.965.122. Selanjutnya untuk indikator Nilai Investasi IKM juga menunjukkan tren peningkatan dimana tahun 2020 memiliki nilai sebesar Rp 162.716.518.700 yang kemudian ditahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.352.918.683.947.

Pasca pandemi COVID-19, terjadi diversifikasi produksi yang cukup signifikan sebagai dampak dari perubahan status kerja sebagian tenaga kerja. Selama masa pandemi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong banyak individu beralih menjadi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mempertahankan pendapatan. Pertumbuhan jumlah IKM ini berkontribusi pada meningkatnya variasi produk yang dihasilkan, terutama di sektor makanan dan minuman, kerajinan, serta usaha berbasis teknologi rumah tangga. Peningkatan jumlah IKM tidak hanya memperluas basis produksi daerah, tetapi juga mendorong arus investasi baru, baik dari modal pribadi pelaku usaha maupun dukungan pembiayaan pemerintah dan swasta. Kondisi ini menjadikan pasca pandemi sebagai momentum penting untuk memperkuat struktur perekonomian melalui pengembangan IKM dan peningkatan kapasitas produksi yang lebih beragam dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

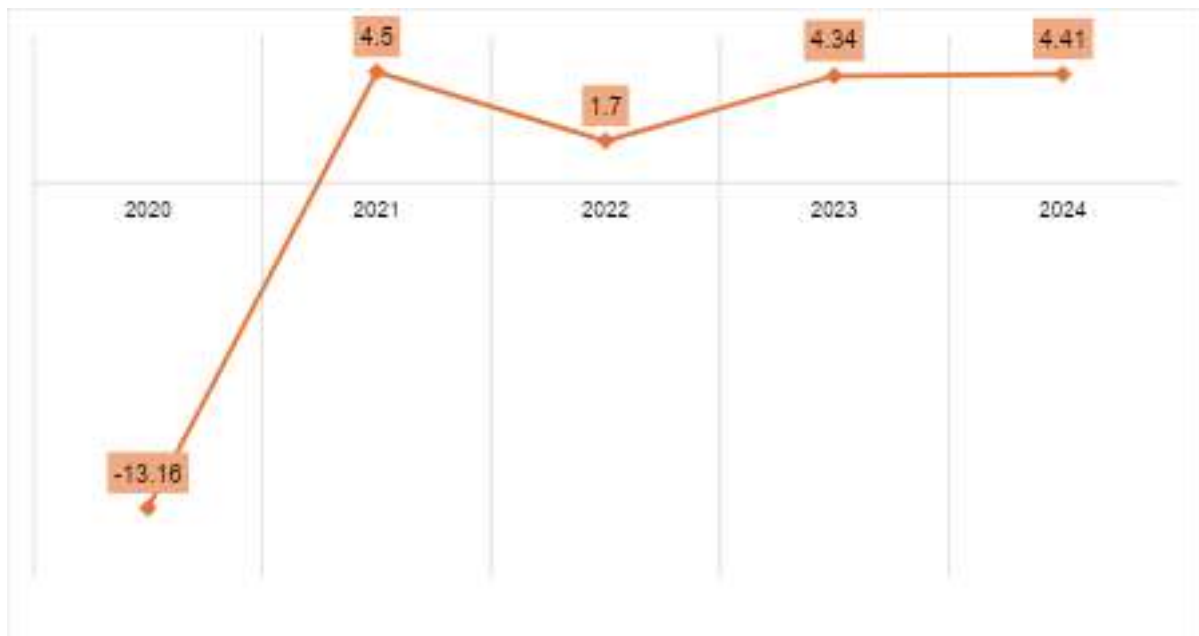
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir, dari 11,62 persen pada tahun 2020 menjadi 12,94 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menjadi indikasi awal bahwa struktur ekonomi daerah mulai bergerak menuju aktivitas ekonomi yang lebih produktif, terutama di sektor pengolahan. Pertumbuhan kontribusi ini juga mencerminkan mulai berjalannya



proses hilirisasi atas komoditas unggulan daerah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, yang sebelumnya didominasi oleh aktivitas hulu.

Arah penguatan hilirisasi ini penting untuk terus diperkuat karena memberikan nilai tambah secara signifikan terhadap produk lokal, sekaligus memperluas rantai ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peluang usaha baru. Dalam konteks pengembangan jangka menengah, peningkatan kontribusi industri pengolahan menjadi sinyal positif bagi upaya transformasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

Selain terdapat tiga indikator capaian kinerja urusan perindustrian diatas, terdapat juga indikator lain yaitu terkait Persentase Peningkatan Nilai Penjualan/Omzet IKM di Kabupaten Banyuwangi yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 2.81 Persentase Peningkatan Nilai Penjualan/Omzet IKM di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, 2025

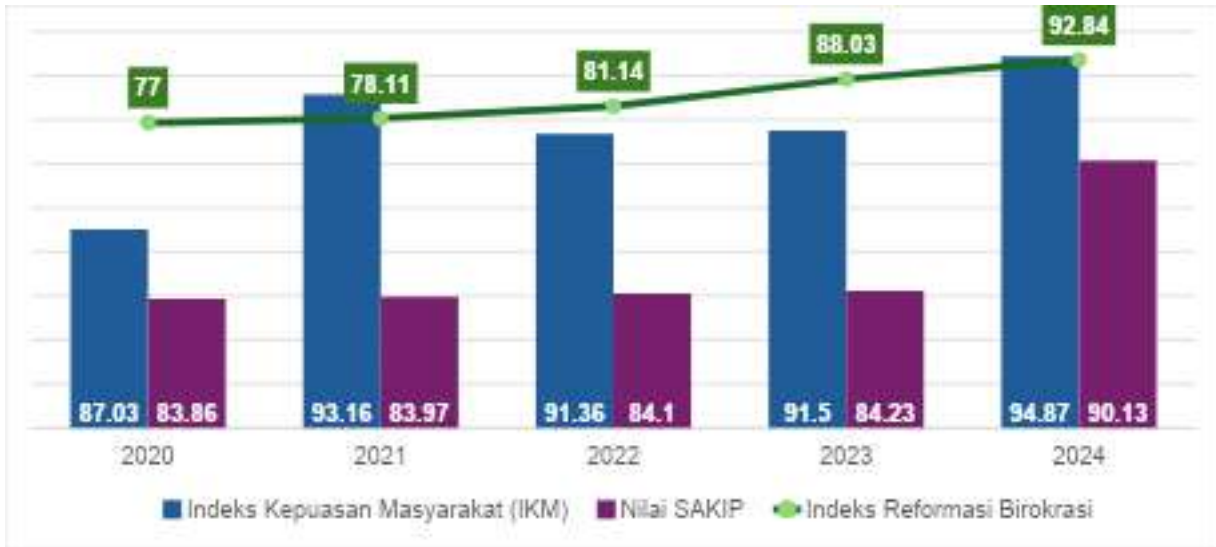
Sesuai dengan grafik diatas, Persentase Peningkatan Nilai Penjualan/Omzet IKM di Kabupaten Banyuwangi pada urusan Perindustrian dari tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif. Peningkatan secara signifikan terjadi di tahun 2021 yang sebelumnya ditahun 2020 memiliki nilai sebesar -13.16% yang kemudian meningkat menjadi sebesar 4.5%. Kemudian ditahun 2022, mengalami penurunan menjadi sebesar 1.7% yang kemudian ditahun 2023-2024 mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar 4.41% ditahun 2024. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh nilai penjualan yang meningkat dipengaruhi oleh strategi penetapan harga yang disesuaikan dengan biaya produksi yang meningkat. Efisiensi operasional dan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat dapat menekan biaya produksi, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan omset.



D. UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu bagian dalam unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini merupakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2. 82 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan capaian tahun 2024 sebesar 94,87 yang masuk dalam kategori “sangat baik,” meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,62, tetapi juga mencerminkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Banyuwangi. Peningkatan ini tak lepas dari berbagai inovasi pelayanan publik yang diluncurkan oleh pemerintah daerah, seperti *Smart Kampung*, platform digital layanan publik yang telah diimplementasikan di seluruh desa, dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang pada tahun 2023 meraih penghargaan nasional sebagai penyelenggara MPP terbaik. Selain digitalisasi, pendekatan pelayanan langsung melalui program *Bunga Desa* (Bupati Ngantor di Desa) juga menjadi upaya strategis untuk menjangkau masyarakat yang belum akrab dengan teknologi, dengan konsep jemput bola menyelesaikan persoalan warga di lokasi.

Seiring dengan itu, capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Banyuwangi juga menunjukkan tren positif. Tahun 2024, indeks RB tercatat sebesar 92,84 atau setara dengan capaian kinerja 110,04%, menandakan bahwa target telah terlampaui. Reformasi birokrasi ini diwujudkan dalam bentuk efisiensi tata kelola pemerintahan, transparansi, serta penguatan akuntabilitas pelayanan



publik. Salah satu indikator utama yang mendukung hal ini adalah meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, Banyuwangi berhasil memperoleh predikat A dalam SAKIP dari Kementerian PAN-RB, yang menandakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Pencapaian Banyuwangi dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik kerap menjadi rujukan daerah lain di Indonesia. Keberhasilan ini didukung kepemimpinan yang inovatif dan partisipatif, serta keseriusan dalam membangun sistem pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Keseluruhan capaian tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berfokus pada output program, tetapi juga menjamin kualitas layanan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kinerja pada urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Banyuwangi salah satunya didukung oleh perbaikan pada aspek Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Inovasi pelayanan digital yang semakin baik mampu menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses administrasi publik. Penguatan infrastruktur layanan juga menjadi faktor penting dalam memastikan aksesibilitas pelayanan yang merata, cepat, dan transparan. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat telah berjalan lebih efektif karena setiap laporan atau keluhan masyarakat segera ditindaklanjuti, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada aspek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan perencanaan berbasis outcome telah membantu fokus pencapaian kinerja menjadi lebih terarah dan terukur. Pemerintah daerah juga memanfaatkan aplikasi pengukuran kinerja yang terintegrasi, memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaporan capaian kinerja telah terhubung langsung dengan sistem e-SAKIP, sehingga proses evaluasi dan akuntabilitas kinerja menjadi lebih transparan, efektif, dan efisien dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, pada aspek Reformasi Birokrasi (RB), penguatan kebijakan dilakukan melalui penyusunan rencana aksi birokrasi yang jelas dan terarah, termasuk penguatan zona integritas di berbagai unit kerja. Pengelolaan sumber daya manusia telah berbasis matriks kinerja, mendukung penerapan smart kampung sebagai salah satu inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Keberadaan Tim RB yang dikoordinasikan oleh dinas pengampu terkait menjadikan pelaksanaan program reformasi birokrasi lebih sistematis, terstruktur, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 tahun 2021 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Secara teknik Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD



dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Adapun secara rinci capaian dari indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada poin di bawah ini:



Gambar 2.83 Kinerja Unsur Pendukung (Sekretariat DPRD) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, indikator capaian pada urusan Sekretariat DPRD adalah mengenai Raperda yang Disahkan menjadi Perda Tepat Waktu ditahun 2020-2024. Pada indikator ini memiliki capaian dengan tren fluktuatif, dimana capaian tertinggi ada di tahun 2023, yaitu sejumlah 53. Sementara capaian terendah ada ditahun 2024 yaitu dengan jumlah 16 dan ditahun 2024 capaian menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2023 yang memiliki capaian tertinggi. Penurunan terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti diantaranya lemahnya penyusunan propemperda karena banyak pengusulan raperda inisiatif (dari lembaga legislatif) tapi tidak disertai dg kajian yg mendalam (hanya judul), banyak regulasi yg mempersulit (pemerintah lebih selektif dalam penyusunan raperda), dan sistem kerja kolektif kolegial. Faktor lain selain dari beberapa permasalahan diatas, adanya benturan kepentingan dalam pembahasan Perda dan adanya urgensi permasalahan yang mendesak diselesaikan dengan Perda.

E. UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi terkait perencanaan yang bersifat strategis sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 91 Tahun 2021, diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi dengan kinerja direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar 2.84 Kinerja Unsur Perencanaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025

Pada urusan Perencanaan terdapat dua indikator capaian kinerja yaitu Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP dan Tercapainya sasaran pembangunan daerah. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP ditahun 2021-2024 memiliki tren capaian yang fluktuatif, yang tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 26.25% yang ditahun sebelumnya memiliki capaian sebesar 28.50%. Sementara ditahun 2023 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 26.34% dan di 2024 kembali mengalami peningkatan secara signifikan menjadi sebesar 27.69%. Indikator kedua adalah Tercapainya sasaran pembangunan daerah dimana tahun 2021-2023 mengalami peningkatan, hingga ditahun 2023 adalah capaian tertinggi selama 4 tahun yaitu sebesar 115.67%. Namun ditahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 94.22%.

Keberhasilan peningkatan kinerja pada urusan perencanaan di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh adanya langkah-langkah strategis dalam penguatan dokumen perencanaan kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyempurnaan Pokok-Pokok Kinerja (Pokin) dilakukan secara berkesinambungan, disertai dengan identifikasi crosscutting Pokin yang mampu menggambarkan keterkaitan dan sharing outcome antar lintas tugas dan fungsi perangkat daerah. Pendekatan ini tidak hanya memperjelas kontribusi masing-masing perangkat daerah terhadap sasaran pembangunan, tetapi juga mendorong koordinasi dan sinergi antarunit kerja sehingga proses perencanaan menjadi lebih terarah, komprehensif, dan berbasis hasil yang terukur.

Meskipun demikian, pencapaian sasaran pembangunan daerah masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Terbatasnya alokasi anggaran menyebabkan tidak semua program prioritas dapat memperoleh dukungan pembiayaan yang optimal, sementara keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat seringkali



menunda pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas menjadi tantangan tersendiri dalam mengawal proses perencanaan hingga implementasi program pembangunan. Upaya penyempurnaan perencanaan yang dilakukan melalui SAKIP diharapkan dapat meminimalkan kendala tersebut, memastikan perencanaan tetap adaptif terhadap kondisi fiskal dan sumber daya yang tersedia, serta menjaga efektivitas pencapaian target pembangunan daerah.

2) Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Capaian dari indikator urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada poin berikut:



Gambar 2.85 Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sesuai dengan grafik urusan penunjang dengan unsur Penelitian dan Pengembangan ditahun 2022-2024, memiliki tren capaian yang fluktuatif. Penurunan terjadi ditahun 2023 dengan capaian sebesar 81% yang sebelumnya ditahun 2022 memiliki capaian sebesar 97.78%. Kemudian ditahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 98.86% yang merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun.

Keberhasilan peningkatan kinerja pada urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh optimalisasi pemanfaatan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten menjalin kerja sama strategis dengan berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Airlangga (UNAIR), Stikes Banyuwangi, Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), Universitas 17 Agustus 1945



(UNTAG), dan Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi), untuk menghasilkan kajian dan rekomendasi berbasis data ilmiah. Kolaborasi ini memperkuat kualitas perencanaan program, karena setiap kebijakan yang dirumuskan dilandaskan pada hasil penelitian yang relevan, teruji, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga mendorong terciptanya inovasi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan.

3) Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai keuangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari beberapa indikator urusan keuangan dapat dilihat dari capaian indikator berikut:

Tabel 2.46 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 2025

Dalam unsur keuangan, terdapat indikator tentang Opini BPK terhadap LKPD dari tahun 2020-2024. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas atas dua jenis pemeriksaan keuangan, yakni pemeriksaan atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Di Kabupaten Banyuwangi, indikator Opini BPK Terhadap LKPD dimana pada indikator ini capaian telah memenuhi target yaitu menjadi WTP di tahun 2020-2024. WTP adalah singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian dan Opini WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK dan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain, masih terdapat permasalahan terhadap penguatan sistem keuangan terintegrasi yang ada di BPKAD, yang disebabkan oleh aplikasi yang baru saja diluncurkan, sehingga aparaturnya mengalami sedikit kendala dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan masih dalam tahap pengelanaan dan adaptasi terhadap aplikasi baru tersebut.

4) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada unsur Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, adalah urusan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, guna mencapai efisiensi, profesionalisme, dan daya saing yang lebih baik. Selain itu, unsur kepegawaian memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Adapun untuk capaian indikator yang ada di unsur Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2.86 Kinerja Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi, 2025

Indikator pertama adalah terkait indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020-2024 yang mengalami tren meningkat. Terjadinya peningkatan pada Indeks Profesionalitas ASN terjadi karena adanya perubahan peraturan terutama ditahun 2023 sehingga, selain itu terdapat penurunan penilaian kualifikasi, selain dari pendidikan, 40% diambil dari kinerja, dan penambahan penilaian dari P3K untuk tahun 2025. Indikator kedua adalah tentang Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dimana ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 80% dibandingkan capaian tahun 2020-2021 yang memiliki capaian sebesar 85%. Penurunan terjadi karena menurunnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi. Sementara indikator ketiga mengenai Indeks penilaian penerapan sistem merit, tersedia data mulai tahun 2021-2023 yang memiliki capaian meningkat dengan capaian akhir ditahun 2023 sebesar 305, yang memiliki beberapa permasalahan seperti tidak adanya manajemen talenta, belum adanya rencana suksesi, dan adanya kesenjangan kualifikasi dan kompetensi.

F. UNSUR PENGAWASAN

1) Inspektorat

Sebagai bagian dari sistem pengawasan internal, Inspektorat berperan penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan keuangan. Maka, Inspektorat berperan dalam melakukan pengawasan, audit, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada unsur Pengawasan, terdapat indikator terkait APIP yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.47 Kinerja Unsur Pengawasan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, 2025

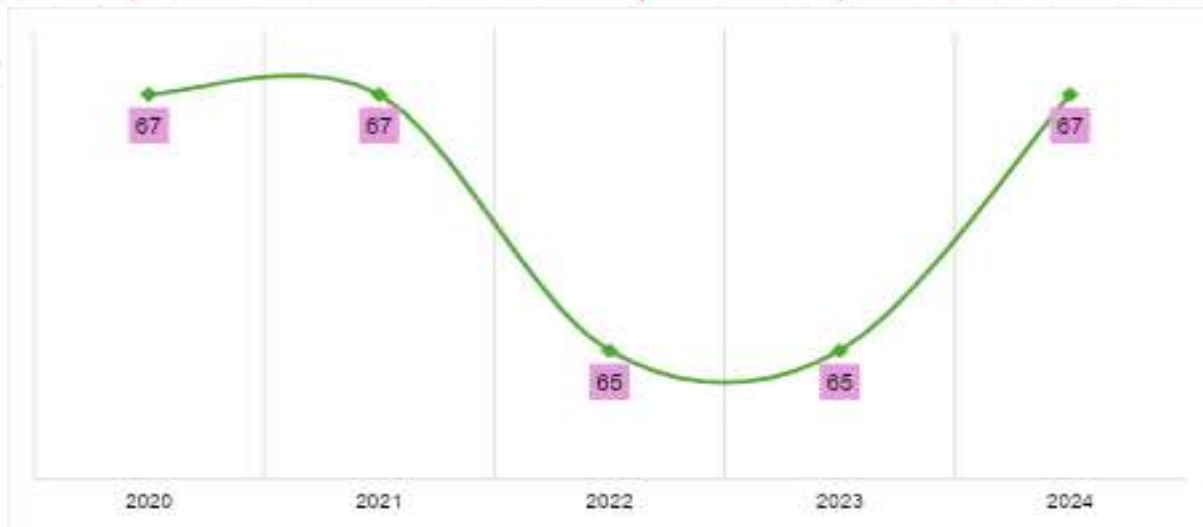
Sesuai dengan tabel indikator diatas, Skor APIP di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024, memiliki capaian dengan berada di Level 3 hingga tahun 2024, meskipun secara riil memiliki nilai yang meningkat. Bersamaan dengan Skor APIP, pada indikator Maturitas APIP juga memiliki capaian yang sama dengan indikator Skor APIP. Capaian Level 3 menunjukkan bahwa skor APIP masuk kepada *Integrated* (Terintegrasi dalam Sistem Pengelolaan Pemerintahan), dimana APIP berperan aktif dalam manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan, serta melakukan audit berbasis kinerja dan efektivitas program, dan dalam pelaksanaannya sudah menggunakan teknologi dalam pengawasan.

Keberhasilan peningkatan kinerja unsur pengawasan di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh adanya regulasi yang kuat dari pemerintah pusat, termasuk Peraturan Pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh. Kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) turut memperkuat pengawasan berbasis partisipasi publik. Sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi faktor kunci dalam menindaklanjuti temuan dan mencegah terjadinya pelanggaran tata kelola. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pengawas juga mendukung penguatan fungsi pengawasan. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel diperkuat melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memungkinkan pengawasan lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada prinsip good governance.

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan kesatuan bangsa dan Politik merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri sekaligus perangkat dari organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam suatu daerah kabupaten/ kota. Dalam hal ini OPD Kesbangpol melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 12 Ayat 1. Berikut ini beberapa indikator yang merepresentasikan oleh urusan pemerintahan umum oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 2.87 Kinerja Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Banyuwangi, 2025

Pada unsur Kesatuan bangsa dan politik, memiliki kinerja yang berkaitan dengan Persentase angka masyarakat yang menggunakan hak politiknya. Tren pada kinerja unsur ini adalah tren fluktuatif dengan adanya penurunan terjadi ditahun 2022-2023 dengan capaian sebesar 65. Sebelumnya ditahun 2020-2021 pada indikator kinerja pada unsur Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki capaian sebesar 65. Penurunan yang terjadi disebabkan karena tingkat kejenuhan masyarakat terhadap fenomena politik yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga timbulah sikap acuh terhadap pesta demokrasi saat ini dirasa semakin tidak sebanding dengan tingginya harapan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan dimasa mendatang. Semakin banyak angka golput dan kurangnya minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan baik nasional ataupun regional, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan berimbas pada kualitas demokrasi. Hal ini tidak sebanding dengan hasil pemilihan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh elemen masyarakat melalui peraturan berikut kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi calon yang sudah terpilih. Selain itu, ada juga faktor masyarakat Banyuwangi yang mayoritas bekerja di luar daerah sehingga tidak dapat atau mengalami kendala untuk menyalurkan hak politiknya. Namun capaian pada unsur Kesatuan bangsa dan politik ditahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 67.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah mencakup hak dan tanggung jawab entitas wilayah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Hak dan tanggung jawab ini diukur dalam bentuk uang dan mencakup seluruh aset yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,



penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Seluruh kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas tidak dapat diremehkan. Pengelolaan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Manajemen keuangan daerah harus berfokus pada kepentingan masyarakat, dan untuk itu perlu disajikan secara jelas, efektif, dan efisien. Pendekatan ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi sejarah kinerja pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, perilaku data dan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan daerah, serta proyeksi ketersediaan dana pembangunan di Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun mendatang.

Landasan yuridis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi berpegang pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan panduan komprehensif yang menjadi acuan utama dalam mengelola keuangan daerah. Dengan berpegang pada landasan yuridis ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu mengelolanya dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa landasan normatif lain yang mendasari proses pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- e. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang UU PDRD (Pajak dan Retribusi Daerah);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Penilaian kinerja keuangan masa lalu dilakukan melalui peninjauan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuwangi disertai kondisi Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tinjauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sedangkan tinjauan terhadap Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi difokuskan pada perkembangan aset daerah, kewajiban serta ekuitas dana yang didalamnya terdapat analisis Neraca Daerah yang meliputi perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah daerah yang mencakup semua rencana penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. APBD mencerminkan rencana keuangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan kegiatan yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;



5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
6. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi meliputi perkembangan pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan sebagai seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan ini meliputi semua penerimaan uang yang masuk melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, serta tidak perlu dikembalikan. Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang mencakup transfer dari pemerintah pusat serta transfer dari provinsi dan daerah lain, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Komponen-komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan perkembangan yang cukup progresif dari tahun 2020 hingga 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan, mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Pendapatan Transfer juga menunjukkan kontribusi yang stabil dan substansial dari pemerintah pusat serta provinsi. Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga memberikan kontribusi penting dalam keseluruhan pendapatan daerah. Berikut ini adalah perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dinyatakan dalam milyar rupiah, yang menunjukkan tren positif dalam peningkatan penerimaan daerah. Berikut merupakan perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 (Dalam Milyar Rupiah):



Gambar 2. 88 Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Tren peningkatan pendapatan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam konteks pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat perkembangan pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0.80%. Sepanjang tahun 2020 – 2024 tercatat terdapat 2x penurunan pertumbuhan pendapatan, yakni pada tahun 2021 yang menurun hingga -2.66% dari tahun sebelumnya serta pada tahun 2024 yang mengalami penurunan sebesar -0.13%. Sedangkan puncak pertumbuhan tertinggi yakni pada tahun 2023 yang mencapai 4.28% dari tahun 2022.

Tren pertumbuhan pada masing-masing komponen Pendapatan tersaji dalam tabel berikut ini:



**Tabel 2.48 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2024**

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	-2.66%	1.73%	4.28%	-0.13%	0.80%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	7.72%	-0.63%	9.87%	5.25%	5.55%
1.2	Pendapatan Transfer	6.86%	3.43%	6.52%	-1.27%	3.88%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	4.03%	3.86%	3.90%	0.39%	3.05%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	40.54%	-0.42%	30.49%	-13.38%	14.31%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-63.78%	-17.05%	-60.59%	1.68%	-34.96%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sektor utama yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan regulasi yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut sebagai penerapan prinsip desentralisasi. Sumber-sumber PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Nilai PAD Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.55%. Nilai PAD pada tahun 2020 sebesar Rp. 482,740,174,377.22 yang kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 7.72% hingga menjadi Rp. 520,021,954,381.20. Adapun pada tahun 2022, PAD Kabupaten Banyuwangi sedikit mengalami penurunan sebesar -0.63% sehingga menjadi Rp 516,757,143,543.55. Penurunan PAD pada tahun 2022 bila memerhatikan komponen PAD bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah yang turun cukup signifikan sebesar -11.74% serta adanya sedikit penurunan pada retribusi daerah sebesar -0.51%. Sedangkan untuk pajak dan hasil pengelola keuangan daerah yang dipisahkan justru mengalami peningkatan yang cukup progresif yakni pajak daerah dapat meningkat hingga mencapai 12.28% sedangkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dapat meningkat sebesar 4.23%. Adapun pada tahun 2023, secara keseluruhan nilai PAD dapat kembali mengalami peningkatan hingga 9.87% atau mencapai Rp 567,756,888,962.16. Peningkatan PAD pada tahun 2023 ini merupakan capaian yang paling progresif dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Meskipun begitu, pada tahun 2023 ini lain-lain PAD yang sah kembali mengalami penurunan hingga mencapai -2.28%. Lebih lanjut, secara keseluruhan peningkatan PAD Kabupaten Banyuwangi dapat kembali terjadi pada tahun 2024, dimana PAD Kabupaten Banyuwangi tumbuh progresif



mencapai 5.25% dari tahun 2023 hingga nilai PAD tahun 2024 dapat mencapai angka Rp. 597,543,976,561.76.

Jika dilihat dari nilai komposisinya, maka hampir keseluruhan komposit PAD menunjukkan rata-rata pertumbuhan dengan nilai positif khususnya pada Retribusi Daerah yang mengalami rata-rata pertumbuhan sangat tinggi serta merupakan komponen PAD yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 114.86%. Rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut dikarenakan pada tahun 2024 terjadi perpindahan komponen pos pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah ke dalam Retribusi Daerah, sehingga nilai Retribusi Daerah tahun 2024 meningkat 454.61% sedangkan Lain-lain Pad yang Sah menjadi satu komponen PAD yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan minus dalam 5 tahun terakhir, yakni memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -24.48% dengan adanya pertumbuhan -94.74% di tahun 2024 yang merupakan hasil perpindahan komponennya kepada Retribusi Daerah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun pada komponen Pajak Daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni mencapai 11.89%. Sedangkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3.57%. Merujuk lebih dalam pada komposit pembentuk Pendapatan Daerah, pajak daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan merupakan komponen yang secara konsisten dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Komponen Pendapatan Daerah selanjutnya adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dimana Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Banyuwangi bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah Kabupaten Banyuwangi bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Transfer Pemerintah Pusat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3.05% yang menunjukkan pertumbuhan jauh lebih rendah dibandingkan dana Transfer Antar Daerah yang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 14.31%. Untuk rata-rata Pertumbuhan pada komponen Dana Bagi Hasil juga mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -5,48%. Adapun jika dilihat secara keseluruhan, komponen Pendapatan Transfer dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pendapatan Bagi Hasil yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 14.98% serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7.73%. Sedangkan komponen Pendapatan Transfer yang memiliki pertumbuhan menurun adalah Dana Insentif Daerah yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar -8.51% serta Bantuan Keuangan yang mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan hingga -15.71%.



Selanjutnya komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 bersumber dari Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana tidak terdapat realisasi pada komponen Dana Darurat. Rata-rata pertumbuhan Hibah yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat terus mengalami penurunan hingga menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar -47.27%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 17.20%.

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 hingga 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.49 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	3,268,231,248,972.23	3,181,210,231,920.83	3,236,145,965,510.90	3,374,669,357,720.55	3,370,326,601,122.08	0.80%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	482,740,174,377.22	520,021,954,381.20	516,757,143,543.55	567,756,888,962.16	597,543,976,561.76	5.55%
1.1.1.	Pajak daerah	191,631,105,771.59	206,146,187,700.00	231,458,652,487.00	282,348,613,611.00	298,505,386,787.00	11.89%
1.1.2.	Retribusi daerah	45,631,411,394.00	43,211,935,541.00	42,989,558,015.92	47,594,308,518.17	263,963,099,584.10	114.88%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	20,666,815,797.40	21,491,551,361.34	22,401,056,861.23	22,910,845,984.92	23,774,290,840.03	3.57%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	224,810,841,414.23	249,172,279,778.86	219,907,876,179.40	214,903,120,848.07	11,301,199,350.63	-24.48%
1.2	Pendapatan Transfer	2,339,531,673,666.00	2,500,041,854,276.00	2,585,719,727,774.00	2,754,232,224,886.00	2,719,220,378,768.00	3.88%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2,157,953,688,002.00	2,244,848,461,387.00	2,331,608,637,955.00	2,422,636,949,911.00	2,431,994,967,768.00	3.05%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,852,125,074,002.00	1,982,325,720,387.00	2,066,775,720,955.00	2,139,924,037,211.00	2,150,010,492,768.00	3.83%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	240,362,530,287.00	187,640,503,000.00	-5.48%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,463,768,018,106.00	1,622,205,084,853.00	1,580,662,835,905.00	1,372,156,815,427.00	1,462,844,517,762.00	0.42%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	388,357,055,896.00	360,120,635,534.00	486,112,885,050.00	527,404,691,497.00	499,525,472,006.00	7.73%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	94,924,042,000.00	42,442,282,000.00	43,122,557,000.00	53,412,589,000.00	51,161,561,000.00	-8.51%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	210,904,572,000.00	220,080,459,000.00	221,710,360,000.00	229,305,443,700.00	230,822,914,000.00	2.29%

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	181,577,985,664.00	255,193,392,889.00	254,111,089,819.00	331,595,274,975.00	287,225,411,000.00	14.31%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	173,818,367,314.00	247,238,037,389.00	234,310,076,819.00	313,446,272,275.00	279,423,766,000.00	14.98%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	7,759,618,350.00	7,955,355,500.00	19,801,013,000.00	18,149,002,700.00	7,801,645,000.00	-15.71%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	445,959,400,929.01	161,146,423,263.63	133,669,094,193.35	52,675,123,872.39	53,562,245,792.32	-34.96%
1.3.1	Hibah	147,881,293,680.01	145,516,896,475.63	99,271,161,818.50	7,822,476,000.00	2,849,524,000.00	-47.27%
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	298,078,107,249.00	15,629,526,788.00	34,397,932,374.85	44,852,647,872.39	50,712,721,792.32	17.20%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



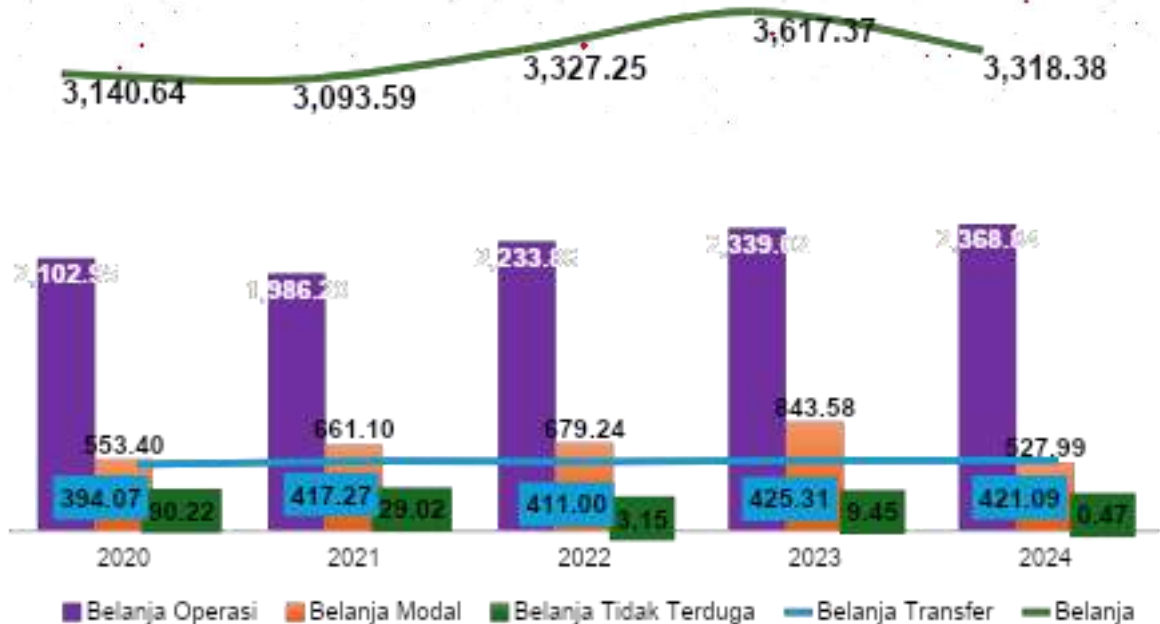
B. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan berbagai Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Urusan Pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, serta urusan penunjang pemerintahan. Dalam alokasi belanja daerah, prioritas utama adalah mendukung urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini harus memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta mengikuti standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pendanaan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan didasarkan pada analisis standar belanja dan harga satuan regional. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pengembangan aspek-aspek lain yang mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada rata-rata pertumbuhan sebesar 1.63%. Sepanjang periode 2020-2024 penurunan belanja daerah terjadi pada tahun 2021 mencapai -1.50% dari tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya *refocusing* dan kebijakan lainnya guna penanganan pandemi Covid-19 serta terjadi penurunan pada tahun 2024 mencapai -8.27% yang disebabkan oleh adanya penurunan pada seluruh jenis belanja daerah terkecuali pada belanja operasi. Sedangkan pada tahun 2022 dan tahun 2023, Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 tergambar dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 2. 89 Komponen Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Realisasi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada 2020 adalah sebesar Rp. 3,140,638,904,668.47. Namun nilai belanja Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar -1.50% menjadi Rp 3,093,593,254,516.97. Terjadinya penurunan pada tahun 2021 tersebut dimungkinkan karena masih adanya transisi dari masa pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga pada tahun tersebut penurunan belanja lebih diakibatkan dengan menurunnya belanja operasi yang mencapai -5.55%. Pasca masa Covid-19 yakni pada tahun 2022 belanja daerah Kabupaten Banyuwangi kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 7.55% menjadi Rp 3,327,251,697,808.09 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 hingga menjadi Rp 3.617.368.478.954,81 atau dengan kata lain mengalami pertumbuhan sebesar 8.72% yang merupakan pertumbuhan belanja paling tinggi dalam kurun waktu 2020-2024. Sedangkan pada tahun 2024, Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi kembali mengalami penurunan hingga memiliki nilai lebih rendah dari tahun 2023 dan 2022, yakni menurun -8.27% menjadi Rp. 3.318.380.677.018,08. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan belanja Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024:



Tabel 2.50 Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 2020-2024

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	-1.50%	7.55%	8.72%	-8.27%	1.63%
2.1	Belanja Operasi	-5.55%	12.47%	4.71%	1.27%	3.22%
2.2	Belanja Modal	19.46%	2.74%	24.19%	-37.41%	2.25%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0.00%	-89.14%	199.82%	-95.08%	3.90%
2.4	Belanja Transfer	5.89%	-1.50%	3.48%	-0.99%	1.72%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Keseluruhan komponen Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif. Akan tetapi pada perkembangannya, masing-masing komponen Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada Belanja Operasi yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3.22% sempat mengalami penurunan di tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 hingga tahun 2024 Belanja Operasi Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Belanja Operasi Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar Rp. 2,102,953,113,847.04 yang kemudian mengalami penurunan cukup tinggi pada tahun 2021 sebesar -5.55% hingga menjadi Rp 1,986,204,516,139.36. Meskipun begitu pada tahun 2022 Belanja Operasi Kabupaten Banyuwangi kembali meningkat progresif sebesar 12.47% hingga menjadi Rp 2,233,858,526,553.47 dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan mencapai 4.71% menjadi Rp 2,339,022,595,489.17. Belanja Operasi Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 hingga menjadi Rp. 2,368,836,243,404.07 atau dengan kata lain tumbuh 1.27% dari tahun 2023. Secara umum belanja operasi dibagi menjadi 6 jenis belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial. Akan tetapi, tidak terdapat realisasi Belanja Bunga dan Belanja Subsidi pada Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024. Dari enam jenis Belanja Operasi di Kabupaten Banyuwangi, nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi terdapat pada belanja hibah dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 76.29% serta belanja bantuan sosial yang memiliki rata-rata pertumbuhan mencapai 13.83%. Pencapaian cukup signifikan tersebut lebih kepada fluktuasinya pertumbuhan dalam kurun waktu 2020-2024 dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020 dan 2023 untuk belanja hibah dan tahun 2021 untuk Belanja Bantuan Sosial. Adapun pada Belanja Pegawai tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki tren rata-rata pertumbuhan yang paling kecil yakni sebesar 0.28%, serta Belanja Barang dan Jasa memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7.23%.



Pada Belanja Modal terdapat realisasi pada masing-masing jenis belanja di setiap tahunnya terkecuali pada belanja modal tanah yang hanya terealisasi pada tahun 2020, dan 2022. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan jenis Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu 30.30%, kemudian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7.94% serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 1.35%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Tanah serta Belanja Aset Lainnya merupakan tiga komponen Belanja Modal yang memiliki rata-rata pertumbuhan minus, yakni sebesar -50.00% untuk belanja modal tanah, -9.79% untuk belanja modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Aset Lainnya yang tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -22.13%.

Tidak jauh berbeda dengan realisasi Belanja Operasi, masing-masing jenis Belanja Modal juga menunjukkan tren fluktuasi yang cukup tinggi. Hal ini juga berdampak pada fluktuasi nilai total realisasi Belanja Modal, dimana pada tahun 2020 nilai Belanja Modal Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar Rp. 553,395,030,040.43. kemudian di tahun 2021 belanja modal meningkat cukup signifikan mencapai 19.46% hingga menjadi Rp 661,103,400,609.61. Meskipun pertumbuhan belanja modal mengalami pelemahan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.74% pada tahun 2022 namun tahun 2023 belanja modal kembali meningkat cukup pesat dengan pertumbuhan mencapai 24.19% atau mencapai Rp 843,580,593,865.54 pada tahun 2023. Adapun pada tahun 2024, Belanja Modal Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -37.41% hingga menjadi Rp. 527,988,557,014.01. Kondisi ini disebabkan oleh adanya penurunan pada seluruh komponen Belanja Modal di tahun 2024 serta tidak adanya realisasi Belanja Tanah ditahun tersebut.

Realisasi pada Belanja Tak Terduga menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan positif diangka 3.90%. Akan tetapi pada perkembangannya Belanja tak Terduga mengalami fluktuasi dengan adanya penurunan dan peningkatan realisasi. Hal ini dimungkinkan karena Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran tak terduga untuk kebutuhan darurat atau mendesak, seperti penanggulangan bencana atau pengembalian kelebihan penerimaan daerah, yang sifatnya tidak biasa dan tak terduga. Sehingga besaran realisasinya menyesuaikan dengan kondisi daerah yang terjadi pada tahun berkenaan.

Sedangkan Belanja Transfer merupakan salah satu jenis Belanja Daerah yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 394,066,330,500.00 dan terus tumbuh secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.72% hingga pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 421,090,548,600.00. Secara keseluruhan nilai realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 beserta masing-masing komponennya tersaji dalam tabel berikut

Tabel 2.51 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	3,140,638,904,668.47	3,093,593,254,516.97	3,327,251,697,808.09	3,617,368,478,954.81	3,318,380,677,018.08	1.63%
2.1	Belanja Operasi	2,102,953,113,847.04	1,986,204,516,139.36	2,233,858,526,553.47	2,339,022,595,489.17	2,368,836,243,404.07	3.22%
2.1.1	Belanja Pegawai	1,089,073,537,928.26	1,077,767,889,579.00	1,062,277,693,191.79	1,056,209,784,687.69	1,100,041,983,084.72	0.28%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	807,356,193,567.78	812,104,772,920.36	997,830,709,483.68	1,067,318,507,219.48	1,051,356,673,507.84	7.23%
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	180,849,655,351.00	35,181,062,240.00	161,377,103,878.00	200,856,311,082.00	205,932,856,811.51	76.29%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	25,673,727,000.00	61,150,791,400.00	12,373,020,000.00	14,637,992,500.00	11,504,730,000.00	13.83%
2.2	Belanja Modal	553,395,030,040.43	661,103,400,609.61	679,243,011,518.62	843,580,593,865.54	527,988,557,014.01	2.25%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	51,868,800.00	0.00	9,999,788,000.00	0.00	0.00	-50.00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117,824,202,615.00	94,308,993,620.40	127,416,182,107.42	158,309,393,578.00	104,515,166,308.00	1.35%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129,356,513,551.00	148,719,626,588.21	125,005,108,897.12	131,194,805,413.81	74,594,790,024.44	-9.79%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	304,976,409,004.43	414,624,441,901.00	414,029,451,844.08	550,003,061,864.73	347,087,558,331.57	7.94%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,186,036,070.00	3,450,338,500.00	2,792,480,670.00	2,021,087,070.00	1,555,803,450.00	30.30%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	2,052,245,939.00	235,238,900.00	-22.13%
2.3	Belanja Tidak Terduga	90,224,430,281.00	29,019,869,108.00	3,152,173,071.00	9,450,823,087.10	465,328,000.00	3.90%



No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.4	Belanja Transfer	394,066,330,500.00	417,265,468,660.00	410,997,986,665.00	425,314,466,513.00	421,090,548,600.00	1.72%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	26,390,119,500.00	21,013,403,477.00	20,193,979,415.00	20,193,959,600.00	20,193,959,600.00	-6.07%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	367,676,211,000.00	396,252,065,183.00	390,804,007,250.00	405,120,506,913.00	400,896,589,000.00	2.25%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah melibatkan transaksi keuangan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Jika terdapat surplus, pembiayaan mencerminkan penggunaan surplus, sedangkan dalam kondisi defisit anggaran, pembiayaan menunjukkan transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah muncul ketika pengeluaran melebihi penerimaan, sehingga terjadi defisit. Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari berbagai sumber., yaitu:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi :

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang dilakukan terhadap komponen pembiayaan daerah akan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat atau jumlah keseluruhan suatu objek dalam perekonomian, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp. 0,-.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024 menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar -5.50%, serta memiliki perkembangan realisasi secara fluktuatif pada setiap tahunnya. Capaian nilai penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang sebagian besar bersumber dari SiLPA sebesar Rp 387,811,173,271.16 yang kemudian terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 mencapai



nilai SiLPA dengan capaian terendah sebesar Rp 37,265,855,820.88. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa semakin baiknya perencanaan anggaran keuangan daerah sehingga seluruh anggaran dapat terserap dengan baik dan menyisakan SiLPA yang semakin rendah. Sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan menunjukkan rata-rata pertumbuhan mencapai 6.55%. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas Penyertaan Modal Daerah yang terdapat pada tahun 2020-2023, sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi.

Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.52 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	187,101,344,846.13	310,594,127,944.30	387,812,709,352.33	287,706,977,055.14	37,265,855,820.88	-5.50%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	187,101,344,846.13	310,594,127,944.30	387,811,173,271.16	287,706,977,055.14	37,265,855,820.88	-5.50%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	1,536,081.17	0.00	0.00	-25.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4,100,000,000.00	10,400,000,000.00	9,000,000,000.00	7,742,000,000.00	0.00	6.55%
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	4,100,000,000.00	10,400,000,000.00	9,000,000,000.00	7,742,000,000.00	0.00	6.55%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



2.2.1.2 NERACA DAERAH

Neraca Daerah menjadi sebuah laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini memiliki signifikansi besar bagi manajemen pemerintah daerah, bukan hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam upaya mengelola sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah, sebagai gambaran posisi keuangan entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu tertentu, mencakup elemen-elemen utama seperti Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, di mana manfaat ekonomi atau sosial di masa mendatang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset juga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban dalam Neraca Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Komponen terakhir yang tercakup dalam Neraca Daerah adalah ekuitas, yang dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah, merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir (2020-2024):

Tabel 2.53 Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	510,859,202,007.11	568,953,667,177.71	446,111,987,239.36	211,709,577,929.73	287.846.856.975,16	-6,70%
1.1.1.	Kas	311,308,763,772.17	387,975,431,067.44	287,857,814,378.14	37,336,464,075.88	89.307.199.186,88	12,75%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0.00%
1.1.3.	Piutang	155,731,933,918.50	157,662,113,901.44	145,948,941,876.91	154,975,161,384.26	163.178.072.077,86	1,32%
1.1.4.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	0.00%
1.1.5.	Piutang Lainnya	7,756,961,269.91	7,089,289,507.50	7,506,283,383.44	9,587,342,527.44	9,178,240,364.92	5.18%
1.1.6.	Penyisihan Piutang	(40,593,609,995.14)	(54,756,043,486.15)	(60,097,645,679.85)	(70,442,056,000.10)	(85.857.989.103,40)	20,94%
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	4,067,057,904.42	3,696,956,804.42	3,780,723,075.08	3,842,999,515.08	1,165,557,253.75	-18,71%
1.1.8.	Persediaan	72,588,095,137.25	67,285,919,383.06	61,115,870,205.64	76,409,666,427.17	110.875.777.195,15	13,41%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	206,233,434,201.87	220,226,413,214.96	233,086,498,321.43	244,990,455,640.00	249.089.272.297,18	4,85%
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	206,233,434,201.87	220,226,413,214.96	233,086,498,321.43	244,990,455,640.00	249.089.272.297,18	4,85%

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.	ASET TETAP	3,660,765,416,069.42	3,815,178,420,444.50	3,948,251,252,682.42	4,096,585,290,691.94	4.231.394.249.418,44	3,69%
1.3.1.	Tanah	1,112,851,624,355.93	1,106,994,455,492.14	1,114,498,721,645.02	1,063,168,499,028.57	1.094.168.598.971,57	-0,38%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	1,102,874,935,940.00	1,218,153,370,257.40	1,348,671,668,002.98	1,464,445,651,031.96	1.551.860.463.678,54	8,93%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	2,054,964,592,276.07	2,194,327,031,148.60	2,346,061,129,207.43	2,436,707,083,743.10	2.512.201.035.960,18	5,16%
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4,244,318,363,727.51	4,655,678,389,117.60	5,040,885,910,883.92	5,582,218,832,875.55	6.118.793.511.845,54	9,58%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	30,615,851,306.90	32,294,459,206.90	32,043,884,001.90	31,965,933,314.30	28.050.424.094,30	-1,95%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	13,673,473,892.85	14,490,218,932.26	17,155,442,041.28	10,211,131,500.00	20.722.247.182,21	21,71%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(4,898,533,425,429.84)	(5,406,759,503,710.40)	(5,951,065,503,100.11)	(6,492,131,840,801.54)	(7.094.402.032.313,90)	9,70%
1.4.	PROPERTI NVESTASI	-	-	-	104,695,451,718.94	135.065.203.097,68	7,25%
1.4.1.	Properti Investasi	-	-	-	118,045,176,028.49	150.724.440.390,49	6,92%
1.4.2.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	(13,349,724,309.55)	(15.659.237.292,81)	4,33%
1.5.	ASET LAINNYA	232,953,288,841.37	276,347,418,737.40	348,483,948,093.13	280,111,168,915.06	247.069.901.178,88	0,96%
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,00%

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	177,301,914,867.85	225,102,469,798.81	223,947,909,798.81	163,867,039,851.56	163,867,039,851.56	-0,10%
1.5.3.	Aset Tak Berwujud	11,260,016,864.00	12,459,365,264.00	13,595,246,594.90	15,770,787,933.90	16,240,835,833.90	9,69%
1.5.4.	Amortisasi	(8,097,929,327.40)	(9,492,809,522.93)	(10,883,724,952.41)	(12,551,426,512.71)	(13,888,528,008.01)	14,46%
1.5.5.	Aset Lain-lain	52,489,286,436.92	48,278,393,197.52	121,824,516,651.83	113,024,767,642.31	80.850.553.501,43	27,16%
	JUMLAH ASET	4,610,811,341,119.77	4,880,705,919,574.57	4,975,933,686,336.34	4,938,091,944,895.67	5.150.465.482.967,34	2,84%
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	54,862,011,024.66	72,893,086,508.14	86,982,075,099.27	96,256,381,970.71	295.152.011.183,88	67,37%
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	715,074,622.28	164,325,719.28	150,837,323.00	70,608,255.00	95,419,262.00	-25,82%
2.1.2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	751,062,394.32	717,568,311.85	456,256,943.83	369,105,598.44	561.904.854,81	-1,94%
2.1.4.	Utang Belanja	48,272,615,625.06	69,576,293,806.01	70,143,050,872.44	94,907,674,197.27	290.649.064.725,07	71,62%
2.1.5.	Utang Transfer	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	5,123,258,383.00	2,434,898,671.00	16,231,929,960.00	908,993,920.00	3.845.622.342,00	185,71%

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	0.00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	54,862,011,024.66	72,893,086,508.14	86,982,075,099.27	96,256,381,970.71	295.152.011.183,88	67,37%
3	EKUITAS						
3.1.	EKUITAS	4,555,949,330,095.12	4,807,812,833,066.43	4,888,951,611,237.07	4,841,835,562,924.96	4.855.313.471.783,47	1,63%
3.1.1.	Ekuitas	4,555,949,330,095.12	4,807,812,833,066.43	4,888,951,611,237.07	4,841,835,562,924.96	4.855.313.471.783,47	1,63%
	JUMLAH EKUITAS	4,555,949,330,095.12	4,807,812,833,066.43	4,888,951,611,237.07	4,841,835,562,924.96	4.855.313.471.783,47	1,63%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4,610,811,341,119.78	4,880,705,919,574.57	4,975,933,686,336.34	4,938,091,944,895.67	5.150.465.482.967,35	2,84%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah disajikan dalam Neraca Daerah selama tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Aset

Aset dalam neraca daerah adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Aset-aset ini dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan mencerminkan kondisi keuangan daerah tersebut. Pengelolaan aset daerah yang baik penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah. Aset harus dicatat dan dilaporkan dengan akurat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan daerah kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, masyarakat, dan investor.

Berdasarkan tabel neraca daerah di atas, aset yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,84% dan mengalami tren peningkatan yang positif meskipun ditahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Jumlah aset di tahun 2020 sebesar Rp 4,610,811,341,119.77 dan tumbuh disetiap tahun terkecuali ditahun 2023 yang mengalami sedikit penurunan dan ditahun 2024 mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar Rp 5,150,465,482,967.34. Aset pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam neraca keuangan daerah terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi, serta Aset Lainnya. Komponen aset yang mengalami pertumbuhan tertinggi ada, pada Properti Investasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,25%.

Komponen aset lancar Kabupaten Banyuwangi memiliki rata-rata pertumbuhan -6,70% dengan pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Nilai aset lancar pada tahun 2020 sebesar Rp 510,859,202,007.11 dan mengalami kenaikan sebesar 11,37% di tahun 2021 menjadi Rp 568,953,667,177.71. Nilai ini merupakan nominal aset lancar tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2022-2023 terjadi tren penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2022 turun sebesar -21,59% menjadi Rp446.113.984.519,36, sedangkan 2023 turun sebesar -52,54% dan merupakan penurunan yang paling signifikan selama lima tahun terakhir menjadi Rp211.709.577.929,73 dan merupakan nilai terendah dalam tahun 2020-2024. Sedangkan ditahun 2024, aset lancar kembali mengalami kenaikan hingga sebesar 35,96% atau menjadi Rp 287,846,856,975.16. Pada komponen Aset Lancar tidak terdapat realisasi Investasi Jangka Pendek dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, melainkan diperoleh dari enam komponen lainnya.

Pada komponen Investasi Jangka Panjang terjadi tren peningkatan dalam rentang tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,85%. Terdapat dua komposit Investasi Jangka Panjang yaitu Investasi Jangka Panjang Permanen dan Non Permanen. Tidak ada capaian selama tahun 2020-2024 untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Sementara untuk Investasi Jangka Panjang Permanen tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 4,85%. Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Kabupaten Banyuwangi



tahun 2020 sebesar Rp 206,233,434,201.87 dan terus mengalami kenaikan hingga angka Rp 249,089,272,297.18 di tahun 2024.

Komponen aset selanjutnya yakni Aset Tetap yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rata-rata pertumbuhan Aset Tetap Kabupaten Banyuwangi sebesar 3,69% dan mengalami tren yang terus meningkat. Tahun 2020 nilai Aset Tetap Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 3,660,765,416,069.42 dan terus tumbuh atau mengalami peningkatan cukup signifikan hingga angka Rp 4,231,394,249,418.44 pada tahun 2024. Komposit Aset Tetap yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Kontruksi dalam Pengerjaan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,71%.

Komponen aset keempat adalah Properti Investasi dengan capaian hanya di dua tahun yaitu tahun 2023 dan 2024. Meskipun hanya memiliki capaian di dua tahun, tetapi capaian tersebut mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,25%. Properti Investasi yang ada di tahun 2023 memiliki jumlah sebesar Rp 104,695,451,718.94 dan kemudian meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar Rp 135,065,203,097.68. Selain keempat jenis aset di atas, komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari Aset Lainnya. Rata-rata pertumbuhan Aset Lainnya sebesar 0,96% dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Nilai Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp 232,953,288,841.37 dan meningkat menjadi sebesar -18,63% menjadi Rp 276,347,418,737.40 di tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 26,10% menjadi Rp 348,483,948,093. Namun di tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup drastis sebesar -29,10% menjadi Rp 280.111.168.915,06, dan di tahun 2024, mengalami penurunan pertumbuhan menjadi -11,80% atau sebesar Rp 247,069,901,178.88. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan aset daerah sebesar 2,84% selama lima tahun mencerminkan manajemen yang stabil dan efisien, serta kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun tetap ada tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan di masa mendatang.

B. Kewajiban

Berdasarkan tabel neraca daerah juga dapat dilihat adanya Kewajiban. Kewajiban daerah terdiri dari 2 komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Melihat pada tabel Neraca Daerah di atas, terlihat bahwa pada Kabupaten Banyuwangi memiliki Kewajiban Jangka Pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 67,37% dengan tren perkembangan yang meningkat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam waktu satu tahun atau kurang, yang nilainya mengalami



peningkatan selama periode lima tahun. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, suku bunga, nilai tukar, atau kondisi keuangan perusahaan.

Selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) nilai kewajiban Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020 nilai kewajiban menunjukkan angka Rp 54,862,011,024.66 dan meningkat mencapai 32,87% di tahun 2021 menjadi Rp 72.893.086.508,14 dan terus meningkat hingga tahun 2024 dimana merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir (2020-2024) sebesar Rp 295,152,011,183.88 yang didorong oleh adanya peningkatan pada komponen Utang Belanja yang meningkat 206.24% dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang meningkat 323.06%.

C. Ekuitas

Selain aset dan kewajiban, salah satu komponen dari neraca selanjutnya adalah ekuitas. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,63% selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) dengan tren pertumbuhan yang fluktuatif cenderung mengalami peningkatan. Adapun nilai ekuitas tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar Rp 4.888.951.611.237,07 sedangkan nilai ekuitas terkecil terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 4,555,949,330,095.12. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 2,84% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya.

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tersaji dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.54 Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar	9,3117	7,8053	5,1288	2,1994	0,9752
2	Rasio Quick	7,9886	6,8822	4,4262	1,4056	0,5996
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0119	0,0149	0,0175	0,0195	0,0573
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0120	0,0152	0,0178	0,0199	0,0608
C	RASIO AKTIVITAS					
1	Rata-rata Umur Piutang	20,1224	18,8305	17,9450	17,1982	17,3829
2	Rata-rata Umur Persediaan	81,569	80,805	72,597	67,89	129,08

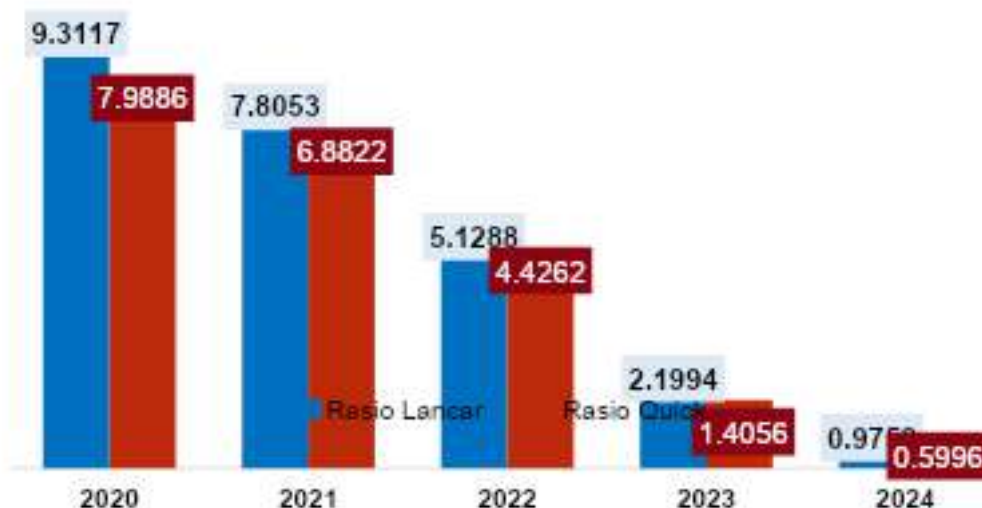
Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



Secara rinci hasil penghitungan rasio neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam konteks neraca keuangan daerah, terdapat dua jenis rasio likuiditas yang relevan, yaitu rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Di sisi lain, rasio *quick* menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih likuid, yaitu aset lancar dikurangi nilai persediaan.



Gambar 2.90 Rasio Likuiditas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Sebagaimana grafik di atas, Rasio lancar Kabupaten Banyuwangi dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan yang menurun, dimana pada tahun 2020 adalah sebesar 9,3117. Meskipun kembali menurun di tahun 2021 menjadi 7,8053, nilai rasio lancar kembali mengalami penurunan selama tahun 2022-2024 menjadi 5,1288 ditahun 2022, ditahun 2023 sebesar 2,1994 dan ditahun 2024 sebesar 0,9246. Penurunan terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi pada tahun tersebut, sedangkan perkembangan aset lancarnya cenderung fluktuatif meningkat, sehingga kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek juga semakin menurun. Pada tahun 2020 kemampuan Kabupaten Banyuwangi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar tercatat sebesar 9,3 kali, di tahun 2021 kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan



asset lancar turun menjadi 7,8 kali dan terus menurun di tahun 2022 dan 2023 menjadi 5,1 kali dan 2,1 kali hingga ditahun 2024 menjadi 1 kali. Semakin rendah nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya mengalami tren fluktuatif yang cenderung menurun.

Seperti halnya dengan rasio lancar, rasio quick Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam setiap tahunnya juga mengalami perkembangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -44,70%. Nilai rasio quick pada tahun 2020 sebesar 7,9886, kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar -13,85% atau 6,8822. Meski demikian, nilai rasio quick kembali menurun di tahun 2022 menjadi 4,4262, nilai rasio quick Kabupaten Banyuwangi kembali menurun dalam tahun 2023 dan 2024 menjadi 1,4056 dan 0,5996. Penurunan di pada tahun 2021-2024 terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi pada tahun tersebut, sedangkan perkembangan aset lancarnya cenderung mengalami penurunan. Nilai rasio quick pada dasarnya sedikit berada dibawah rasio lancarnya, karena aset lancar yang diperhitungkan sebagai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tidak memperhitungkan komponen persediaan. Perbedaan perhitungan rasio lancar dan rasio quick terletak pada adanya persediaan sebagai unsur penghitung besaran nilai rasio. Jika pada rasio lancar melihat pada kemampuan membayar hutang menggunakan aset lancar, maka pada rasio quick melihat kemampuan membayar dengan aset lancar selain persediaan. Sehingga pergerakan besar kecilnya rasio quick selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengaruhi oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2020 kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar (setelah dikurangi dengan nilai persediaan) tercatat sebesar 9.31 kali dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi sebanyak 7.80 kali. Penurunan kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar Kembali terjadi di tahun 2022, 2023, dan 2024 tercatat sebesar 4,42 kali, 1,40 kali, dan 0,60 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membayar/ melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang telah dikurangi dengan persediaan belum konsisten setiap tahunnya.

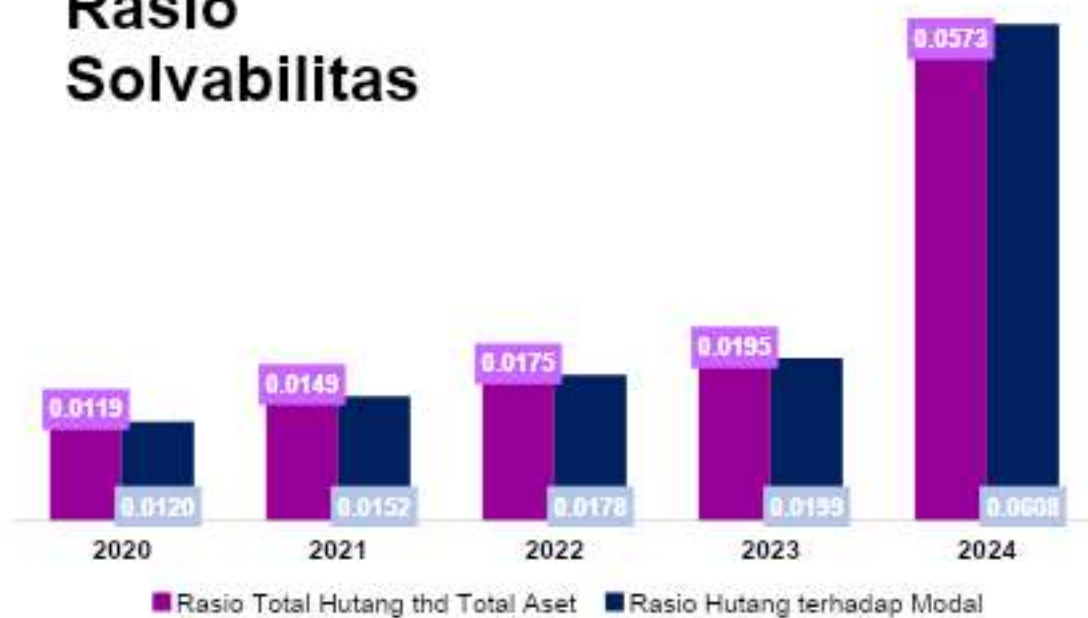
2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam konteks neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan dua matriks utama. Pertama, Rasio total hutang terhadap total aset menggambarkan sejauh mana hutang berpengaruh terhadap nilai



total aset, memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan pada hutang. Kedua, Rasio hutang terhadap modal mengindikasikan sejauh mana penggunaan hutang dibandingkan dengan modal yang dimiliki, memberikan perspektif terhadap tingkat kebutuhan hutang dalam kaitannya dengan modal yang tersedia.

Rasio Solvabilitas



Gambar 2.91 Rasio Solvabilitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 62,02%. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0119 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 menjadi 0,0573. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan nilai kewajiban/ hutang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan total asetnya. Seiring adanya kenaikan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024, sedangkan nilai total aset yang dimiliki semakin menurun, maka nilai Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi selama rentang lima tahun terakhir. Semakin tinggi angka Rasio Total Hutang terhadap Total Aset maka hal ini dapat diartikan semakin tinggi pula pengaruh hutang terhadap pembiayaannya. Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dengan kecenderungan meningkat menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam keadaan yang cenderung kurang. Persentase dana berasal dari kreditor/ donatur/ pihak ketiga dalam membiayai pembangunan masih kecil (di bawah 2%) sekalipun dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif.



Tren serupa juga terjadi pada capaian Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang dalam lima tahun terakhir juga mengalami tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 65,19%. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0120 dan meningkat signifikan menjadi 0,0608 di tahun 2024. Tren kenaikan yang pesat di tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan nilai total hutang di tahun 2024 meskipun kondisi ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki (Tidak Bergantung pada Hutang). Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah adanya tren kecenderungan meningkat khususnya pada tahun 2024.

Secara umum, rasio total hutang terhadap modal di Kabupaten Banyuwangi masih cukup rendah, yaitu di bawah 5%. Rendahnya rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak bergantung pada hutang dalam pengelolaan keuangannya. Total hutang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki, dengan kisaran antara 0,75% hingga 5%. Namun, perlu diperhatikan adanya tren peningkatan rasio hutang terhadap modal dari tahun ke tahun.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai tingkat aktivitas tertentu dalam kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Dua jenis rasio aktivitas yang sering digunakan adalah Rata-Rata Umur Piutang dan Rata-Rata Umur Persediaan. Rata-rata umur piutang mengindikasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan piutang, menunjukkan seberapa cepat piutang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Sementara itu, rata-rata umur persediaan memberikan informasi tentang berapa lama dana diinvestasikan dalam bentuk persediaan, menunjukkan seberapa efisien persediaan tersebut digunakan dalam penyediaan pelayanan publik.



Gambar 2.92 Rasio Aktivitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas Kabupaten Banyuwangi pada tabel di atas menunjukkan adanya fluktuasi pada nilai Rata-rata Umur Piutang, yakni sebanyak 20 hari pada tahun 2020 dan mengalami penurunan ditahun 2021 menjadi sebesar 19 hari. Capaian tahun 2020 merupakan capaian rata-rata umur piutang tertinggi Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir. Capaian ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 dan terus menurun hingga 17,94 ditahun 2022, 17,19 hari di tahun 2023, dan 2024 sebesar 17,38 hari. Nilai Rata-rata Umur Piutang secara keseluruhan menunjukkan angka yang masih baik, dimana umur piutangnya kurang dari 1 bulan, bahkan pada tahun 2021-2023 tren umur piutang menurun. Dimana artinya, dengan semakin pendek jangka waktu pelunasannya, maka semakin kecil pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Melihat hasil perhitungan Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Banyuwangi tercatat selama 129,74 hari atau 4 bulan 10 hari. Di tahun 2021-2023 terjadi penurunan yang menjadikan nilai Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Banyuwangi tercatat selama 68,40 hari atau 2 bulan 8 hari ditahun 2021, kemudian menjadi 65,41 hari atau 2 bulan 5 hari ditahun 2022, turun lagi menjadi 58,55 hari atau 1 bulan 29 hari ditahun 2023. Sementara untuk tahun 2024 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 129,08 hari atau 4 bulan 9 hari.

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan di tahun 2021-2023, efektivitas dan manajemen pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sedikit meningkat. Meskipun demikian, tren yang terjadi di tahun 2020 dan 2024 perlu diperhatikan dikarenakan terjadi peningkatan nilai Rata-rata Umur Persediaan, hal ini perlu diwaspadai dikarenakan semakin tinggi rasio ini, semakin tidak efisien pengelolaan persediaan, karena dana diinvestasikan dalam persediaan dapat lebih lambat dikembalikan atau diubah menjadi layanan atau produk yang dibutuhkan.

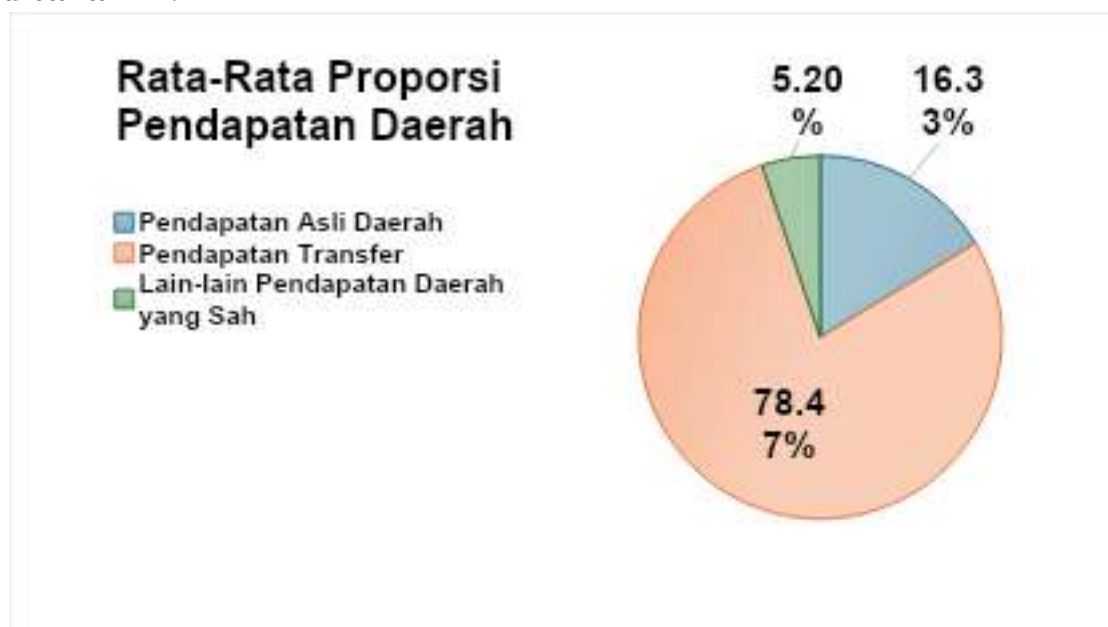
2.2.2 KEBIJAKAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN ANALISIS PEMBIAYAAN

2.2.2.1 PROPORSI PENDAPATAN DAERAH

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.



Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 78,47%. Dengan kata lain bahwa tiga seperempat Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Sedangkan sisanya sebesar 16,33% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 5,20% Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rata – rata Proporsi tersebut melalui perhitungan proporsi dari kurun waktu 2020 samapai dengan tahun 2024. Perbandingan proporsi secara lebih jelas dapat dilihat pada diagram seperti dibawah ini:



Gambar 2.93 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.55 Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	14,78%	16,35%	15,97%	16,82%	17,73%	16,33%
1.1.1.	Pajak daerah	5,87%	6,48%	7,15%	8,37%	8,86%	7,34%
1.1.2.	Retribusi daerah	1,40%	1,36%	1,33%	1,41%	7,83%	2,67%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan	0,63%	0,68%	0,69%	0,68%	0,71%	0,68%



No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
	daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6,88%	7,83%	6,80%	6,37%	0.34%	5.64%
1.2	Pendapatan Transfer	71,61%	78,59%	79,90%	81,62%	80.68%	78.47%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	66,05%	70,57%	72,05%	71,79%	72.16%	70.52%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	56,69%	62,31%	63,87%	63,41%	63.79%	62.01%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.57%	2.54%
1.2.1.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	44,80%	50,99%	48,84%	47,78%	43.40%	45.74%
1.2.1.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	11,89%	11,32%	15,02%	15,63%	14.82%	13.73%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	2,91%	1,33%	1,33%	1,58%	1.52%	1.73%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	6,46%	6,92%	6,85%	6,79%	6.85%	6.77%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	5,56%	8,02%	7,85%	9,83%	8.52%	7.96%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5,32%	7,77%	7,24%	9,29%	8.29%	7.58%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,24%	0,25%	0,61%	0,54%	0.23%	0.37%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,62%	5,07%	4,13%	1,56%	1.59%	5.20%
1.3.1	Hibah	4,49%	4,57%	3,07%	0,23%	0.08%	2.50%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	9,12%	0,49%	1,06%	1,33%	1.50%	2.70%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Melihat secara lebih rinci pada proporsi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi maka dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan komponen dengan proporsi paling tinggi, baik terhadap Pendapatan Transfer maupun terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) Dana Perimbangan



memiliki kontribusi terhadap Pendapatan sebesar 62,01%. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Kabupaten Banyuwangi masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai pembangunan daerah dan penyediaan fasilitas publik di daerah tersebut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat pada proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, hanya di tahun 2022 saja yang sedikit mengalami penurunan hingga pada angka 15,97%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah sehingga pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi hingga pada angka proporsi 17,73%. Tren peningkatan yang terjadi pada proporsi PAD berbanding lurus dengan munculnya tren peningkatan pada Pendapatan Transfer, yaitu pada tahun 2020 hingga 2023 kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Transfer Kabupaten Banyuwangi dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi juga semakin meningkat, meskipun mengalami penurunan sedikit pada tahun 2024 menjadi 80,68%. Sedangkan komponen Pendapatan yang terus mengalami penurunan adalah Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah dari proporsi 13,65% di tahun 2020 menjadi 1,59% di tahun 2024. Berikut merupakan grafik pergeseran proporsi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 - 2024:



Gambar 2.94 Pergeseran Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Seperti yang diketahui bahwa Otonomi daerah dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan di daerah dan pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah otonom tersebut. Maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu aspek yang penting dalam menggambarkan kemandirian keuangan pada suatu daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan derajat mampu tidaknya suatu daerah melakukan pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapataa daerah tersebut. Rasio ini dapat dihitung dari jumlah Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain, yaitu transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, dan pinjaman. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga kondisi tersebut juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Untuk dapat mengetahui perkembangan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.95 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, secara umum Kabupaten Banyuwangi masih memiliki rasio PAD terhadap total pendapatan di bawah 50% yang artinya masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pusat atau memiliki rasio kemandirian daerah yang rendah.

Tabel 2.56 Predikat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
20,63	20,80	19,99	20,61	21,97
INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada pada range angka 20,63% - 21,97%. Jika angka tersebut disandingkan dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka menunjukkan kemampuan keuangan Kabupaten Banyuwangi dalam membiayai rumah tangganya selama 5 tahun (2020 - 2024) masih rendah serta memiliki pola hubungan yang Instruktif pada setiap tahunnya karena berada pada range persentase kemandirian 0%- 25%, dimana campur tangan pemerintah pusat masih terbilang besar. Meski masih tergolong dalam kemampuan keuangan yang rendah, akan tetapi nilai yang muncul telah menunjukkan dalam perkembangannya yang progresif dan hampir mendekati kategori kemampuan sedang dengan hubungan Konsultatif. Melihat tren nilai Kemandirian Daerah Kabupaten Banyuwangi yang menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2024 memiliki rasio kemandirian yang paling tinggi yakni 21,97%. Maka dari itu, hal ini mengindikasikan terus berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Pendapatan Transfer terutama Pendapatan Transfer pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta mengindikasikan adanya upaya peningkatan PAD di daerah. Namun yang perlu mendapat perhatian ialah capaian di tahun 2022 yang mengindikasikan merupakan capaian terendah dari kurun waktu 5 tahun yaitu 19,99%. Hal ini sesuai dengan tren yang muncul pada realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi,

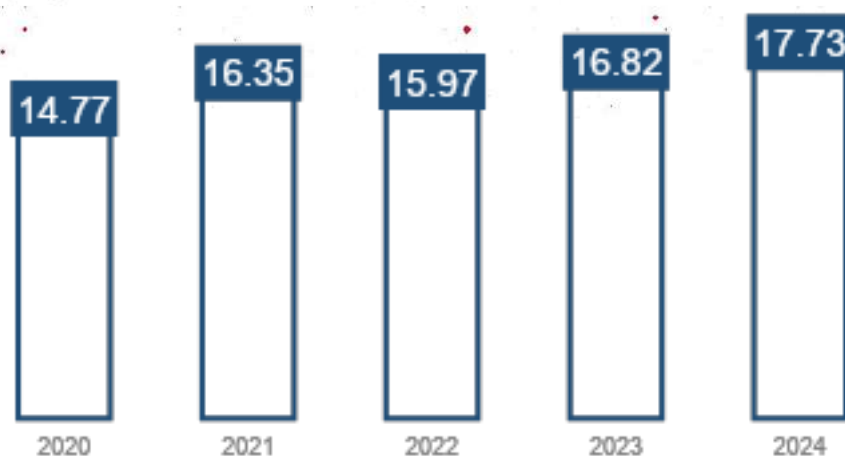


dimana terdapat tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,55%.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal ini dapat diukur menggunakan skala interval. Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Berdasarkan perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah diperoleh nilai desentralisasi fiskal yang nilainya mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, dimana nilai terendah dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun periode terakhir yaitu 2024. Pada tahun 2020 nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 14,77% dengan kriteria “Kurang”. Pada tahun 2021 nilai rasio tersebut mengalami peningkatan sehingga menjadi 16,35% dengan termasuk pada kriteria “Kurang”. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kabupaten Banyuwangi pada tahun-tahun mendatang. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan kembali dan berkisar pada angka 15,97%. Sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali pada angka 16,82% dengan kriteria yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu “Kurang”. Sedangkan pada tahun 2024 nilai rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan menjadi hingga menjadi 17,73% dengan kriteria tetap, yakni “Kurang”. Untuk mengetahui nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini:



Gambar 2.96 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas maka menunjukan bahwa peran atau kontribusi PAD terhadap total penerimaan keuangan daerah memiliki rata-rata capaian 16,23%. Seperti yang diketahui bahwa peran PAD dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa peran PAD dalam menunjang keberhasilan Kabupaten Banyuwangi masih terbilang “Kurang” pada kurun waktu 2020- 2024. Hal tersebut dapat terlihat pada data di atas yang menunjukan bahwa peran PAD atau rasio derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Banyuwangi hanya berada di angka 14,77% di tahun 2020 dan 16,35% di tahun 2021. Untuk tahun 2022 dan tahun 2023 rasio derajat desentralisasi fiskal di angka 15,97% dan 16,82%. Sedangkan untuk tahun 2024 berada di angka 17,73% yang merupakan capaian pada tahun terakhir.

Tabel 2.57 Predikat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
14,77	16,35	15,97	16,82	17,73
KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

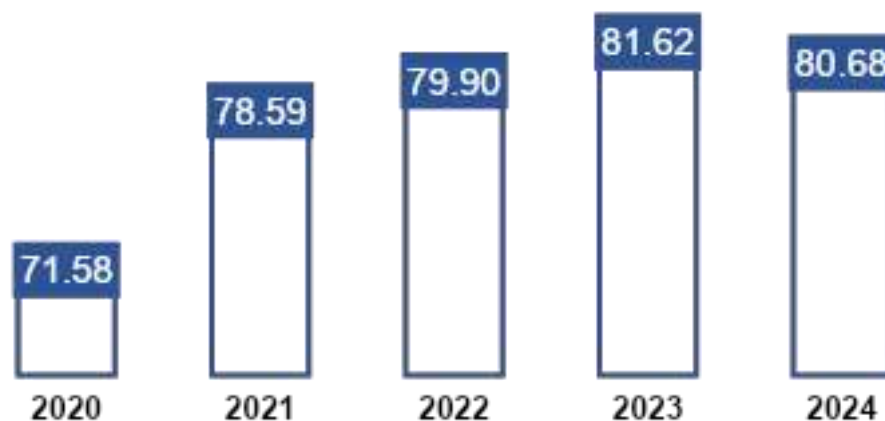
Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memaksimalkan PAD terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya masih terbilang “Kurang” pada kurun waktu 2020 - 2024. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan PAD sebesar 1,58% pada tahun 2021 dan merupakan peningkatan tertinggi pada periode tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian sebesar 0,38% namun masih tetap pada



kategori “Kurang”. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan 0,85% dan pada tahun terakhir yakni di tahun 2024 terjadi peningkatan 0,91%. Kedepannya diperlukan konsistensi usaha peningkatan PAD secara lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kontribusinya dalam menjalankan fungsi desentralisasi yang lebih baik dalam sisi keuangan daerah.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Semakin tinggi keberhasilan otonomi daerah menandakan bahwa tingkat ketergantungan yang rendah, jadi bisa dikatakan terbalik. Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio Ketergantungan Keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Untuk dapat mengetahui lebih detail mengenai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi yakni sebagai berikut:



Gambar 2.97 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan pada gambar diatas maka Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi terendah berada pada tahun 2020 yakni dengan nilai 71,58% dengan keterangan “Sangat Tinggi”. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Hal tersebut terbukti bahwa di tahun 2020, Kabupaten Banyuwangi telah mencapai capaian positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Seperti yang diketahui bahwa tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang



diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Seperti pada tabel capaian dibawah ini yang berisikan nilai rasio beserta dengan kriterianya:

Tabel 2.58 Predikat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
71,61	78,59	79,90	81,62	80,68
SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Secara garis besar nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang fluktuatif pada setiap tahunnya dengan adanya peningkatan dan penurunan yang terjadi. Kondisi tersebut terlihat pada tahun pertama sebesar 71,61% untuk tahun 2020, kemudian meningkat menjadi sebesar 78,59% di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 79,90%. Pada tahun 2023 nilai ketergantungan daerah mengalami peningkatan hingga pada angka 81,62% dan merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 80,68%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dibuktikan dengan capaian rasio ketergantungan keuangan daerah yang berusaha untuk menurunkan rasionya.

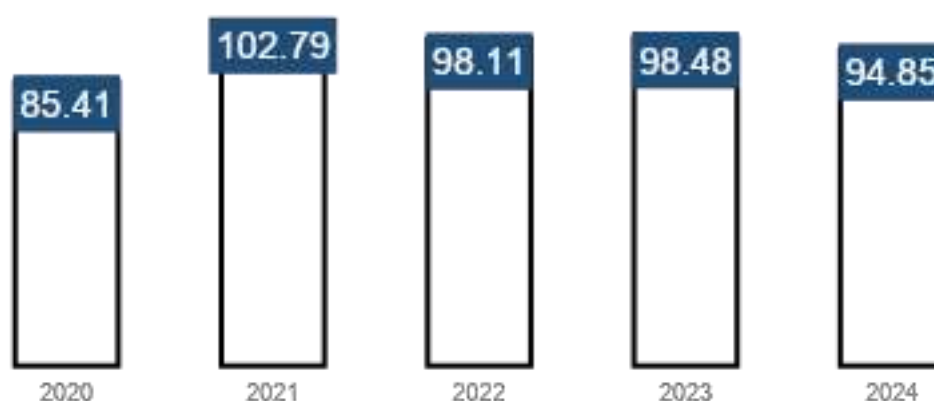
Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang muncul pada range antara 71,61% - 81,62% dan masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang “Sangat Tinggi” karena berada pada persentase lebih dari 50% (> 50%). Sehingga diperlukan konsistensi optimalisasi PAD serta usaha untuk mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun provinsi agar kedepannya rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat perlahan berubah menjadi “Tinggi” ataupun “Cukup” sehingga bisa dikatakan daerah Otonom yang mandiri. Namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki abtusian untuk munculkan penurunan nilai ketergantungan keuangan pada tahun 2024 sebesar 0.94% dibandingkan tahun 2023 dan hal tersebut telah menunjukkan perkembangan yang progresif serta mendekati kategori ketergantungan yang tinggi.

4. Rasio Efektivitas

Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi dan menerapkan value for money yang benar. Value for money merupakan diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan evektivitas.



Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berikut tersaji data Rasio Efektivitas Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun beserta kriterianya:



Gambar 2.98 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas, rata- rata capaian rasio efektivitas sudah berpredikat “Cukup Efektif” dari kurun waktu 2020-2024. Namun yang perlu menjadi perhatian yakni pada tahun 2022 dan tahun 2024 rasio efektivitas menurun. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 2.59 Predikat Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
85,41	102,79	98,11	98,48	94,85
KURANG EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

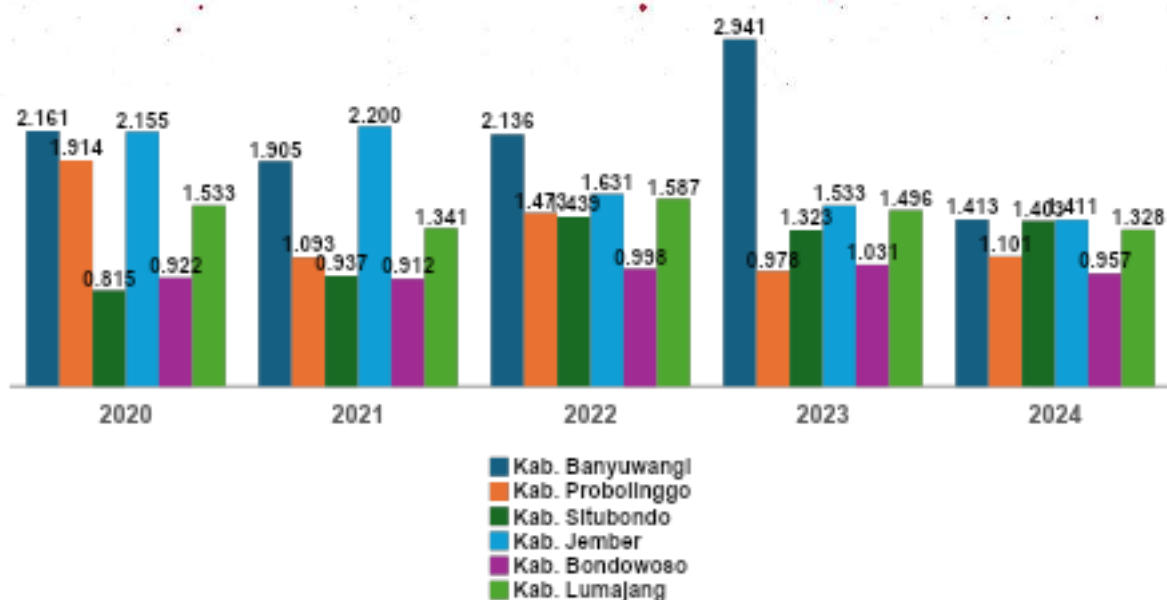
Rasio efektivitas PAD Kabupaten Banyuwangi dalam 3 tahun pertama (2020-2022) memiliki nilai yang cenderung fluktuatif dan pada tahun 2021 termasuk dalam kategori “Sangat Efektif”, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah terakomodir ke dalam target yang telah ditetapkan. Namun pada dua tahun terakhir, yakni



pada tahun 2023 dan 2024 Kabupaten Banyuwangi dalam hal Rasio Efektivitas termasuk menurun namun masih dalam kategori “Cukup Efektif” menurun dari periode tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 rasio efektivitas Kabupaten Banyuwangi masih berada pada angka 85,41% dengan kategori “Kurang Efektif”, sedangkan kondisi pada tahun 2022 menurun kembali menjadi 98,11% dengan termasuk dalam kategori “Cukup Efektif”. Pada tahun 2021 nilai rasio efektivitas mengalami pertumbuhan yang signifikan 17,38% hingga berada pada angka 102,79% dengan kategori “Sangat Efektif”. Perkembangan yang progresif terlihat pada nilai efektivitas yang muncul pada tahun 2021 tersebut dengan merupakan capaian rasio efektivitas yang tertinggi dalam periode lima tahun. Namun pada tahun selanjutnya yakni ditahun 2022 capaian menurun hingga menjadi 98,11% dan dengan kategori “Cukup Efektif”. Begitu pula untuk tahun 2023 nilai rasio meningkat hingga pada angka 98,48% namun masih dengan kategori yang sama yaitu “Cukup Efektif”. Pengelolaan PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 perlu menjadi catatan dikarenakan merupakan capaian terendah dengan kategori “Kurang Efektif” sehingga kedepannya akan meningkatkan rasio efektivitasnya. Sehingga pada kedua tahun tersebut rasio efektivitas Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kriteria “Sangat Efektif” karena telah menunjukkan nilai yang memiliki kinerja berada pada range $>100\%$. Penurunan yang cukup signifikan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kedepannya harus lebih ditingkatkan.

5. Indeks Kapasitas Fiskal

Pembagian wilayah dan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tersebut kemudian menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat saat memasuki orde reformasi mengalami perubahan. Penghitungan kapasitas fiskal merupakan salah satu faktor dalam reformulasi pengalokasian DAU. Kapasitas fiskal dihitung sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Sehingga Indeks Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2021. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan / atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Banyuwangi dan daerah sekitarnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Gambar 2.99 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berikut merupakan pengelompokan predikat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan nilainya dalam lima kategori:

Tabel 2.60 Predikat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Nilai IKFD	Kriteria
$IKFD < 0,905$	Sangat Rendah
$0,905 \leq IKFD < 1,141$	Rendah
$1,141 \leq IKFD < 1,378$	Sedang
$1,378 \leq IKFD < 1,615$	Tinggi
$1,615 \geq IKFD$	Sangat Tinggi

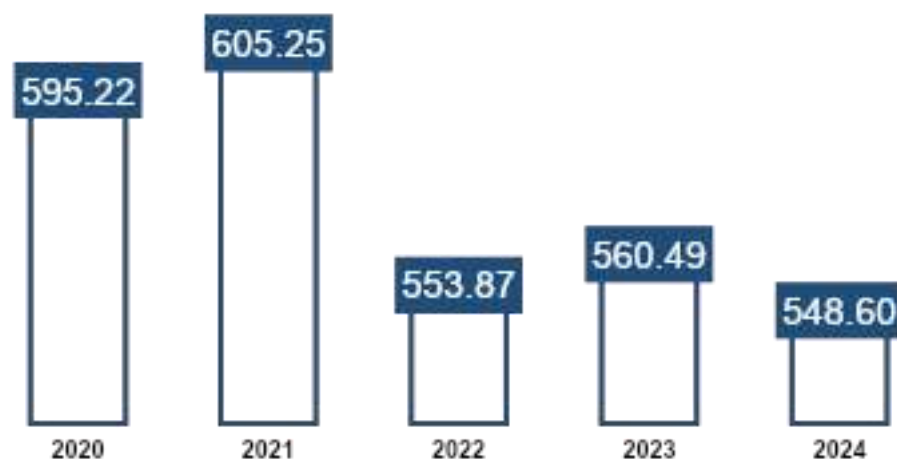
Berdasarkan data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Banyuwangi serta 5 daerah sekitarnya yang tertera dalam grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai IKFD dengan rata-rata berkategori “Sangat Tinggi”. Dengan capaian IKFD yang tinggi tersebut Kabupaten Banyuwangi berada di atas nilai rata-rata di empat wilayah lainnya. Melihat pada nilai yang muncul di tahun-tahun sebelumnya, IKFD Kabupaten Jember menunjukkan angka yang cukup bersaing dengan Kabupaten Banyuwangi akan tetapi dengan tren pertumbuhan yang tentunya berbeda.



Nilai yang muncul pada IKFD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif, yakni dengan kondisi awal sebesar 2,161 pada tahun 2020 kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga pada angka 1,905. Namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 2,136 di tahun 2022. Pada tahun 2023 nilai IKFD kembali mengalami peningkatan yang signifikan hingga di angka 2,941 dengan kategori “Sangat Tinggi” dan merupakan capaian tertinggi. Penurunan kembali terjadi pada capaian angka IKFD Kabupaten Banyuwangi di tahun 2024 yaitu pada angka 1,413 namun masih berada di kategori “Tinggi”. Secara keseluruhan nilai yang muncul pada tahun 2020 hingga 2024 dengan memperhatikan range nilai IKFD memiliki kriteria “Sangat Tinggi”.

6. Rasio PAD Terhadap PDRB

Rasio PAD terhadap PDRB (Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah bergantung pada pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan kapasitas ekonomi daerah tersebut, yang diukur dengan PDRB. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintah daerah dengan mengandalkan sumber pendapatan sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi PAD terhadap ekonomi daerah, yang menunjukkan ketergantungan lebih rendah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber luar lainnya. Adapun Rasio PAD terhadap PDRB di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.100 Rasio PAD Terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

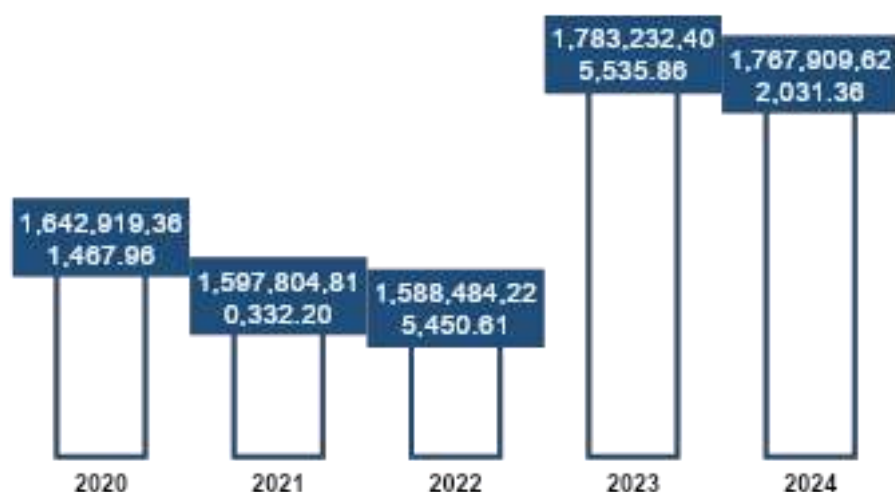
Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



Sesuai dengan grafik diatas, Rasio PAD Terhadap PDRB di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif. Dimana capaian Rasio PAD Terhadap PDRB ditahun 2021 memiliki capaian tertinggi yaitu sebesar 605,25, dan sebelumnya ditahun 2020 yang memiliki capaian 595,22. Namun ditahun 2022-2024 mengalami penurunan capaian dengan capaian terendah ada di tahun 2024 yaitu sebesar 548,60. Meskipun mengalami penurunan, namun Rasio PAD Terhadap PDRB di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB. Sehingga menunjukkan semakin besarnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintah daerah dengan mengandalkan sumber pendapatan sendiri.

7. Rasio Ruang Fiskal

Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Adapun untuk Rasio Ruang Fiskal yang ada di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.101 Rasio Ruang Fiskal di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



Ruang Fiskal Kabupaten Banyuwangi terlihat cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir (2020-2024), hal ini mengindikasikan semakin besarnya peluang atau kebebasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan daerah atau kegiatan prioritas. Rata-rata dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki ruang fiskal yang mencapai 50% dari besaran Pendapatan Daerah maupun dari besaran Belanja Daerah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.61 Ruang Fiskal di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ruang Fiskal/ Belanja Daerah	52%	52%	48%	49%	53%
Ruang Fiskal/ Pendapatan Daerah	50%	50%	49%	53%	52%

2.2.2.2 PROPORSI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib maupun pilihan. Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintahan daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan berpotensi meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Di dalam Belanja Daerah terdapat beberapa komponen yaitu adalah Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Analisis Belanja Daerah dalam pembahasan ini ditinjau berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja daerah, analisis proporsi belanja daerah, dan analisis kinerja realisasi belanja daerah sebagai berikut.



Tabel 2.62 Proporsi Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Operasi	66,96%	64,20%	67,14%	64,66%	71,39%	66,87%
2.1.1	Belanja Pegawai	34,68%	34,84%	31,93%	29,20%	33,15%	32,76%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25,71%	26,25%	29,99%	29,51%	31,68%	28,63%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	5,76%	1,14%	4,85%	5,55%	6,21%	4,70%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,82%	1,98%	0,37%	0,40%	0,35%	0,78%
2.2	Belanja Modal	17,62%	21,37%	20,41%	23,32%	15,91%	19,73%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,06%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,75%	3,05%	3,83%	4,38%	3,15%	3,63%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,12%	4,81%	3,76%	3,63%	2,25%	3,71%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9,71%	13,40%	12,44%	15,20%	10,46%	12,24%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,04%	0,11%	0,08%	0,06%	0,05%	0,07%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,01%	0,01%
2.3	Belanja Tidak Terduga	2,87%	0,94%	0,09%	0,26%	0,01%	0,84%
2.4	Belanja Transfer	12,55%	13,49%	12,35%	11,76%	12,69%	12,57%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,84%	0,68%	0,61%	0,56%	0,61%	0,66%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	11,71%	12,81%	11,75%	11,20%	12,08%	11,91%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata proporsi realisasi belanja Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Proporsi realisasi Belanja Operasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 hingga 2024 tercatat memiliki rata-rata di atas 60%. Tahun 2023 capaian rata-rata proporsi belanja operasi menurun dari tahun sebelumnya yaitu 64,66% dan merupakan capaian terendah kedua setelah capaian tahun 2021 yang sebesar 64,20% dari periode lima tahun terakhir. Komponen realisasi belanja dengan rata-rata terbesar berada pada belanja pegawai (Belanja Operasi) yaitu sebesar 32,76% dari total belanja daerah, artinya realisasi belanja pegawai yang notabene bersifat rutin dan kurang berkaitan langsung dengan pembangunan masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (secara umum) yang memiliki keterkaitan lebih dekat dengan Pembangunan daerah.

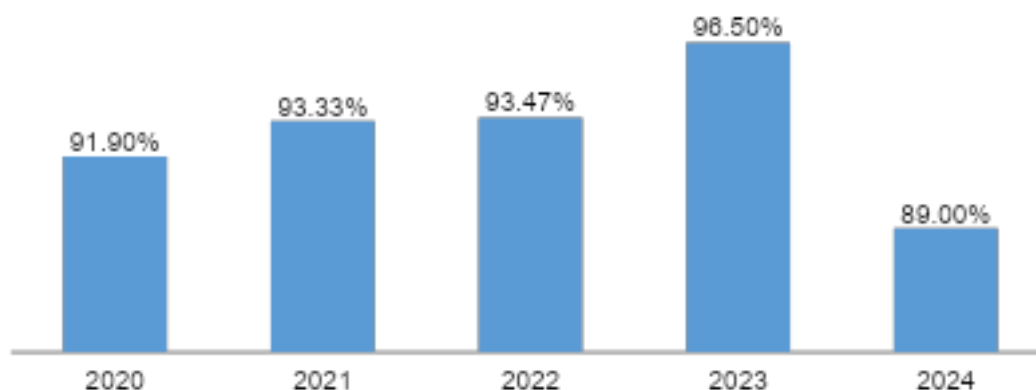
Di antara 4 komponen belanja daerah Kabupaten Banyuwangi, Proporsi Belanja Operasi memiliki nilai rata-rata realisasi paling besar yakni dengan capaian rata-rata 66,87%. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, proporsi realisasi belanja operasi terbesar tercatat pada tahun 2024 yang mencapai



71,39%. Sedangkan, proporsi realisasi Belanja Modal Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 tercatat memiliki nilai rata-rata 19,71%. Proporsi realisasi Belanja Modal memiliki nilai paling besar berada pada tahun 2023 yang mencapai 23,32%. Sedangkan komponen belanja dengan proporsi rata-rata realisasi terendah berada pada belanja Belanja Modal Tanah yang merupakan komponen Belanja Modal dengan rata-rata proporsi sebesar 0,06% dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan rata-rata sebesar 0,07%. Secara spesifik, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah merupakan gambaran secara riil mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai tingkat realisasi menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Banyuwangi dalam waktu 5 tahun terakhir yakni di tahun 2020 - 2024 secara lebih jelas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.102 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah di Kabupaten Banyuwangi rata-rata masih berada dibawah 100%. Dengan nilai capaian tertinggi yaitu sebesar 96,50% yang terjadi pada tahun 2023. Pada tahun 2024 tingkat realisasi belanja daerah terhadap anggaran memiliki capaian 89,00% yang merupakan nilai terendah selama kurun waktu satu periode. Selaras dengan keadaan sebelumnya yakni pada tahun 2020

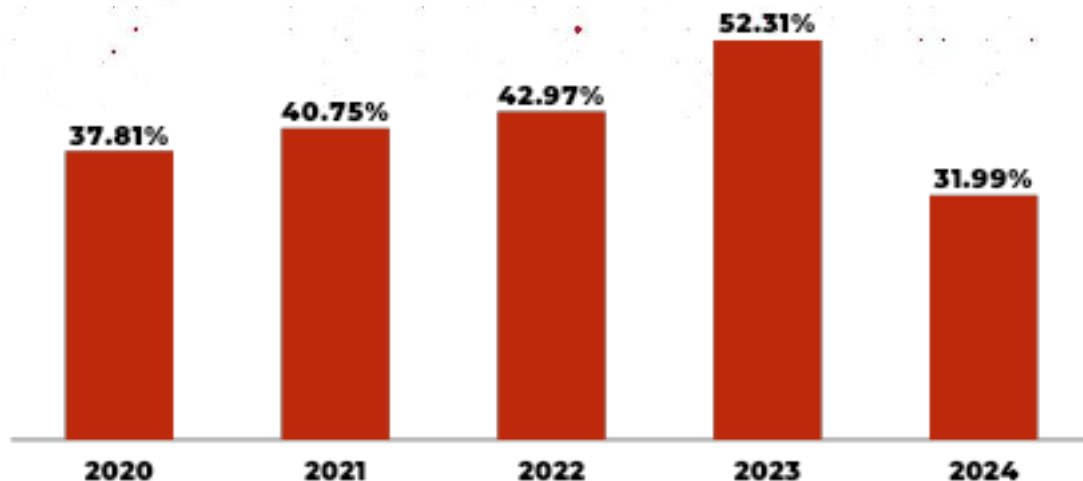


mengalami peningkatan realisasi belanjanya mencapai 91,90%. Selanjutnya pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 93,33%, hal tersebut seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi maka tingkat realisasi belanja daerah kembali mengalami peningkatan. Tingkat capaian pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai proporsi realisasi belanja yakni pada angka 93,47%. Begitu pula pada tahun 2023 terjadi peningkatan hingga menunjukkan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu 96,50%. Angka tersebut membuktikan gambaran realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 - 2024). Oleh karena itu, tingkat realisasi anggaran perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

2. Proporsi Belanja Terhadap Dana Transfer Umum

Proporsi Belanja Modal merupakan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara umum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit (leverage) di berbagai sektor pembangunan lain. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah termasuk di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan $\geq 25\%$ untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, hal tersebut lebih jelas diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.103 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2023 secara umum memiliki tren capaian yang meningkat, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 37,81%. Sedangkan pada tahun 2021 selaras dengan membaiknya keadaan ekonomi pasca Pandemi Covid- 19 sehingga capaian membaik dan berangsur meningkat signifikan hingga pada angka 40,75% yang menandakan peningkat secara signifikan dan nilai tersebut sudah berada di atas ambang batas rasio Belanja Modal terhadap DTU dalam aturan UU APBN yaitu sebesar $\geq 25\%$. Sedangkan pada tahun 2022 proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai proporsi terbesar yaitu di angka 42,97%. Pada tahun 2023 merupakan capaian tertinggi selama satu periode yaitu dengan capaian 52,31%. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dengan capaian 31,99%.

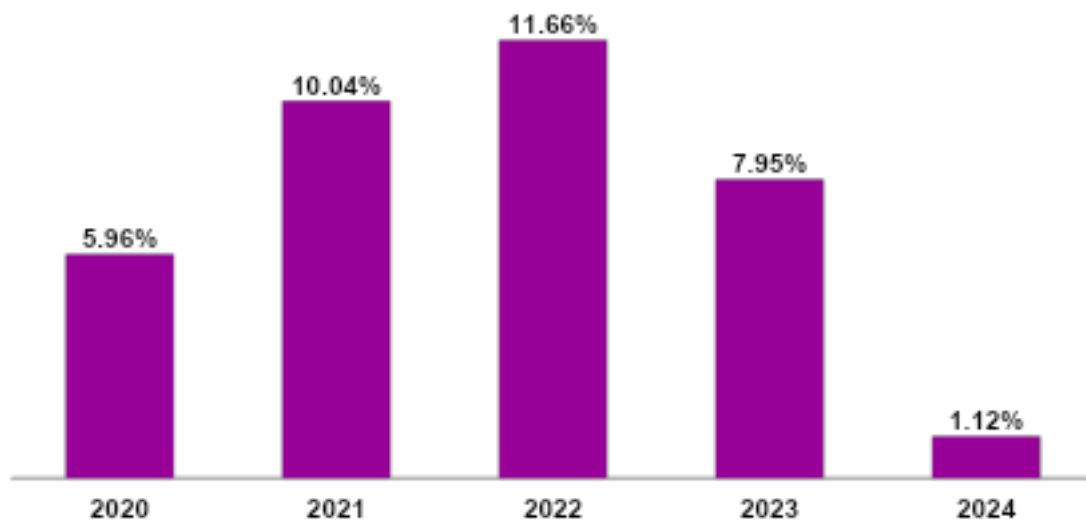
Secara umum proporsi belanja modal terhadap DTU Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 telah berhasil mencapai rata-rata proporsi diatas 25% yakni mencapai 41,17%. Hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi akan semakin berkembang dalam menunjang pembangunan dan perekonomian daerah.

3. Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun



lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.104 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

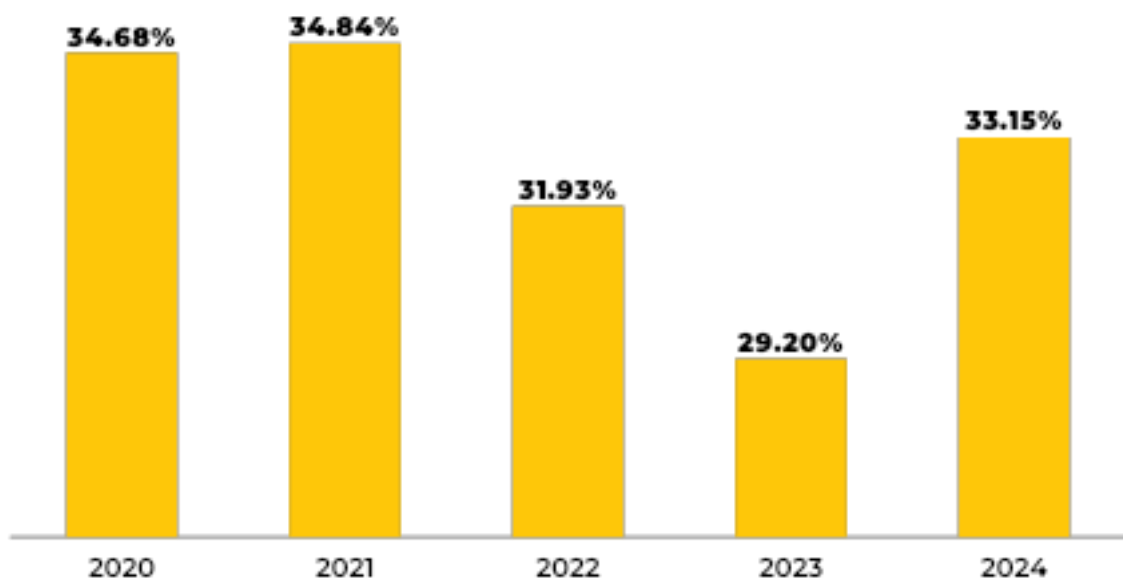
Berdasarkan pada grafik di atas, tren proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masuk dalam kategori fluktuatif. Pada tahun 2020 proporsinya berada pada angka 5,96%, dan juga pada tahun setelahnya yakni di tahun 2021 mengalami peningkatan capaian sebesar 4,08% yakni menjadi 10,04%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan 1,62 sehingga pada angka 11,66%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan mencapai 7,95%. Pada tahun selanjutnya yakni di tahun 2024 menurun secara signifikan hingga pada angka 1,12%. Fluktuasi tren proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tersebut menggambarkan kemampuan Kabupaten Banyuwangi dalam penyerapan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun 2020 hingga 2024 sudah cukup efektif karena mengalami penurunan yang signifikan dan mengalami tren kecenderungan menurun pada satu periode. Meskipun kenaikan rasio pada tahun 2021 dan 2022, namun pada tahun setelahnya bahkan pada tahun 2024 dengan capaian 1,12% menunjukkan upaya penyerapan SiLPA yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Diketahui bahwa semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*, begitu pula sebaliknya jika nilai proporsi SiLPA rendah maka menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi



sudah menyerap dana publik untuk digunakan dalam pembangunan dan pelayanan. Pada tahun-tahun mendatang diperlukan konsistensi manajemen belanja, sehingga capaian belanja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif di Kabupaten Banyuwangi.

4. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Proporsi ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.105 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, proporsi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif. Proporsi belanja pegawai Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 tercatat sebesar 34,68%. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan mencapai 34,84%. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan hingga pada angka 31,93%. Pada tahun setelahnya yakni tahun 2023 proporsi belanja pegawai dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berada pada posisi yang ideal yakni dibawah 30% yaitu 29,20%. Namun pada tahun 2024 proporsi belanja pegawai dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan menjadi 33,15%. Rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tahun 2020 hingga 2024 telah berada dibawah 50% dan di atas 30% yaitu di angka 32,76%, artinya kondisi tersebut masih relatif baik di mana porsi anggaran tidak didominasi oleh belanja pegawai atau belanja



yang bersifat pengeluaran rutin dan tidak berpengaruh terhadap kinerja program pembangunan secara langsung. Namun berdasarkan peraturan yang terbaru, Pada Pasal 146 ayat (1) UU HKPD, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja. Sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki belanja pegawai di atas 30% dari total belanja APBD, UU HKPD memberikan waktu selama 5 tahun bagi pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan porsi belanja pegawainya sesuai dengan ketentuan.

5. Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur

Analisis ini memberikan gambaran mengenai rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja kebutuhan aparatur. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja tersebut, maka semakin kecil pula proporsi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur.

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Banyuwangi pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana telah disampaikan pada sub-bab kinerja keuangan masa lalu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 hingga 2023 dapat disajikan pada tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.63 Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2019	1,800,855,156,730.56	3.021.315.752.989,13	59.60%
2	Tahun Anggaran 2020	1,675,465,573,287.69	3.144.579.804.668,47	53.28%
3	Tahun Anggaran 2021	1,540,997,053,862.61	3.103.993.254.516,97	49.65%
4	Tahun Anggaran 2022	1,673,127,503,858.41	3.336.251.697.808,09	50.15%
5	Tahun Anggaran 2023	1,857,969,768,877.23	3.625.105.358.954,81	51.25%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2024 (diolah)

Melihat data yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi pada periode tahun 2019 hingga 2023 memiliki presentase menurun dengan mengindikasikan tren capaian positif. Seperti yang bisa dilihat dari tahun



2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan persentase pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 capaian persentase berada pada angka 59.60% kemudian pada tahun berikutnya yakni ditahun 2020 menurun hingga di angka 53.28%. Dimana kondisi penurunan tersebut bertahan hingga pada tahun 2021 mencapai 49.65%. Akan tetapi pada dua tahun terakhir (2022 dan 2023) Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi menunjukkan sedikit peningkatan pada angka 50.15% dan 51.25%.

Adanya capaian yang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, mengindikasikan bahwa secara umum Kabupaten Banyuwangi telah berkomitmen dengan baik dalam optimalisasi pemanfaatan belanja daerah yang tercermin dari adanya penekanan proporsi belanja pemenuhan aparatur dan lebih memfokuskan pada belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi kedepannya tetap diperlukan upaya optimal dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun penganggaran belanja pegawai. Sebab, dalam lima tahun ke depan alokasi belanja pegawai maksimal yang diperkenankan hanya 30 persen dari APBD. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

a. Alokasi Anggaran Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dari penjelasan tersebut maka yang termasuk didalam Mandatory Spending ialah diantaranya:

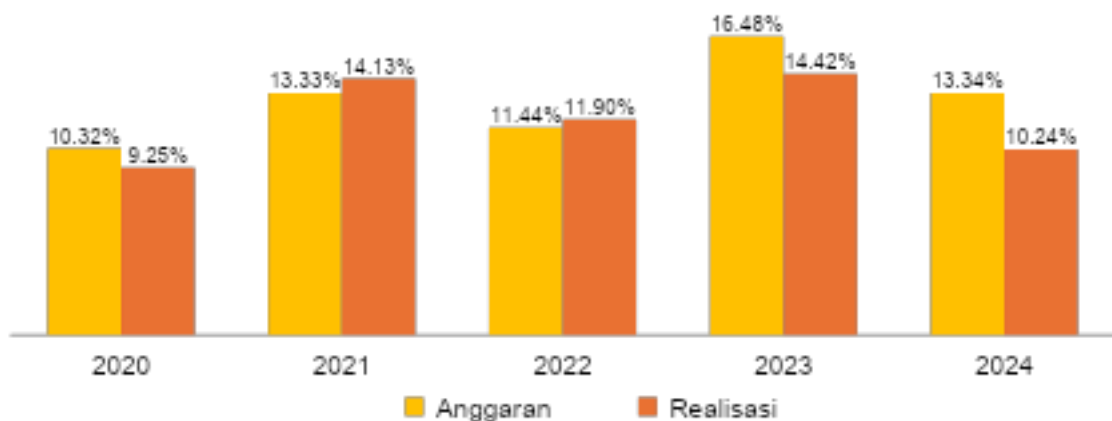
- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

Dengan berpedoman pada penjelasan sebelumnya maka akan dibagi menjadi Sub *Mandatory Spending* di Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut:



1) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja Infrastruktur yang dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Yang kemudian dimaksud infrastruktur ialah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat mengetahui perbandingan atau proporsi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik terhadap total anggaran belanja:



Gambar 2.106 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa proporsi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik terhadap total anggaran Belanja Daerah mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, dengan persentase tertinggi pada tahun 2023 mencapai 16.48%. Akan tetapi pada tahun 2024 kembali menurun pada angka 13.34%. Kondisi ini juga terjadi pada proporsi realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik terhadap total realisasi Belanja Daerah yang juga menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan capaian paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 14.42% serta kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 10.24%.

Secara umum, proporsi realisasi Belanja Infrastruktur menunjukkan angka yang lebih rendah dari proporsi anggarannya (terkecuali tahun 2021 dan 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa alokasi Belanja Infrastruktur adalah minimal 40% dari total Belanja APBD. Sehingga ketika melihat proporsi Belanja Infrastruktur Kabupaten Banyuwangi



dalam kurun waktu 2020-2024 baik terhadap anggaran maupun realisasinya, maka seluruhnya belum mampu memenuhi batas minimum 40%, melainkan seluruhnya masih berada dibawah 20%.

Oleh karenanya, kedepan diperlukan pergeseran alokasi Belanja Kabupaten Banyuwangi untuk lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi yang dicerminkan melalui pemenuhan infrastruktur. Jika melihat pada capaiannya, di tahun 2024 Belanja Infrastruktur Kabupaten Banyuwangi hanya terealisasi 68.31% dari anggaran yang ditetapkan. Sehingga selain mengalami penurunan persentase terhadap total Belanja Daerah, Belanja Infrastruktur Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 juga belum dapat terealisasi sepenuhnya.

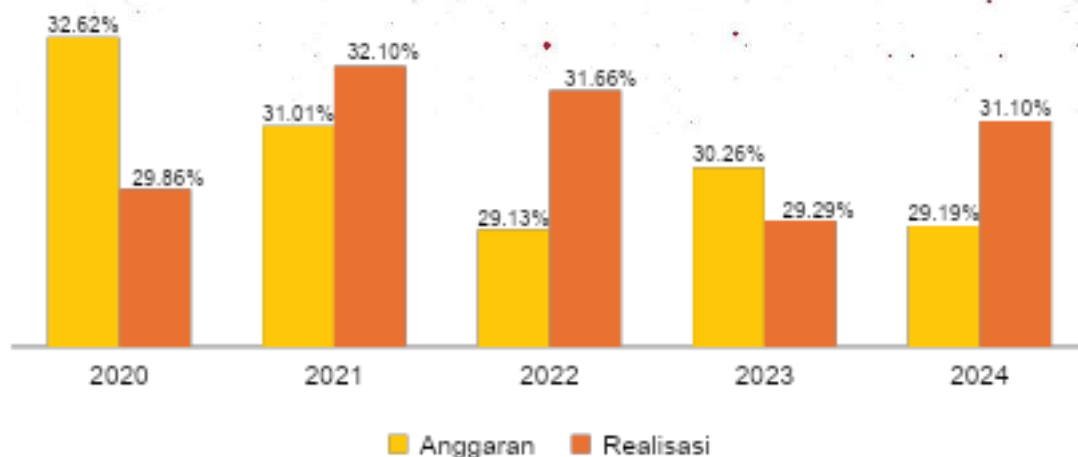
**Tabel 2.64 Capaian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024**

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	312,123,673,217.00	441,958,378,378.00	407,427,167,269.00	547,524,008,542.00	497,315,352,077.00
Realisasi	290,380,993,780.00	437,125,272,653.00	396,020,088,856.00	521,621,897,116.00	339,733,111,812.24
Capaian	93.03%	98.91%	97.20%	95.27%	68.31%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

2) Belanja Pendidikan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pemerintah Daerah menganut dan mengharuskan untuk melaksanakan pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan dalam sektor pendidikan akan terselesaikan. Pemenuhan akses dan layanan pendidikan diharapkan semakin meningkat pada masa mendatang. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Mandatory Spending* dalam bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2020- 2024 ialah sebagai berikut:



Gambar 2.107 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Pendidikan terhadap Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan minimum adalah sebesar 20% terhadap total anggaran belanja daerah maka jika dilihat dari grafik diatas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dapat memenuhi amanat tersebut. Secara keseluruhan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan anggaran dalam bidang pendidikan sudah berada diatas angka 20%. Utamanya pada persentase realisasinya dapat menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding persentase pada anggaran yang ditetapkan. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah proporsi Belanja Pendidikan Kab. Banyuwangi terhadap Belanja Daerah masih menunjukkan adanya fluktuasi, sehingga kedepannya diperlukan konsistensi alokasi dan realisasi Belanja Pendidikan sehingga tidak sampai mengalami penurunan dibawah 20%.

Melihat pada besarn nilainya, Belanja Pendidikan Kab. Banyuwangi juga cenderung meningkat. Dari Rp. 937,848,342,304.02 ditahun 2020 menjajdi Rp. 1,031,904,392,566.05 ditahun 2024 serta dapat memiliki capaian diatas 90% terhadap anggaran yang ditentukan. Sehingga hal ini mencerminkan sudah baiknya pemenuhan belanja aspek pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.65 1Capaian Belanja Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

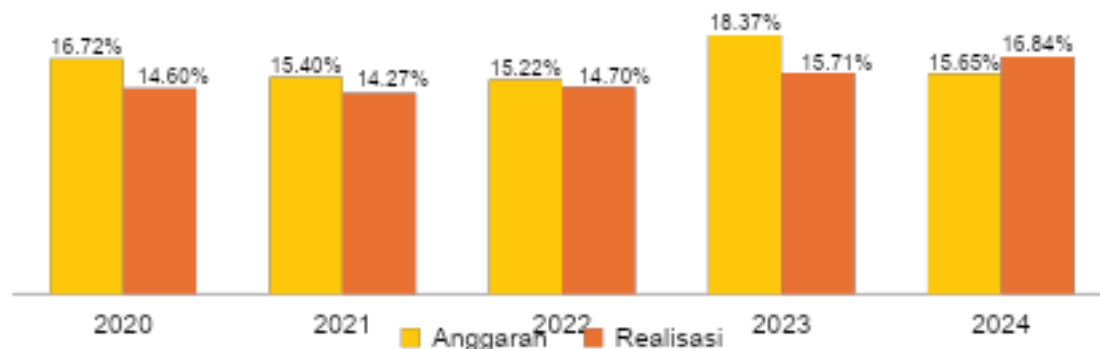
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	986,146,820,614.15	1,027,769,335,719.15	1,037,101,136,121.35	1,005,547,239,028.49	1,088,474,717,169.00
Realisasi	937,848,342,304.02	992,974,420,103.35	1,053,449,059,451.35	1,059,436,636,806.09	1,031,904,392,566.05
Capaian	95.10%	96.61%	101.58%	105.36%	94.80%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



3) Belanja Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan yang sedang gencar- gencarnya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan salah satu diantaranya menetapkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pentingnya kesehatan bagi seluruh masyarakat untuk menunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 2.108 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Kesehatan terhadap Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa proporsi anggaran dan realisasi belanja kesehatan berada pada posisi diatas 10% terhadap anggaran dan realisasasi Belanja Daerah. Hal ini sesuai dengan batas minimum yang diamanatakkn oleh Pemerintah Pusat bahawa alokasi belanja kesehatan paling sedikit adalah 10% terhadap total anggaran belanja daerah. Selain itu, proporsi realisasi belanja kesehatan Kab. Banyuwangi juga cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2024 hingga pada tahun 2024 mencapai 16.84%. Hal ini mencerminkan semakin baiknya pemenuhan kebutuhan aspek kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini juga terlihat dari adanya peningkatan nilai Belanja Kesehatan yang cenderung meningkat dari Rp. 458,478,894,076.81 di tahun 2020 menjadi Rp. 558,680,802,750.61 di tahun 2024.

Tabel 2.66 Capaian Belanja Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	505,637,087,338.50	510,584,725,066.00	541,963,398,873.00	610,481,515,243.65	583,659,055,986.00
Realisasi	458,478,894,076.81	441,467,339,864.11	488,960,370,025.12	568,140,290,731.81	558,680,802,750.61
Capaian	91%	86%	90%	93%	96%

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



6. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rentang lima tahun terakhir (2020-2024) fluktuatif yang cenderung menurun. Nilai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebesar Rp. 927,023,609,526.33 yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp. 717,803,957,376.00. Pada tahun 2022, Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Banyuwangi sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 758,125,345,676.00 dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi Rp 753,924,985,160.00. Adapun pada tahun 2024 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sedikit mengalami peningkatan menjadi Rp. 779,012,900,303.08. Secara garis besar, pengeluaran terbesar dalam struktur pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan. Sedangkan pada komponen Belanja Bunga, Pembentukan Dana Cadangan dan Pembayaran Pokok Utang tidak ada realisasi.

Tabel 2.67 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	927,023,609,526.33	717,803,957,376.00	758,125,345,676.00	753,924,985,160.00	779,012,900,303.08
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	905,051,086,049.33	665,524,063,666.00	705,418,346,660.00	700,742,229,945.00	726,869,131,151.08
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	959,120,000.00	32,085,914,295.00	32,513,039,416.00	32,988,795,615.00	31,949,809,552.00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	21,013,403,477.00	20,193,979,415.00	20,193,959,600.00	20,193,959,600.00	20,193,959,600.00
B	Pengeluaran Pembiayaan			-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B)	927,023,609,526.33	717,803,957,376.00	758,125,345,676.00	753,924,985,160.00	779,012,900,303.08

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2025 (diolah)



2.2.2.3 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Adapun beberapa pembahasan dalam analisis pembiayaan meliputi : Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, serta Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil memberikan gambaran mengenai kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada masa lalu. Defisit riil diketahui dengan menghitung Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Setelah diketahui selanjutnya dilakukan penutupan oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan yang dimana keseluruhan datanya dituangkan dalam tabel Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis tersebut, kemudian disusun tabel Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3,268,231,248,972.2 ₃	3,181,210,231,920.8 ₃	3,236,145,965,510.90	3,374,669,357,720.55	3,370,326,601,122.08
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	3,140,638,904,668.4 ₇	3,093,593,254,516.9 ₇	3,327,251,697,808.09	3,617,368,478,954.81	3,318,380,677,018.08
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,100,000,000.00	10,400,000,000.00	9,000,000,000.00	7,742,000,000.00	-
A	Defisit riil	123,492,344,303.76	77,216,977,403.86	(100,105,732,297.19)	(250,441,121,234.26)	51,945,924,104.00
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	187,101,344,846.13	310,594,127,944.30	387,811,173,271.16	287,706,977,055.14	37,265,855,820.88
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	1,536,081.17	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	187,101,344,846.13	310,594,127,944.30	387,812,709,352.33	287,706,977,055.14	37,265,855,820.88
A- B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	310,593,689,149.89	387,811,105,348.16	287,706,977,055.14	37,265,855,820.88	89,211,779,924.88

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 2025 (diolah)



Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lebih sering memiliki surplus riil dibandingkan dengan defisit, dimana defisit hanya terjadi pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2024. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami defisit sebesar Rp. 100.105.732.297,19, sedangkan pada tahun 2023 besar defisit riil anggaran Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 250.441.121.234,26. Dari defisit tersebut selanjutnya ditutup salah satunya dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dimana proporsi Defisit Riil terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2022 mencapai 387,40% dan pada tahun 2023 mencapai 114,88%. Kondisi keuangan pada tahun 2020 mengalami surplus masing-masing sebanyak Rp. 123,492,344,303.76, sebesar Rp. 77.216.977.403,86 pada tahun 2021 serta pada tahun 2024 mengalami surplus sebanyak Rp 51,945,924,104.00. Dimana keberadaan surplus yang dimiliki telah meningkatkan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada tahun tersebut, sehingga bila melihat pada kondisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih cukup kuat untuk membiayai belanja dengan mengoptimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

Tabel 2.69 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	151.51%	402.24%	-387.40%	-114.88%	71.74%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BKAD Kabupaten Banyuwangi, 2025 (diolah)

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memberikan gambaran mengenai dari mana SiLPA diperoleh atau sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber terhadap SiLPA yang



dimiliki. Komposisi SiLPA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan, Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sedangkan untuk kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan tidak terdapat realisasi.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 hingga 2021 diperoleh dari 5 sumber sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dimana pada tahun 2018 sebagian besar SiLPA dihasilkan dari adanya kegiatan lanjutan sebesar 59,16%. Pada tahun 2019 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi diperoleh dari komponen yang sama, dimana sebagian besar SiLPA dihasilkan dari adanya kegiatan lanjutan sebesar 99,77%. Pada tahun 2020 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi mayoritas diperoleh dari kegiatan lanjutan sebesar 36,12%, Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi sebagian besar diperoleh dari Pelampauan penerimaan dana perimbangan yang masing-masing sebesar 85,04% dan 98,13%. Pada tahun 2022 selain diperoleh dari Pelampauan penerimaan dana perimbangan, SiLPA juga diperoleh dari Pelampauan penerimaan PAD sebesar 1,87%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 hingga 2022 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi sebesar -5,43%.

Berikut disajikan data terkait dengan perkembangan SiLPA dan sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 2.70 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	257.447.873.311,41	100,00%	157.523.697.617,73	100,00%	183.117.881.673,63	100,00%	191.948.861.762,33	100,00%	184.330.943.845,35	100,00%	-5,43%
1	Pelampauan penerimaan PAD	-	0,00%	-	0,00%	7.909.552.687,37	4,32%	25.334.483.463,94	13,20%	3.439.750.969,00	1,87%	177,09%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	42.138.487.686,00	16,37%	-	0,00%	64.774.971.811,00	35,37%	163.232.036.358,45	85,04%	180.891.192.876,35	98,13%	15,70%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	20.134.090.000,00	7,82%	366.340.000,00	0,23%	1.574.190.000,00	0,86%	3.144.525.439,94	1,64%	-	0,00%	57,82%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	42.867.038.472,58	16,65%	-	0,00%	34.348.089.479,64	18,76%	237.816.500,00	0,12%	-	0,00%	-99,77%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00%	-	0,00%	8.375.401.472,00	4,57%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
6	Kegiatan lanjutan	152.308.257.152,83	59,16%	157.157.357.617,73	99,77%	66.135.676.223,62	36,12%	-	0,00%	-	0,00%	-51,58%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 2023 (diolah)

**C. Analisis Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan memberikan gambaran mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran secara riil yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp. 311,308,763,772.17, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2021 sehingga menjadi Rp. 387,975,431,067.44. Akan tetapi pada tahun 2022 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 287.857.814.378,14. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 hingga menjadi Rp. 37.336.464.075,88 di tahun 2023. Pada tahun 2024 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menunjukkan adanya peningkatan pada angka Rp. 89,277,893,065.18. Sehingga rata-rata pertumbuhan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 adalah sebesar 12.73%. Untuk mengetahui hasil perhitungan dan perkembangan Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	311,308,763,77 2.17	387,975,431,06 7.44	287,857,814,37 8.14	37,336,464,075 .88	89,277,893,065 .18
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	311,308,763,7 72.17	387,975,431,0 67.44	287,857,814,3 78.14	37,336,464,07 5.88	89,277,893,06 5.18

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 2025 (diolah)

Dengan masih besarnya SILPA, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan serta pengeluaran yaitu memperhatikan kondisi makro perekonomian, memperbaiki



kinerja penyerapan anggaran dan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. SiLPA yang diperoleh dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik.

Pengelolaan keuangan yang semakin baik tercermin dalam hasil Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran, dimana Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran menggambarkan perkiraan kondisi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun mendatang. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 20,885,690,443.69 yang kemudian menurun hingga tahun 2029 diperkirakan sebesar Rp. 17,618,062,971.25. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 hingga 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2029

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029
			(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	37,336,464,075.88	12.73%	20,885,690,443.69	22,819,079,918.69	22,190,708,091.07	19,611,862,989.68	17,618,062,971.25
	Dikurangi :							
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0
2	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	37,336,464,075.88	12.73%	20,885,690,443.69	22,819,079,918.69	22,190,708,091.07	19,611,862,989.68	17,618,062,971.25

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 2025 (diolah)



2.2.3 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian integral dari kerangka keuangan yang berkaitan erat dengan kapasitas pembiayaan belanja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan kerangka ini memiliki tujuan utama untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2030. Melalui kerangka pendanaan ini, diharapkan tercipta sinkronisasi dan keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan guna mendanai program-program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi pada beberapa tahun mendatang, khususnya periode 2025-2030. Dalam sub bab ini, beberapa aspek penting yang akan dibahas meliputi proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta metode penghitungan kerangka pendanaan. Proyeksi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan dapat diimplementasikan sesuai dengan kemampuan finansial pemerintah daerah, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

2.2.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kerangka pendanaan pemerintah daerah untuk beberapa tahun ke depan tidak dapat dipisahkan dari data historis, yaitu perkembangan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menganalisis proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di masa mendatang, diperlukan analisis terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama lima tahun terakhir. Analisis ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode tersebut serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk dukungan terhadap pencapaian target prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi peramalan (forecast), yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan nilai berdasarkan data historis selama lima tahun terakhir, ditambah dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan informasi mengenai pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada masa RPJMD Kabupaten Banyuwangi, serta tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun mendatang. Secara umum, pendapatan daerah terbagi menjadi tiga jenis: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah yang Sah lainnya. Sedangkan belanja daerah terbagi



menjadi empat jenis: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai perkiraan pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2025 hingga 2030 dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi dan kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta belanja yang akan dikeluarkan dengan memperhatikan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima serta kebijakan-kebijakan terkait dengan belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah dan kondisi peningkatan pendapatan daerah, serta pertimbangan/ kebijakan lainnya.

Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0.76%, untuk belanja daerah Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan pada rentang waktu tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -1.43%. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -9.95% dan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 114.65%.

Melihat pada hasil proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukan nilai pendapatan sebesar Rp. 3,440,396,404,162.00 pada tahun 2025. Nilai tersebut mengalami peningkatan 2.08% dibanding realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya potensi peningkatan PAD yang cukup tinggi yakni sebesar 23.89% (2024-2025). Sedangkan pada Pendapatan Transfer khususnya DAU diperkirakan akan menurun dengan adanya efisiensi transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam lima tahun berikutnya (2026-2030), Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2025-2030 mencapai 4.40%, dimana pada tahun 2026 Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 1.43% menjadi Rp 750,894,401,233.00. Capaian PAD yang cukup baik tersebut terus konsisten meningkat hingga tahun 2030 sehingga pada akhir tahun 2030 PAD diperkirakan mencapai Rp. 917,594,836,413.96. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan dari pemberlakuan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Semakin meningkatnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 mengandung harapan tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin baik, hal ini tentunya menjadi konsekuensi seiring dengan meningkatnya belanja daerah dalam setiap tahun, serta sebagaiantisipasi adanya kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap dana transfer dari pusat ke daerah.



Ditengah kecenderungan tren penurunan dana transfer pemerintah pusat yang saat ini menjadi proporsi terbesar pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 78.47% proporsinya terhadap seluruh total pendapatan (2020-2024), PAD kedepannya harus memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan Kabupaten Banyuwangi. Eksisting saat ini tahun 2024, PAD mencapai 17.73% terhadap total seluruh pendapatan di Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2025-2030 akan diperkirakan proporsi PAD terhadap total pendapatan mencapai 21.52% pada tahun 2025 dan diproyeksikan secara konsisten meningkat hingga tahun 2030 yang mencapai 25.68%. Angka tersebut tentunya relatif kecil mengingat Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai kontributor utama pembangunan, maka kedepannya potensi PAD untuk dapat dioptimalisasi akan sangat besar. Adapun pada pendapatan transfer saat ini (2024) berada pada proporsi 80.68% dan diasumsikan dalam lima tahun kedepan (2025 hingga 2030) akan mengalami penurunan proporsi pada angka 76.99% pada tahun 2025 serta terus menurun setiap tahunnya hingga menjadi 72.94% pada tahun 2030. Proyeksi ini dilakukan dengan berdasar pada adanya kerentanan terhadap pengaruh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara, selain itu hal ini juga dilakukan sebagai upaya Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Melihat pada hasil proyeksi pendapatan daerah yang memiliki pertumbuhan 0.76% serta adanya penurunan pada pendapatan transfer yang merupakan komposit paling besar dalam keuangan Kabupaten Banyuwangi, maka belanja daerah Kabupaten Banyuwangi 2025-2030 diproyeksikan akan sedikit mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1.43%. Adapun untuk belanja operasi diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -1.36%, untuk belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -1.74%. Untuk belanja tidak terduga dalam kurung waktu tahun 2025-2029 dialokasikan sebesar Rp. 20.000.000.000,00, serta untuk belanja transfer rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0.16%.

Bila melihat pada jenis belanja operasi, untuk belanja pegawai di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -0.35%, dimana kecilnya pertumbuhan belanja tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan pemenuhan proporsi gaji pegawai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang tidak boleh melebihi 30% dari APBD (total anggaran belanja), disisi lain peningkatan belanja pegawai diperlukan dalam rangka melakukan antisipasi terhadap penerimaan pegawai baru. Kondisi eksisting saat ini belanja pegawai mencapai 33% terhadap total seluruh belanja pada tahun 2024, artinya bahwa proporsi belanja Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 masih belum memenuhi amanat UU 1 Tahun 2022.

Pada proyeksi Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 hingga 2030 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang



dipisahkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000 di tahun 2026, serta Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 496,332,583,000.00 di tahun 2025. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan diperkirakan Kabupaten Banyuwangi akan melaksanakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029 serta Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah di tahun 2026 sebesar Rp. 1.000.000.000.000.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 hingga 2030 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2030

No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	3,440,396,404,162.00	3,438,427,221,112.00	3,460,149,598,349.30	3,480,552,108,168.33	3,527,915,516,320.48	3,573,250,097,592.96	0.76%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	740,306,550,833.00	750,894,401,233.00	789,061,178,370.30	829,467,788,009.33	872,260,255,141.48	917,594,836,413.96	4.40%
1.1.1.	Pajak daerah	375,065,550,833.00	417,803,401,233.00	434,515,537,282.32	451,896,158,773.61	469,972,005,124.56	488,770,885,329.54	5.48%
1.1.2.	Retribusi daerah	305,954,314,200.00	272,257,750,000.00	292,550,392,337.98	314,390,714,254.47	337,897,490,373.45	363,198,645,835.37	3.77%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	24,950,000,000.00	24,950,000,000.00	25,573,750,000.00	26,213,093,750.00	26,868,421,093.75	27,540,131,621.09	2.00%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	34,336,685,800.00	35,883,250,000.00	36,421,498,750.00	36,967,821,231.25	37,522,338,549.72	38,085,173,627.96	2.10%
1.2	Pendapatan Transfer	2,648,841,111,336.00	2,638,659,034,336.00	2,621,204,534,336.00	2,602,390,434,336.00	2,606,281,274,336.00	2,606,281,274,336.00	-0.32%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2,546,599,930,000.00	2,549,417,853,000.00	2,531,963,353,000.00	2,513,149,253,000.00	2,516,151,353,000.00	2,516,151,353,000.00	-0.24%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2,274,840,634,000.00	2,278,653,557,000.00	2,260,403,557,000.00	2,240,901,557,000.00	2,245,181,857,000.00	2,245,181,857,000.00	-0.26%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	231,017,307,000.00	234,330,230,000.00	216,580,230,000.00	197,735,230,000.00	197,235,230,000.00	197,235,230,000.00	-3.02%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,442,675,465,000.00	1,440,925,465,000.00	1,440,775,465,000.00	1,440,520,465,000.00	1,443,220,765,000.00	1,443,220,765,000.00	0.01%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	601,147,862,000.00	603,397,862,000.00	603,047,862,000.00	602,645,862,000.00	604,725,862,000.00	604,725,862,000.00	0.12%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	32,023,746,000.00	29,773,746,000.00	30,073,746,000.00	30,525,746,000.00	29,047,246,000.00	29,047,246,000.00	-1.87%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	239,735,550,000.00	240,990,550,000.00	241,486,050,000.00	241,721,950,000.00	241,922,250,000.00	241,922,250,000.00	0.18%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	102,241,181,336.00	89,241,181,336.00	89,241,181,336.00	89,241,181,336.00	90,129,921,336.00	90,129,921,336.00	-2.34%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	95,508,627,336.00	80,943,627,336.00	81,133,627,336.00	80,534,327,336.00	81,957,867,336.00	81,957,867,336.00	-2.80%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	6,732,554,000.00	8,297,554,000.00	8,107,554,000.00	8,706,854,000.00	8,172,054,000.00	8,172,054,000.00	4.44%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	51,248,741,993.00	48,873,785,543.00	49,883,885,643.00	48,693,885,823.00	49,373,986,843.00	49,373,986,843.00	-0.71%
1.3.1	Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	51,248,741,993.00	48,873,785,543.00	49,883,885,643.00	48,693,885,823.00	49,373,986,843.00	49,373,986,843.00	-0.71%
2	BELANJA	3,899,608,184,086.88	3,366,917,864,774.00	3,390,583,347,011.31	3,410,354,327,355.33	3,455,125,931,385.48	3,590,956,693,543.97	-1.43%
2.1	Belanja Operasi	2,553,443,122,889.30	2,259,795,283,753.00	2,296,795,283,753.00	2,294,578,683,753.00	2,363,265,534,564.88	2,367,483,277,753.37	-1.36%
2.1.1	Belanja Pegawai	1,307,581,766,962.93	1,239,596,058,765.00	1,272,596,058,765.00	1,267,596,058,765.00	1,257,596,058,765.00	1,282,596,058,765.00	-0.35%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,054,627,221,723.37	870,745,193,988.00	874,745,193,988.00	876,203,193,988.00	877,745,193,988.38	927,745,193,988.38	-2.19%
2.1.3	Belanja Bunga	20,309,351,203.00	7,400,000,000.00	7,400,000,000.00	7,400,000,000.00	7,400,000,000.00	0.00	-32.71%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	154,896,458,000.00	123,443,706,000.00	125,443,706,000.00	127,444,106,000.00	205,932,856,811.51	142,550,600,000.00	2.74%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16,028,325,000.00	18,610,325,000.00	16,610,325,000.00	15,935,325,000.00	14,591,425,000.00	14,591,425,000.00	-1.43%
2.2	Belanja Modal	896,811,876,597.58	655,164,396,421.00	641,334,378,658.31	663,086,059,002.33	638,970,512,220.59	770,583,531,190.59	-1.74%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	985,250,000.00	1,009,881,250.00	1,035,128,281.25	1,061,006,488.28	1,087,531,650.49	1,087,531,650.49	2.00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123,313,851,554.00	100,908,163,545.33	81,396,943,892.37	61,747,554,167.05	57,056,291,937.89	82,056,291,937.89	-5.09%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192,195,797,308.58	93,156,776,295.12	83,622,560,176.60	84,040,672,977.48	84,460,876,342.37	109,460,876,342.37	-6.23%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	575,587,776,735.00	455,336,728,325.55	470,503,135,068.06	511,436,331,073.29	491,541,315,522.14	573,154,334,492.14	0.77%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,799,392,000.00	1,808,388,960.00	1,817,430,904.80	1,826,518,059.32	1,835,650,649.62	1,835,650,649.62	0.40%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	2,929,809,000.00	2,944,458,045.00	2,959,180,335.23	2,973,976,236.90	2,988,846,118.09	2,988,846,118.09	0.40%
2.3	Belanja Tidak Terduga	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00%
2.4	Belanja Transfer	429,353,184,600.00	431,958,184,600.00	432,453,684,600.00	432,689,584,600.00	432,889,884,600.00	432,889,884,600.00	0.16%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	20,193,959,600.00	20,193,959,600.00	20,193,959,600.00	20,193,959,600.00	20,193,959,600.00	20,193,959,600.00	0.00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	409,159,225,000.00	411,764,225,000.00	412,259,725,000.00	412,495,625,000.00	412,695,925,000.00	412,695,925,000.00	0.17%

No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	585,544,362,924.88	1,020,990,643,662.00	22,933,748,662.00	22,302,219,187.00	19,710,415,065.00	17,706,595,951.00	-9.59%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	89,211,779,924.88	20,990,643,662.00	22,933,748,662.00	22,302,219,187.00	19,710,415,065.00	17,706,595,951.00	-18.35%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	1,000,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	496,332,583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	126,332,583,000.00	1,092,500,000,000.00	92,500,000,000.00	92,500,000,000.00	92,500,000,000.00	0.00	114.65%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	126,332,583,000.00	92,500,000,000.00	92,500,000,000.00	92,500,000,000.00	92,500,000,000.00	0.00	-25.36%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.6	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah	0.00	1,000,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 2025 (diolah)



Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah terdapat pada tabel di atas, maka selanjutnya dapat dikemukakan beberapa kebijakan keuangan daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Adapun kebijakan keuangan daerah dikelompokkan berdasarkan 3 komponen yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2030 berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam beberapa tahun kedepan. Adapun kebijakan terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);
- b. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi Sistem Informasi Online, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan
- c. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui :
 - o Pelaksanaan mekanisme *reward* dan *punishment*;
 - o Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - o *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- d. Melakukan *review* dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala khususnya di wilayah-wilayah yang secara signifikan mengalami pertumbuhan ekonomi;
- e. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- f. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat;



- g. Memperkuat sistem pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);
- h. Optimalisasi tata kelola aset daerah dan pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber penerimaan dalam PAD;
- i. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif;
- j. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
- k. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya;
- l. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%).

2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah didasarkan pada pendekatan Money Follow Program yang memberikan prioritas pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kebijakan Belanja Daerah dalam RPD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah Kabupaten Banyuwangi diprioritaskan untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan Daerah;
- b. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja;
- c. Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah;
- d. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan Analisis Standar Belanja;
- e. Belanja pegawai dialokasikan dengan proporsi yang semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027 (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
- f. Untuk menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi, maka minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) dialokasikan/ digunakan untuk belanja



infrastruktur, dimana Dana Transfer Umum (DTU) meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);

- g. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- i. Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dengan memperhatikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebagai jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK;
- j. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas, rujukan di RSUD Blambangan dan RSUD Genteng, serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- k. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan paling sedikit sebesar 20% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat;
- l. Pengalokasian anggaran mandatory lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- m. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen keuangan yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam RPD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. SiLPA yang terpasang pada tahun 2025 - 2030 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA dalam 4 tahun terakhir. Rendahnya SiLPA yang diproyeksikan memerlukan upaya optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya, sehingga diperlukan perbaikan sistem sinkronisasi



- perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
- b. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah;
 - c. Bila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/ Non-Governmental Organization melalui Publik Private Partnership, seperti : KPBU atau optimalisasi CSR. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang layak untuk dikembangkan. KPBU juga memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien. Selain itu, skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama;
 - e. Untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi, yaitu untuk menjamin keberlanjutan dan kemanfaatan program-program pembangunan daerah bagi generasi sekarang dan mendatang, maka perlu dilakukan pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Abadi Daerah bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/ atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, dimana hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk : Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

2.2.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah



secara utuh. Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama beberapa tahun ke depan sampai dengan tahun 2030. Untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menghitung seluruh penerimaan daerah, yang meliputi: Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda), dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Selanjutnya dari jumlah penerimaan tersebut dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan data hasil proyeksi yang diperoleh dapat diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 hingga 2030 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3.72%, dimana pada tahun 2025 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 3,403,275,601,086.88 dan pada tahun 2030 menjadi Rp. 3,590,956,693,543.96. Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025 dan 2030 selanjutnya dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan daerah pada masing-masing tahun. Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 hingga 2030 secara lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2030

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	3,440,396,404,162.00	3,438,427,221,112.00	3,460,149,598,349.30	3,480,552,108,168.33	3,527,915,516,320.48	3,573,250,097,592.96
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	89,211,779,924.88	20,990,643,662.00	22,933,748,662.00	22,302,219,187.00	19,710,415,065.00	17,706,595,951.00
	Total Penerimaan	3,529,608,184,086.88	3,459,417,864,774.00	3,483,083,347,011.30	3,502,854,327,355.33	3,547,625,931,385.48	3,590,956,693,543.96
	Dikurangi:						
1	Pengeluaran Pembiayaan	126,332,583,000.00	1,092,500,000,000.00	92,500,000,000.00	92,500,000,000.00	92,500,000,000.00	0.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	3,403,275,601,086.88	2,366,917,864,774.00	3,390,583,347,011.30	3,410,354,327,355.33	3,455,125,931,385.48	3,590,956,693,543.96

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 2025 (Diolah)



2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan dapat ditelusuri melalui evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya dan memperhatikan kondisi di masyarakat atas suatu permasalahan yang sedang terjadi. Berikut ini adalah rekapitulasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana evaluasi yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya untuk setiap urusan pembangunan dan telah memperhatikan permasalahan atau isu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 2.75 Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi

No	Urusan	Permasalahan
1	Pendidikan	Masih belum meratanya kualitas Pendidikan
		Tantangan dalam mengimbangi Pendidikan dengan nilai karakter
		Belum sepenuhnya kompetensi guru dalam penguasaan IT
		Sarpras sekolah belum memenuhi akses lengkap yang berkualitas
2	Kesehatan	Belum meratanya jaminan Kesehatan
		Jumlah Kematian Ibu
		Masih adanya kasus Stunting
		Belum Meratanya akses Kesehatan yang berkualitas
		Upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal
3	PUPR	Infrastruktur jalan dan jembatan serta konektivitas daerah belum optimal
		Kondisi drainase yang belum bisa menampung air hujan
		Terdapat Konflik kepentingan antar petani terkait pembagian air
		Pemanfaatan lahan masih belum sesuai peruntukan, belum optimalnya pengembangan jaringan irigasi
		Terdapat sumber mata air inactive karena sumber air tanah sudah habis
4	Perkim	Penanganan permukiman kumuh dan RTLH belum berjalan optimal
		IPLT yang ada sekarang tidak dapat menampung kebutuhan
5	Trantibum	kurangnya pengamanan digital seperti CCTV



No	Urusan	Permasalahan
		kurangnya kesadaran keamanan
		Kurangnya integrasi antar dinas terkait dalam penanganan bencana
		Kurangnya sarana dan prasarana pemadam
		Pos sektor pemadam yang belum merata
		Belum optimalnya fungsi hydrant pada pusat-pusat keramaian
		Regulasi bencana yang belum jelas
		Pemahaman SDM yang tidak merata
		Desa Tanggap Bencana (Destana) hanya ada 27 desa dari 217 desa
		Belum optimalnya sinergitas antar stakeholder dalam penanganan gangguan Trantibum dan PPKS
8	Sosial	Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial karena data belum tepat
		Kurang sinerginya pihak terkait dalam pelayanan PMKS
9	Tenaga Kerja	Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh para pencari kerja.
		Serapan tenaga kerja di banyuwangi masih belum optimal
		Tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi
10	PPPA	Terjadi peningkatan kekerasan perempuan dan anak
11	Pangan	Minat bertani berkurang kesejahteraan petani khususnya pada buruh tani
		Lahan produktif mulai berkurang
		Kesejahteraan petani yang belum optimal
12	Lingkungan Hidup	Masih tingginya Pencemaran air terutama di hulu sungai
		Pengelolaan sampah berkelanjutan yang kurang optimal sehingga terdapat sampah di DAS
		Rendahnya ketaatan kegiatan usaha dalam pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
13	Adminduk	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya data kependudukan



No	Urusan	Permasalahan
		Kurang maksimalnya integrasi digitalisasi layanan
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum maksimalnya peran BUMDES sebagai penggerak ekonomi lokal
		Terjadi stagnansi pengembangan kawasan perdesaan
15	Pengendalian Penduduk dan KB	Terjadi kerentanan kualitas keluarga yang berdampak pada peningkatan perilaku menyimpang di kalangan individu
16	Perhubungan	Minat masyarakat dalam penggunaan transportasi umum sangat rendah
		Belum semua ruas jalan telah dilengkapi perlengkapan jalan yang ideal
		Menurunnya kepatuhan masyarakat untuk tertib berlalu lintas
		Terhambatnya konektivitas akibat faktor alam sehingga menyebabkan berhentinya layanan angkutan penyeberangan.
17	Kominfo	Masih sulitnya integrasi data, terutama dengan aplikasi-aplikasi pusat
		Smart Kampung belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Desa di Kabupaten Banyuwangi
18	Koperasi dan UMKM	Belum optimalnya tata kelola sumber daya koperasi
		Minimnya diversifikasi usaha koperasi
19	Penanaman Modal	Lemahnya daya tarik investasi
		Belum adanya dokumen RDTRK menuju digitalisasi dan terintegrasi dengan aplikasi perizinan digital
		Akses permodalan dan akses pasar
20	Kepemudaan dan Olahraga	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang kurang
		Belum sinkronnya data terkait pemuda dan keikutsertaanya dalam aktivitas usaha
21	Pertanahan	Kurang Optimalnya Layanan air minum dan layanan sanitasi yang berkelanjutan
22	Statistik	Masih ada penyelenggaraan statistik yang belum sesuai dengan standar statistik nasional
23	Persandian	Kurangnya literasi digital masyarakat yang berkaitan dengan keamanan informasi
		Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan informasi



No	Urusan	Permasalahan
		Sulitnya kontrol kemananan akibat kompleksitas infrastruktur IT di masing-masing dinas
24	Kebudayaan	Kecenderungan meninggalkan budaya akibat teknologi yang semakin cepat berubah
25	Perpustakaan	Masih kurangnya bahan bacaan sehingga berakibat pada minat baca masyarakat rendah
		Belum inklusifnya layanan di perpustakaan daerah
26	Kearsipan	Kesadaran masyarakat terkait pentingnya arsip masih rendah,
		Belum optimalnya pemeliharaan dan konservasi koleksi dan kearsipan (restorasi)
27	Kelautan dan Perikanan (Pilihan)	Produksi perikanan mengalami penurunan
		Belum optimalnya angka konsumsi ikan di masyarakat
28	Pariwisata (Pilihan)	Minimnya promosi serta pengembangan atraksi dan sarana pendukung pariwisata
29	Pertanian (Pilihan)	Adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular terhadap hewan ternak
		Adanya ketergantungan terhadap pupuk sehingga menyebabkan penurunan kesuburan lahan pertanian
30		Hilirisasi dan jaringan keberantaraan pasar sektor pertanian
31	Perdagangan (Pilihan)	Belum efektif dan efisien jaringan distribusi perdagangan melalui penataan sistem dan sarana distribusi, serta belum siapnya usaha masyarakat yang beradaptasi dengan teknologi dan pemasaran
32	Perindustrian (Pilihan)	Penerapan industri yang ramah lingkungan (<i>green industry</i>) belum optimal
33	Sekda	Kendala administrasi dan izin belajar untuk ASN studi lanjut
		Tumpang tindih regulasi tata kelola lebih akuntabel
34	Sekwan	Terdapat Raperda yang tidak disertai kajian mendalam
		Terdapat kepentingan kelompok dalam penyusunan Raperda
35	Perencanaan	Hyper regulation berdampak pada inkonsistensi sistem dan kebijakan di pemda
		Pemanfaatan teknologi sebagai tools perencanaan
36	Keuangan	Penguatan sistem keuangan terintegrasi



No	Urusan	Permasalahan
		Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
37	Kepegawaian	Belum optimalnya penerapan sistem merit dan <i>Talent Mobility</i>
38	Pendidikan dan Pelatihan	
39	Litbang	Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
40	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	Belum efektifnya sistem pengawasan internal
		Kurangnya koordinasi atau efisiensi dalam alur kerja
		Belum terkelolanya standarisasi pengetahuan bagi auditor
41	Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan politik tidak berperan secara maksimal

Sumber: Diolah dari Bappeda, 2025

2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.2.1 TELAHAH RPJMN TAHUN 2025 - 2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana pembangunan merupakan dasar dalam menentukan arah perkembangan pembangunan, sehingga sistem pemerintahan Indonesia berkewajiban menyusun dan melaksanakan perencanaan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perencanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. RPJMN adalah dokumen strategis yang merumuskan prioritas, tujuan, dan target pembangunan Indonesia selama periode lima tahun. RPJMN dibuat oleh pemerintah Indonesia dan mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya.

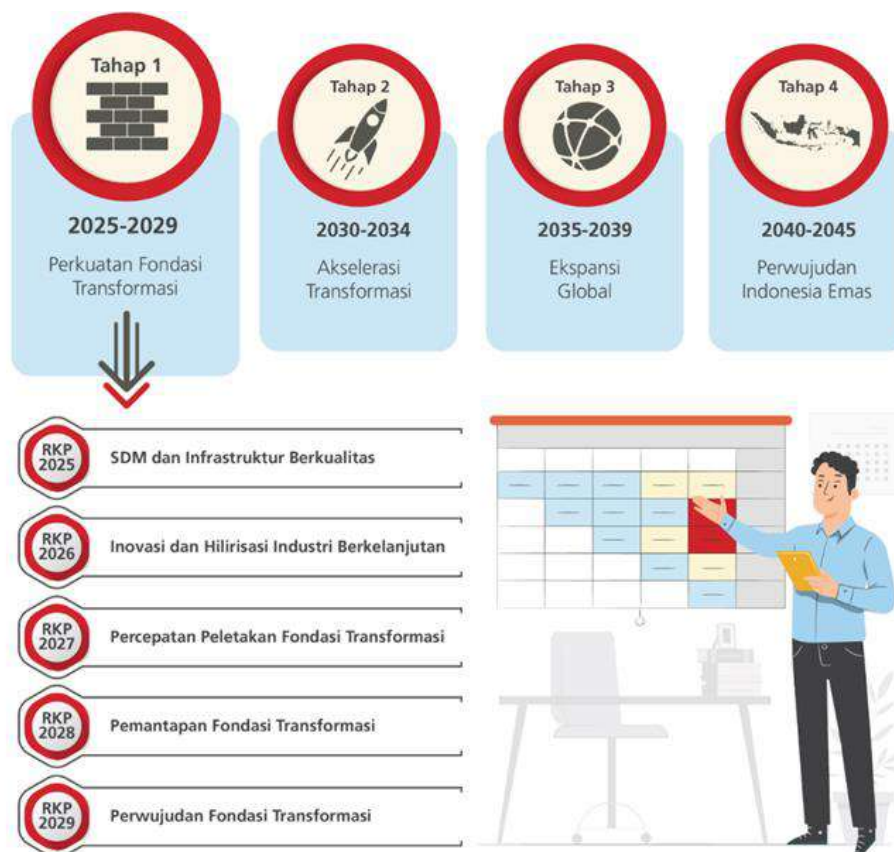
RPJMN bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dokumen ini juga merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menyusun rencana aksi untuk implementasi kebijakan dan strategi. RPJMN diadopsi oleh pemerintah sebagai panduan utama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di seluruh Indonesia. Dalam RPJMN, terdapat indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan hasil pembangunan yang dicapai, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerah otonom masing-masing, sehingga pada setiap urusan dan sub-urusan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota telah dipetakan kewenangannya masing-masing. Kebijakan



Kabupaten Banyuwangi

desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga segala potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik serta dapat secara langsung menentukan batasan-batasan untuk menghindari eksploitasi sumber daya. Meskipun demikian, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat bahwa externalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut menjadi tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar bagi daerah untuk menjalankan urusannya, namun tetap harus memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan dengan pemerintah di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029, penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi landasan utama, dengan fokus untuk mencapai Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur *dibreadown* kedalam arah pembangunan jangka menengah yang kemudian dikerucutkan kedalam tema RKP 2025-2029. Berikut merupakan tahapan / periodisasi pembangunan jangka menengah dalam RPJPN 2025-2045:



Gambar 2.109 Periodisasi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029



Tema RPJMN 2025-2029, "Perkuatan Fondasi Transformasi," menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam membangun pondasi yang kokoh untuk transformasi Indonesia menuju visi jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Setiap tahunnya, tema-tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengarahkan fokus strategis dan prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan ini. Pada tahun 2025, tema "SDM dan Infrastruktur Berkualitas" menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Tahun berikutnya, 2026, difokuskan pada "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan," yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan industri hilir yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik. Tahun 2027 mengangkat tema "Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi," di mana pemerintah akan mempercepat langkah-langkah strategis untuk meletakkan fondasi transformasi yang lebih kuat. Pada tahun 2028, tema "Pemantapan Fondasi Transformasi" akan memastikan bahwa fondasi yang telah diletakkan semakin kuat dan siap mendukung transformasi besar-besaran di tahun-tahun mendatang. Akhirnya, pada tahun 2029, tema "Perwujudan Fondasi Transformasi" akan menandai pencapaian visi besar melalui fondasi transformasi yang sudah matang dan siap untuk membawa Indonesia menuju era baru.

Hal tersebut tentunya selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Banyuwangi yang tertuang pada RPJPD Banyuwangi Tahun 2025-2029 yang mana memiliki tema "**Penguatan Ekosistem Transformasi**". Fokus arah kebijakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 selaras dengan fokus agenda pembangunan nasional 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:



Fokus Agenda Pembangunan Tahun 2025 - 2029

➤ Transformasi Sosial:

Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

➤ Transformasi Ekonomi:

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

➤ Transformasi Tata Kelola:

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

➤ Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan.

➤ Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Gambar 2.110 Fokus Agenda Pembangunan Nasional 2025-2029

Sumber: Bappenas, 2025



Tabel 2.76 Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2045
Transformasi Sosial	• Penuntasan Pemenuhan Pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial • Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
Transformasi Ekonomi	• Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan • Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja • Penerapan ekonomi hijau • Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, • Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa.
Transformasi Tatakelola	• Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi • Penyempurnaan fondasi penataan regulasi • Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi • Peningkatan kualitas ASN berbasis merit • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Penguatan kapasitas masyarakat sipil.
Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	• Pembaruan substansi hukum • Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila • Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan Nasional • Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, • Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif • Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan,



Transformasi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2045
	• Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi • Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat • Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan • Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK
Pembangunan wilayah dan Sarana Prasarana	• Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi • Pembangunan island grtd (dimulai di sumatera) dan national grid (dimulai antara sumatera-jawa) • Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital • Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu kota nusantara (IKN) • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid)
Kesinambungan Pembangunan	• Reformasi tata kelola fiskal, • Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju,



dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Ersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yang juga sebagai Prioritas Nasional. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup



langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.



Gambar 2.111 Visi Misi Presiden

Sumber: Bappenas, 2025

Isu pembangunan sangat penting sebagai pengarah pembangunan kewilayahan, sehingga potensi wilayah dapat dimaksimalkan. Adapun isu pembangunan di wilayah Jawa antara lain:

1. Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.
2. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).
3. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.
4. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan



gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.

5. Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.
6. Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).
7. Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.
8. Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

Selain isu pembangunan terdapat pemetaan potensi wilayah Jawa sebagai berikut:

1. Pertanian dan ketahanan pangan: Jawa berkontribusi 54,22 persen dalam produksi beras nasional, berkontribusi sekitar 36 persen dalam produksi tebu nasional, berkontribusi sekitar 51,86 persen dalam produksi jagung nasional, serta berkontribusi sekitar 21 persen dalam produksi perikanan nasional.
2. Potensi ketahanan energi Cadangan gas bumi 5.846,8 TSCF, dan minyak bumi 1.582,32 MMSTB. Potensi clean energy berupa energi surya (640,3 GWp), hidro (2 GW), panas bumi (7,9 GW), bioenergi (9,4 GW), bayu (39,05 GW), dan arus laut (0,4 GW).
3. Industri pengolahan: lebih dari 52 persen industri pengolahan di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, yang telah membentuk rantai nilai dan pasokan industri yang cukup lengkap.
4. SDM terampil: terdapat ratusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas.
5. Perkotaan: sebanyak 56 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan demand & supply, serta penyediaan labor/talent pool.
6. Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol) dan jalur kereta api, serta memiliki beberapa pelabuhan dan bandara utama.
7. Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area wilayah permukiman di Pulau Jawa.



8. Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan".

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Barisan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Pemerintahan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Gambar 2.112 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Sumber: Bappenas, 2025



Kabupaten Banyuwangi

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029)
- ✓ GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029)
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9 % (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)



Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029)



Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)
- ✓ Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029)
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)



Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029)
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)

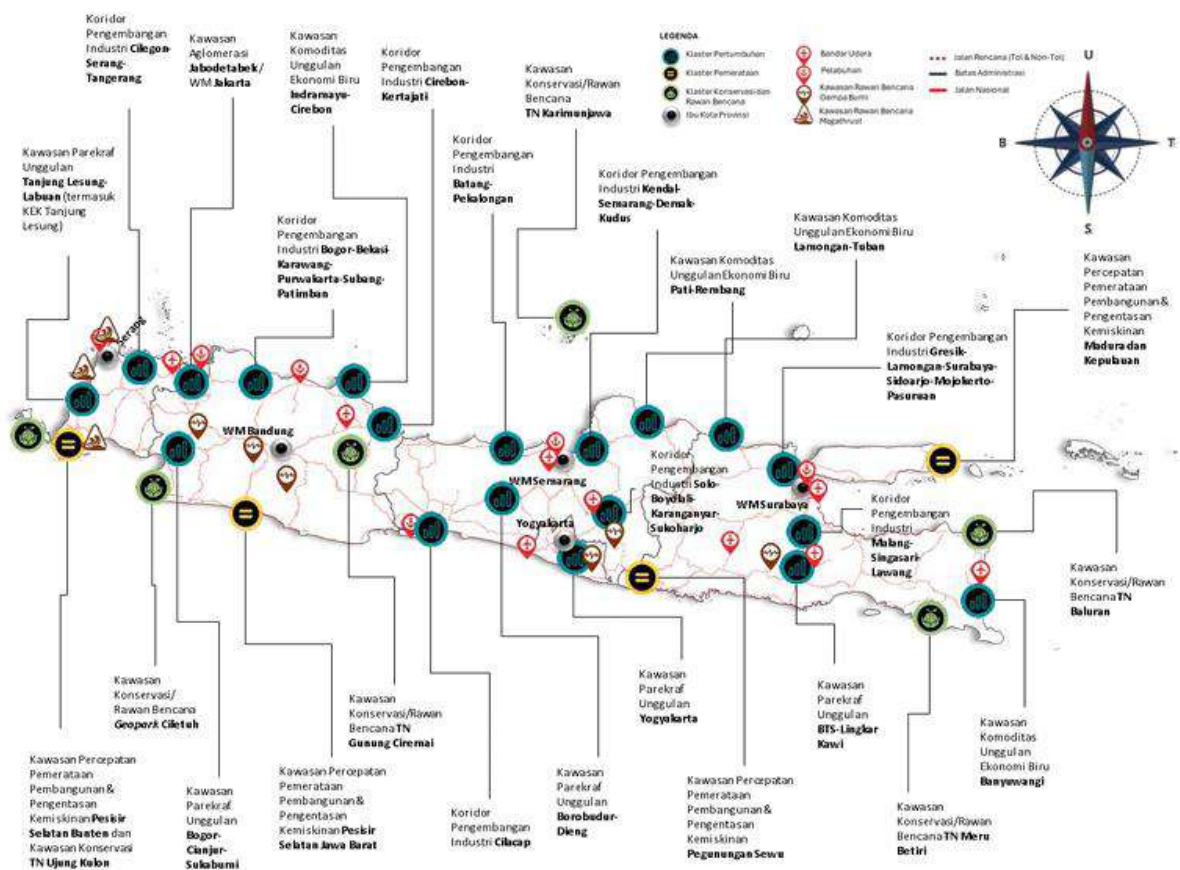
Gambar 2.113 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Bappenas, 2025



	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025 (Rata-rata 2025–2029)	6,9	56,5	85,4	5,09–5,62	6,68–7,68
2029 (2029)	7,9	55,1	122,4	4,51–5,27	3,79–4,79

Dengan target Pertumbuhan ekonomi 8%, Kabupaten Banyuwangi diarahkan sebagai pada pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi serta kawasan komoditas unggulan dengan fokus pada kawasan komoditas unggulan ekonomi biru dengan indikasi intervensi Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir sebagaimana pemetaan berikut:



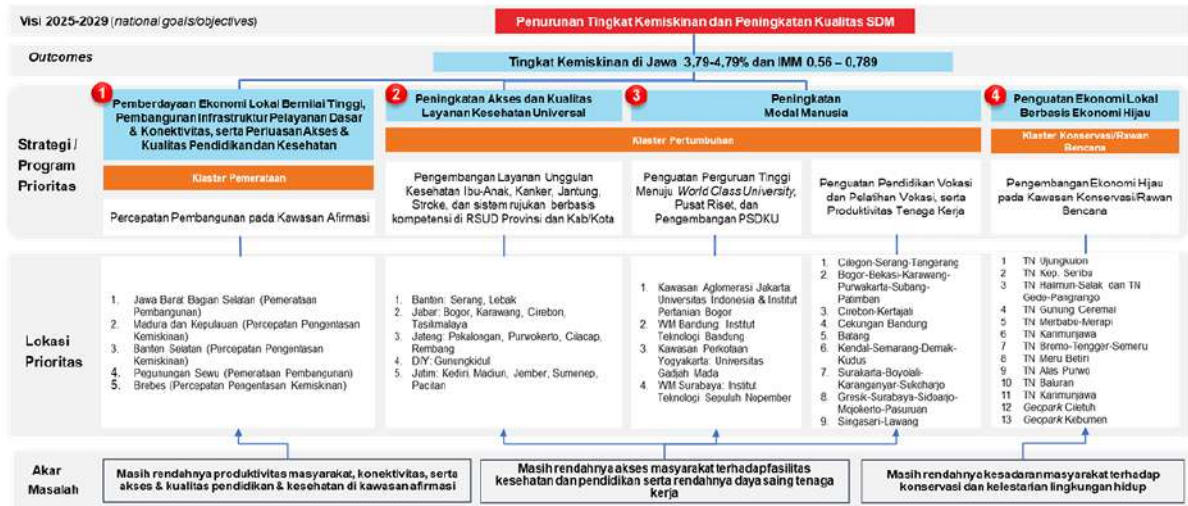
Gambar 2.114 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Jawa

Sumber: Bappenas, 2025

Selain itu Kabupaten banyuwangi dengan wilayahnya yang luas, memiliki wilayah cagar alam berupa Alas purwo yang pada RPJMN menjadi wilayah pengembangan ekonomi hijau pada kawasan konservasi / rawan bencana. Adapun kawasan lain sebagai wilayah pengembangan ekonomi hijau pada kawasan konservasi / rawan bencana adalah Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Situbondo dan Kab.



Bondowoso. Bentuk indikasi intervensi berupa Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.



Gambar 2.115 Alur Pikir Pembangunan Wilayah Jawa dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

Sumber: Bappenas, 2025

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan pada kewilayahan, dimana pembangunan kewilayahan berfokus pada pengembangan suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, serta kebutuhan wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Adapun Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan.



Gambar 2.116 Arah Pembangunan Wilayah Jawa Timur

Sumber: Bappenas, 2025



Adapun Kabupaten Banyuwangi diarahkan sebagai Kawasan Swasembada, Air, dan Energi Tapal Kuda serta kawasan komoditas unggulan ekonomi biru dengan prioritas intervensi sebagai berikut:

- Indikasi Intervensi Kawasan Swasembada, Air, dan Energi Tapal Kuda
 - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat
 - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
 - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
 - Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
 - pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
 - Pembangunan infrastruktur PLTP Ijen
 - Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
 - Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
 - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan Modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen



- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan Varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan Implementasi hasil riset pertanian
- Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur
- Indikasi Intervensi Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Banyuwangi
 - Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Muncar
 - Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Banyuwangi
 - Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
 - Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya, terutama pada komoditas lobster air laut yang memiliki nilai jual tinggi (High Value Comodity)
 - Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat
 - Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
 - Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
 - Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan



2.3.2.2 TELAAH RPJMD JAWA TIMUR TAHUN 2025-2030

RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 harus selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 untuk memastikan keterpaduan pembangunan antara pemerintah kota dan provinsi. Dalam konteks ini, arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 periode pertama menjadi acuan utama. Hal tersebut dikarenakan sejauh ini belum terdapat dokumen definitif rancangan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.

Setidaknya terdapat 7 isu strategis jangka panjang Provinsi Jawa Timur mengacu terhadap dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.
2. Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.
3. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal
4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal
7. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana
9. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Secara umum Visi jangka panjang Provinsi Jawa Timur 2025-2045 ialah **“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”** yang diterjemahkan kedalam 8 misi pembangunan jangka panjang yang meliputi:



1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Mengerucutkan terhadap pentahapan pembangunan tahun 2025-2029, maka berikut setidaknya fokus / arah pembangunan masing-masing misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi
4. Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan
5. Demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.
6. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
7. Peningkatan Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kestinambungan pembangunan.



Adapun isu strategis dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah
2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; Perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; Perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; Perluasan akses 04 fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; Pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.
3. Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan
6. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 merupakan dokumen penjabaran dari Visi, Misi dan Program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), maka ditetapkan pasangan Dr. (H.C. UA) Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Dr. H. Emil Elhasbiyanto Dardak, B.Bus., M.Sc. a.k.a sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai mana di atur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2030 berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan tahap pertama RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan arah dan tujuan Pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi



Kabupaten Banyuwangi

kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Visi Pembangunan RPJMD 2025-2030 Provinsi Jawa Timur adalah

Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

1 	Jatim Sejahtera Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan diantaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>8,90-9,40</td><td>6,40-6,90</td></tr></table> Rasio Gini <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>0,371-0,381</td><td>0,366-0,375</td></tr></table>	2025	2030	8,90-9,40	6,40-6,90	2025	2030	0,371-0,381	0,366-0,375
2025	2030										
8,90-9,40	6,40-6,90										
2025	2030										
0,371-0,381	0,366-0,375										
2 	Jatim Kerja Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st Century Skills) yang berdaya saing.	Terwujudnya Lapangan Kerja yang Berkualitas, Stabilitas Ekonomi, dan Peningkatan Kewirausahaan serta Pengembangan Ekonomi Kreatif didukung dengan pengembangan konektivitas antar wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (%) <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>4,80-5,20</td><td>5,10-6,90</td></tr></table>	2025	2030	4,80-5,20	5,10-6,90				
2025	2030										
4,80-5,20	5,10-6,90										
3 	Jatim Akses Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>3,90-4,49</td><td>3,62-4,28</td></tr></table>	2025	2030	3,90-4,49	3,62-4,28				
2025	2030										
3,90-4,49	3,62-4,28										
4 	Jatim Cerdas Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif, merata, berkeadilan, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>75,50-76,05</td><td>77,10-79,66</td></tr></table>	2025	2030	75,50-76,05	77,10-79,66				
2025	2030										
75,50-76,05	77,10-79,66										
5 	Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).		Indeks Modal Manusia (IMM) <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>0,61</td><td>0,72</td></tr></table>	2025	2030	0,61	0,72				
2025	2030										
0,61	0,72										
6 	Jatim Berkah - Amanah Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas serta terciptanya Masyarakat yang aman, tentram, tertib dan berdemokrasi dengan menjunjung nilai Pancasila	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>85,20-85,70</td><td>88,60-90,20</td></tr></table>	2025	2030	85,20-85,70	88,60-90,20				
2025	2030										
85,20-85,70	88,60-90,20										
7 	Jatim Agro Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan melalui tata niaga yang berkeadilan, akses optimal terhadap sarana produksi dan pembiayaan, serta dukungan infrastruktur pertanian guna memperkuat Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.	PDRB Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>0,75-1,5</td><td>0,75-1,5</td></tr></table>	2025	2030	0,75-1,5	0,75-1,5				
2025	2030										
0,75-1,5	0,75-1,5										
8 	Jatim Harmoni Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.	Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan dalam keberagaman melalui penguatan nilai-nilai kebhinekaan, kesetaraan gender, serta kemajuan seni, budaya, dan olahraga	Indeks Pembangunan Gender (IPG) <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>92,60 - 93,80</td><td>93,30 - 94,50</td></tr></table> Indeks Kesalehan Sosial (IKS) <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>75,90 - 77,40</td><td>78,40 - 79,90</td></tr></table>	2025	2030	92,60 - 93,80	93,30 - 94,50	2025	2030	75,90 - 77,40	78,40 - 79,90
2025	2030										
92,60 - 93,80	93,30 - 94,50										
2025	2030										
75,90 - 77,40	78,40 - 79,90										
9 	Jatim Lestari Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.	Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) <table><tr><th>2025</th><th>2030</th></tr><tr><td>74,00 - 74,17</td><td>74,41-74,59</td></tr></table>	2025	2030	74,00 - 74,17	74,41-74,59				
2025	2030										
74,00 - 74,17	74,41-74,59										

Gambar 2.117 Visi-Misi dan Sasaran Pembangunan Jawa Timur

Sumber: Bappenas, 2025



Untuk memudahkan pencapaian Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur, dari masing-masing Misi perlu untuk ditetapkan tujuan dan sasaran masing-masing misi. Tujuan diturunkan dari visi dan misi Pembangunan yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (Lima) Tahun. Tujuan mencakup beberapa fokus pembangunan sebagai berikut



Gambar 2.118 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Bappenas, 2025

2.3.2.3 TELAAH RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 – 2045

Penekanan telaah RPJPD Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan bahwa RPJMD selaras dengan arahan kebijakan pada Periode I 2025 – 2029 RPJPD Kabupaten Banyuwangi. Maka yang perlu diperhatikan yaitu Isu, Visi, Misi, Arah Kebijakan 2025 – 2029, dan sasaran Pokok. Berikut merupakan isu jangka panjang yang telah teridentifikasi pada proses penyusunan dokumen jangka panjang daerah:

1. Belum Optimalnya Pendidikan merata yang berkualitas yang berorientasi pada IT dan karakter.
2. Upaya Pemerataan kualitas sarana prasarana kesehatan yang mampu beradaptasi pada transisi epidemiologi
3. Jaminan sosial masyarakat rentan dengan ketepatan sasaran



4. Optimalisasi digitalisasi untuk layanan publik dan peningkatan ekonomi daya saing masyarakat
5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan cepat mendukung pelayanan berbasis IT
6. Terjaganya kepariwisataan alam berkelanjutan budaya dan kearifan lokal
7. Optimalisasi kualitas keluarga dan peran gender dalam pembangunan
8. Kualitas lingkungan hidup menurun berpengaruh terhadap meningkatnya resiko bencana
9. Pemanfaatan teknologi, minat serta ancaman perubahan iklim pada sektor pertanian dan perikanan
10. Stabilitas ketentraman dan ketertiban serta penguatan demokrasi sebagai ruang partisipasi publik

Visi Kabupaten Banyuwangi mengacu pada pandangan atau cita-cita jangka panjang yang diinginkan di masa mendatang di Tahun 2045. Visi Kabupaten Banyuwangi mencerminkan gambaran ideal dari masa depan yang diinginkan oleh seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Banyuwangi terutama masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Perumusan Visi Banyuwangi menjawab isu strategis yang akan menjadi persoalan di masa depan. maka visi Kabupaten Banyuwangi 2025-2045 adalah Banyuwangi Harmoni, Maju dan Berkelanjutan:

Tabel 2.77 Target Sasaran Utama Visi Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Visi	Nilai Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Satuan	Baseline	Target
					2025	2045
Banyuwangi Harmoni, Maju, Berkelanjutan	Harmony	Kemiskinan Menuju 0% Dan Ketimpangan Berkurang	Rasio Gini	Indeks	0,34 – 0,31	0,31 – 0,29
			Tingkat Kemiskinan	%	7,30 – 7,26	2,25 – 2,10
	Maju	Pendapatan Perkapita Meningkat	PDRB Perkapita	Rp	59,08 – 60,08	130,25 – 150,6
		Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM	Indeks	73,80 – 75,08	85,00 – 88,03
	Berkelanjutan	Kelestarian Lingkungan	IKLH	Indeks	73,5 – 74,5	75-77,5



Berdasarkan dari visi diatas, dan bercermin dari misi Nasional. Misi Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 8 misi yang terdiri atas: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Stabilitas Ketentraman dan Demokrasi; (5) Ketahanan Sosial budaya; (6) Kualitas Keluarga dan kesetaraan Perempuan; (7) Ketahanan Ekologi; (8) Pemenuhan Infrastruktur. Maka Misi Kabupaten Banyuwangi adalah:



Gambar 2.119 Misi RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2025-2045

Sumber: Bappenas, 2025

Tahapan pertama melalui penguatan ekosistem ke seluruh misi pembangunan. Tahapan kedua melalui percepatan transformasi untuk membangun aspek pembangunan yang siap menuju daya saing. Di tahapan ketiga Banyuwangi telah dapat bersaing pada level nasional maupun menjangkau upaya mendorong nasional dalam ekspansi global. Tahapan terakhir yaitu menciptakan banyuwangi yang harmon, maju dan berkelanjutan. Berikut merupakan pentahapan kebijakan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 yang dibagi kedalam 4 periode sebagai berikut.



Gambar 2.120 Tahapan Kebijakan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Sumber: Bappenas, 2025

Tahapan pertama (2025-2029) adalah Penguatan ekosistem transformasi pada tahap ini **transformasi sosial** dititiberatkan pada penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan penuntasan kemiskinan. **Transformasi ekonomi** berfokus pada penguatan nilai tambah ekonomi tinggi pada sektor utama penyanggah ekonomi kabupaten banyuwangi dengan inovasi dan produktivitas. **Transformasi tata kelola** melanjutkan penguatan birokrasi berkualitas dan digitalisasi layanan publik. Selain itu juga perbaikan kelembagaan dan kualitas ASN, penerapan manajemen risiko serta perencanaan, pengendalian pembangunan. **Stabilitas ketentraman ketertiban dan demokrasi** difokuskan pada penguatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban, Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan. **Ketahanan sosial dan budaya** mengedepankan perkuatan pada sosial budaya sebagai identitas diri. Optimalisasi nilai agama dan budaya untuk ketangguhan pembangunan kabupaten banyuwangi. **Membangun kualitas keluarga dan kesetaraan gender** berfokus pada peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, dan perlindungan pada perempuan terutama keberdayaan perempuan kepala rumah tangga. **Memantapkan ketahanan ekologi** berfokus pada Memperkuat Ekosistem Lingkungan hidup terutama dalam penataan regulasi perlindungan lingkungan hidup dan penaaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pemenuhan infrastruktur berkelanjutan berfokus pada peningkatan pada wilayah potensi ekonomi tinggi, infrastruktur pendukung terutama ketangguhan bencana.

(1) Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan

Pembangunan kedepan dituntut dengan perubahan yang besar di tatanan masyarakat secara mendasar, termasuk perubahan demografi,



perilaku masyarakat, teknologi, perubahan iklim dan pergeseran ekonomi. Secara mendasar pun akan terjadi pada tuntutan pembangunan pada transformasi sosial, maka dengan perubahan tersebut arah kebijakan transformasi sosial kabupaten banyuwangi diarahkan ke dalam tahapan pembangunan.

Tahun 2025 - 2029 Penguatan Ekosistem Layanan Dasar Berkeadilan

Pada periode 2025 hingga 2029, terjadi transformasi dalam penguatan ekosistem layanan dasar berkeadilan. Dengan munculnya teknologi yang semakin canggih dan inklusif, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi lebih merata dan mudah dijangkau bagi semua lapisan masyarakat. program-program inovatif diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh hak-hak dasar mereka. fondasi yang lebih kuat untuk masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

(2) Arah Kebijakan Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing

Adanya potensi pergeseran ekonomi sehingga kedepan diperlukan persiapan transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan perilaku masyarakat terhadap daya beli. Perekonomian pada nasional diarahkan pada hilirasi dan mengubah model ekonomi yang cenderung efisien dan produktif.

Tahun 2025 - 2029 Penguatan Nilai tambah ekonomi sektor unggulan

Pada periode 2025 hingga 2029, terjadi penguatan yang signifikan dalam nilai tambah ekonomi sektor unggulan di berbagai wilayah. Melalui strategi kolaboratif antara pemerintah, industri, dan lembaga riset, terjadi diversifikasi dan modernisasi yang berkelanjutan dalam sektor-sektor kunci seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur canggih. Investasi besar dalam inovasi dan infrastruktur membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu, penekanan pada pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan adaptif mendukung transformasi ekonomi yang inklusif, memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

(3) Arah Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berdampak



Tata Kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, akuntabel, didasarkan atas transparansi dan mematuhi regulasi yang telah diatur. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah untuk berkerja yang dapat berkontribusi dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas.

Tahun 2025 - 2029 Penguatan Birokasi Berkualitas dan Digitalisasi Layanan Publik

Pada periode tahun 2025 hingga 2029, terjadi penguatan yang signifikan dalam birokrasi yang berkualitas dan digitalisasi layanan publik. Dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, pemerintah mengimplementasikan reformasi birokrasi yang mendalam, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Proses administratif yang tadinya lambat dan rumit menjadi lebih cepat dan efektif, meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan publik memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi warga, serta memperluas jangkauan layanan di wilayah yang terpencil atau terpinggirkan.

(4) Arah Kebijakan Misi 4: Memantapkan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Dan Demokrasi

Untuk menciptakan transformasi sosial dan ekonomi, perlu di dukung stabilitas ketentraman dan ketertiban di wilayah, dan dorongan demokrasi yang dewasa. Untuk mendukung visi dilakukan melalui arah kebijakan.

Tahun 2025 - 2029 Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban, Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan

Pada rentang tahun 2025 hingga 2029, terciptanya suasana stabil dan penuh ketentraman serta ketertiban, dengan masyarakat yang secara aktif terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi yang kuat dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program-program pembangunan memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi mereka diakomodasi dengan baik, menciptakan lingkungan yang inklusif dan progresif bagi pertumbuhan bersama.

(5) Arah Kebijakan Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial dan Budaya

Ketahanan sosial budaya merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk menjaga dan melindungi identitas, nilai-nilai, norma, dan warisan budaya mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Penting untuk dicatat bahwa ketahanan sosial budaya adalah proses dinamis



yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya waktu. Masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai budaya mereka.

Tahun 2025 - 2029 Memperkuat Sosial Budaya sebagai Identitas Daerah

Pada periode 2025 hingga 2029, Banyuwangi memperkuat esensi sosial budayanya sebagai identitas yang membedakannya. Melalui program-program inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, warisan budaya lokal seperti tarian, musik, dan festival tradisional ditingkatkan nilai dan pemahamannya. Pemerintah setempat bekerja sama dengan pemangku kepentingan budaya untuk memperkuat infrastruktur seni dan kebudayaan, menjadikan Banyuwangi tujuan utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang kaya dan autentik. Dengan memperkuat dan merayakan keberagaman budaya yang unik, Banyuwangi tidak hanya mempertahankan identitasnya, tetapi juga memperkokoh ikatan antargenerasi, antar umata beragama, antar suku serta meningkatkan kebanggaan kolektif di antara penduduknya.

(6) Arah Kebijakan Misi 6: Membangun Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender

Keluarga yang harmonis dan mendukung kesetaraan perempuan adalah lingkungan di mana semua anggota keluarga diperlakukan dengan adil, dihargai, dan memiliki kesempatan yang setara dalam segala hal. Keluarga yang harmonis menekankan komunikasi terbuka dan jujur antara semua anggota keluarga.

Tahun 2025 - 2029 Memperkuat Kualitas Keluarga dan Berdayanya Perempuan

Pada tahun 2025 hingga 2029, Banyuwangi memfokuskan upayanya untuk memperkuat kualitas keluarga dan memberdayakan perempuan. pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi, membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan setara, Banyuwangi bukan hanya memperkuat kualitas hidup keluarga, tetapi juga menggali potensi penuh perempuan sebagai agen perubahan yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan bersama.

(7) Arah Kebijakan Misi 7: Memantapkan Ketahanan Ekologi Untuk Keseimbangan Pembangunan



Lingkungan hidup yang berkualitas adalah suatu kondisi di mana udara, air, dan tanah bersih dari polusi yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Lingkungan ini, sumber daya alam yang dikelola dengan bijaksana untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Akses yang memadai terhadap air bersih, sanitasi, dan energi terbarukan menjadi norma, sementara pengelolaan limbah dilakukan secara efisien. Kesesuaian lingkungan dengan kebutuhan manusia tercermin dalam adanya ruang terbuka hijau, fasilitas umum, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Lingkungan hidup yang berkualitas juga mencerminkan komitmen pada keadilan sosial dan inklusi, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya tanpa adanya diskriminasi. Dalam lingkungan ini, prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan menjadi panduan utama untuk menciptakan dunia yang seimbang dan lestari bagi generasi saat ini dan mendatang.

Tahun 2025 - 2029 Memperkuat Ekosistem Lingkungan hidup

Pada periode tahun 2025 hingga 2029, Banyuwangi menekankan pentingnya memperkuat ekosistem lingkungan hidup sebagai kerangka implelementasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang progresif, langkah-langkah strategis diterapkan untuk menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi pencemaran lingkungan, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pendidikan lingkungan yang ditingkatkan, infrastruktur pengelolaan sampah, program rehabilitasi ekosistem, dan promosi gaya hidup berkelanjutan menjadi fokus utama, memastikan bahwa Banyuwangi tetap menjadi tempat yang lestari dan tahan bencana.

(8) Arah Kebijakan Misi 8: Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan mencakup infrastruktur yang dirancang dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan berfokus pada keberlanjutan. Ini melibatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang memenuhi standar keamanan, efisiensi energi, dan manajemen limbah. Contoh sarana berkualitas dan ramah lingkungan termasuk bangunan hijau dengan desain energi-efisien, sistem transportasi berbasis energi terbarukan, dan instalasi sanitasi yang meminimalkan dampak pada sumber daya air. Selain itu, prasarana yang berkualitas juga mencakup pengelolaan taman kota, penanaman pohon, dan



pelestarian ruang terbuka hijau untuk mendukung biodiversitas dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan binaan yang berkontribusi positif terhadap kesehatan manusia, mengurangi emisi karbon, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Tahun 2025 - 2029 Pemenuhan infrastruktur yang merata

Pada rentang tahun 2025 hingga 2029, langkah-langkah signifikan dalam pemenuhan infrastruktur yang merata di seluruh wilayahnya. Melalui komitmen pemerintah yang kuat dan investasi strategis, jaringan transportasi, diperluas dan diperbaharui untuk memastikan akses yang lebih baik bagi penduduk pedesaan dan perkotaan. Selain itu, investasi dalam penyediaan perumahan layak, air bersih, sanitasi, dan pangan juga dipercepat, menjadikan layanan dasar ini tersedia bagi semua warga Banyuwangi dengan memperkuat infrastruktur secara merata.

2.3.2.4 TELAAH RTRW KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 – 2044

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yakni:

“Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM bersinergi dengan pengembangan permukiman, industri, perikanan, dan infrastruktur yang berkelanjutan”

Tujuan penataan ruang Kabupaten Banyuwangi disusun dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi daerah, serta visi pembangunan yang ingin diwujudkan di masa depan. Dengan dasar tersebut, berbagai isu strategis dirumuskan sebagai pedoman dalam mengarahkan pemanfaatan ruang yang optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan antara lain :

a. Potensi

Potensi pengembangan wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi adalah :

- Pelabuhan yang terletak di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi merupakan pelabuhan utama yang melayani penyebrangan, baik orang maupun barang, dari dan ke pulau Bali. Pelabuhan Ketapang, juga menunjang pelabuhan Tanjungwangi, pelabuhan yang juga berada di Kecamatan Kalipuro, yang merupakan penunjang pelayaran, alih muat peti kemas, dan pelabuhan general cargo. Selain itu, juga menunjang alur pelayaran dengan tujuan pelabuhan utama dalam negeri, maupun luar negeri **(Pusat Penyebrangan Pulau Jawa-Bali)**



- Kabupaten Banyuwangi diarahkan menjadi PKW untuk menunjang kegiatan skala lokal. PKW di Kabupaten Banyuwangi dengan pusat di perkotaan Banyuwangi memiliki fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata **(Banyuwangi sebagai PKW)**
- Peningkatan sektor industri dengan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi kawasan industri, sentra industri kecil, dan sentra industri menengah **(Rencana Pengembangan Industri)**.
- Kawah Ijen menjadi salah satu wilayah pengembangan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa alam dan termasuk dalam wisata andalan di Kabupaten Banyuwangi. Kawah Ijen merupakan kawasan hutan konservasi berupa cagar alam dan taman wisata Gunung Berapi yang terletak di Kecamatan Licin **(Potensi Pengembangan Wisata Ijen)**
- Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam Kawasan strategi agropolitan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi untuk mengembangkan Kawasan agropolitannya menjadi wilayah pengembangan pariwisata baik dari sektor pertanian maupun perikanan dengan Kawasan minapolitan yang berada di Kecamatan Muncar **(Potensi Pengembangan Agrowisata)**
- Zona inti kawasan minapolitan Kabupaten Banyuwangi terletak di Kecamatan Muncar. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, terintegrasi dengan pengembangan program Kawasan Minapolitan Muncar. Pengembangan kawasan budidaya perikanan di Kecamatan Muncar meliputi pengembangan budidaya laut yang meliputi pengembangan budidaya karamba jaring apung, budidaya rumput laut dan budidaya ikan hias. Kawasan minapolitan muncar selain menjadi pengembangan budidaya laut direncanakan pula menjadi kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan **(Pengembangan Minapolitan Muncar-Srono di Kabupaten Banyuwangi)**
- Pembangunan sistem jaringan jalan nasional ruas jalan terusan meliputi rencana jalan terusan antara Tol Probolinggo Banyuwangi - Bandara Udara Banyuwangi - Tol Jember Banyuwangi berada di Kecamatan Glenmore, Kecamatan Genteng, Kecamatan Sempu, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Kabat, Kecamatan Banyuwangi, dan Kecamatan Giri **(Rencana Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi)**
- Rencana jalan lintas selatan merupakan jalan nasional kolektor primer yang direncanakan melintasi Glonggong-Pacitan-Panggul-Durenan-Tulungagung-Blitar-Kepanjen-Turen-Lumajang-Wonorejo-Jember-Gentengkulon-Jajag-Benculuk-Rogojampi-Banyuwangi **(Rencana Jalan Lintas Selatan)**



- Pembangunan rencana sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan pengumpul juga terdapat di Pelabuhan Tanjung Wangi, Kabupaten Banyuwangi (**Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Wangi**)

b. Permasalahan

Sedangkan permasalahan mengenai penataan ruang di wilayah Kabupaten Banyuwangi antara lain :

- Perkembangan permukiman di Kabupaten Banyuwangi juga menjadi isu dalam kebijakan penataan ruang pengembangan kawasan peruntukan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis serta mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Banyuwangi (**Perkembangan dan Pola Permukiman**)
- Perlindungan bagi kawasan konservasi di Kabupaten yang meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan lindung geologi, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove (**Perlindungan Kawasan Konservasi**)
- Perubahan fungsi area Lahan sawah beririgasi menjadi peruntukan lain (**Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**)
- Kabupaten Banyuwangi masuk ke dalam kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan kerentanan gerakan tanah, kawasan rawan banjir, kawasan rawan letusan gunung api, dan kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami (**Perlindungan Kawasan Rawan Bencana**)

c. Urgensi Penanganan

Adapun urgensi penanganan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi dititikberatkan pada poin-poin berikut :

- Pengembangan dan peningkatan fungsi pelabuhan guna meningkatkan *multi player effect* dari kegiatan pelabuhan pada sektor-sektor terdampak. Pelabuhan yang terletak di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi merupakan pelabuhan utama yang melayani penyebrangan, baik orang maupun barang, dari dan ke pulau Bali. Pelabuhan Ketapang, juga menunjang pelabuhan Tanjungwangi, pelabuhan yang juga berada di Kecamatan Kalipuro, yang merupakan penunjang pelayaran, alih muat peti kemas, dan pelabuhan general cargo. Selain itu, juga menunjang alur pelayaran dengan tujuan pelabuhan utama dalam negeri, maupun luar negeri.
- Pengoptimalan dan pengembangan infrastruktur penunjang fungsi Banyuwangi sebagai fungsi PKW (fungsi pusat permukiman dan fungsi tematis PKW). Kabupaten Banyuwangi diarahkan menjadi PKW untuk menunjang kegiatan skala lokal. PKW di Kabupaten Banyuwangi dengan pusat di perkotaan Banyuwangi memiliki fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.



- Peningkatan sektor industri dengan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi kawasan industri, sentra industri kecil, dan sentra industri menengah.
- Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kawah Ijen menjadi salah satu wilayah pengembangan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa alam dan termasuk dalam wisata andalan di Kabupaten Banyuwangi. Kawah Ijen merupakan kawasan hutan konservasi berupa cagar alam dan taman wisata Gunung Berapi yang terletak di Kecamatan Licin.
- Optimalisasi fungsi Kabupaten Banyuwangi dalam sistem agropolitan pada *cluster* pengembangan agro yang diamanatkan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam Kawasan strategi agropolitan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi untuk mengembangkan Kawasan agropolitannya menjadi wilayah pengembangan pariwisata baik dari sektor pertanian maupun perikanan dengan Kawasan minapolitan yang berada di Kecamatan Muncar.
- Peningkatan dan optimalisasi kawasan Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi. Zona inti kawasan minapolitan Kabupaten Banyuwangi terletak di Kecamatan Muncar. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, terintegrasi dengan pengembangan program Kawasan Minapolitan Muncar. Pengembangan kawasan budidaya perikanan di Kecamatan Muncar meliputi pengembangan budidaya laut yang meliputi pengembangan budidaya karamba jaring apung, budidaya rumput laut dan budidaya ikan hias. Kawasan minapolitan muncar selain menjadi pengembangan budidaya laut direncanakan pula menjadi kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan.
- Pembangunan sistem jaringan jalan nasional ruas jalan terusan meliputi rencana jalan terusan antara Tol Probolinggo Banyuwangi - Bandara Udara Banyuwangi - Tol Jember Banyuwangi berada di Kecamatan Glenmore, Kecamatan Genteng, Kecamatan Sempu, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Kabat, Kecamatan Banyuwangi, dan Kecamatan Giri.
- Rencana jalan lintas selatan merupakan jalan nasional kolektor primer yang direncanakan melintasi Glonggong-Pacitan-Panggul-Durenan-Tulungagung-Blitar-Kepanjen-Turen- Lumajang-Wonorejo-Jember-Gentengkulon-Jajag-Benculuk-Rogojampi- Banyuwangi.
- Pembangunan rencana sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan pengumpul juga terdapat di Pelabuhan Tanjung Wangi, Kabupaten Banyuwangi.
- Perkembangan permukiman di Kabupaten Banyuwangi juga menjadi isu dalam kebijakan penataan ruang pengembangan kawasan peruntukan



budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis serta mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

- Perlindungan bagi kawasan konservasi di Kabupaten yang meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan lindung geologi, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Banyuwangi disusunnya rencana pembangunan yang mencakup struktur ruang, pola ruang, serta kawasan strategis yang menjadi prioritas pengembangan. Dalam proses perencanaan, terdapat irisan periodisasi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044 terutama pada periodisasi yang KEDUA. Keselarasan antara keduanya menjadi kunci dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan selaras dengan visi jangka panjang daerah, sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah sinkronisasi antara program prioritas RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan RTRW Tahun 2024–2044 terutama pada periodisasi kedua.

Tabel 2.78 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024–2044

PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
Program Promosi Penanaman Modal	
Program Pelayanan Penanaman Modal	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyediaan jalur evakuasi bencana Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana
Program Penyelenggaraan Jalan	Perwujudan sistem jaringan jalan
Program Perencanaan Tenaga Kerja	
Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Program pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata
	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan
	Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan
	Program perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya
	Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Perwujudan Kawasan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Perwujudan Kawasan Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Perwujudan Kawasan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	



PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Perwujudan Kawasan Perikanan Budidaya
Program Peningkatan Dayatarik Destinasi Pariwisata	Program Perwujudan Kawasan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Program Perwujudan Kawasan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Perwujudan Kawasan Pariwisata
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
Program Pengembangan Umkm	
Program Penataan Bangunan Gedung	Program Perwujudan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Ekspor	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
Program Penyelenggaraan Jalan	Program Perwujudan sistem jaringan jalan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Program Perwujudan sistem jaringan jalan
Program Perekonomian Dan Pembangunan	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
Program Hubungan Industrial	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
	Program Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Perwujudan sistem drainase
Program Penanganan Bencana	Program Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana
Program Penanggulangan Bencana	Program Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perwujudan Kawasan Lindung
	Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Perwujudan Kawasan Lindung
	Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Program Perwujudan Kawasan Lindung
	Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Program Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Program Perwujudan sistem jaringan persampahan
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
Program Hubungan Industrial	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	



PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM)
Program Pengembangan Perumahan	Program Perwujudan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Program Perwujudan Kawasan Permukiman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
Program Rehabilitasi Sosial	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
Program Perlindungan Perempuan	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	
Program Pengembangan Kebudayaan	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organ Isasi Kemasyarakatan	
Program Pemberdayaan Sosial	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Program Penempatan Tenaga Kerja	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
Program Pengelolaan Pendidikan	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Program Pengelolaan Pendidikan	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
Program Pembinaan Perpustakaan	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
Program Pengendalian Penduduk	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	
Program Aplikasi Informatika	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	



PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029	INDIKASI PROGRAM RTRW PERIODISASI KEDUA TAHUN 2025 - 2029
Program Pengelolaan Arsip	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Program Kepegawaian Daerah	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Program Pendaftaran Penduduk	
Program Pencatatan Sipil	
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2025

Berdasarkan hasil sinkronisasi, sejumlah program prioritas RPJMD 2025–2029 telah selaras dengan indikasi program utama RTRW periode kedua, khususnya yang berbasis spasial dan berorientasi pada pembangunan fisik kawasan, seperti pengembangan jaringan jalan, sistem sumber daya air dan drainase, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengendalian lingkungan dan kebencanaan, serta pengembangan kawasan pariwisata. Program pada kelompok ini telah memiliki koridor, lokus, atau kawasan yang jelas dalam RTRW, sehingga keterpaduan antara perencanaan dan implementasi dapat ditelusuri dengan baik. Di sisi lain, masih terdapat program RPJMD yang belum padan karena bersifat non-spasial (pengembangan SDM, tata kelola, pelayanan publik, dan penguatan kelembagaan) atau parsial yakni program layanan/ekonomi yang berpotensi dispasialisasi tetapi belum mencantumkan lokusnya secara eksplisit.

Perbedaan ini merupakan konsekuensi langsung dari mandat dan karakter dokumen. RTRW berfungsi menetapkan struktur dan pola pemanfaatan ruang serta infrastruktur fisik jangka panjang, sementara RPJMD mengarahkan pembangunan lintas sektor (fisik dan non-fisik) dalam jangka waktu menengah atau lima tahunan. Akibatnya, program non spasial tidak selalu relevan atau perlu untuk ditautkan ke RTRW. Dampaknya, program fisik yang sinkron memperoleh kepastian kesesuaian tata ruang serta dasar penganggaran yang lebih kuat, sedangkan program non-spasial relatif sulit dipetakan lokasinya dan lebih menantang untuk dimonitor berbasis wilayah.



Dengan demikian, perbedaan fokus antara RPJMD dan RTRW tidak menjadi masalah substantif, melainkan konsekuensi dari mandat yang berbeda. Hasil sinkronisasi menunjukkan bahwa seluruh program prioritas yang bersifat spasial telah terakomodasi dalam RTRW, memberikan landasan penataan ruang yang memadai untuk pelaksanaan periode 2025–2029.

2.3.2.5 TELAHAH KLHS KABUPATEN BANYUWANGI 2025 - 2029

Sebagai upaya untuk memastikan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Hasil dari penelaahan ini pada akhirnya akan menjadi dasar integrasi rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029, terdapat setidaknya 22 isu pembangunan berkelanjutan yang memiliki pengaruh pada keberlangsungan pembangunan secara umum di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Isu-isu yang secara umum terbagi ke dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan tersebut juga memiliki kemungkinan besar akan mempengaruhi dinamika pembangunan Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun ke depan. Berikut merupakan daftar isu pendek (shortlist issue) KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029:

**Tabel 2.79 Isu pendek (shortlist issue) KLHS RPJMD
Kabupaten Banyuwangi 2025-2029**

NO	ISU	PILAR
1	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	SOSIAL
2	Penguatan kesehatan mental masyarakat	SOSIAL
3	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan	SOSIAL
4	Kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	SOSIAL
5	Peningkatan kualitas dan ketersediaan pangan	SOSIAL
6	Pengendalian Bencana Sosial	SOSIAL
7	Akses pelayanan Sarana dan air bersih yang layak	LINGKUNGAN
8	Peningkatan tata kelola lingkungan	LINGKUNGAN
9	Kerentanan terhadap bencana alam	LINGKUNGAN
10	Penanganan persampahan dan limbah	LINGKUNGAN
11	Pengendalian dan adaptasi perubahan iklim	LINGKUNGAN
12	Pengendalian alih fungsi lahan	LINGKUNGAN
13	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kawasan Pesisir	LINGKUNGAN
14	Kemudahan Pembiayaan untuk usaha kecil menengah	EKONOMI
15	Optimalisasi Pengembangan Potensi Ekonomi dan ketersediaan infrastruktur	EKONOMI
16	Peningkatan tata kelola pemerintahan	HUKUM & TATA KELOLA
17	Pemerataan Pelayanan Jaringan telekomunikasi	HUKUM & TATA KELOLA

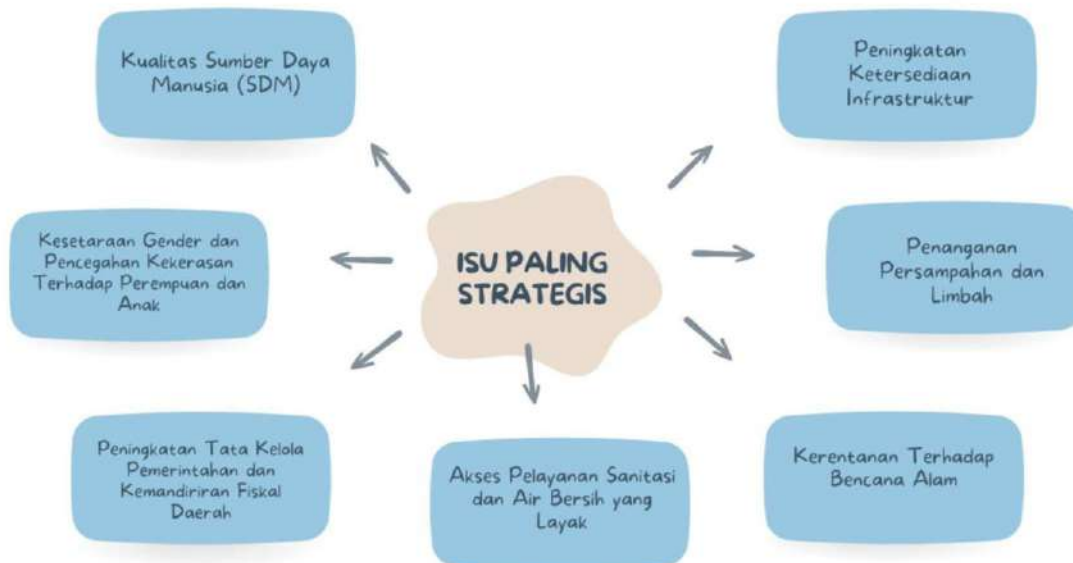
Sumber : DLH Kabupaten Banyuwangi, 2025

Sebanyak 17 daftar pendek isu tersebut lantas dibobotkan dengan pertimbangan prioritas daerah sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mencakup kriteria Keterkaitan dengan



Kabupaten Banyuwangi

Karakteristik Wilayah, Tingkat Pentingnya Potensi Dampak, Keterkaitan antar Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan, Keterkaitan dengan Materi Muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program, serta Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Keterkaitan dengan KLHS RTRW/ RPJPD Kab. Banyuwangi hingga memunculkan 7 Isu Paling Strategis yaitu:



Gambar 2.121 Isu Paling Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029

Sumber: DLH Kabupaten Banyuwangi, 2025

Amanat *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terbaru untuk kabupaten/kota, sebagaimana tertera dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2021-2024, adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai target SDGs. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melokalisasi SDGs dan memastikan bahwa pembangunan daerah inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, komitmen ini diwujudkan melalui **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)** yang mengintegrasikan **17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator** ke dalam perencanaan pembangunan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berikut ini adalah isu SDGs/TPB sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi SDGs/TPB Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2030.

1) Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan

Fokus pada penghapusan kemiskinan, penyediaan perlindungan sosial, dan penguatan ketahanan masyarakat miskin. Targetnya menurunkan angka kemiskinan menjadi sekitar 3% di tahun 2030, memperluas kepesertaan



jaminan kesehatan hingga 98%, serta memastikan penanganan korban bencana 100%.

2) Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan

Menjamin ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan pertanian berkelanjutan. Target 2030 meliputi penurunan prevalensi stunting balita hingga 14%, wasting <6%, peningkatan skor pola pangan harapan, dan penguatan keberlanjutan lahan pertanian.

3) Tujuan 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Menurunkan angka kematian ibu hingga 87 per 100.000 KH, neonatal menjadi 4 per 1.000 KH, serta mengendalikan penyakit menular dan tidak menular. Vaksinasi nasional dipertahankan >90%, sedangkan tenaga kesehatan ditingkatkan secara signifikan.

4) Tujuan 4 – Pendidikan Berkualitas

Menjamin akses pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi 100% pada 2030. Fokus pada pemerataan gender, peningkatan APK PAUD, dan keterampilan TIK bagi remaja.

5) Tujuan 5 – Kesetaraan Gender

Menjamin partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, mengurangi kekerasan terhadap perempuan/anak, serta memperluas akses layanan KB aktif hingga 79% di 2030.

6) Tujuan 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak

Meningkatkan akses air minum layak hingga 96% dan sanitasi hingga 86% di 2030. Kualitas air dikelola melalui indeks kualitas air yang terus ditingkatkan, serta penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu.

7) Tujuan 7 – Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin rasio elektrifikasi 100% dan memperkuat bauran energi terbarukan.

8) Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Menargetkan pertumbuhan PDB per kapita >5% di 2030, menurunkan pengangguran terbuka hingga 2,5%, memperkuat UMKM, serta mendorong pariwisata berkelanjutan dengan peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara.

9) Tujuan 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Meningkatkan infrastruktur jalan mantap hingga 92,5%, pertumbuhan industri pengolahan >9%, serta akses internet dan broadband universal 100%.

10) Tujuan 10 – Berkurangnya Kesenjangan

Menurunkan Gini Ratio menjadi 0,28, menghapus desa tertinggal, dan memperluas perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

11) Tujuan 11 – Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Menangani 100% kawasan kumuh, meningkatkan akses hunian layak hingga 99%, meningkatkan ruang terbuka hijau, serta mengelola limbah padat perkotaan hingga 100% dengan kualitas udara lebih baik.

12) Tujuan 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Mengurangi limbah pangan, meningkatkan pengelolaan limbah B3, serta mengurangi produksi sampah melalui daur ulang dan reuse.

13) Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim

Meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan bencana, serta penanganan darurat bencana 100%.



14) Tujuan 14 – Ekosistem Laut

Meningkatkan pengelolaan laut berkelanjutan, perlindungan nelayan kecil 100%, serta pemberantasan IUU fishing.

15) Tujuan 15 – Ekosistem Daratan

Menjaga tutupan lahan 61,59%, meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup >71, serta menekan perdagangan ilegal satwa dilindungi.

16) Tujuan 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh

Mengurangi kejahatan kekerasan, memperkuat akuntabilitas pemerintahan (nilai SAKIP “A”), meningkatkan keterwakilan politik perempuan di DPRD, serta menjamin 100% anak memiliki akta kelahiran.

17) Tujuan 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat kerja sama multipihak, meningkatkan investasi hingga 8%, serta memastikan akses internet 100% sebagai sarana mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.3.2.6 ISU STRATEGIS KABUPATEN BANYUWANGI

Perumusan isu strategis Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui 3 tahapan meliputi telaah isu pembangunan atau identifikasi awal, Pemataan isu dan pendalaman dan penyepakatan isu strategis. Pada tahap identifikasi awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa sumber yaitu hasil evaluasi kinerja pembangunan pada periode pembangunan sebelumnya, telaah mandatori yang relevan seperti Rantek RPJMN, Rantek RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW dan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan yang ketiga adalah melihat isu berkenaan dengan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis pada ketiga sumber tersebut diseleksi atau merujuk pada agenda pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029:

1. Sumber Daya Manusia yang Belum Berdaya Saing

Daya saing kualitas sumber daya manusia berdasarkan konsep pembangunan manusia didukung oleh kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. Perluasan pendidikan berkualitas di Kabupaten Banyuwangi menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai program dan inisiatif telah diluncurkan untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain perluasan fokus utama yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada siswa dan pergeseran mindset dalam pelaksanaan pendidikan formal juga turut mempengaruhi daya saing SDM di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini terjadi fenomena orang tua lebih mengedepankan bersekolah pada sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Karena secara kualitas pengajaran dan sarana prasarana lebih maju. Peran keluarga juga turut menyumbang besar dalam karakter dari siswa. Maka tidak cukup hanya berfokus dari penguatan sekolah, tapi mindset lebih luas di dalam peranan keluarga dalam pendidikan. saat ini banyak Pendidikan sering kali lebih berfokus pada pencapaian akademis tanpa cukup menekankan pada pembentukan karakter



dan etika kerja yang kuat. Akibatnya, lulusan sekolah dan pendidikan tinggi sering kali kurang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang sesungguhnya. Pergeseran mindset ini menyebabkan banyak siswa dan lulusan yang hanya berorientasi pada nilai dan ijazah, bukan pada pengembangan keterampilan praktis dan softskill yang dibutuhkan di pasar kerja. Untuk meningkatkan daya saing SDM di banyuwangi, perlu adanya reformasi dalam sistem pendidikan yang lebih menekankan pada pengembangan karakter, etika kerja, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi termasuk penurunan stunting untuk mempersiapkan generasi emas. Tidak kalah penting yaitu Akses kesehatan di Kabupaten Banyuwangi menjadi isu strategis yang semakin penting seiring dengan perkembangan daerah dan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat infrastruktur kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang tersebar di berbagai kecamatan. Pemerintah daerah berupaya memastikan fasilitas kesehatan tersebut dilengkapi dengan peralatan medis yang modern serta tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Upaya ini bertujuan agar masyarakat Banyuwangi dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

Kabupaten Banyuwangi juga fokus pada peningkatan kualitas sistem kesehatan melalui implementasi teknologi informasi dan program kesehatan berbasis masyarakat. Program-program promotif dan preventif, seperti posyandu dan kampanye kesehatan, diintensifkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan sistem kesehatan yang lengkap dan berkualitas, Kabupaten Banyuwangi berupaya menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi seluruh warganya.

2. Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan melalui Perluasan Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran dan Terintegrasi

Pemerintah daerah berfokus pada penyempurnaan sistem pendataan untuk mengidentifikasi secara akurat kelompok-kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan, seperti keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Melalui penggunaan teknologi informasi dan data yang terintegrasi, program bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi duplikasi penerima manfaat dan bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Selain itu, integrasi program perlindungan sosial dengan berbagai layanan tambahan menjadi prioritas untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dan holistik. Pemerintah daerah mengkombinasikan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Misalnya, penerima bantuan sosial diberikan akses ke program pelatihan kerja untuk meningkatkan



kemandirian ekonomi mereka, serta akses ke layanan kesehatan gratis atau bersubsidi untuk memastikan mereka tetap sehat dan produktif.

3. Kurangnya Peranan sosial dalam Pembangunan

Kurangnya peranan sosial dalam pembangunan, terutama pada aspek partisipasi sosial, kohesi sosial, dan kelembagaan inklusif, mengindikasikan bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya inklusif, belum memperkuat solidaritas antarwarga, serta belum menata kelembagaan yang mampu mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat. Permasalahan Aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif masih rendah karena kurangnya edukasi dan akses informasi. Kohesi sosial untuk mewujudkan tingkat keterikatan, solidaritas, dan rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. Dalam konteks pembangunan, kohesi sosial menjadi fondasi penting agar setiap kelompok masyarakat dapat bekerja sama, saling percaya, dan berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi oleh pendekatan sosial berpotensi memunculkan kesenjangan, menurunnya rasa kebersamaan, dan rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Perhatian juga terhadap peran serta dalam pembangunan seperti terkait dalam peran serta perempuan dalam keterwakilan pada parlemen, keterwakilan perempuan dalam forum pembangunan, serta proporsi perempuan pada birokrasi. Selain itu, penguatan perempuan dalam akses ekonomi khususnya pada perempuan dengan peran sebagai kepala keluarga sekaligus dalam rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi perlu menjadi perhatian karena sebagai upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan perempuan terhadap kekerasan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan di Kabupaten Banyuwangi karena angka kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang signifikan sehingga diperlukannya upaya pencegahan dan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Banyuwangi.

4. Keterhubungan produktivitas pertanian terhadap cadangan pangan dan peningkatan nilai tambah

Produktivitas pertanian merupakan faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing sektor pertanian. Peningkatan produktivitas tidak hanya berpengaruh pada ketersediaan cadangan pangan untuk memenuhi kerawanan pangan, tetapi juga berhubungan erat dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirasasi hasil pertanian, diversifikasi produk, dan penguatan rantai pasok. Keterhubungan antara produktivitas pertanian, cadangan pangan, dan peningkatan nilai tambah belum optimal. Hal ini menyebabkan ketahanan pangan masih rentan terhadap gangguan produksi, harga pangan berfluktuasi, dan potensi ekonomi dari sektor pertanian belum dimaksimalkan.



Sebagai upaya dalam menjamin kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dan berkelanjutan. Ketahanan pangan daerah dapat dicapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Kabupaten Banyuwangi dengan potensi pertanian yang sangat besar mulai dari pertanian pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan maupun pada perikanan tangkap maupun budidaya sehingga sangat menunjang dalam pencapaian ketahanan pangan. Peningkatan produktivitas pada sektor-sektor pertanian dapat menciptakan pemenuhan kebutuhan pangan daerah serta pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional khususnya wilayah Jawa Timur.

5. Menjaga Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemerintah daerah berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan manajerial, serta etika kerja yang tinggi. Selain itu, penilaian kinerja berbasis meritokrasi diterapkan untuk memastikan bahwa setiap ASN memiliki motivasi dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan aparatur yang profesional, diharapkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dapat meningkat, serta tercipta budaya kerja yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Layanan publik yang cepat dan berkualitas juga menjadi fokus utama, dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu kuncinya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan sistem pelayanan terpadu berbasis digital, seperti aplikasi pelayanan online dan sistem e-government, untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, pengembangan layanan publik yang ramah dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan marginal, terus diupayakan.

6. Akses infrastruktur ekonomi dan pelayanan Dasar (sanitasi dan air bersih yang aman belum merata.

Akses terhadap infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pasar, dan jaringan transportasi, serta pelayanan dasar berupa sanitasi dan air bersih yang aman, merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun beberapa permasalahan yaitu Pembangunan infrastruktur ekonomi belum sepenuhnya selaras dengan pengembangan kawasan pariwisata, industri kreatif, dan pertanian terpadu.

Sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, maka Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan sanitasi dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang aman. Melalui pemenuhan pelayanan sanitasi dan air bersih yang aman dapat menunjang tingkat kesehatan masyarakat khususnya dalam upaya penurunan angka stunting, gizi buruk, serta ibu hamil beresiko. Selain itu, dalam upaya



peningkatan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Banyuwangi, pemenuhan pelayanan sanitasi dan akses air minum (air bersih aman) adalah hal yang perlu menjadi prioritas pembangunan.

7. Kerentanan terhadap Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup global, termasuk isu pengelolaan sampah dan sumber daya air, menjadi tantangan krusial yang juga dirasakan di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi. World Bank memproyeksikan bahwa timbunan sampah global akan meningkat sebesar 70% pada tahun 2050, mencapai 3,4 miliar ton per tahun. Hal ini didorong oleh pesatnya pertumbuhan urbanisasi, populasi, dan pembangunan ekonomi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi negara-negara berpendapatan rendah termasuk Indonesia adalah keterbatasan pembiayaan dan infrastruktur dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Di tingkat lokal, Kabupaten Banyuwangi mencerminkan kondisi yang serupa. Data menunjukkan bahwa timbunan sampah di daerah ini selama periode 2019–2023 mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022, mencapai angka terendah sebesar 813,91 ton. Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun capaian tersebut belum diiringi oleh peningkatan kinerja penanganan sampah. Persentase sampah yang terkelola juga mengalami penurunan pada tahun yang sama dan meskipun ada sedikit peningkatan pada 2023, nilainya masih berada di bawah capaian tahun 2019–2021. Hal ini menandakan bahwa sistem pengelolaan sampah di Banyuwangi masih rentan dan memerlukan peningkatan baik dari aspek infrastruktur, pembiayaan, maupun partisipasi masyarakat.

Kerentanan lingkungan hidup di Banyuwangi tidak hanya berhenti pada isu sampah, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya air. Wilayah ini dikenal memiliki sumber daya air yang melimpah, yang menjadi penopang utama bagi sektor pertanian, industri, hingga kebutuhan domestik. Namun demikian, tekanan terhadap kuantitas dan kualitas air dapat meningkat akibat degradasi lingkungan, limbah cair, dan perubahan iklim yang memicu ketidakaturan curah hujan dan bencana banjir maupun kekeringan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah meluncurkan berbagai program konservasi dan rehabilitasi sumber daya air, seperti penghijauan daerah aliran sungai, pembangunan sumur resapan, waduk, dan embung. Selain itu, pendekatan edukatif dan partisipatif diterapkan melalui kampanye kesadaran lingkungan yang mendorong masyarakat untuk bijak menggunakan air, mengurangi limbah cair, dan menjaga kebersihan sumber air.

Dengan kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal dan tantangan dalam pelestarian sumber daya air, Kabupaten Banyuwangi menghadapi kerentanan lingkungan hidup yang nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, termasuk penguatan regulasi, investasi infrastruktur, peningkatan kapasitas



kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Langkah ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banyuwangi di masa depan

8. Rendahnya Produktivitas Ekonomi

Potensi Kabupaten Banyuwangi yang sangat besar, dari segi pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta sumber daya alam. Maka dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan pengembangan hilirisasi/ nilai tambah pada hasil pertanian dan perikanan, peningkatan iklim investasi daerah, penguatan daya saing pariwisata, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Hilirisasi produk pertanian dan perikanan fokus utama saat Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas lokal. Dengan potensi pertanian dan perikanan yang melimpah, pemerintah daerah berupaya mendorong pengembangan industri pengolahan yang dapat mengolah hasil pertanian dan perikanan menjadi produk bernilai tinggi. Melalui hilirisasi, diharapkan produk-produk lokal dapat dipasarkan tidak hanya di tingkat regional dan nasional, tetapi juga merambah pasar internasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta menciptakan lapangan kerja baru.

Selain investasi infrastruktur, Kabupaten Banyuwangi juga fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengolahan dan pemasaran produk hilir. Program pelatihan dan pendampingan diberikan kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil menengah untuk mengembangkan keterampilan dalam teknologi pengolahan, standar kualitas, serta strategi pemasaran yang efektif. Kolaborasi dengan lembaga inovasi dan swasta dalam bentuk mentoring UMKM untuk penguatan untuk inovasi produk dan diversifikasi usaha. Dengan strategi hilirisasi yang terintegrasi, Kabupaten Banyuwangi berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, dimana produk pertanian dan perikanan tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Banyuwangi dikenal dengan berbagai destinasi wisata alamnya yang menakjubkan, seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, dan Taman Nasional Alas Purwo. Untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata, pemerintah daerah berfokus pada pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, seperti akses jalan yang baik, fasilitas akomodasi yang memadai, serta layanan transportasi yang nyaman. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam industri pariwisata juga menjadi prioritas, dengan pelatihan bagi pelaku usaha wisata dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini.

Tidak hanya infrastruktur fisik, promosi dan pemasaran yang efektif juga menjadi kunci dalam optimalisasi daya saing pariwisata Banyuwangi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media, agen perjalanan, dan platform digital, untuk mempromosikan destinasi wisata Banyuwangi ke tingkat nasional dan internasional. Event-event



tahunan seperti Banyuwangi Festival juga diadakan untuk menarik wisatawan dan memperkenalkan budaya lokal yang kaya. Upaya ini dilengkapi dengan pengembangan ekowisata dan pariwisata berkelanjutan yang menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. pariwisata sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah yang mampu bersaing di pasar global.

Peningkatan kesempatan kerja yang layak bagi pemuda di Kabupaten Banyuwangi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah berfokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Melalui peningkatan investasi di sektor-sektor ini, baik dari pemerintah maupun swasta, diharapkan tercipta lebih banyak lapangan kerja baru. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan vokasional juga diintensifkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang secara global. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Berdasarkan hasil telaah dokumen perencanaan terkait khususnya terkait mada RPJMN Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029, maka bila dilinearkan dengan isu strategis pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80 Linearitas Isu Strategis RPJMN, KLHS dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi

Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
		Global	Nasional	Regional	
Infrastruktur kesehatan penyakit menular dan tidak menular yang berkualitas	Kualitas SDM	Persaingan Talenta Global Aging Population Transformasi Digital	Rendahnya Kualitas SDM	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.	Sumber Daya Manusia yang Belum Berdaya Saing
Belum meratanya jaminan Kesehatan					
Kenaikan angka kematian ibu					
Masih adanya kasus Stunting					
Belum Meratanya Sistem Kesehatan yang berkualitas					
Masih belum meratanya kualitas Pendidikan					
Belum sepenuhnya kompetensi guru dalam penguasaan IT					
Sarpras sekolah belum memenuhi akses lengkap yang berkualitas					
Tantangan dalam mengimbangi Pendidikan dengan nilai karakter					
Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh para pencari kerja.					
Serapan tenaga kerja di banyuwangi masih belum optimal					
Tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi					
Terjadi peningkatan kekerasan perempuan dan anak	Kesetaraan Gender dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak	Partisipasi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Kebijakan Regulasi yang Lemah	Pergeseran struktur kelas masyarakat		Kurangnya Peranan Gender dalam Pembangunan
Terjadi kerentanan kualitas keluarga yang berdampak pada peningkatan perilaku menyimpang di kalangan individu					

Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
		Global	Nasional	Regional	
Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial karena data belum tepat	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan	Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Sosial	Target kemiskinan 4,5-5%	Penanggulangan kemiskinan	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan melalui Perluasan Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran dan Terintegrasi
Kurang sinerginya pihak terkait dalam pelayanan PMKS					
Minat bertani berkurang kesejahteraan petani kususnya pada buruh tani	Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Pangan	Krisis Pangan dan Kelaparan	Swasembada pangan	Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani	Ketahanan Pangan
Lahan produktif mulai berkurang		Perubahan Iklim			
Kesejahteraan petani yang belum optimal		Teknologi dan Inovasi Pertanian			
Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya data kependudukan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Efisiensi birokrasi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemeintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Menjaga Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah
Kurang maksimalnya integrasi digitalisasi layanan					
Penguatan sistem keuangan terintegrasi					
Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD					
Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai	Akses Pelayanan Sanitasi dan air bersih yang layak	Polusi Air	Krisis Lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Kerentanan terhadap Lingkungan Hidup
Penanganan permukiman kumuh dan RTLH belum berjalan optimal					
IPLT yang ada sekarang tidak dapat menampung kebutuhan					
Penumpukan sampah yang tidak di daur ulang		Pertumbuhan Volume Sampah			

Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
		Global	Nasional	Regional	
Belum optimalnya pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayah selain wilayah kota	Penanganan Persampahan dan Limbah	Sampah Laut dan Ancaman terhadap Ekosistem			
Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah					
Masih tingginya Pencemaran air dan udara,	Peningkatan Tata Kelola Lingkungan				
Kerusakan alam dan perubahan iklim mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia					
Belum optimalnya tata kelola sumber daya koperasi	Optimalisasi pengembangan potensi ekonomi dan ketersediaan infrastruktur	Perang dagang Perang kawasan Inovasi dan Investasi R&D	Rendahnya Produktivitas	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Rendahnya Produktivitas Ekonomi
Minimnya diversifikasi usaha koperasi					
Lemahnya daya tarik investasi					
Belum adanya dokumen RDTRK menuju digitalisasi dan terintegrasi dengan aplikasi perizinan digital					
Akses permodalan dan akses pasar					
Produksi perikanan mengalami penurunan					
Konsumsi ikan masih rendah hilirisasi produk perikanan					
Minimnya promosi serta pengembangan atraksi dan sarana pendukung pariwisata					
Adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular terhadap hewan ternak					
Adanya ketergantungan terhadap pupuk sehingga menyebabkan penurunan kesuburan lahan pertanian					
Hilirisasi dan jaringan keperantaraan pasar sektor pertanian					
Belum efektif dan efisien jaringan distribusi perdagangan melalui penataan sistem dan sarana distribusi,					



Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
		Global	Nasional	Regional	
serta belum siapnya usaha masyarakat yang beradaptasi dengan teknologi dan pemasaran					
Penerapan industri yang ramah lingkungan (<i>green industry</i>) belum optimal					
Infrastuktur jalan dan jembatan serta konektivitas daerah belum optimal					
Kondisi drainase yang belum bisa menampung air hujan					
Terdapat Konflik kepentingan antar petani terkait pembagian air					
Pemanfaatan lahan masih belum sesuai peruntukan, belum optimalnya pengembangan jaringan irigasi					
Masih terdapat sumber mata air inactive					

Sumber : Hasil Analisa Bappeda,



BAB III

visi, Misi, dan Program
Prioritas Pembangunan Daerah





BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 VISI DAN MISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Banyuwangi yang MAJU, SEJAHTERA dan BERKAH untuk SEMUA”

Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Banyuwangi kedepan. *Value* Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Beberapa *value* yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Semangat untuk membawa **BANYUWANGI MAJU** diorientasikan pada kondisi Banyuwangi yang lebih memiliki daya saing, baik dikancah Nasional mapun Internasional. Banyuwangi sudah masuk sebagai pusat aglomerasi perumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur, dengan kekuatan keunggulan Sumber Daya Alam kita, sangat mungkin Banyuwangi mewarnai daya saing perekonomian Nasional dan Global. Kita punya potensi Wisata kelas dunia, potensi pertanian dan kemaritiman yang membanggakan, UMKM kita juga tumbuh pesat dan mampu bertahan dalam kondisi sulit. Kreatifitas anak muda dalam ekonomi kreatif juga sangat pesat. Kami meyakini, Banyuwangi memiliki daya saing Global. Kita hanya perlu mencari penguinkit yang telat, dengan infrastruktur yang lebih mantab, investasi yang tepat, dan kepercayaan terhadap birokrasi yang kuat mampu mempercepat Banyuwangi Maju Ekonominya.

Sementara itu, semangat untuk membawa **BANYUWANGI SEJAHTERA** merupakan Gambaran untuk menjadikan Masyarakat kita harmonis kehidupan sosialnya, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pendidikan berkualitas harus merata dan dinikmati oleh semua, layanan kesehatan harus berkualitas dan terjangkau. Kondisi lingkungan harus kondusif, tertib dan tentram dan penuh rasa toleransi. Banyuwangi harus terus bergerak maju tanpa meninggalkan kharakter lokalitasnya, menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budayanya.

Kemajuan dan Kesejahteraan yang kita upayakan adalah upaya-upaya manusia, sebagai Masyarakat beriman kita menyakini ridho dan pertolongan Allah adalah penentunya. Dengan semangat mengharap **KEBERKAHAN**, Pembangunan



Banyuwangi harus diniatkan untuk mendatangkan kebaikan, manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, Pembangunan yang diberkahi pastilah mendatangkan maslahat kebaikan bagi Banyuwangi.

Pembangunan harus dikerjakan dengan bergotong royong, oleh semua elemen Masyarakat, maka Visi ini adalah sebuah komitmen untuk menciptakan kemajuan yang inklusif, di mana setiap warga Banyuwangi dapat merasakan kesejahteraan dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Bukan hanya sekedar janji atau impian, tetapi merupakan semangat untuk memastikan bahwa setiap warga Banyuwangi, dari pelosok desa hingga pusat kota, merasakan kehadiran pembangunan yang berkeadilan untuk semua.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sedangkan **Jawa Timur Maju**, merupakan komitmen sekaligus semangat (*spirit*) yang menegaskan bahwa pada tahapan 2025–2029, melanjutkan perjuangan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai *center of gravity* yang strategis dan berkembang pesat. **Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan**, bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, keunggulan inovasi, dan Pembangunan yang berkelanjutan. **Menuju**, mengandung pengertian upaya untuk mencapai tujuan -tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur. Sejalan dengan Visi Nasional dan Provinsi, Visi Kabupaten Banyuwangi yaitu **Maju, Sejahtera dan Berkah Untuk Semua** telah memiliki keselarasan, sehingga pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah dapat selaras dan sejalan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam mendukung visi, perlu Langkah-langkah atau cara yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 5 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, kelima misi tersebut adalah:

Misi 1: Memperkuat Sektor Pertanian, UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Unggulan Rakyat lainnya secara berkelanjutan. Ini adalah fokus Pembangunan ekonomi di Banyuwangi, kondisi yang ingin kita ciptakan adalah produktifitas sektor unggulan yang meningkat, UMKM dan ekonomi kreatif berkembang pesat, kesempatan kerja meluas bagi penduduk Banyuwangi, pendapatan warga juga meningkat. Selain kita tumbuh secara ekonomi, Pembangunan harus tetap memantabkan ketahanan ekologi dan keseimbangan Pembangunan.

Misi 2: Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan yang Harmonis, Dimana kita akan fokus pada menekan kemiskinan serendah-rendahnya, kesenjangan berkurang, perlindungan sosial untuk Masyarakat rentan, Perempuan dan anak harus merata dan tepat sasaran, berkembangnya seni dan budaya Banyuwangi yang semakin mendunia, dan kerukunan dan toleransi beragama terjaga dengan baik.

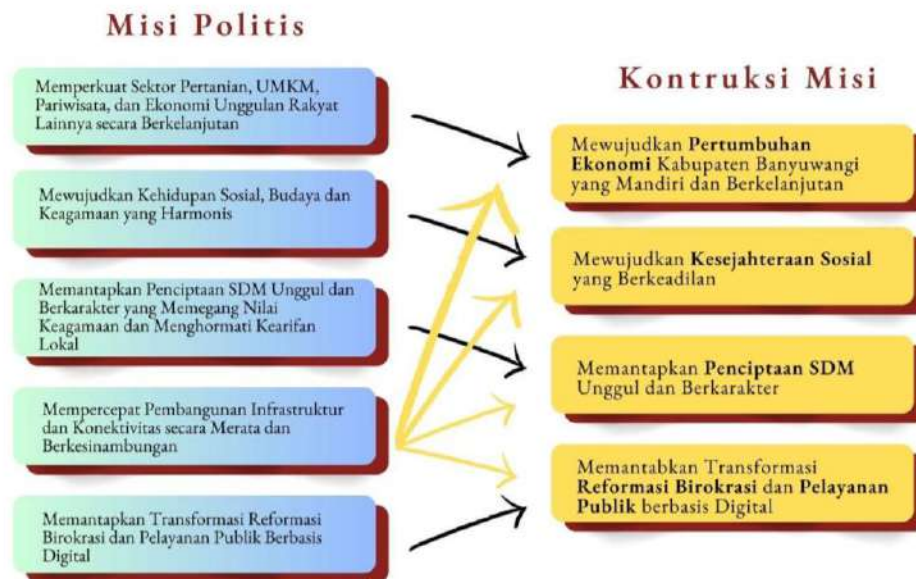


Misi 3: Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter yang memegang nilai keagamaan dan menghormati kearifan lokal. Misi ini berfokus pada penyiapan SDM Masyarakat Banyuwangi yang mampu bersaing di kancah global dan menyongsong masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita akan berfokus pada pemerataan kualitas Pendidikan, pemerataan kualitas dan keterjangkauan kesehatan. Hal mendasar ini (Pendidikan dan Kesehatan) harus bisa dinikmati oleh semua. Oleh sebab itu kita juga akan meningkatkan gizi ibu hamil, anak usia dini dan pelajar. Generasi masa depan Banyuwangi harus menjadi generasi emas Indonesia. Keberpihakan terhadap kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak juga tidak boleh ditinggalkan.

Misi 4: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas secara Merata dan Berkesinambungan. Melalui implementasi misi ini, kita akan berfokus pada pemerataan infrastruktur diseluruh wilayah Banyuwangi, infrastruktur berkualitas yang merata. Menghubungkan titik-titik pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas akan kita tingkatkan. Tidak hanya membangun, menjaga lingkungan dan menguatkan kehanan ekologi dalam rangka mitigasi resiko bencana juga merupakan komitmen kami, demi keberlanjutan lingkungan demi generasi masa depan.

Misi 5: Memantapkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital. Kami meyakini bahwa birokrasi adalah pelayan publik, maka birokrasi harus hadir memersamai rakyat, birokrasi harus melayani dengan cepat, mudah dan berorientasi pada kepuasan rakyat, oleh karenanya layanan publik harus dibangun dengan basis digital, terintegrasi dan memudahkan. Disisi lain, birokrasi harus bertindak sebagai lokomotif Pembangunan. Oleh sebab itu pada aspek tatakelola pemerintahan ini kita harus fokus pada membangun sistem kerja birokrasi yang lincah (agile) dan berorientasi hasil, ASN nya harus memiliki kompetensi tinggi dan memiliki pola karir berbasis kinerja.

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah diatas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan *clustering* dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.



Gambar 3.1 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan;**
- 2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan;**
- 3. Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter;**
- 4. Memantapkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital.**

Misi pembangunan diatas selanjutnya menentukan kerangka berpikir dalam bentuk *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD. *Cascading* tujuan nya untuk pencapaian visi Pembangunan Daerah. *Cascading* menunjukkan dalam rangka menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.

Untuk mendukung Asta Cita Republik Indonesia tahun 2025 – 2029 dan visi Misi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi telah menyelaraskan dengan misi pembangunan. Berikut merupakan keselarasan untuk mendukung tercapainya asta cita dan misi Provinsi Jawa timur:



Tabel 3.1 Keselarasan untuk mendukung tercapainya Asta Cita dan Misi Provinsi Jawa timur

Asta Cita	Misi Jawa Timur	Misi Kabupaten Banyuwangi
PN1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		
PN2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Iklim dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan; Jatim Harmoni	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan;
PN3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan;
PN4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan,	Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter



Asta Cita	Misi Jawa Timur	Misi Kabupaten Banyuwangi
	serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC)	
	Jatim Harmoni , Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengarusutamaan Nilai-nilai Kesejahteraan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Peradaban	
PN5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Jatim Agro , Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional Jatim Lestari , Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Iklim dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan; Jatim Harmoni	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan;
PN6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Jatim Sejahtera , Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan
PN7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Jatim Berkah Amanah , Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Memantapkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital
PN8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Jatim Lestari , Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Iklim dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan; Jatim Harmoni	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan; Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan



3.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2025 - 2029

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alur visi misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sasaran sebagai indikator keberhasilan bupati.

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *cascading* Kabupaten Banyuwangi. Gambaran *cascading* diatas menunjukkan gambaran pola menurunkan kinerja yang harus dilakukan secara berjenjang. Masing masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program program pembangunan daerah terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan rumusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Misi. Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2029 yang di ikuti dengan gambar arsitektur kinerja Banyuwangi:

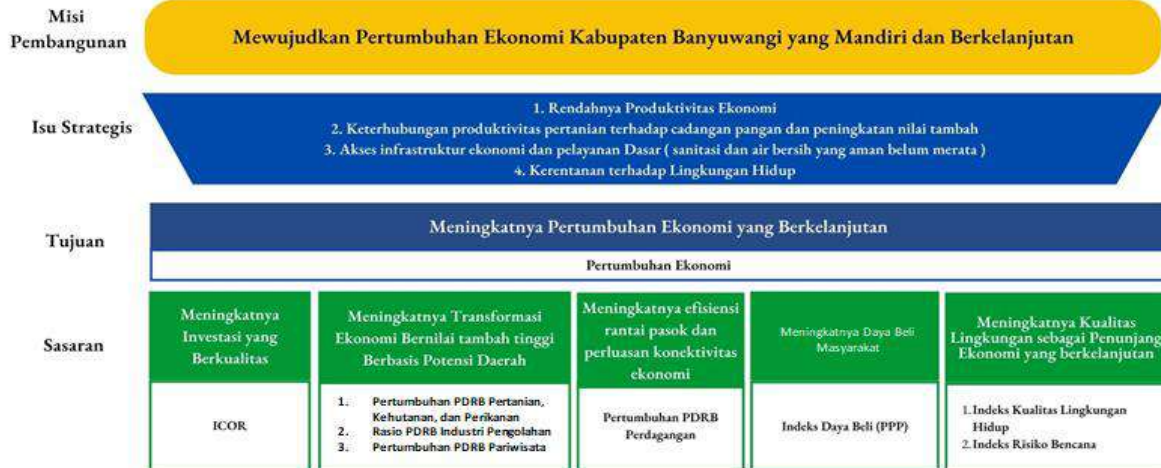


Tujuan I: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi yang berkualitas
2. Meningkatnya Transformasi Ekonomi Bernilai tambah tinggi Berbasis Potensi Daerah
3. Meningkatnya efisiensi rantai pasok dan perluasan konektivitas ekonomi
4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan sebagai Penunjang Ekonomi yang berkelanjutan



Gambar 3.2 Cascading Pencapaian Tujuan 1

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditopang dengan investasi yang berkualitas, efisiensi rantai pasok dan perluasan konektivitas ekonomi, Stabilitas Daya Beli Masyarakat serta mengimbangkan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas lingkungan sebagai penunjang ekonomi berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut ada upaya yang perlu didukung capaian bawahnya.

Peningkatan investasi yang berkualitas dapat diwujudkan melalui penurunan nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi, yang mencerminkan semakin optimalnya penggunaan modal dalam menghasilkan output ekonomi. Hal ini dicapai dengan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas, memperbaiki pelayanan perizinan agar lebih cepat dan efisien melalui digitalisasi dan simplifikasi proses, menciptakan iklim daerah yang kondusif dengan kepastian hukum dan keamanan yang terjaga, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kebutuhan pasar, serta melalui pengembangan promosi investasi dan peningkatan potensi investasi.

Transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi berbasis potensi daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan perlindungan usaha sektor pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana prasarana pertanian yang tepat guna serta penguatan kelembagaan petani guna menghasilkan komoditas unggulan yang berdaya saing. Selanjutnya, pengembangan industri pengolahan diarahkan pada kegiatan hilirisasi yang mampu menciptakan nilai tambah lokal dengan membuka kesempatan wirausaha baru, kemudahan akses permodalan, pengembangan kapasitas usaha dan membentuk kawasan ekonomi strategis. Di sisi lain, daya saing sektor pariwisata terus ditingkatkan melalui penguatan amenities, aksesibilitas, dan atraksi berbasis kearifan lokal serta promosi destinasi unggulan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata dan berkelanjutan.



Peningkatan efisiensi rantai pasok dan perluasan konektivitas ekonomi menjadi elemen penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur logistik yang memadai, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung kelancaran arus barang dan jasa secara efisien antar wilayah. Selain itu, perluasan akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor perdagangan, serta penerapan sistem tertib niaga turut memperkuat ekosistem perdagangan yang sehat. Dengan demikian, biaya logistik dapat ditekan, keterhubungan ekonomi antar daerah meningkat, dan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Meningkatnya daya beli masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan kualitas lapangan kerja serta kemudahan akses terhadap peluang kerja yang produktif. Penciptaan lapangan kerja yang layak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja menjadi kunci. Di sisi lain, kemudahan akses terhadap informasi dan kesempatan kerja—melalui penguatan layanan ketenagakerjaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan pemanfaatan teknologi digital—akan memperluas partisipasi angkatan kerja secara lebih merata. Dengan demikian, daya beli masyarakat tetap terjaga, mendorong konsumsi rumah tangga, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Di sisi lain, pengendalian inflasi melalui stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Sinergi antara perluasan akses ekonomi dan pengelolaan harga yang efektif akan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, menjaga konsumsi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkeadilan.

Meningkatnya kualitas lingkungan sebagai penunjang ekonomi yang berkelanjutan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang yang tangguh dan inklusif. Upaya ini tercermin melalui penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan penguatan pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, dorongan terhadap pembangunan ekonomi rendah karbon melalui efisiensi energi, transisi energi bersih, dan praktik produksi hijau menjadi langkah strategis dalam menurunkan emisi dan meningkatkan daya saing ekonomi hijau. Di sisi lain, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui sistem mitigasi yang adaptif dan responsif memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko iklim dan geologi, sehingga mampu menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Tujuan II: Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan
2. Meningkatkan Peranan Sosial masyarakat



3. Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan
4. Menurunnya Transmisi Kemiskinan



Gambar 3.3 Cascading Pencapaian Tujuan 2

Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat menjadi ultimate outcome dengan indikator persentase penduduk miskin dan indeks kesejahteraan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan sosial perlu upaya mengurangi beban pengeluaran, meningkatnya peranan sosial, keberdayaan ekonomi dan menurunnya transmisi kemiskinan.

Upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin menjadi langkah strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara. Hal ini dilakukan melalui penurunan beban pengeluaran pangan, seperti melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, pemberian bantuan pangan, dan peningkatan akses terhadap pangan bergizi dengan harga terjangkau. Di samping itu, pengurangan beban non-pangan diwujudkan melalui penyediaan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta subsidi atau keringanan biaya utilitas dasar seperti sanitasi, air dan perlindungan tenaga kerja rentan.

Meningkatnya peranan sosial masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun kehidupan yang inklusif, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi sosial dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, pembangunan, serta pengambilan keputusan di tingkat lokal. Partisipasi aktif ini mendorong munculnya rasa memiliki, solidaritas, dan kepedulian antarwarga yang menjadi kekuatan sosial, serta peranan kelompok perempuan, anak, disabilitas meningkat. Sejalan dengan itu, meningkatnya kohesi sosial tercermin dari menguatnya rasa kebersamaan, toleransi, dan harmoni antar kelompok masyarakat, yang menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan adaptif.



Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan menurunkan kesenjangan sosial. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas usaha masyarakat miskin, baik melalui akses permodalan, pendampingan usaha, maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga mereka mampu mengembangkan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri. Selain itu, perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja yang layak dan mudah diakses menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi keluarga miskin. Keberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi aspek penting, dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, penguatan kapasitas, serta dukungan kebijakan yang berpihak, sehingga perempuan sebagai pilar keluarga dapat berkontribusi lebih besar dalam menggerakkan roda ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Tujuan III: Meningkatnya Daya Saing Sumber daya Manusia

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3: Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatnya Daya Saing Sumber daya Manusia, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang merata
2. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat yang merata



Gambar 3.4 Cascading Pencapaian Tujuan 3

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan manusia berupaya dalam meningkatkan daya saing dengan ukuran keberhasilan Indeks pembangunan manusia. Daya saing SDM di topan oleh kualitas pendidikan dan kualitas



kesehatan. Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, yang dicapai melalui penguatan partisipasi sekolah, peningkatan literasi masyarakat, serta pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah. Partisipasi sekolah yang aktif, baik dari pendidik, peserta didik, orang tua, maupun masyarakat, mendorong terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Di sisi lain, literasi masyarakat yang terus ditingkatkan menjadi penopang dalam membangun budaya belajar sepanjang hayat dan memperluas akses terhadap pengetahuan. Pemerataan kualitas pendidikan juga menjadi prioritas, melalui distribusi guru yang berkeadilan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan sistem pendidikan di daerah tertinggal, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas.

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang merata, yang ditopang oleh penguatan kesehatan keluarga, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta ketahanan kesehatan masyarakat. Kesehatan keluarga menjadi fondasi utama melalui upaya promotif dan preventif, seperti peningkatan gizi, imunisasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Di sisi lain, kualitas pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, distribusi tenaga medis yang merata, serta penerapan standar layanan yang profesional dan berorientasi pada pasien. Ketahanan kesehatan masyarakat juga diperkuat melalui sistem kewaspadaan dini, respon cepat terhadap penyakit menular dan tidak menular, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungannya. Sinergi ketiga aspek tersebut menjadi pendorong utama terciptanya sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.

Tujuan IV : Terwujudnya Transformasi Birokrasi yang berorientasi layanan

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3: Memantapkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya Transformasi Birokrasi yang berorientasi layanan, dengan sasaran pembangunan yaitu

1. Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan
2. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Akuntabel
3. Meningkatnya Penerapan Meritokrasi ASN
4. Terwujudnya Layanan Publik yang Prima



Gambar 3.5 Cascading Pencapaian Tujuan 4

Terwujudnya Transformasi Birokrasi yang berorientasi layanan merupakan tingkat pencapaian tertinggi dari pencapaian misi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tercapai dengan upaya tata kelola pemerintah yang berorientasi layanan, pemerintah yang akuntabel, ASN yang profesional, dan layanan publik prima.

Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dengan sistem yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, digitalisasi mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif, partisipatif, dan berfokus pada kepuasan pengguna layanan. Hal ini menjadi fondasi membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat daya saing dan efektivitas pemerintahan di era modern.

Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berintegritas. Hal ini dicapai melalui peningkatan kualitas manajemen kinerja yang menekankan pada pencapaian hasil secara terukur dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Di samping itu, perencanaan pembangunan yang semakin berorientasi pada kinerja mendorong sinergi antarprogram dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien serta tepat sasaran. Penguatan efektivitas pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, turut memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kinerja pemerintahan yang semakin berkualitas melalui penataan pengelolaan keuangan yang baik dan sistem pencegahan korupsi.

Meningkatnya Penerapan Meritokrasi ASN. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan, baik dari sisi kompetensi teknis, manajerial, maupun integritas, agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang dinamis. Ketepatan dalam penempatan ASN sesuai dengan



Kabupaten Banyuwangi

kompetensi dan kebutuhan organisasi menjadi kunci dalam optimalisasi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepegawaian—melalui sistem yang transparan, berbasis merit, dan terintegrasi secara digital—akan memperkuat tata kelola SDM aparatur, mendorong motivasi kerja, serta membentuk ASN yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang berkualitas.



Tabel 3.2 Sasaran dan Target RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: Mewujudkan Banyuwangi yang Maju, Sejahtera dan Berkah untuk Semua										
VISI : Mewujudkan Banyuwangi yang MAJU, SEJAHTERA dan BERKAH untuk SEMUA MISI 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	4,90	5,15	5,41	5,66	5,89	6,10	
		1) Meningkatkan Investasi yang berkualitas	ICOR	6,69	6,54	6,38	6,21	6,04	5,88	
		2) Meningkatkan Transformasi Ekonomi Bernilai tambah tinggi Berbasis Potensi Daerah	1. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,79	0,90	1,10	1,30	1,49	1,69	
			2. Rasio PDRB Industri Pengolahan	13,11	13,82	14,55	15,30	16,05	16,81	
			3. Pertumbuhan PDRB Pariwisata	6,94	7,29	7,67	8,08	8,49	8,91	
		3) Meningkatkan efisiensi rantai pasok dan perluasan konektivitas ekonomi	Pertumbuhan PDRB Perdagangan	6,01	6,03	6,26	6,60	7,14	8,11	
		4) Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli (PPP)	0,790	0,795	0,800	0,810	0,815	0,820	
		5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan sebagai Penunjang Ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,27	78,35	78,43	78,51	78,58	78,66	
			Indeks Risiko Bencana	143,33	139,83	136,50	133,33	130,31	127,40	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MISI 2: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	6,29	6,03	5,77	5,41	5,15	4,89	
		1. Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan	Indeks Kebutuhan Dasar	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	
		2. Meningkatkan Peranan Sosial masyarakat	Indeks Peranan Sosial	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	
		3. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	1. Indeks Keberdayaan Ekonomi	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	
			2. Indeks Gini	0,310	0,308	0,306	0,304	0,301	0,299	
		4. Menurunnya Transmisi Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	
MISI 3: Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Daya Saing Sumber daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	74,87	75,38	75,87	76,34	76,78	77,19	
		1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang merata	1. Harapan Lama Sekolah	13,16	13,18	13,20	13,22	13,24	13,26	
			2. Rata-rata Lama Sekolah	7,80	7,82	7,84	7,86	7,88	7,90	
			3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai rapor berkategori baik	76,68	77,68	78,68	79,68	80,68	81,68	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2. Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat yang merata	Usia Harapan Hidup	74,26	74,60	74,93	75,20	75,61	76,20	
Misi 4: Memantapkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital	Terwujudnya Transformasi Birokrasi yang berorientasi layanan		Indeks Reformasi Birokrasi	93,5	95	97	99	100	105	
		1. Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan	Indeks Pemerintah Digital*	4,82	2,08	2,18	2,28	2,38	2,48	
		2. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP	91	92	93	94	95	96	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	67,287	68,387	69,587	70,887	72,287	73,687	
			Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,45	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	
		3. Meningkatnya Penerapan Meritokrasi ASN	Indeks Sistem Merit	325	330	335	340	345	350	
		4. Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,5	4,7	4,8	4,9	5	5	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	94,87	94,89	94,9	94,92	94,96	94,98	

- Ket: *Tahun 2025 masih Menggunakan Indeks SPBE



3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2025 - 2029

A. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design perencanaan* pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi didasarkan pada permasalahan dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Setelah melalui proses Analisis.

Sasaran : Meningkatnya Investasi yang berkualitas

Strategi 1: Penguatan iklim investasi yang inklusif dan berdaya saing.

Iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah dengan iklim investasi yang baik akan lebih mudah menarik modal dari dalam dan luar negeri, sehingga mempercepat pembangunan dan inovasi. Investasi yang tinggi dapat meningkatkan produksi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Investasi yang tinggi dapat meningkatkan lapangan kerja sehingga dapat Pengurangan pengangguran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Investasi yang tinggi dapat di optimalkan untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga meningkatkan anggaran pembangunan. Namun, investasi tidak akan mengalir dengan optimal jika regulasi yang berbelit, infrastruktur yang kurang memadai, kondusifitas daerah, sdm kompeten, promosi investasi serta birokrasi yang lambat masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penguatan iklim investasi berbasis keunggulan kompetitif dan kemudahan berusaha menjadi prioritas utama.

Sasaran : Meningkatnya Transformasi Ekonomi Bernilai tambah tinggi Berbasis Potensi Daerah

Strategi 2: Penguatan sektor unggulan yang bertumpu pada nilai tambah Sektor Pertanian dan Industri Berbasis Lokal, serta mendorong Daya Saing Pariwisata melalui Penguatan Destinasi.

Kabupaten Banyuwangi, terletak di ujung timur Pulau Jawa, dikenal sebagai daerah dengan potensi pertanian dan perikanan yang signifikan. Sektor-sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian lokal tetapi juga berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, peningkatan produktivitas dan nilai tambah menjadi kunci utama. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan keterbatasan teknologi masih menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah (hilirisasi) pada



sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan data yang menunjukkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap PDRB, implementasi strategi yang tepat akan membawa dampak positif yang berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pengembangan destinasi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata, serta optimalisasi promosi berbasis digital melalui kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata. Banyuwangi fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan memadukan pelestarian alam dan budaya lokal. Dengan upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata. Peningkatan infrastruktur fisik dan nonfisik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sentra pariwisata kreatif.

Sasaran : Meningkatnya efisiensi rantai pasok dan perluasan konektivitas ekonomi

Sasaran : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Strategi 3: Penguatan Stabilitas Ekonomi melalui peningkatan daya beli dan Stabilitas Harga serta melalui distribusi perdagangan yang efisien.

Daya beli masyarakat adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Peningkatan daya beli sangat penting karena berkontribusi langsung pada pertumbuhan konsumsi domestik, yang menjadi pilar utama perekonomian. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatnya akses terhadap sumber ekonomi, meningkat infrastruktur logistik yang memadai dan akses pasar yang tertib niaga. Stabilitas harga diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian ekonomi bagi konsumen dan produsen. Memantau harga barang dan jasa utama yang berpengaruh pada inflasi, seperti bahan pangan dan energi. Memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui manajemen stok yang baik, terutama pada musim panen atau situasi krisis.

Optimalisasi sistem distribusi dan akses pasar yang terintegrasi bertujuan untuk memastikan kelancaran alur barang dan jasa dari produsen ke konsumen, meningkatkan efisiensi pasar, serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah. Langkah ini juga berfokus pada pengurangan biaya logistik, peningkatan daya saing produk, dan penciptaan akses pasar yang inklusif untuk semua pelaku usaha, terutama UMKM



Sasaran : Meningkatkan Kualitas Lingkungan sebagai Penunjang Ekonomi yang berkelanjutan

Strategi 4: Membangun ekosistem lingkungan hidup yang berkualitas guna menstabilkan dampak pembangunan ekonomi.

Pengelolaan sumber daya alam yang mencakup air, kualitas udara, dan tutupan lahan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan industri ramah lingkungan sangat bergantung pada keberlanjutan dan kualitas sumber daya ini. Pengelolaan yang tepat tidak hanya memastikan kelestarian lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan melibatkan strategi untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air, meminimalkan kerugian, serta melakukan konservasi lingkungan. Pengelolaan kualitas udara melibatkan pengendalian emisi dari industri, transportasi, dan aktivitas lainnya untuk mencegah pencemaran udara. Udara bersih mendukung kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas kerja, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi wisatawan. Pengelolaan tutupan lahan yang berkelanjutan melibatkan konservasi hutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, dan perencanaan tata ruang yang bijaksana. Hal ini penting untuk mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah, dan mendukung keanekaragaman hayati. Fokus pada lima tahun kedepan juga pada pengelolaan sampah yang diarahkan dengan teknologi daur ulang persampahan dan peran serta aktif dari kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah

Sasaran : Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan

Strategi 5: Pelindungan sosial adaptif dan Perluasan Jaminan Sosial yang tepat sasaran

Perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Dengan adanya berbagai tantangan seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, urbanisasi, dan bonus demografi, perlindungan sosial harus lebih adaptif dan jaminan sosial harus diperluas dengan cara yang tepat sasaran. Jaminan sosial meliputi berbagai program seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, program subsidi, dan bantuan sosial (bansos). Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa jaminan sosial benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan dan tidak salah sasaran. Meningkatkan perlindungan sosial adaptif dan memperluas jaminan sosial yang tepat sasaran adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan sejahtera. Dengan pendekatan yang berbasis data, digitalisasi, dan peningkatan cakupan



jaminan sosial, kelompok rentan dapat terlindungi dari dampak krisis ekonomi, dan perubahan iklim.

Dalam rangka memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menempatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pemanfaatan DTSEN dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan berbasis pada data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi sehingga dapat tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dengan pendekatan ini, arah kebijakan daerah diarahkan pada sinkronisasi program lintas perangkat daerah, penajaman target sasaran penerima manfaat, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data. Melalui optimalisasi DTSEN, diharapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Banyuwangi dapat lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan, selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Sasaran : Meningkatnya Peranan Sosial masyarakat

Strategi 6: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dengan kebijakan yang inklusif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan inklusif memastikan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan. Kebijakan inklusif menekankan kesetaraan akses, pengakuan terhadap keberagaman, dan keterlibatan aktif dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Adapun untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dengan kebijakan yang inklusif dapat dilakukan dengan cara, Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Publik, Menciptakan Platform Partisipasi yang Mudah Diakses, Mendorong Keterlibatan Kelompok Rentan dan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan inklusif sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada semua golongan. Dengan mengatasi tantangan eksklusi sosial, meningkatkan akses informasi, dan membangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, pembangunan akan lebih berkelanjutan dan merata.

Sasaran : Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan

Strategi 7: Mendorong kolaborasi yang fokus pemberdayaan ekonomi dengan sasaran kelompok miskin dan rentan



Kolaborasi Pentahelix adalah model kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha (business), komunitas, dan media massa dalam menciptakan solusi inovatif untuk berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui penciptaan peluang usaha, peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih luas. Kolaborasi menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan tersebut, hal ini karena Kolaborasi pentahelix dapat mengoptimalkan sinergi antar pemangku kepentingan, memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing sektor, meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mendorong kolaborasi Pentahelix dalam pemberdayaan ekonomi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan. Dengan keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, program pemberdayaan ekonomi bisa lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Sasaran : Menurunkan Transmisi Kemiskinan

Strategi 8: menurunkan kemiskinan antar generasi dengan memutus rantai kemiskinan melalui tingkat pendidikan dan kesehatan anak.

Transmisi kemiskinan adalah proses di mana kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka memiliki peluang lebih kecil untuk keluar dari kemiskinan saat dewasa. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat menjadi lingkaran yang terus berulang, menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Oleh karena itu, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan yang adil menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sebagai langkah Jangka Panjang, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendidikan berkualitas membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Kesehatan yang baik memastikan masyarakat tetap produktif dan terhindar dari beban biaya pengobatan yang tinggi. Diharapkan dengan adanya ke dua faktor tersebut dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, dan memiliki mobilitas sosial yang lebih tinggi.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang merata

Strategi 9: Meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pendidikan serta pengembangan budaya karakter lokal



Meningkatkan kualitas pendidikan dan kolaborasi pendidikan, serta mengembangkan budaya karakter, peningkatan partisipasi sekolah, budaya literasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang unggul secara intelektual, emosional, dan moral. Kualitas pendidikan adalah pondasi utama untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu fokus nya adalah peran teknologi dalam pendidikan dan pengembangan budaya karakter. Pengembangan budaya karakter bagian penting dari pendidikan yang bertujuan membangun nilai-nilai moral, etika, dan integritas dalam diri siswa. Langkah-langkah pengembangan budaya karakter meliputi Integrasi Nilai-Nilai Karakter dalam kurikulum pendidikan karakter di rumah dan komunitas.

Salah satu cara efektif juga yaitu kolaborasi pendidikan melibatkan sinergi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sekolah, komunitas, dan sektor swasta, untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan. Strategi yang dapat dilakukan Mengembangkan program magang, pendidikan vokasi, dan pembelajaran berbasis dunia kerja untuk siswa, sehingga mereka memiliki keterampilan yang relevan.

Sasaran : Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat yang merata

Strategi 10: Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, serta penguatan sistem kesehatan yang adaptif terhadap perubahan.

Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan berfokus pada upaya memastikan bahwa setiap individu, memiliki akses terhadap layanan kesehatan bermutu sesuai kebutuhannya. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan, penguatan fasilitas layanan kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada kelompok rentan. Di sisi lain, tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, hingga perkembangan teknologi menuntut adanya sistem kesehatan yang adaptif dan tangguh. Penguatan sistem kesehatan adaptif dilakukan melalui peningkatan kapasitas surveilans, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan wabah, serta integrasi lintas sektor dalam penyediaan pelayanan. Dengan demikian, sistem kesehatan tidak hanya mampu merespons kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi dinamika dan ancaman kesehatan di masa depan.

Sasaran : Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Akuntabel

Strategi 11: Penguatan sistem manajemen pemerintah yang berorientasi capaian Kinerja tinggi dan Akuntabel

Akuntabilitas dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan yang efektif merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Dalam era modern, masyarakat menuntut pemerintahan yang tidak hanya bertanggung jawab



dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memiliki tata kelola yang baik guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan kepada publik. Pengelolaan keuangan yang efektif bukan hanya sekadar penggunaan anggaran yang sesuai aturan, tetapi juga harus berorientasi pada pencapaian kinerja yang optimal. Untuk meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan efektif, penguatan manajemen pemerintahan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.

Sasaran : Meningkatnya Penerapan Meritokrasi ASN

Strategi 12: Meningkatkan sumber daya aparatur yang adaptif dan Agile

Sumber daya aparatur yang adaptif dan agile adalah elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan efisien. Dengan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan bersikap gesit dalam pengambilan keputusan, aparatur negara dapat lebih efektif dalam melayani masyarakat dan menghadapi tantangan dinamis di era modern. Untuk mewujudkan aparatur yang adaptif dan agile, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan dengan langkah : Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas, Penerapan Budaya Kerja Agile, Penguatan Nilai-Nilai Profesionalisme dan integritas.

Sasaran : Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan

Sasaran : Terwujudnya Layanan Publik yang Prima

Strategi 13: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi dan Penguatan Inovasi Pelayanan

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator utama dari pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di era digital, pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi layanan publik. Digitalisasi dan inovasi dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga mempercepat proses birokrasi serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan inovasi adalah langkah krusial dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengadopsi teknologi digital, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik harus menjadi prioritas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

B. Pentahapan Pembangunan

Proses penyusunan tema-tema pembangunan untuk setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tema ini memberikan fokus prioritas yang berbeda setiap tahun, dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan pembangunan daerah. Urut-urutan pentahapan pembangunan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD dan dari tiap tahapan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun untuk penyusunan RPJPD. Tahapan pembangunan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Berikut pentahapan RPJMD 2025 – 2029 sebagai berikut:



Gambar 3.6 Pentahapan RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, terdapat setidaknya prioritas Pembangunan. **Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Banyuwangi tahun 2026 MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI YANG INKLUSIF UNTUK MENURUNKAN KEMISKINAN** dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Pangan
2. Peningkatan Nilai Tambah Produk UMKM
3. Perluasan Pasar Sektor Pertanian Dan Pariwisata
4. Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Dalam Sektor UMKM Dan Pariwisata
5. Peningkatan Akses Infratraktur Pariwisata Dan Pertanian, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Perlindungan Sosial Adaptif Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Rentan
7. Penguatan Pendidikan Yang Berdaya Saing
8. Peningkatan Akses Kesehatan Dan Pola Hidup Sehat
9. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Banyuwangi tahun 2027 MENGUATKAN PRODUKTIVITAS SDM UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI YANG BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:



1. peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat sebagai Fondasi Produktivitas
3. Penguatan Kesempatan Kerja dan Wirausaha Produktif
4. Reformasi Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Mendorong Kemandirian
5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Sektor Strategis (Pertanian, UMKM dan Pariwisata)
6. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah
7. Peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam keanerakagaman hayati
8. Transformasi layanan publik

Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Banyuwangi tahun 2028 AKSELARASI PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI YANG BERTUMPU PADA SEKTOR UNGGULAN dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Penguatan Sektor Unggulan Daerah
2. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi pertanian, Industri, pariwisata dan Konektivitas
3. Peningkatan Investasi dan Iklim Usaha
4. Penguatan SDM Produktif untuk Mendukung Sektor Ekonomi
5. Digitalisasi Ekonomi dan Layanan Publik
6. Penguatan Kolaborasi dan Tata Kelola Pemerintah Daerah
7. Peningkatan infrastruktur pengairan dan kebencanaan
8. Peningkatan lingkungan hidup dan tata kelola persampahan

Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Banyuwangi tahun 2029 MEMANTAPKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas pendidikan dan Daya Saing SDM
2. Peningkatan Kesehatan dan Daya Tahan SDM
3. Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Nilai Tambah
4. Penguatan UMKM dan pariwisata lokal
5. Tata Kelola yang Efisien dan Adaptif
6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan
7. Penguatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan budaya lokal

Berdasarkan tema pembanguann Kabupaten Banyuwangi tahun 2030 PEREKONOMIAN BANYUWANGI YANG MAJU, SUMBERDAYA MANUSIA YANG SEJAHTERA, SERTA KEHIDUPAN YANG HARMONIS YANG BERKELANJUTAN dapat dirumuskan Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Hilirisasi dan industrialisasi produk lokal
2. Peningkatan investasi daerah
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan



4. Perluasan akses layanan kesehatan berkualitas
5. Perlindungan sosial adaptif
6. Penguatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan budaya lokal
7. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan
8. Pengembangan energi baru dan terbarukan
9. Penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana
10. Layanan publik yang cepat dan adaptif

C. Lokus Pembangunan

Penentuan lokus pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2029 dilakukan secara strategis dan terpadu dengan mempertimbangkan beragam aspek yang saling berkaitan. Proses ini didasarkan pada pendekatan analitis terhadap dokumen-dokumen sektoral dan spasial yang mampu mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta kebutuhan spesifik di setiap wilayah.

Selain itu, penetapan lokus pembangunan wilayah diselaraskan secara konsisten dengan visi dan misi pembangunan daerah, guna memastikan setiap intervensi pembangunan berkontribusi langsung terhadap tujuan strategis yang ingin dicapai selama periode 2025–2029. Visi-misi ini menjadi fondasi normatif dalam menyusun arah dan prioritas pembangunan di tingkat wilayah. Terdapat lima dimensi utama yang menjadi landasan dalam menentukan lokus pembangunan wilayah, yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, melalui optimalisasi potensi unggulan sektor-sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, perikanan, UMKM, serta industri yang tersebar di berbagai kecamatan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial tinggi, termasuk wilayah dengan prevalensi kemiskinan ekstrem, risiko stunting, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, serta minimnya akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal dan rentan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, dengan menetapkan wilayah-wilayah prioritas dengan tingkat pendidikan dan kapasitas yang relatif rendah untuk pengembangan layanan pendidikan, pelatihan vokasi, serta pusat-pusat inovasi dan kewirausahaan.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, melalui pembangunan infrastruktur kelembagaan dan digitalisasi layanan publik, khususnya di pusat-pusat administratif kecamatan yang memiliki peran strategis sebagai simpul pelayanan.
5. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang mengalami tekanan lingkungan tinggi dan kawasan ekosistem penting seperti hutan, kawasan pesisir, dan daerah resapan air, industri, pertambangan dan lain-lain.



Setiap wilayah dalam Kabupaten Banyuwangi dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian kelima dimensi tersebut. Melalui pendekatan ini, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya terfokus pada wilayah dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga mendorong akselerasi pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal, dengan prinsip keadilan spasial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penentuan lokus pembangunan wilayah dalam RPJMD 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam memastikan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah penentuan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Banyuwangi :

Tabel 3.3 Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

No	Dimensi Pembangunan	Isu Permasalahan	Prioritas Wilayah	Dasar Penetapan (Data/Sumber)	Lokus Pembangunan Wilayah
1	Pertumbuhan Ekonomi	Sektor Pariwisata masih bergantung pada alam, dengan belum optimalnya diversifikasi, infrastruktur, serta SDM yang belum merata.	Kec. Glagah Kec. Giri Kec. Licin Kec. Tegaldlimo Kec. Pesanggaran Kec. Siliragung Kec. Wongsorejo	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata (RTRW Kab. Banyuwangi Tahun 2024 - 2044)	Kec. Glagah Kec. Giri Kec. Licin Kec. Tegaldlimo Kec. Pesanggaran Kec. Siliragung Kec. Wongsorejo Kec. Bangorejo Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Glenmore Kec. Muncar Kec. Srono
		Sektor pertanian memiliki tantangan alih fungsi lahan, penggunaan teknologi yang masih konvensional, serta harga jual hasil panen yang kurang stabil; Menjadi arahan Kawasan wasembada pangan, Air, dan Energi tapal Kuda	Kec. Licin Kec. Glagah Kec. Bangorejo Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Glenmore	- Penetapan Kawasan Strategis Agropolitan (RTRW Kab. Banyuwangi Tahun 2024 - 2044) - Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030	
		Sektor perikanan menghadapi masalah minimnya infrastruktur pelabuhan, serta industri pengolahan hasil laut yang belum optimal.	Kec. Muncar Kec. Srono Kec. Kalipuro	Penetapan Kawasan Strategis Minapolitan (RTRW Kab. Banyuwangi 2024 - 2044)	
		Pengembangan industri belum merata dan terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara kawasan industri yang ada masih membutuhkan peningkatan infrastruktur	Kec. Wongsorejo	Penetapan Kawasan Strategis Industri (RTRW Kab. Banyuwangi 2024 - 2044)	
2	Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Penduduk miskin ekstrem yang hidup dengan pendapatan rendah dan akses layanan dasar terbatas tersebar di beberapa wilayah	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Kabat Kec. Muncar Kec. Rogojampi	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RPKD) Tahun 2025 - 2029	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Kabat Kec. Muncar Kec. Rogojampi



No	Dimensi Pembangunan	Isu Permasalahan	Prioritas Wilayah	Dasar Penetapan (Data/Sumber)	Lokus Pembangunan Wilayah
		Resiko stunting di Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Glenmore Kec. Sempu Kec. Banyuwangi	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RPKD) Tahun 2025 - 2029	Kec. Glenmore Kec. Sempu Kec. Banyuwangi Kec. Blimbingsari Kec. Bangorejo Kec. Srono
		Tingkat Pendidikan yang rendah	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Kabat Kec. Glenmore Kec. Blimbingsari	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RPKD) Tahun 2025 - 2029	
		Tingkat Pengangguran tinggi	Kec. Songgon Kec. Glenmore Kec. Sempu Kec. Banyuwangi Kec. Bangorejo Kec. Srono	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RPKD) Tahun 2025 - 2029	
		Penerima Jaminan Sosial	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Kabat Kec. Glenmore Kec. Muncar Kec. Sempu	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RPKD) Tahun 2025 - 2029	
		Minimnya akses air bersih, sanitasi dan hunian layak	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Glenmore Kec. Sempu Kec. Banyuwangi	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RPKD) Tahun 2025 - 2029	
		Rendahnya kepemilikan aset	Kec. Kalipuro Kec. Glenmore Kec. Muncar Kec. Banyuwangi Kec. Kabat Kec. Blimbingsari Kec. Rogojampi	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RPKD) Tahun 2025 - 2029	
3	Sumberdaya Manusia	Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cukup tinggi tersebar di beberapa wilayah	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Kabat Kec. Glenmore Kec. Blimbingsari	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RPKD) Tahun 2025 - 2029	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Kabat Kec. Glenmore Kec. Blimbingsari
4	Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya tata kelola dan penegakan hukum Hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2045 KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025 - 2029	Kabupaten Banyuwangi
5	Lingkungan Hidup	Aktivitas pertambangan, khususnya tambang emas dan mineral, menimbulkan kekhawatiran terhadap degradasi lingkungan dan konflik sosial	Kec. Pesanggaran	Penetapan Kawasan Strategis Pertambangan (RTRW Kab. Banyuwangi 2024 - 2044)	Kec. Pesanggaran Kec. Tegaldlimo Kec. Purwoharjo Kec. Licin Kec. Kalipuro Kec. Wongsorejo Kec. Kabat Kec. Bangorejo Kec. Glenmore



No	Dimensi Pembangunan	Isu Permasalahan	Prioritas Wilayah	Dasar Penetapan (Data/Sumber)	Lokus Pembangunan Wilayah
		Minimnya akses air bersih dan sanitasi layak	Kec. Wongsorejo Kec. Songgon Kec. Kalibaru Kec. Kalipuro Kec. Glenmore Kec. Sempu Kec. Banyuwangi	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (RKPD) Tahun 2025 - 2029	Kec. Kalibaru Kec. Sempu Kec. Siliragung Kec. Songgon Kec. Muncar Kec. Banyuwangi
		Degradasi lingkungan akibat kerusakan hutan dari pembalakan liar, pariwisata yang melebihi kapasitas lingkungan, serta pertumbuhan industri dan pemukiman yang tidak terkendali; masih rendahnya upaya resiliensi dan upaya mitigasi dimana Kab. Banyuwangi diarahkan menjadi kawasan konservasi dan geopark (TN Alas Purwo (E3) dan Geopark (Taman Bumi))	Kec. Pesanggaran Kec. Tegaldlimo Kec. Purwoharjo Kec. Licin Kec. Kalipuro Kec. Wongsorejo Kec. Kabat Kec. Bangorejo Kec. Glagah Kec. Glenmore Kec. Kalibaru Kec. Sempu Kec. Siliragung Kec. Songgon TN Alas Purwo (E3) Geopark (Taman Bumi)	- Penetapan Kawasan Strategis Daya dukung Lingkungan Hidup (RTRW Kab. Banyuwangi 2024 - 2044) - Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030	
		Daya dukung pangan (lahan pertanian) defisit	Kec. Pesanggaran Kec. Purwoharjo Kec. Kalipuro Kec. Wongsorejo Kec. Bangorejo Kec. Muncar Kec. Siliragung Kec. Banyuwangi	KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025 - 2029	
		Daya dukung sumberdaya air defisit	Kec. Muncar Kec. Gambiran Kec. Genteng Kec. Srono Kec. Rogojampi Kec. Blimbingsari Kec. Banyuwangi Kec. Giri	KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025 - 2029	
		Pengelolaan persampahan belum optimal	Kabupaten Banyuwangi	KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025 - 2029	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan dari hasil identifikasi lokus pembangunan wilayah berdasarkan lima dimensi utama diatas, selanjutnya adalah penentuan urgensi penanganan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Dalam proses penetapannya, lokus pembangunan akan ditentukan melalui mekanisme scoring berdasarkan tingkat urgensi dan potensi setiap wilayah dalam memenuhi indikator pembangunan.



Pendekatan skoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Berikut ini adalah skoring penentuan urgensi penanganan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Banyuwangi :

Tabel 3.4 Skoring Penentuan Urgensi Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Penilaian										Tota l	Kriteria
		Dimensi Lingkunga n (20%)		Dimensi Kemiskina n (25%)		Dimensi SDM (20%)		Dimensi Ekonomi (25%)		Dimensi Reformasi Birokrasi (10%)			
		Sko r	Nilai	Sko r	Nilai	Sko r	Nilai	Sko r	Nilai	Sko r	Nilai		
1	Pesanggaran	3	0.6	1	0.25	1	0.2	3	0.75	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
2	Siliragung	2	0.4	1	0.25	1	0.2	3	0.75	3	0.3	1.9	Lokus Menengah
3	Bangorejo	2	0.4	2	0.5	1	0.2	3	0.75	3	0.3	2.15	Lokus Menengah
4	Purwoharjo	2	0.4	1	0.25	1	0.2	1	0.25	3	0.3	1.4	Lokus Pendukung
5	Tegaldlimo	3	0.6	1	0.25	1	0.2	3	0.75	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
6	Muncar	2	0.4	3	0.75	1	0.2	3	0.75	3	0.3	2.4	Lokus Utama
7	Cluring	1	0.2	1	0.25	1	0.2	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
8	Gambiran	1	0.2	1	0.25	1	0.2	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
9	Tegalsari	1	0.2	1	0.25	1	0.2	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
10	Glenmore	1	0.2	3	0.75	3	0.6	3	0.75	3	0.3	2.6	Lokus Utama
11	Kalibaru	2	0.4	1	0.25	3	0.6	3	0.75	3	0.3	2.3	Lokus Menengah
12	Genteng	1	0.2	3	0.75	1	0.2	1	0.25	3	0.3	1.7	Lokus Menengah
13	Srono	1	0.2	3	0.75	1	0.2	3	0.75	3	0.3	2.2	Lokus Menengah
14	Rogojampi	1	0.2	2	0.5	1	0.2	1	0.25	3	0.3	1.45	Lokus Pendukung
15	Blimbingsari	1	0.2	3	0.75	3	0.6	1	0.25	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
16	Kabat	1	0.2	1	0.25	3	0.6	1	0.25	3	0.3	1.6	Lokus Pendukung
17	Singojuruh	1	0.2	1	0.25	1	0.2	1	0.25	3	0.3	1.2	Lokus Pendukung
18	Sempu	2	0.4	3	0.75	1	0.2	1	0.25	3	0.3	1.9	Lokus Menengah
19	Songgon	1	0.2	3	0.75	3	0.6	1	0.25	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
20	Glagah	1	0.2	1	0.25	1	0.2	3	0.75	3	0.3	1.7	Lokus Menengah
21	Licin	1	0.2	1	0.25	1	0.2	3	0.75	3	0.3	1.7	Lokus Menengah
22	Banyuwangi	3	0.6	3	0.75	1	0.2	1	0.25	3	0.3	2.1	Lokus Menengah
23	Giri	1	0.2	1	0.25	1	0.2	3	0.75	3	0.3	1.7	Lokus Menengah
24	Kalipuro	3	0.6	3	0.75	3	0.6	3	0.75	3	0.3	3	Lokus Utama
25	Wongsorejo	3	0.6	3	0.75	3	0.6	3	0.75	3	0.3	3	Lokus Utama

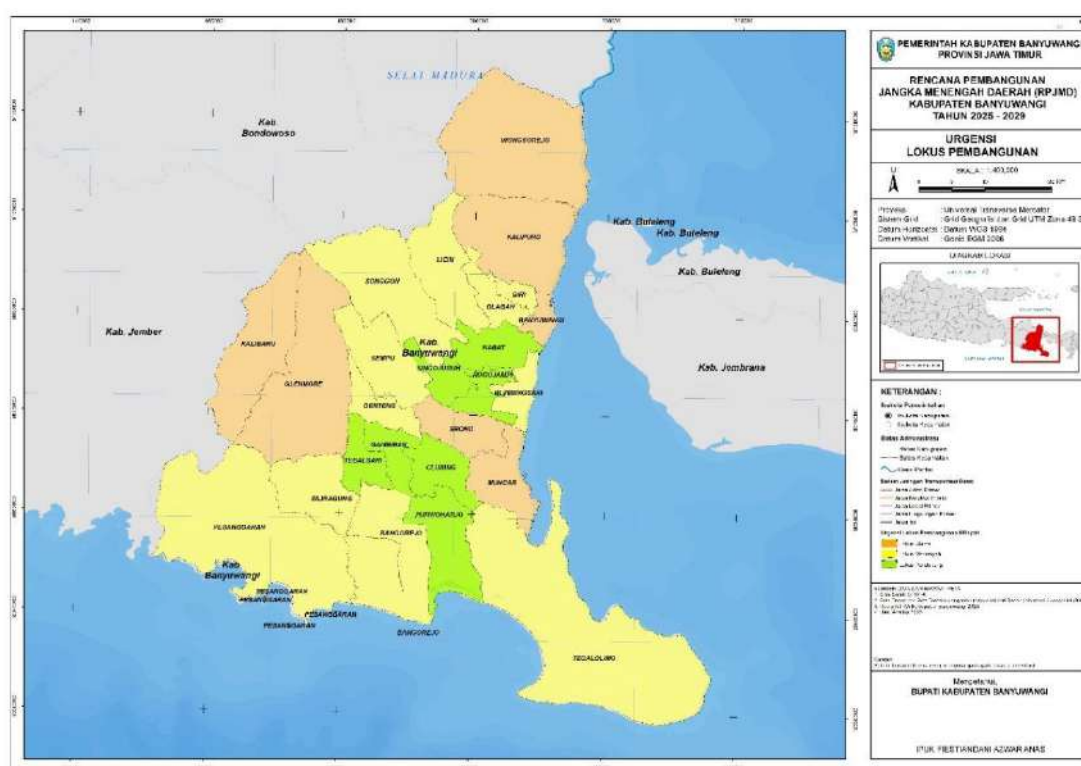
Keterangan :

2,35 – 3,00 Lokus Utama.
 1,68 – 2,34 Lokus Menengah
 1,00 – 1,67 Lokus Pendukung

Berdasarkan hasil analisis skoring yang mempertimbangkan berbagai dimensi strategis menunjukkan bahwa lokus utama terdiri dari

7 (tujuh) kecamatan, yaitu **Kecamatan Muncar, Glenmore, Kalipuro, Kalibaru, Banyuwangi, Srono, dan Wongsorejo**. Lokus menengah mencakup 11 kecamatan, yaitu **Kecamatan Pesanggrahan, Siliragung, Bangorejo, Tegaldlimo, Blimbingsari, Licin, Genteng, Sempu, Songgon, Glagah dan Giri**. Sementara lokus pendukung mencakup 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan **Purwoharjo, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Kabat, Singojuruh dan Rogojampi**.

Penentuan lokus ini bertujuan untuk mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan tingkat urgensi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, sehingga strategi pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Berikut adalah sebaran pembagian lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Banyuwangi :



Gambar 3.7 Lokus Pembangunan *Wilayah* di Kabupaten Banyuwangi

D. Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, permasalahan, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan



menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian misi pembangunan.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri dan Berkelanjutan	Penguatan iklim investasi yang inklusif dan berdaya saing	Penguatan kerjasama dengan pengusaha untuk menarik Investasi Daerah
		Penyederhanaan dan Digitalisasi Perizinan
		Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur
		Penciptaan stabilitas kondusifitas daerah
		Meningkatkan Kompetensi dan Ketersediaan Tenaga Kerja
		Penciptaan sentra produk unggulan daerah
		insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		Pengembangan multi-infrastructure backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis (tol probolinggo banyuwangi & jalan lintas selatan)
	Penguatan sektor unggulan yang bertumpu pada nilai tambah Sektor Pertanian dan Industri Berbasis Lokal, serta mendorong Daya Saing Pariwisata melalui Penguatan Destinasi	Meningkatkan Produksi Bahan Baku Lokal
		Industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi dalam rangka meningkatkan nilai tambah
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dan sustainable dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) diwilayah Ijen Geopark



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Mewujudkan Lembaga Pengelola Wisata yang Profesional
		Menjaga destinasi pariwisata yang berkelanjutan
		Peningkatan produktivitas, Kualitas dan daya saing produk pertanian (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan) yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta ketersediaan air berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi
		Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi petani, nelayan dan petambak.
		Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
		Peningkatan produktivitas BUMD.
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy),
		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism dan wilayah kawasan pariwisata
		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas sebagai upaya mengoptimalkan akses



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	Penguatan Stabilitas Ekonomi melalui peningkatan daya beli dan Stabilitas Harga serta melalui distribusi perdagangan yang efisien	pariwisata dan potensi wilayah.
		Membangun Infrastruktur Logistik yang Terpadu dan Berkualitas
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (pembiayaan dan pemasaran), kemitraan usaha dan perluasan akses ekosistem digital (ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis)
		Peningkatan pemasaran Produk daerah melalui digital marketplace/platform.
		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang mendorong bertumbuhnya pusat ekonomi baru
		Mengendalikan Inflasi untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat dengan pemantauan standar harga
		Penguatan pengelolaan jalan daerah, jalan desa dan jalan lingkungan sebagai wujud mengurangi disparitas antar wilayah
		Perlindungan tenaga kerja
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan
	Membangun ekosistem lingkungan hidup yang berkualitas guna menstabilkan dampak pembangunan ekonomi	Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup
		Mendorong pembangunan ekonomi Hijau
		Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
		peningkatan infrastruktur kebencanaan
		Penguatan mitigasi, penanganan darurat, dan pemulihan bencana serta peningkatan ketahanan



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		bencana khususnya kawasan TN meru betiri , TN alas purwo, dan Geopark Ijen
		Menjaga Sumber mata air yang berkelanjutan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Perencanaan dan pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan	Pelindungan sosial adaptif dan Perluasan Jaminan Sosial yang tepat sasaran	perluasan bantuan pangan pada lansia dan kelompok rentan
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		Perbaikan rumah tidak layak huni yang mencakup akses air bersih dan sanitasi sehat
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat
		Memastikan keberlanjutan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman
		Perlindungan usaha yang mengalami kerugian akibat bencana
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau, penyediaan hunian vertikal, penataan kawasan kumuh, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dengan kebijakan yang inklusif	Mengembalikan fungsi sosial dengan peningkatan kapasitas di individu pada kelompok rentan
		Menciptakan nilai-nilai gotong royong dan toleransi pada kegiatan di masyarakat
		Merumuskan kebijakan yang inklusif untuk mendorong akses yang sama serta perlindungan hukum pada kelompok rentan
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil
		Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya lokal dalam bingkai NKRI
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
	Mendorong kolaborasi yang fokus pemberdayaan ekonomi dengan sasaran kelompok miskin dan rentan	mendorong CSR untuk pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas usaha
		Menfasilitasi akses modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha
		menciptaan wirausaha muda dan mendekatkan kesempatan kerja
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling
		Penguatan lembaga ekonomi desa
		Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan, pemberdayaan,



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	menurunkan kemiskinan antar generasi dengan memutus rantai kemiskinan melalui tingkat pendidikan dan kesehatan anak	dan peningkatan terhadap akses ekonomi
		menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas dan aman
		fasilitasi beasiswa pendidikan bagi anak berprestasi keluarga miskin
		pemenuhan gizi ibu hamil, anak usia dini dan pelajar
		pemahaman secara luas pola hidup sehat dengan pendamping teknis di desa dan kelurahan
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
Memantapkan Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter	Meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pendidikan serta pengembangan budaya karakter.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		Harmonisasi kebijakan penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
		Menciptakan lingkungan yang berpendidikan pada usia sekolah
		Meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi Masyarakat
		menguatkan iklim sekolah yang ramah anak
		pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan religi
		pengembangan pendidikan berbasis teknologi dan sains
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata.
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah Afirmasi
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
		Perluasan akses dan kesempatan masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
		Peningkatan digitalisasi layanan pendidikan
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, serta mengembangkan mitigasi



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, serta penguatan sistem kesehatan yang adaptif terhadap perubahan.	struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer berbasis siklus hidup dan optimalisasi pelayanan kesehatan rujukan secara kompeherensif.
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap berbasis kearifan lokal
		Pengendalian penyakit tidak menular
		Digitalisasi dan inovasi dalam layanan kesehatan
		Penguatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
		Peningkatan kecukupan, kompetensi, dan distribusi tenaga kesehatan
		Penguatan layanan pemeriksaan kesehatan gratis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
		Penguatan ketahanan kesehatan daerah dan



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital	Penguatan sistem manajemen pemerintahan yang berorientasi capaian Kinerja tinggi dan Akuntabel	Sanitasi lingkungan untuk antisipasi dampak perubahan iklim pada kesehatan.
		Perbaikan tata kelola perencanaan berbasis <i>evidence dan science</i>
		Penerapan sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi
		Mendorong kelembagaan yang berorientasi pada efektifitas kinerja
		Menciptakan Reward and Punishment sesuai Kinerja yang dihasilkan
		Penguatan budaya kerja yang Integritas dan berkolaborasi
		Meningkatkan tata kelola PAD dengan inovasi dan sistem yang terintegrasi
		menerapkan belanja yang berorientasi pada sasaran yang efektif
		Sinergitas stakeholders dalam pengembangan pembiayaan dan manajemen tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional
		Pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel
		Peningkatan pajak pada sektor produktif
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi.
		Peningkatan Kompetensi aparatur pemerintah



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan sumber daya aparatur yang adaptif dan Agile	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi dan Penguatan Inovasi Pelayanan	menciptakan aparatur yang Ber-Akhlak
		Peningkatan kapasitas aparatur desa
		efektivitas pelayanan publik sampai ke tingkat desa
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
		Penguatan Inovasi Layanan Publik pada seluruh sektor pelayanan di Daerah
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah

3.2.2 PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025 – 2029

Guna Mendukung 17 Program prioritas nasional dan Program Kerja dari Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merumuskan program (quick win) yang juga mendukung program nasional dan program Jawa Timur. Maka berikut Program Prioritas Kabupaten Banyuwangi :

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Program Prioritas /Quick Win Kabupaten Banyuwangi
Mencapai Swasembada pangan, energi , dan air Menjamin Ketersediaan Pupuk, benih, dan pestisida langsung ke Petani	Jatim Agro , Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional	Penguatan sektor unggulan rakyat: pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif
Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha	Jatim Kerja , Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan	Mengakselerasi pengentasan kemiskinan



Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Program Prioritas /Quick Win Kabupaten Banyuwangi
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam termasuk sumberdaya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi	Penguatan sektor unggulan rakyat: pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif
Menjamin Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Jatim Akses , Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Mempercepat pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup
Penguatan Pendidikan , sains dan teknologi serta digitalisasi	Jatim Cerdas , Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pendidikan merata dan berkualitas untuk generasi berakhlak, berkarakter, dan berdaya saing
Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia: Peningkatan Kesehatan dan Penyediaan obat untuk Rakyat	Jatim Sehat , Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC)	Kesehatan untuk Semua dan Penguata Gizi ibu hamil, anak usia dini, serta pelajar
Penguatan Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Jatim Harmoni , Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengarusutamaan Nilai-nilai Kesejahteraan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Peradaban	Mengakselerasi pengentasan kemiskinan
Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah		
Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga		
pemberantasan kemiskinan	Jatim Sejahtera , Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu	Mengakselerasi pengentasan kemiskinan



Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Program Prioritas /Quick Win Kabupaten Banyuwangi
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Mempercepat digitalisasi layanan publik dan ASN berbudaya kerja BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif)
Pemberantasan korupsi dan narkoba		
Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara		
Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Iklim dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan; Jatim Harmoni	Mempercepat pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup

Langkah strategis dalam mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Program prioritas bertujuan untuk menjawab isu strategis, mendukung visi dan misi kepala daerah, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Menentukan program prioritas yang selaras dengan tujuan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pohon kinerja sesuai dengan permenpan 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Program Prioritas juga memperhatikan program penapisan KLHS dan RTRW serta amanat program prioritas kepala daerah. Program prioritas di transformasikan ke dalam program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020. maka didefinisikan kedalam program:

Tabel 3.6 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
Mewujudkan Banyuwangi Yang Maju, Sejahtera Dan Berkah Untuk Semua						
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Investasi Yang Berkualitas		Pertumbuhan Ekonomi		
				Icor		
			Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi Daerah Yang Dikembangkan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Ikm Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Mempunyai Lkpm Sesuai Standar	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Tata Kelola Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Meningkatnya Sarana Jalan Yang Berfungsi Baik	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Dibina	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	Program Hubungan Industrial	
			Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Daerah Aman Dari Daya Rusak Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
				Persentase Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Sda		
				Persentase Daerah Irigasi Yang Terlayani		
				Persentase Peningkatan Das Yang Dikonservasi		
			Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Negara Dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Tik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Perda	Persentase Pelanggaran Perda Perda Yang Tertangani	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Transformasi Ekonomi		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
		Bernilai Tambah Tinggi Berkualitas Potensi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi	Pertumbuhan PDRB Pariwisata		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan		
				Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
				Peningkatan Produksi Komoditas Pternakan		
				Peningkatan Produksi Hortikultura		
			Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Produksi Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Mendukung Pternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Mendukung Tanaman Pangan		
				Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Mendukung Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
			Meningkatnya Kesehatan Hewan Dan Kesmavet	Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Usaha Produk Hewan Yang Bersertifikasi Pra/Nkv		
			Meningkatnya Perlindungan Usaha Tani	Luas Areal Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Dpi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Meningkatnya Kualitas Sdm Dan Kelembagaan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap Nelayan Kecil	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	% Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Regulasi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Meningkatnya Produksi Dan Pemasaran Usaha Olahan Hasil Perikanan	% Peningkatan Produksi Produk Usaha Mikro Kecil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatkan Daya Tarik Terhadap Destinasi Pariwisata	Length Of Stay	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional	% Pertumbuhan Pelaku Seni	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya Pengembangan Budaya Lokal Yang Dilestarikan	% Budaya Lokal Yang Dilestarikan Dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya Perencanaan Dan Pengembangan Industri	% Pertumbuhan Nilai Produksi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
				% Peningkatan Sentra Industri Pengolahan		
				Jumlah Ikm Yang Memiliki Jaringan Pemasaran		
			Meningkatnya Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Nilai Omset	Program Pengembangan Umkm	
			Meningkatnya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Wirausaha Mandiri	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Presentase Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif	%Peningkatan Pendapatan Pelaku Ekraf	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Meningkatnya Efisiensi		Pertumbuhan PDRB Perdagangan		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
		Rantai Pasok Dan Perluasan Konektivitas Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Layanan Angkutan Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	
				Persentase Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan		
			Meningkatnya Sarana Jalan Yang Berfungsi Baik	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Mengalami Peningkatan Kualitas	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Kualitas Pengembangan Ekspor	Jumlah Realisasi Ekspor (Dalam Juta U\$)	Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (Utt) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		Indeks Daya Beli (PPP)		
			Meningkatnya Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (Dalam Dan Luar Negeri)	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Per Komoditas Bahan Pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Meningkatnya Perekonomian Dan Pembangunan	Peringkat Tpid	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sebagai Penunjang Ekonomi Yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Disusun	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Dan Aktifitas Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Terkendalinya Alih Fungsi Lahan Hijau	Persentase Rth	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Meningkatnya Presentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten	Persentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Ijin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
			Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya Penghargaan Terhadap Pelestari Lingkungan Hidup	Persentase Penghargaan Terhadap Pelaku Pelestari Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Rasio Sampah Daerah Yang Tertangani	Program Pengelolaan Persampahan	
				Persentase Rata-Rata Sampah Yang Masuk Ke Tpa		
			Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya Prosentase Wilayah Yang Telah Mempunyai Rencana Detail Tata Ruang	Persentase Wilayah Yang Telah Tersusun Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya Perumahan Yang Dilengkapi Psu	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Psu (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kecukupan Luasan Rth Publik	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
				Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana		
				Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana		
			Meningkatnya Pencegahan, Pananggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Respons Time Rate Maksimal 15 Menit Pada Wilayah Manajemen Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Dan Rentan		Persentase Penduduk Miskin		
				Indeks Kebutuhan Dasar		
			Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Angka Kecukupan Protein		
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Pasca Bencana Dan Terdampak Relokasi	Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	
			Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki Diluar Kawasan Kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Per Komoditas Bahan Pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Ada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	Program Penanganan Bencana	
			Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Meningkatnya Peranan		Indeks Peranan Sosial		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
		Sosial Masyarakat	Meningkatnya Rehabilitas Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	
				Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti		
				Persentase Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti		
		Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Di Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Angka Potensi Konflik Sara Di Masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
				Persentase Masyarakat Yang Memiliki Wawasan Kesabangsaan, Ideologi Pancasila Dan Ipoleksosbudhankam Yang Baik (Nilai Post Test Lebih Dari 70)		
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan Tppo Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
		Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak (Pha)		% Peningkatan Partisipasi Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Dan Rentan		Indeks Keberdayaan Ekonomi		
				Indeks Gini		
			Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lkd)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa Dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
				Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Psks Yang Melaksanakan Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
			Meningkatnya Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (Dalam Dan Luar Negeri)	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatnya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		Menurunnya Transmisi Kemiskinan		Indeks Keparahan Kemiskinan		
			Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peserta Didik Miskin Dan Berprestasi Yang Mendapatkan Beasiswa Dan Pelayanan Pendidikan Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	
			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		
				Penemuan Kasus Tbc		
				Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Standar		
				Prevalensi Wasting (Gizi Kurang Dan Gizi Buruk) Pada Balita		
				Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
				Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (Phbs) Rumah Tangga		
				Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1		
			Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Terlayannya Keluarga Yang Memanfaatkan Puspaga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	
	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata		Indeks Pembangunan Manusia		
				1. Harapan Lama Sekolah		
				2. Rata -Rata Lama Sekolah		
				3. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Nilai Rapor Berkategori Baik		
			Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peserta Didik Miskin Dan Berprestasi Yang Mendapatkan Beasiswa Dan Pelayanan Pendidikan Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	
				Persentase Peserta Didik Yang Telah Mencapai Batas Kompetensi Minimum Untuk Numerasi		
				Persentase Peserta Didik Yang Telah Mencapai Batas Kompetensi Minimum Untuk Literasi		
				Jumlah Peserta Didik Yang Berprestasi		
				Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik		
			Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Paud Berakreditasi Minimal B	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
				Persentase Sd Berakreditasi Minimal B		
				Persentase Smp Berakreditasi Minimal B		
				Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Berakreditasi Minimal B		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Meningkatnya Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Bahasa Dan Sastra Daerah Yang Dikembangkan Dan Dilindungi Di Kabupaten Banyuwangi	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	
			Meningkatnya Pengembangan Kurikulum	Persentase Perangkat Kurikulum Yang Dikembangkan	Program Pengembangan Kurikulum	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan	% Perpustakaan Yang Terakreditasi	Program Pembinaan Perpustakaan	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup		
			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		
				Penemuan Kasus Tbc		
				Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Standar		
				Prevalensi Wasting (Gizi Kurang Dan Gizi Buruk) Pada Balita		
				Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri		
				Persentase Puskesmas Yang Memenuhi Rasio Puskesmas Terhadap Populasi		
				Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (Phbs) Rumah Tangga		
				Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Apotek Dan Toko Obat Yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mcpr)		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
	Terwujudnya Transformasi Birokrasi Yang Berorientasi Layanan	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan		Indeks Reformasi Birokrasi		
				Indeks Pemerintah Digital		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Konten Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Tik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Opd Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya Keamanan Sistem Informasi Pemerintah	Indeks Kami	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	
		Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Akuntabel		Sakip		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Persentase Perangkat Daerah Yang Kinerjanya (Tujuan Dan Sasaran Renstra) Tercapai		
			Meningkatnya Kualitas Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	% Pelayanan Realisasi Pengeluaran Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				% Pelayanan Realisasi Penerimaan Keuangan		
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Lkpd Yang Sesuai Sap Dan Tepat Waktu		
			Meningkatnya Tata Kelola Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu		



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Pemenuhan Lbmd Tepat Waktu	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				% Pertumbuhan Objek Pendapatan Baru		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	% TI Akuntabilitas Kinerja	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				% TI Tatakelola Kinerja		
				% TI Tatakelola Keuangan		
				% TI Akuntabilitas Keuangan		
			Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	% TI Implementasi Mr	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
				% TI Efektivitas Rtp		
				% TI Pencegahan Korupsi		
				% TI Dumas, % TI Pelimpahan Aph/Itprop/Itjen		
		Meningkatnya Penerapan Meritokrasi ASN		Indeks Sistem Merit		
			Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Asn	Persentase Penilaian Dan Kapasitas Kinerja Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	
				Nilai Indeks Implementasi Nspk Manajemen Asn		
			Meningkatnya Kualitas Asn	Persentase Asn Yang Meningkat Kompetensinya	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Terwujudnya Layanan Publik Yang Prima		Indeks Pelayanan Publik		
				Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Ikm Kesra	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Sakip Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya Kualitas Pencatatan Sipil	Persentase Layanan Pencatatan Sipil Yang Selesai Tepat Waktu	Program Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya Jumlah Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk Yang Selesai Tepat Waktu	Program Pendaftaran Penduduk	



Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Meningkatnya Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kelitbangan Yang Sesuai Dengan Isu Strategis Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Prosentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Yang Di Fasilitas	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
				Prosentase Pengesahan Perda Yang Tepat Waktu		
				Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dprd		
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya Di Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	



BAB IV

**Program Perangkat Daerah
Dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah**



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam BAB IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.008.792.611.566,00		1.010.698.683.600,00		1.010.775.443.600,00		1.016.892.927.200,00		1.044.140.126.800,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					915.389.611.566,00		917.119.202.700,00		917.188.854.200,00		922.739.927.000,00		947.464.337.700,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	91	92	915.389.611.566,00	93	917.119.202.700,00	93	917.188.854.200,00	94	922.739.927.000,00	95	947.464.337.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					93.030.000.000,00		93.205.776.200,00		93.212.856.300,00		93.777.005.400,00		96.289.719.700,00	
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan berkondisi baik (%)	94,52	94,72	94,92	93.030.000.000,00	95,12	93.205.776.200,00	95,32	93.212.856.300,00	95,52	93.777.005.400,00	95,72	96.289.719.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase peserta didik miskin dan berprestasi yang mendapatkan Beasiswa dan Pelayanan Pendidikan Sekolah (%)	69,85	71,85	73,85		75,85		77,85		79,85		81,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Batas Kompetensi Minimum untuk Literasi (%)	69,89	70,89	71,89		72,89		73,89		74,89		75,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Batas Kompetensi Minimum untuk Numerasi (%)	69,15	70,15	71,15		72,15		73,15		74,15		75,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah peserta didik yang Berprestasi (Angka)	217	237	257		277		297		317		337		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					94.000.000,00		94.177.600,00		94.184.800,00		94.754.800,00		97.293.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan Kurikulum	Persentase perangkat kurikulum yang dikembangkan (%)	100	100	100	94.000.000,00	100	94.177.600,00	100	94.184.800,00	100	94.754.800,00	100	97.293.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					71.000.000,00		71.134.100,00		71.139.500,00		71.570.000,00		73.487.700,00	
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi di Masing-Masing Sekolah (%)	93,32	94	95	71.000.000,00	96	71.134.100,00	97	71.139.500,00	98	71.570.000,00	100	73.487.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					142.000.000,00		142.268.300,00		142.279.100,00		143.140.100,00		146.975.400,00	
Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD berakreditasi minimal B (%)	85,25	85,45	85,65	142.000.000,00	85,85	142.268.300,00	86,05	142.279.100,00	86,25	143.140.100,00	86,45	146.975.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	97,03	97,23	97,43		97,63		97,83		98,03		98,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (%)	82,72	82,92	83,12		83,32		83,52		83,72		83,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan kesetaraan berakreditasi minimal B (%)	30,51	30,71	30,91		31,11		31,31		31,51		31,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					66.000.000,00		66.124.700,00		66.129.700,00		66.529.900,00		68.312.500,00	
Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan dan dilindungi di Kabupaten Banyuwangi (%)	100	100	100	66.000.000,00	100	66.124.700,00	100	66.129.700,00	100	66.529.900,00	100	68.312.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					572.180.570.163,00		573.261.682.500,00		573.305.219.900,00		576.775.017.000,00		592.229.449.800,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					355.712.570.163,00		356.384.674.600,00		356.411.740.500,00		358.568.839.800,00		368.176.534.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	95	95	95,5	355.712.570.163,00	96	356.384.674.600,00	96,5	356.411.740.500,00	97	358.568.839.800,00	97	368.176.534.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					206.260.000.000,00		206.649.720.200,00		206.665.414.900,00		207.916.209.700,00		213.487.233.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	87,40	88	88,40	206.260.000.000,00	89,40	206.649.720.200,00	90,40	206.665.414.900,00	91,40	207.916.209.700,00	92	213.487.233.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	74,5	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1,38	1,38	2,3		2,76		3,23		3,69		4,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan (%)	88,5	89	89		89,5		90		90,50		90,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang sesuai standar (%)	0	40	50		60		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	80,42	95	95		97		98		99		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	93,95	94	95		95,5		96		96,5		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	10	10	20		35		50		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 (%)	92,1	92,6	93,1		93,6		94,1		94,6		95,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Rumah Tangga (%)	56	56	57		58		59		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang memenuhi rasio Puskesmas terhadap populasi (%)	15,5	15,5	15,5		17,30		19,10		20,80		20,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	79,18	75	77		79		81		83		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%)	6,5	6,3	6,3		6,1		5,9		5,7		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.563.000.000,00		1.565.953.300,00		1.566.072.200,00		1.575.550.400,00		1.617.766.600,00	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Angka)	2.3:1000	2.3:1000	2.3:1000	1.563.000.000,00	2.3:1000	1.565.953.300,00	2.3:1000	1.566.072.200,00	2.3:1000	1.575.550.400,00	2.3:1000	1.617.766.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					325.000.000,00		325.614.100,00		325.638.900,00		327.609.800,00		336.388.000,00	
Meningkatnya Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	90	92	325.000.000,00	94	325.614.100,00	96	325.638.900,00	98	327.609.800,00	100	336.388.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (%)	39,8	42	44		46		48		50		52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					8.320.000.000,00		8.335.720.300,00		8.336.353.400,00		8.386.807.300,00		8.611.528.200,00	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	40	40	42	8.320.000.000,00	44	8.335.720.300,00	46	8.336.353.400,00	48	8.386.807.300,00	50	8.611.528.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					476.463.063.628,00		477.363.320.800,00		477.399.574.400,00		480.288.924.100,00		493.158.053.700,00					
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.182.063.628,00		45.267.432.800,00		45.270.870.400,00		45.544.861.500,00		46.765.215.600,00					
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					45.182.063.628,00		45.267.432.800,00		45.270.870.400,00		45.544.861.500,00		46.765.215.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	92	94	94,50				95				95,50			96		96,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
																	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					76.971.000.000,00		77.116.433.800,00		77.122.290.600,00		77.589.055.100,00		79.668.019.800,00					
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase daerah aman dari daya rusak air (%)	89	89,2	89,4	76.971.000.000,00	89,6	77.116.433.800,00	89,8	77.122.290.600,00	90	77.589.055.100,00	90,2	79.668.019.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
	Persentase daerah irigasi yang terlayani (%)	68	68,1	68,2		68,3		68,4		68,5		68,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan SDA (%)	43	43,5	44		44,5		45		45,5		46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase peningkatan DAS yang dikonservasi (%)	33	34,67	36,34		38,01		39,68		41,32		43,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					95.156.000.000,00		95.335.793.400,00		95.343.033.800,00		95.920.075.400,00		98.490.211.500,00	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sehari-hari (%)	97,58	97,6	97,62	95.156.000.000,00	97,64	95.335.793.400,00	97,66	95.343.033.800,00	97,68	95.920.075.400,00	97,7	98.490.211.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					363.000.000,00		363.685.900,00		363.713.400,00		365.914.700,00		375.719.200,00	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	0,24	0,3	0,36	363.000.000,00	0,42	363.685.900,00	0,49	363.713.400,00	0,56	365.914.700,00	0,63	375.719.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					75.873.000.000,00		76.016.358.900,00		76.022.132.000,00		76.482.238.400,00		78.531.546.300,00	
Meningkatnya kualitas Sistem Drainase Kabupaten	Panjang Drainase Berfungsi Baik (Angka)	74,45	75,45	76,45	75.873.000.000,00	77,45	76.016.358.900,00	78,45	76.022.132.000,00	79,45	76.482.238.400,00	80,45	78.531.546.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					692.000.000,00		693.307.500,00		693.360.100,00		697.556.600,00		716.247.400,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Presentase gedung negara dalam kondisi baik (%)	34	35	37	692.000.000,00	40	693.307.500,00	45	693.360.100,00	47	697.556.600,00	50	716.247.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					3.768.000.000,00		3.775.119.500,00		3.775.406.200,00		3.798.255.900,00		3.900.028.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kecukupan luasan RTH Publik (%)	16,49	17,19	17,89	3.768.000.000,00	18,59	3.775.119.500,00	19,29	3.775.406.200,00	19,99	3.798.255.900,00	20,69	3.900.028.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten (%)	30,65	32,55	34,45		36,35		38,25		40,15		42,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					170.875.000.000,00		171.197.861.200,00		171.210.863.100,00		172.247.077.100,00		176.862.361.600,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	76,41	77,07	77,73	170.875.000.000,00	78,4	171.197.861.200,00	79,08	171.210.863.100,00	79,76	172.247.077.100,00	80,44	176.862.361.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.294.000.000,00		1.296.445.100,00		1.296.543.500,00		1.304.390.600,00		1.339.341.100,00	
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Jasa Kontruksi	Presentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (%)	79	80	81	1.294.000.000,00	82	1.296.445.100,00	83	1.296.543.500,00	84	1.304.390.600,00	85	1.339.341.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					6.289.000.000,00		6.300.882.700,00		6.301.361.300,00		6.339.498.800,00		6.509.362.700,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase wilayah yang telah tersusun perencanaan tata ruang (%)	25	33	41	6.289.000.000,00	50	6.300.882.700,00	58	6.301.361.300,00	66	6.339.498.800,00	75	6.509.362.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					35.861.000.000,00		35.928.757.500,00		35.931.486.400,00		36.148.953.200,00		37.117.548.100,00	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.887.000.000,00		2.892.454.600,00		2.892.674.600,00		2.910.181.800,00		2.988.158.600,00	
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Pasca	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana (%)	0	100	100	2.806.000.000,00	100	2.811.301.700,00	100	2.811.515.400,00	100	2.828.531.400,00	100	2.904.320.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bencana dan Terdampak Relokasi														Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas perumahan yang berijin	Presentase perumahan yang mendapatkan ijin (%)	0	0	100	81.000.000,00	100	81.152.900,00	100	81.159.200,00	100	81.650.400,00	100	83.838.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.940.000.000,00		1.943.665.600,00		1.943.813.200,00		1.955.577.700,00		2.007.976.500,00	
Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	2,71	3,54	4,56	1.940.000.000,00	5,45	1.943.665.600,00	6,57	1.943.813.200,00	7,58	1.955.577.700,00	8,59	2.007.976.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					11.422.000.000,00		11.443.581.400,00		11.444.450.400,00		11.513.715.200,00		11.822.220.200,00	
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar Kawsan Kumuh (%)	0	100	100	11.422.000.000,00	100	11.443.581.400,00	100	11.444.450.400,00	100	11.513.715.200,00	100	11.822.220.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					19.612.000.000,00		19.649.055.900,00		19.650.548.200,00		19.769.478.500,00		20.299.192.800,00	
Meningkatnya perumahan yang dilengkapi PSU	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	100	19.612.000.000,00	100	19.649.055.900,00	100	19.650.548.200,00	100	19.769.478.500,00	100	20.299.192.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					30.280.127.241,00		30.336.840.100,00		30.339.644.200,00		30.523.267.300,00		31.341.124.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.648.127.241,00		23.692.309.100,00		23.694.608.500,00		23.838.014.200,00		24.476.743.100,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	91	92	23.648.127.241,00	93	23.692.309.100,00	94	23.694.608.500,00	95	23.838.014.200,00	96	24.476.743.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	94,5	95	95		95,5		95,5		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.641.000.000,00		2.645.990.200,00		2.646.191.100,00		2.662.206.600,00		2.733.539.400,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Perda	Persentase penurunan pelanggaran PERDA (%)	4,1	4,1	4	2.641.000.000,00	3,8	2.645.990.200,00	3,6	2.646.191.100,00	3,4	2.662.206.600,00	3,2	2.733.539.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.814.000.000,00		1.817.427.500,00		1.817.565.700,00		1.828.565.900,00		1.877.561.100,00	
Terwujudnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui mitigasi, dan kesiapsiagaan, dan	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	0,75	0,75	0,75	1.814.000.000,00	0,75	1.817.427.500,00	0,75	1.817.565.700,00	0,75	1.828.565.900,00	0,75	1.877.561.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemulihan yang lebih optimal														Perlindungan Masyarakat
	Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Indeks)	0,81	0,81	0,81		0,82		0,82		0,82		0,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	0,52	0,52	0,52		0,53		0,53		0,53		0,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.177.000.000,00		2.181.113.300,00		2.181.278.900,00		2.194.480.600,00		2.253.280.900,00	
Meningkatnya Pencegahan, Pananggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Respons time rate Maksimal 15 Menit pada Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	75	75	75,5	2.177.000.000,00	76	2.181.113.300,00	76,5	2.181.278.900,00	77	2.194.480.600,00	77,5	2.253.280.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					32.150.481.999,00		32.211.229.400,00		32.213.675.600,00		32.408.641.400,00		33.277.016.700,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.080.481.999,00		11.101.418.200,00		11.102.261.200,00		11.169.455.000,00		11.468.735.600,00	
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	87,5	95	95,2	11.080.481.999,00	95,4	11.101.418.200,00	95,6	11.102.261.200,00	95,8	11.169.455.000,00	96	11.468.735.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					3.648.000.000,00		3.654.892.800,00		3.655.170.400,00		3.677.292.500,00		3.775.823.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	100	100	100	3.648.000.000,00	100	3.654.892.800,00	100	3.655.170.400,00	100	3.677.292.500,00	100	3.775.823.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					6.780.000.000,00		6.792.810.700,00		6.793.326.600,00		6.834.441.700,00		7.017.567.600,00	
Meningkatnya Rehabilitas Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	6.780.000.000,00	100	6.792.810.700,00	100	6.793.326.600,00	100	6.834.441.700,00	100	7.017.567.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					7.470.000.000,00		7.484.114.300,00		7.484.682.700,00		7.529.982.000,00		7.731.744.500,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhinya kebutuhan dasar (%)	100	100	100	7.470.000.000,00	100	7.484.114.300,00	100	7.484.682.700,00	100	7.529.982.000,00	100	7.731.744.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					2.496.000.000,00		2.500.716.100,00		2.500.906.000,00		2.516.042.100,00		2.583.458.400,00	
Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (%)	100	100	100	2.496.000.000,00	100	2.500.716.100,00	100	2.500.906.000,00	100	2.516.042.100,00	100	2.583.458.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					676.000.000,00		677.277.300,00		677.328.700,00		681.428.100,00		699.686.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	676.000.000,00	100	677.277.300,00	100	677.328.700,00	100	681.428.100,00	100	699.686.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					13.061.913.660,00		13.086.593.600,00		13.087.587.200,00		13.166.796.600,00		13.519.594.900,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.448.913.660,00		6.461.098.600,00		6.461.589.200,00		6.500.696.300,00		6.674.879.500,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	96,68	87	97	6.448.913.660,00	97	6.461.098.600,00	97,25	6.461.589.200,00	97,25	6.500.696.300,00	97,5	6.674.879.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					81.000.000,00		81.153.000,00		81.159.200,00		81.650.400,00		83.838.200,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga kerja	Persentase rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan pada RTK Kabupaten yang dilaksanakan (%)	100	75	100	81.000.000,00	100	81.153.000,00	100	81.159.200,00	100	81.650.400,00	100	83.838.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.852.000.000,00		1.855.499.200,00		1.855.640.100,00		1.866.870.900,00		1.916.892.900,00	
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	7,59	7,60	7,67	1.852.000.000,00	7,75	1.855.499.200,00	7,89	1.855.640.100,00	7,9	1.866.870.900,00	8	1.916.892.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	63,091	63,320	63,731		64,054		64,379		64,705		65,033		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					2.075.000.000,00		2.078.920.700,00		2.079.078.500,00		2.091.661.600,00		2.147.706.700,00	
Meningkatnya Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan tenaga kerja (Dala dan Luar Negeri) (%)	93,92	79,23	94,43	2.075.000.000,00	94,69	2.078.920.700,00	95	2.079.078.500,00	95,20	2.091.661.600,00	95,46	2.147.706.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.605.000.000,00		2.609.922.100,00		2.610.120.200,00		2.625.917.400,00		2.696.277.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	81,8	81,9	82	2.605.000.000,00	82,5	2.609.922.100,00	83	2.610.120.200,00	83,5	2.625.917.400,00	84	2.696.277.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.823.000.000,00		9.841.560.200,00		9.842.307.600,00		9.901.875.900,00		10.167.192.300,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					4.087.000.000,00		4.094.722.200,00		4.095.033.200,00		4.119.817.400,00		4.230.206.100,00	
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran responsif Gender (%)	59	60	60,50	4.087.000.000,00	65,50	4.094.722.200,00	70,50	4.095.033.200,00	75,50	4.119.817.400,00	80,50	4.230.206.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					904.000.000,00		905.708.000,00		905.776.800,00		911.258.800,00		935.675.600,00	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	904.000.000,00	100	905.708.000,00	100	905.776.800,00	100	911.258.800,00	100	935.675.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					517.000.000,00		517.976.900,00		518.016.200,00		521.151.400,00		535.115.400,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase terlayannya keluarga yang memanfaatkan puspa (%)	100	100	100	517.000.000,00	100	517.976.900,00	100	518.016.200,00	100	521.151.400,00	100	535.115.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					3.410.000.000,00		3.416.443.100,00		3.416.702.600,00		3.437.381.400,00		3.529.484.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% peningkatan partisipasi anak (%)	60	60	63	3.410.000.000,00	66	3.416.443.100,00	69	3.416.702.600,00	72	3.437.381.400,00	75	3.529.484.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					905.000.000,00		906.710.000,00		906.778.800,00		912.266.900,00		936.710.700,00	
Meningkatnya perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	905.000.000,00	100	906.710.000,00	100	906.778.800,00	100	912.266.900,00	100	936.710.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.779.000.000,00		7.793.698.100,00		7.794.290.400,00		7.841.463.700,00		8.051.572.000,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					423.000.000,00		423.799.200,00		423.831.400,00		426.396.600,00		437.821.700,00	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Presentase Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Unggulan (%)	100	100	100	423.000.000,00	100	423.799.200,00	100	423.831.400,00	100	426.396.600,00	100	437.821.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					3.826.000.000,00		3.833.229.000,00		3.833.520.300,00		3.856.722.000,00		3.960.061.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	Angka Kecukupan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.288	2.280	2.244	3.826.000.000,00	2.208	3.833.229.000,00	2.172	3.833.520.300,00	2.136	3.856.722.000,00	2.100	3.960.061.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Angka Kecukupan Protein (Gram/Kapita/Hari)	68,66	67	65		63		61		59		57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					3.023.000.000,00		3.028.711.800,00		3.028.941.900,00		3.047.273.800,00		3.128.924.100,00	
Menurunnya Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) (%)	1,84	2	2	3.023.000.000,00	2	3.028.711.800,00	1	3.028.941.900,00	1	3.047.273.800,00	1	3.128.924.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					507.000.000,00		507.958.100,00		507.996.800,00		511.071.300,00		524.765.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) (%)	100	100	100	507.000.000,00	100	507.958.100,00	100	507.996.800,00	100	511.071.300,00	100	524.765.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					446.000.000,00		446.842.600,00		446.876.400,00		449.581.100,00		461.627.400,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					214.000.000,00		214.593.200,00		214.617.000,00		216.521.200,00		225.002.200,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan (%)	100	100	100	214.000.000,00	100	214.593.200,00	100	214.617.000,00	100	216.521.200,00	100	225.002.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					132.000.000,00		132.249.400,00		132.259.400,00		133.059.900,00		136.625.200,00	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan (%)	0	100	100	132.000.000,00	100	132.249.400,00	100	132.259.400,00	100	133.059.900,00	100	136.625.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Fasilitasi Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah	Persentase fasilitasi kegiatan redistribusi tanah (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					34.912.750.142,00		34.978.716.600,00		34.981.373.400,00		35.193.090.000,00		36.036.073.100,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.622.750.142,00		18.657.937.300,00		18.659.354.500,00		18.772.285.700,00		19.275.280.700,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	89	90	91,80	18.622.750.142,00	93,64	18.657.937.300,00	95,51	18.659.354.500,00	97,42	18.772.285.700,00	97,42	19.275.280.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					169.000.000,00		169.319.300,00		169.332.200,00		170.357.000,00		174.921.600,00	
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Persentase Perencanaan bidang lingkungan hidup yang disusun (%)	100	100	100	169.000.000,00	100	169.319.300,00	100	169.332.200,00	100	170.357.000,00	100	174.921.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.143.000.000,00		1.145.159.600,00		1.145.246.600,00		1.152.178.000,00		1.183.050.100,00	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan sarana prasarana dan aktifitas penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	100	100	100	1.143.000.000,00	100	1.145.159.600,00	100	1.145.246.600,00	100	1.152.178.000,00	100	1.183.050.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					655.000.000,00		656.237.600,00		656.287.500,00		660.259.600,00		677.951.000,00	
Terkendalinya alih fungsi lahan hijau	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	95	95,5	95,7	655.000.000,00	95,9	656.237.600,00	96,1	656.287.500,00	96,3	660.259.600,00	96,5	677.951.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase penerbitan rekomendasi teknis ijin pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					145.000.000,00		145.274.000,00		145.285.000,00		146.164.300,00		150.080.700,00	
Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan (%)	74	75	78	145.000.000,00	80	145.274.000,00	82,85	145.285.000,00	83,75	146.164.300,00	84,71	150.080.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					142.000.000,00		142.268.400,00		142.279.200,00		143.140.300,00		146.975.600,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup (%)	20	20	22	142.000.000,00	24	142.268.400,00	26	142.279.200,00	28	143.140.300,00	30	146.975.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					56.000.000,00		56.105.800,00		56.110.100,00		56.449.700,00		57.962.200,00	
Meningkatnya Penghargaan terhadap pelestari lingkungan hidup	Persentase penghargaan terhadap pelaku pelestari lingkungan hidup (%)	65	70	72	56.000.000,00	73	56.105.800,00	74	56.110.100,00	75	56.449.700,00	76	57.962.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					13.975.000.000,00		14.001.414.600,00		14.002.478.300,00		14.087.255.400,00		14.364.851.200,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	31,3	38,78	40,26	13.975.000.000,00	41,75	14.001.414.600,00	43,24	14.002.478.300,00	44,72	14.087.255.400,00	46,21	14.364.851.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	27,5	30,67	30,87		31,07		31,27		31,47		31,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	31,3	38,78	40,26		41,75		43,24		44,72		46,21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	27,5	30,67	30,87		31,07		31,27		31,47		31,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.764.827.138,00		11.787.056.000,00		11.787.951.300,00		11.859.294.900,00		12.177.059.500,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.106.827.138,00		7.120.255.000,00		7.120.795.800,00		7.163.892.600,00		7.355.846.100,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	92,5	92,5	92,5	7.106.827.138,00	92,5	7.120.255.000,00	92,5	7.120.795.800,00	92,5	7.163.892.600,00	92,5	7.355.846.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					3.447.000.000,00		3.453.512.900,00		3.453.775.200,00		3.474.678.400,00		3.567.780.800,00	
Meningkatnya Jumlah Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu (%)	86	89	90	3.447.000.000,00	91	3.453.512.900,00	92	3.453.775.200,00	93	3.474.678.400,00	94	3.567.780.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					786.000.000,00		787.485.000,00		787.544.800,00		792.311.200,00		813.540.800,00	
Meningkatnya Kualitas Pencatatan Sipil	Persentase layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu (%)	80,1	89	90	786.000.000,00	91	787.485.000,00	92	787.544.800,00	93	792.311.200,00	94	813.540.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					425.000.000,00		425.803.100,00		425.835.500,00		428.412.700,00		439.891.800,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Kependudukan	Persentase data kependudukan yang ganda dan anomali (%)	1	1	1	425.000.000,00	1	425.803.100,00	1	425.835.500,00	1	428.412.700,00	1	439.891.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					12.534.844.446,00		12.558.528.200,00		12.559.481.900,00		12.635.495.200,00		12.974.057.600,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.271.844.446,00		5.281.805.200,00		5.282.206.200,00		5.314.175.500,00		5.456.566.300,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	92,5	92,5	93,50	5.271.844.446,00	94,50	5.281.805.200,00	95,50	5.282.206.200,00	96,50	5.314.175.500,00	97,50	5.456.566.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					38.000.000,00		38.071.800,00		38.074.700,00		38.305.100,00		39.331.500,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	0	25	30	38.000.000,00	50	38.071.800,00	70	38.074.700,00	80	38.305.100,00	90	39.331.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					102.000.000,00		102.192.700,00		102.200.400,00		102.819.000,00		105.574.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)	0	30	40	102.000.000,00	50	102.192.700,00	60	102.200.400,00	70	102.819.000,00	80	105.574.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					6.264.000.000,00		6.275.835.400,00		6.276.312.100,00		6.314.297.900,00		6.483.486.700,00	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	0	30	40	6.264.000.000,00	55	6.275.835.400,00	70	6.276.312.100,00	80	6.314.297.900,00	90	6.483.486.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					859.000.000,00		860.623.100,00		860.688.500,00		865.897.700,00		889.099.100,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0	35	50	859.000.000,00	60	860.623.100,00	70	860.688.500,00	80	865.897.700,00	90	889.099.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	25	30		35		40		45		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1.863.000.000,00		1.866.520.200,00		1.866.662.000,00		1.877.959.400,00		1.928.278.600,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					371.000.000,00		371.701.000,00		371.729.300,00		373.979.100,00		383.999.800,00	
Terkendalinya Penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2,02	2,02	2,02	371.000.000,00	2,02	371.701.000,00	2,02	371.729.300,00	2,02	373.979.100,00	2,01	383.999.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000)	7,7	7,5	6,5		6		5,5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	WUS 15-19 tahun) (Angka)													Keluarga Berencana				
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					999.000.000,00		1.000.887.700,00		1.000.963.700,00		1.007.021.700,00		1.034.004.400,00					
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	69,8	71,44	72	999.000.000,00	73	1.000.887.700,00	73,75	1.000.963.700,00	74,25	1.007.021.700,00	75	1.034.004.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,86	11,86	11,5				11,2				10,9			10,6		10,3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					493.000.000,00		493.931.500,00		493.969.000,00		496.958.600,00		510.274.400,00					
Meningkatnya Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	78,71	79,76	80,81	493.000.000,00	81,86	493.931.500,00	82,91	493.969.000,00	83,96	496.958.600,00	85	510.274.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	61,40	61,58	61,76				61,94				62,12			62,30		62,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	81,3	82,67	84,03				85,4				86,73			88,10		89,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN					27.087.850.194,00		27.139.031.700,00		27.141.093.000,00		27.305.358.000,00		28.036.992.900,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG PERHUBUNGAN														
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.237.850.194,00		11.259.083.700,00		11.259.938.900,00		11.328.086.900,00		11.631.617.900,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	94,10	94,20	94,30	11.237.850.194,00	96,10	11.259.083.700,00	97,90	11.259.938.900,00	99,70	11.328.086.900,00	100	11.631.617.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					13.270.000.000,00		13.295.073.100,00		13.296.082.900,00		13.376.554.400,00		13.734.973.300,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase layanan angkutan darat (%)	60,91	62	63	13.270.000.000,00	64	13.295.073.100,00	65	13.296.082.900,00	66	13.376.554.400,00	67	13.734.973.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Kinerja Lalu Lintas (Rasio)	0,325	0,372	0,375		0,378		0,38		0,383		0,385		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pelayaran	Rasio Konektivitas Laut (Rasio)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					33.000.000,00		33.062.400,00		33.064.900,00		33.265.000,00		34.156.300,00	
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Kawasan KKOP	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Kawasan KKOP (Orang)	100	100	100	33.000.000,00	100	33.062.400,00	100	33.064.900,00	100	33.265.000,00	100	34.156.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					2.497.000.000,00		2.501.812.500,00		2.502.006.300,00		2.517.451.700,00		2.586.245.400,00	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan kereta api yang ditangani (%)	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani (%)	75	75	76	2.497.000.000,00	77	2.501.812.500,00	78	2.502.006.300,00	79	2.517.451.700,00	80	2.586.245.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					31.931.885.422,00		31.992.219.300,00		31.994.649.100,00		32.188.289.300,00		33.050.760.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.269.885.422,00		9.287.400.200,00		9.288.105.700,00		9.344.319.600,00		9.594.696.400,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	91	92,5	93,50	9.269.885.422,00	94,50	9.287.400.200,00	95,50	9.288.105.700,00	96,50	9.344.319.600,00	98	9.594.696.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					8.336.000.000,00		8.351.750.600,00		8.352.384.800,00		8.402.935.800,00		8.628.088.700,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas Konten informasi publik (Angka)	85,7	85,8	85,9	8.336.000.000,00	86	8.351.750.600,00	86,1	8.352.384.800,00	86,2	8.402.935.800,00	86,3	8.628.088.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					14.326.000.000,00		14.353.068.500,00		14.354.158.600,00		14.441.033.900,00		14.827.975.100,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	"Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan TIK" (Angka)	0	80	80,25	14.326.000.000,00	80,5	14.353.068.500,00	80,75	14.354.158.600,00	81	14.441.033.900,00	81,25	14.827.975.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					17.860.296.021,00		17.894.042.600,00		17.895.401.500,00		18.003.709.300,00		18.486.110.600,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.490.296.021,00		14.517.675.000,00		14.518.777.600,00		14.606.649.200,00		14.998.027.700,00	
terpenuhinya penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	92	92	92	14.490.296.021,00	92	14.517.675.000,00	92	14.518.777.600,00	92	14.606.649.200,00	92	14.998.027.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					62.000.000,00		62.117.200,00		62.121.900,00		62.497.800,00		64.172.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	87,22	87,22	88,22	62.000.000,00	89,25	62.117.200,00	91	62.121.900,00	92	62.497.800,00	93	64.172.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					20.000.000,00		20.037.800,00		20.039.300,00		20.160.600,00		20.700.800,00	
Meningkatnya Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat (%)	44,86	19,03	46	20.000.000,00	47	20.037.800,00	48	20.039.300,00	49	20.160.600,00	50	20.700.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					120.000.000,00		120.037.800,00		120.039.300,00		120.160.600,00		120.700.800,00	
Meningkatnya Kompetensi SDM Pengelola Koperasi	Persentase pengurus dan pengawas bersertifikat kompetensi (%)	5	8	10	120.000.000,00	15	120.037.800,00	20	120.039.300,00	25	120.160.600,00	30	120.700.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					182.000.000,00		182.155.000,00		182.161.200,00		182.658.400,00		184.873.200,00	
Meningkatnya Kapasitas Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	76,98	17	17,5	182.000.000,00	18	182.155.000,00	18,5	182.161.200,00	19	182.658.400,00	19,5	184.873.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.087.000.000,00		2.091.321.200,00		2.091.495.200,00		2.105.364.000,00		2.167.135.300,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	74,07	75	76	2.087.000.000,00	77	2.091.321.200,00	78	2.091.495.200,00	79	2.105.364.000,00	80	2.167.135.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					899.000.000,00		900.698.600,00		900.767.000,00		906.218.700,00		930.500.400,00	
Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat nilai omset (Persentase)	36,73	36,73	38	899.000.000,00	39	900.698.600,00	41	900.767.000,00	42	906.218.700,00	43	930.500.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					12.084.498.948,00		12.107.332.000,00		12.108.251.600,00		12.181.534.100,00		12.507.932.800,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.124.498.948,00		9.142.532.700,00		9.143.259.000,00		9.201.138.300,00		9.458.932.300,00	
Terpenuhinya kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	97	97	97	9.124.498.948,00	97	9.142.532.700,00	97	9.143.259.000,00	97	9.201.138.300,00	97	9.458.932.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1.054.000.000,00		1.055.991.500,00		1.056.071.800,00		1.062.463.600,00		1.090.931.900,00	
Meningkatnya Iklim Penanaman modal	Persentase Potensi Investasi Daerah yang Dikembangkan (%)	0	0	12,5	1.054.000.000,00	12,5	1.055.991.500,00	25	1.056.071.800,00	25	1.062.463.600,00	25	1.090.931.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					400.000.000,00		400.755.800,00		400.786.200,00		403.211.900,00		414.015.800,00	
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	17,42	17,42	17,50	400.000.000,00	17,60	400.755.800,00	17,70	400.786.200,00	17,80	403.211.900,00	17,90	414.015.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Indeks)	93,06	91,75	92,00	420.000.000,00	92,25	420.000.000,00	92,50	420.000.000,00	92,75	420.000.000,00	93,00	420.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					1.057.000.000,00		1.058.997.200,00		1.059.077.600,00		1.065.487.400,00		1.094.036.600,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang mempunyai LKPM sesuai standar (%)	17	17	18	1.057.000.000,00	19	1.058.997.200,00	20	1.059.077.600,00	21	1.065.487.400,00	22	1.094.036.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM					29.000.000,00		29.054.800,00		29.057.000,00		29.232.900,00		30.016.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INFORMASI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Tata Kelola Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	95	95	100	29.000.000,00	100	29.054.800,00	100	29.057.000,00	100	29.232.900,00	100	30.016.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					19.360.286.273,00		19.396.866.500,00		19.398.339.200,00		19.515.742.900,00		20.038.658.300,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.428.286.273,00		5.438.542.600,00		5.438.955.500,00		5.471.873.400,00		5.618.489.600,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	87,5	92,5	93,75	5.428.286.273,00	95,00	5.438.542.600,00	96,25	5.438.955.500,00	97,50	5.471.873.400,00	98,75	5.618.489.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3.205.000.000,00		3.211.055.800,00		3.211.299.600,00		3.230.735.200,00		3.317.301.300,00	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Wirausaha Mandiri (%)	20	20	21	3.205.000.000,00	21	3.211.055.800,00	22	3.211.299.600,00	22	3.230.735.200,00	23	3.317.301.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	20	20	21		21		22		22		23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Jumlah pemuda pelopor yang berperan aktif (Angka)	5	5	7		7		8		8		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					10.519.000.000,00		10.538.875.100,00		10.539.675.300,00		10.603.464.200,00		10.887.579.300,00	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga (Angka)	1.000	1.000	1.100	10.519.000.000,00	1.200	10.538.875.100,00	1.300	10.539.675.300,00	1.400	10.603.464.200,00	1.500	10.887.579.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase cabor yang memiliki infrastruktur memadai (%)	80	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					208.000.000,00		208.393.000,00		208.408.800,00		209.670.100,00		215.288.100,00	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	20	20	21	208.000.000,00	21	208.393.000,00	22	208.408.800,00	22	209.670.100,00	23	215.288.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					4.550.000.000,00		4.558.597.000,00		4.558.943.300,00		4.586.535.300,00		4.709.429.500,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					4.550.000.000,00		4.558.597.000,00		4.558.943.300,00		4.586.535.300,00		4.709.429.500,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	4.550.000.000,00	100	4.558.597.000,00	100	4.558.943.300,00	100	4.586.535.300,00	100	4.709.429.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					721.000.000,00		722.362.200,00		722.417.000,00		726.789.200,00		746.263.200,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					721.000.000,00		722.362.200,00		722.417.000,00		726.789.200,00		746.263.200,00	
Meningkatnya Keamanan sistem informasi pemerintah	Indeks KAMI (Angka)	0	550	559	721.000.000,00	568	722.362.200,00	578	722.417.000,00	587	726.789.200,00	596	746.263.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					9.511.929.719,00		9.529.902.300,00		9.530.626.200,00		9.588.307.700,00		9.845.222.300,00	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					7.918.929.719,00		7.933.892.400,00		7.934.494.900,00		7.982.516.300,00		8.196.404.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	85	92,5	94,30	7.918.929.719,00	96,10	7.933.892.400,00	97,90	7.934.494.900,00	99,70	7.982.516.300,00	100	8.196.404.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					283.000.000,00		283.534.700,00		283.556.300,00		285.272.400,00		292.916.200,00	
Meningkatnya pengembangan budaya lokal yang dilestarikan	Persentase Budaya lokal yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	76,47	88	88,23	283.000.000,00	88,40	283.534.700,00	88,60	283.556.300,00	88,80	285.272.400,00	89	292.916.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					532.000.000,00		533.005.200,00		533.045.700,00		536.271.900,00		550.641.100,00	
Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pertumbuhan Pelaku Seni (%)	1,06	1,06	1,1	532.000.000,00	1,2	533.005.200,00	1,3	533.045.700,00	1,4	536.271.900,00	1,5	550.641.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					224.000.000,00		224.423.200,00		224.440.300,00		225.798.500,00		231.848.800,00	
Meningkatnya Pelestarian Program dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Jumlah Obyek Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	25,51	25,51	25,53	224.000.000,00	25,55	224.423.200,00	25,58	224.440.300,00	25,62	225.798.500,00	25,67	231.848.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					554.000.000,00		555.046.800,00		555.089.000,00		558.448.600,00		573.411.900,00	
Meningkatnya Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Kunjungan Museum (%)	12,52	12,95	13	554.000.000,00	13,05	555.046.800,00	13,10	555.089.000,00	13,15	558.448.600,00	13,20	573.411.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					10.212.441.203,00		10.231.737.200,00		10.232.514.300,00		10.294.444.200,00		10.570.279.000,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.359.441.203,00		5.369.567.600,00		5.369.975.500,00		5.402.476.100,00		5.547.232.800,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	94	95	95	5.359.441.203,00	95	5.369.567.600,00	96	5.369.975.500,00	96	5.402.476.100,00	96	5.547.232.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					4.435.000.000,00		4.443.379.800,00		4.443.717.200,00		4.470.611.700,00		4.590.399.700,00	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi (%)	88,74	88,8	89,90	4.435.000.000,00	89,90	4.443.379.800,00	89,1	4.443.717.200,00	89,20	4.470.611.700,00	89,3	4.590.399.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					418.000.000,00		418.789.800,00		418.821.600,00		421.356.400,00		432.646.500,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan (%)	10,5	37,84	39,19	418.000.000,00	40,54	418.789.800,00	41,89	418.821.600,00	43,24	421.356.400,00	43,24	432.646.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					4.994.000.000,00		5.003.436.000,00		5.003.816.000,00		5.034.100.300,00		5.168.986.800,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					4.082.000.000,00		4.089.712.800,00		4.090.023.400,00		4.114.777.200,00		4.225.030.900,00	
Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	95	95	95,5	4.082.000.000,00	96	4.089.712.800,00	96,5	4.090.023.400,00	97	4.114.777.200,00	97,5	4.225.030.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					912.000.000,00		913.723.200,00		913.792.600,00		919.323.100,00		943.955.900,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	73	74	75	912.000.000,00	76	913.723.200,00	77	913.792.600,00	78	919.323.100,00	79	943.955.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.407.551.322,00		10.427.215.900,00		10.428.007.400,00		10.491.120.100,00		10.772.224.900,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.309.551.322,00		6.321.473.000,00		6.321.952.800,00		6.360.214.900,00		6.530.633.900,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	92,5	92,5	93,50	6.309.551.322,00	94,50	6.321.473.000,00	95,50	6.321.952.800,00	96,50	6.360.214.900,00	97,50	6.530.633.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.099.000.000,00		1.101.076.500,00		1.101.160.200,00		1.107.824.600,00		1.137.508.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap Nelayan Kecil	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil (Ton)	21.529	23.684	24.158	1.099.000.000,00	24.641	1.101.076.500,00	25.134	1.101.160.200,00	25.636	1.107.824.600,00	26.149	1.137.508.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.581.000.000,00		1.583.987.200,00		1.584.107.400,00		1.593.694.700,00		1.636.397.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya (Ton)	30.047	30.610	30.995	1.581.000.000,00	31.200	1.583.987.200,00	31.410	1.584.107.400,00	31.630	1.593.694.700,00	31.792	1.636.397.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					684.000.000,00		685.292.400,00		685.344.400,00		689.492.300,00		707.967.000,00	
Meningkatnya Pengawasan pelaku Usaha perikanan	Persentase jumlah pelaku usaha perikanan yang taat regulasi (Persentase)	0	0	50	684.000.000,00	53	685.292.400,00	66	685.344.400,00	69	689.492.300,00	72	707.967.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					734.000.000,00		735.386.800,00		735.442.600,00		739.893.600,00		759.718.700,00	
Meningkatnya Produksi dan Pemasaran usaha olahan hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi UMK perikanan (Persentase)	0	0	2,5	734.000.000,00	2,5	735.386.800,00	2,5	735.442.600,00	2,5	739.893.600,00	2,5	759.718.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.460.000.000,00		5.470.316.300,00		5.470.732.000,00		5.503.842.300,00		5.651.315.300,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.281.000.000,00		1.283.420.400,00		1.283.518.100,00		1.291.286.400,00		1.325.885.700,00	
Meningkatkan Daya Tarik Terhadap Destinasi Pariwisata	Length of stay (Hari)	2	2	2	1.281.000.000,00	2	1.283.420.400,00	2	1.283.518.100,00	2	1.291.286.400,00	2	1.325.885.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.058.000.000,00		2.061.888.500,00		2.062.045.100,00		2.074.525.100,00		2.130.111.100,00	
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan (%)	10	10	12	2.058.000.000,00	16	2.061.888.500,00	19	2.062.045.100,00	23	2.074.525.100,00	26	2.130.111.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK					1.360.000.000,00		1.362.569.500,00		1.362.673.000,00		1.370.920.200,00		1.407.653.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Presentase Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Ekraf (%)	0,47	0,47	0,5	1.360.000.000,00	0,55	1.362.569.500,00	0,59	1.362.673.000,00	0,63	1.370.920.200,00	0,67	1.407.653.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					761.000.000,00		762.437.900,00		762.495.800,00		767.110.600,00		787.665.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3,72	4	4,2	761.000.000,00	4,4	762.437.900,00	4,6	762.495.800,00	4,8	767.110.600,00	5	787.665.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					78.469.201.646,00		78.617.466.000,00		78.623.436.600,00		79.099.287.000,00		81.218.717.500,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.970.201.646,00		31.028.718.600,00		31.031.075.200,00		31.218.883.600,00		32.055.379.800,00	
Meningkatkan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan PD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	94,29	94,71	95,29	30.970.201.646,00	95,86	31.028.718.600,00	96,43	31.031.075.200,00	97,00	31.218.883.600,00	97,57	32.055.379.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					11.921.000.000,00		11.943.524.200,00		11.944.431.100,00		12.016.722.100,00		12.338.704.900,00	
Meningkatkan Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2,74	2,75	2,76	11.921.000.000,00	2,77	11.943.524.200,00	2,78	11.944.431.100,00	2,79	12.016.722.100,00	2,80	12.338.704.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	11,54	11,55	11,56		11,57		11,58		11,59		11,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	-22,57	1,2	1,3		1,4		1,5		1,6		1,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan produksi komoditas perkebunan (%)	-1,21	0,30	0,35		0,40		0,45		0,50		0,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					26.955.750.000,00		27.006.681.700,00		27.008.732.800,00		27.172.197.100,00		27.900.264.100,00	
Meningkatkan Pemanfaatan Prasarana Produksi Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan (%)	100	100	100	26.955.750.000,00	100	27.006.681.700,00	100	27.008.732.800,00	100	27.172.197.100,00	100	27.900.264.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (%)	95,24	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.660.750.000,00		1.663.888.000,00		1.664.014.300,00		1.674.085.300,00		1.718.941.700,00	
Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	59	70	71	1.660.750.000,00	73	1.663.888.000,00	75	1.664.014.300,00	77	1.674.085.300,00	79	1.718.941.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV (Unit)	19	26	30		34		38		42		44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					6.006.000.000,00		6.017.348.100,00		6.017.805.100,00		6.054.226.400,00		6.216.446.800,00	
Meningkatkan Perlindungan Usaha Tani	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	76,52	76,62	76,72	6.006.000.000,00	76,82	6.017.348.100,00	76,92	6.017.805.100,00	77,02	6.054.226.400,00	77,12	6.216.446.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					955.500.000,00		957.305.400,00		957.378.100,00		963.172.500,00		988.980.200,00	
Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani (%) (%)	100	100	100	955.500.000,00	100	957.305.400,00	100	957.378.100,00	100	963.172.500,00	100	988.980.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.503.000.000,00		4.511.507.900,00		4.511.850.500,00		4.539.157.400,00		4.660.782.100,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					266.000.000,00		266.502.500,00		266.522.700,00		268.135.800,00		275.320.400,00	
Meningkatnya Pasar Tertib Niaga Melalui Fasilitas Perizinan Usaha Perdagangan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	266.000.000,00	100	266.502.500,00	100	266.522.700,00	100	268.135.800,00	100	275.320.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.837.000.000,00		1.840.470.900,00		1.840.610.600,00		1.851.750.500,00		1.901.367.300,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan Kualitas (%)	20	20	25	1.837.000.000,00	35	1.840.470.900,00	45	1.840.610.600,00	55	1.851.750.500,00	65	1.901.367.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.735.000.000,00		1.738.278.100,00		1.738.410.100,00		1.748.931.300,00		1.795.793.100,00	
Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok (%)	5,14	5	5,13	1.735.000.000,00	5,12	1.738.278.100,00	5,11	1.738.410.100,00	5,10	1.748.931.300,00	5,10	1.795.793.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					302.000.000,00		302.570.600,00		302.593.600,00		304.425.000,00		312.582.000,00	
Meningkatnya Volume Ekspor	Jumlah realisasi ekspor (dalam Juta US\$) (Angka)	175,5	175,5	176,38	302.000.000,00	177,26	302.570.600,00	178,15	302.593.600,00	179,04	304.425.000,00	179,93	312.582.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					290.000.000,00		290.547.900,00		290.570.000,00		292.328.600,00		300.161.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pasar Tertib Niaga	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	20,31	20,4	20,5	290.000.000,00	20,75	290.547.900,00	21	290.570.000,00	21,25	292.328.600,00	21,5	300.161.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					73.000.000,00		73.137.900,00		73.143.500,00		73.586.200,00		75.557.900,00	
Meningkatnya Volume Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi (Persentase)	12,93	12,93	13,89	73.000.000,00	14,86	73.137.900,00	15,83	73.143.500,00	16,79	73.586.200,00	17,76	75.557.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.349.000.000,00		2.353.438.400,00		2.353.617.100,00		2.367.861.800,00		2.431.307.700,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.593.000.000,00		1.596.010.000,00		1.596.131.100,00		1.605.791.300,00		1.648.817.900,00	
Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM (%)	7,86	8	8,5	1.593.000.000,00	8,6	1.596.010.000,00	8,7	1.596.131.100,00	8,8	1.605.791.300,00	8,9	1.648.817.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					378.000.000,00		378.714.200,00		378.743.000,00		381.035.200,00		391.244.800,00	
Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor (%)	10,78	10,84	10,89	378.000.000,00	10,95	378.714.200,00	11,00	378.743.000,00	11,06	381.035.200,00	11,12	391.244.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					378.000.000,00		378.714.200,00		378.743.000,00		381.035.300,00		391.245.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM (%)	0,78	1,30	1,40	378.000.000,00	1,55	378.714.200,00	1,63	378.743.000,00	1,77	381.035.300,00	1,86	391.245.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					399.000.000,00		399.753.900,00		399.784.300,00		402.203.900,00		412.980.800,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					399.000.000,00		399.753.900,00		399.784.300,00		402.203.900,00		412.980.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Menetap (%)	100	100	100	399.000.000,00	100	399.753.900,00	100	399.784.300,00	100	402.203.900,00	100	412.980.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					108.591.714.835,00		108.796.894.300,00		108.805.157.000,00		109.463.675.000,00		112.396.706.600,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					59.004.714.835,00		59.116.201.500,00		59.120.691.100,00		59.478.505.400,00		61.072.206.100,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Peningkatan manajemen pelayanan pemerintah daerah (Nilai)	94,87	94,87	94,89	59.004.714.835,00	94,90	59.116.201.500,00	94,92	59.120.691.100,00	94,96	59.478.505.400,00	94,98	61.072.206.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Peningkatan pelayanan Tamu (Nilai)	95,77	95,80	95,82		95,85		95,90		95,95		96,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pelayanan Pimpinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	90,13	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Kepuasan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Setda (%)	90,80	91,00	91,25		91,50		91,75		91,90		92,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP SETDA (Angka)	90,33	90,45	90,65		90,85		91,00		91,10		91,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					44.844.000.000,00		44.928.731.000,00		44.932.143.100,00		45.204.084.600,00		46.415.308.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	IKM Kesra (Indeks)	0	90,00	90,25	44.844.000.000,00	90,50	44.928.731.000,00	90,75	44.932.143.100,00	91,00	45.204.084.600,00	92,00	46.415.308.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100				
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	85,00	87,00	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.743.000.000,00		4.751.961.800,00		4.752.322.800,00		4.781.085.000,00		4.909.192.200,00	
Meningkatnya perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Angka)	88,42	88,45	88,48	4.743.000.000,00	88,50	4.751.961.800,00	88,53	4.752.322.800,00	88,55	4.781.085.000,00	88,58	4.909.192.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Inflasi ((%))	1,73	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
												Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					75.067.303.169,00		75.209.139.900,00		75.214.852.300,00		75.670.072.800,00		77.697.619.300,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.802.303.169,00		48.894.513.200,00		48.898.226.700,00		49.194.172.000,00		50.512.308.400,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	100	92,5	94,30	48.802.303.169,00	96,10	48.894.513.200,00	97,90	48.898.226.700,00	99,70	49.194.172.000,00	100	50.512.308.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					26.265.000.000,00		26.314.626.700,00		26.316.625.600,00		26.475.900.800,00		27.185.310.900,00	
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (%)	84	85	86	26.265.000.000,00	87	26.314.626.700,00	88	26.316.625.600,00	89	26.475.900.800,00	90	27.185.310.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Prosentase pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas DPRD (%)	90	91	91,25		91,5		91,75		92		92,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di faiilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	prosentase pengesahan perda yang tepat waktu (%)	66	68	70		71		72		73		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					23.105.460.999,00		23.149.117.800,00		23.150.875.600,00		23.290.990.800,00		23.915.062.500,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.360.460.999,00		14.387.594.400,00		14.388.686.900,00		14.475.771.100,00		14.863.642.900,00	
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	97,81	100	100	14.360.460.999,00	100	14.387.594.400,00	100	14.388.686.900,00	100	14.475.771.100,00	100	14.863.642.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.210.000.000,00		2.214.175.800,00		2.214.344.000,00		2.227.745.700,00		2.287.437.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan standar kualitas proses perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	2.210.000.000,00	100	2.214.175.800,00	100	2.214.344.000,00	100	2.227.745.700,00	100	2.287.437.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Perangkat Daerah yang Kinerjanya (Tujuan dan Sasaran Renstra) Tercapai (%)	66,67	68,52	70,37		72,22		74,07		75,93		77,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI					6.535.000.000,00		6.547.347.600,00		6.547.844.700,00		6.587.474.000,00		6.763.982.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya Kualitas Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan standar kualitas substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	6.535.000.000,00	100	6.547.347.600,00	100	6.547.844.700,00	100	6.587.474.000,00	100	6.763.982.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					487.484.042.759,00		505.708.954.123,00		525.260.837.439,00		552.571.085.639,00		610.629.170.298,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.640.228.858,00		24.686.785.500,00		24.688.660.700,00		24.838.082.500,00		25.503.608.000,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	100	92,5	94,30	24.640.228.858,00	96,10	24.686.785.500,00	97,90	24.688.660.700,00	99,70	24.838.082.500,00	100	25.503.608.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	100	92,5	94,30		96,10		97,90		99,70		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					452.082.813.901,00		470.240.836.223,00		489.790.025.439,00		516.885.595.339,00		573.987.502.998,00	
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	% Pelayanan Realisasi Penerimaan Keuangan (%)	102,40	100,00	100,00	448.451.813.901,00	100,00	466.602.975.623,00	100,00	486.151.888.739,00	100,00	513.225.439.739,00	100,00	570.229.275.498,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	% Pelayanan Realisasi Pengeluaran Keuangan (%)	92,60	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	1.384.000.000,00	100,00	1.386.614.900,00	100,00	1.386.720.000,00	100,00	1.395.112.700,00	100,00	1.432.493.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
MeningkatnyaTata kelola Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penganggaran tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	2.247.000.000,00	100,00	2.251.245.700,00	100,00	2.251.416.700,00	100,00	2.265.042.900,00	100,00	2.325.733.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.460.000.000,00		1.462.758.600,00		1.462.869.800,00		1.471.723.500,00		1.511.157.700,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik daerah	Presentase pemenuhan LBMD tepat waktu (%)	92	95	96	1.460.000.000,00	97	1.462.758.600,00	98	1.462.869.800,00	99	1.471.723.500,00	100	1.511.157.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN					9.301.000.000,00		9.318.573.800,00		9.319.281.500,00		9.375.684.300,00		9.626.901.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDAPATAN DAERAH														
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak (%)	0	0	92	9.301.000.000,00	93	9.318.573.800,00	94	9.319.281.500,00	95	9.375.684.300,00	96	9.626.901.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					24.013.828.355,00		24.059.201.400,00		24.061.028.400,00		24.206.652.000,00		24.855.258.500,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.603.828.355,00		20.642.758.400,00		20.644.326.000,00		20.769.270.900,00		21.325.774.400,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	85	92,5	94,30	20.603.828.355,00	96,10	20.642.758.400,00	97,90	20.644.326.000,00	99,70	20.769.270.900,00	100	21.325.774.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.410.000.000,00		3.416.443.000,00		3.416.702.400,00		3.437.381.100,00		3.529.484.100,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen ASN	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (%)	85,08	86	86,5	3.410.000.000,00	87	3.416.443.000,00	87,5	3.416.702.400,00	88	3.437.381.100,00	88,5	3.529.484.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.640.000.000,00		1.643.098.700,00		1.643.223.500,00		1.653.168.700,00		1.697.464.600,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.640.000.000,00		1.643.098.700,00		1.643.223.500,00		1.653.168.700,00		1.697.464.600,00	
Meningkatkan Kualitas ASN	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya (%)	80	80	83	1.640.000.000,00	85	1.643.098.700,00	88	1.643.223.500,00	90	1.653.168.700,00	93	1.697.464.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.164.000.000,00		1.166.199.200,00		1.166.287.900,00		1.173.346.600,00		1.204.786.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.164.000.000,00		1.166.199.200,00		1.166.287.900,00		1.173.346.600,00		1.204.786.000,00	
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian kelitbangan yang sesuai dengan isu strategis daerah (%)	80	81	81,5	1.164.000.000,00	82	1.166.199.200,00	82,5	1.166.287.900,00	83	1.173.346.600,00	83,5	1.204.786.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	98,86	87	88		89		90		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					27.157.185.430,00		27.208.497.600,00		27.210.563.800,00		27.375.249.200,00		28.108.756.800,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.031.185.430,00		14.057.696.600,00		14.058.764.200,00		14.143.851.400,00		14.522.829.600,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	92,5	92,5	93,50	14.031.185.430,00	94,50	14.057.696.600,00	95,50	14.058.764.200,00	96,50	14.143.851.400,00	97,50	14.522.829.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					8.416.000.000,00		8.431.901.700,00		8.432.542.000,00		8.483.578.000,00		8.710.891.700,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Akuntabilitas Keuangan (%)	100	100	100	8.416.000.000,00	100	8.431.901.700,00	100	8.432.542.000,00	100	8.483.578.000,00	100	8.710.891.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Akuntabilitas Kinerja (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
	Persentase Tindak Lanjut Tatakelola Kinerja (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
	% TL Tatakelola Keuangan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.710.000.000,00		4.718.899.300,00		4.719.257.600,00		4.747.819.800,00		4.875.035.500,00	
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI/APIP (%)	61	100	62	4.710.000.000,00	63,5	4.718.899.300,00	65,5	4.719.257.600,00	68	4.747.819.800,00	71,5	4.875.035.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					116.715.721.888,00		116.936.251.488,00		116.945.132.316,00		117.652.915.646,00		120.805.373.746,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					88.816.686.833,00		89.037.216.433,00		89.046.097.261,00		89.753.880.591,00		92.906.338.691,00	
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70	88.816.686.833,00	94,90	89.037.216.433,00	96,10	89.046.097.261,00	97,30	89.753.880.591,00	98,50	92.906.338.691,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	92	92,5	93,00		93,50		94,00		94,50		95,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,50		94,50		95,50		96,50		97,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	94,30		96,10		97,90		99,70		100,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	95	95	95,50		96		96,50		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	94,00		95,50		97,00		98,50		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,00		93,50		94,00		94,50		95,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	95,5		96		96,5		97		97,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	94,30		96,10		97,90		99,70		101,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,50		94,50		95,50		96,50		97,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	95	95	95,5		96		96,5		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	95	95	95,5		96		96,5		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	0	0	95,50		96,00		96,50		97,00		97,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	98	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70		94,90		96,10		97,30		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.769.643.645,00		4.769.643.645,00		4.769.643.645,00		4.769.643.645,00		4.769.643.645,00	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	82,5	100	100	4.769.643.645,00	100	4.769.643.645,00	100	4.769.643.645,00	100	4.769.643.645,00	100	4.769.643.645,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	82,50	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	82,50	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik (%)	75,0	77,5	80,0		82,5		85,0		87,5		90,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					22.523.882.707,00		22.523.882.707,00		22.523.882.707,00		22.523.882.707,00		22.523.882.707,00	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92	22.523.882.707,00	93	22.523.882.707,00	94	22.523.882.707,00	95	22.523.882.707,00	95	22.523.882.707,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	91	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	100	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	0	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	92	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	0	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	0	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	0	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	0	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	50	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	0	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	0	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (%)	27	92	92		93		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					306.550.505,00		306.550.505,00		306.550.505,00		306.550.505,00		306.550.505,00	
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	90	92	306.550.505,00	94	306.550.505,00	96	306.550.505,00	98	306.550.505,00	98	306.550.505,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	2	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	90	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	2	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	92	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	2	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	88	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	0	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	92	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					298.958.198,00		298.958.198,00		298.958.198,00		298.958.198,00		298.958.198,00	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pmerintahan Desa					298.958.198,00		298.958.198,00		298.958.198,00		298.958.198,00		298.958.198,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang menyelesaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					14.163.476.608,00		14.190.237.900,00		14.191.315.700,00		14.277.205.200,00		14.659.756.300,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.733.476.608,00		5.744.309.800,00		5.744.746.000,00		5.779.514.600,00		5.934.373.900,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	90	92,5	93,70	5.733.476.608,00	94,90	5.744.309.800,00	96,10	5.744.746.000,00	97,30	5.779.514.600,00	98,50	5.934.373.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.625.000.000,00		1.628.070.400,00		1.628.194.100,00		1.638.048.400,00		1.681.939.100,00	
Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarakat (Kejadian)	1	1	0	1.625.000.000,00	0	1.628.070.400,00	0	1.628.194.100,00	0	1.638.048.400,00	0	1.681.939.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	"Presentase masyarakat yang memiliki wawasan kesabangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANK AM yang baik (nilai post test lebih dari 70) " (%)	70	71	73		75		77		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					5.290.000.000,00		5.299.995.200,00		5.300.397.700,00		5.332.477.100,00		5.475.358.500,00	
Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik di masyarakat (%)	65	65	69	5.290.000.000,00	72	5.299.995.200,00	75	5.300.397.700,00	80	5.332.477.100,00	83	5.475.358.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					67.000.000,00		67.126.600,00		67.131.700,00		67.538.000,00		69.347.700,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang dibina (Angka)	65	65	69	67.000.000,00	72	67.126.600,00	75	67.131.700,00	80	67.538.000,00	83	69.347.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					467.000.000,00		467.882.400,00		467.918.000,00		470.750.000,00		483.363.500,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Angka potensi konflik sosial dan budaya di masyarakat (Kejadian)	12	12	10	467.000.000,00	8	467.882.400,00	6	467.918.000,00	4	470.750.000,00	2	483.363.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					981.000.000,00		982.853.500,00		982.928.200,00		988.877.100,00		1.015.373.600,00	
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional, dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Konflik Sosial	Angka potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (Kejadian)	12	12	10	981.000.000,00	8	982.853.500,00	6	982.928.200,00	4	988.877.100,00	2	1.015.373.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					3366917864774.00		3390582847011.00		3410354327355.00		3455125931385.00		3590856693544.00	



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Banyuwangi menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Ukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian periode 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyuwangi 2025-2030

NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68	4,9	5,15	5,41	5,66	5,89	6,10
2	Persentase Penduduk miskin	%	6,54	6,29	6,03	5,77	5,41	5,15	4,89
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,30	74,87	75,38	75,87	76,34	76,78	77,19
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	92,84	93,5	95	97	99	100	105
5	ICOR	Indeks	6,84	6,69	6,54	6,38	6,21	6,04	5,88
6	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-1,48	0,79	0,90	1,10	1,30	1,49	1,69
7	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	12,94	13,11	13,82	14,55	15,3	16,05	16,81
8	Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	6,75	6,94	7,29	7,67	8,08	8,49	8,91
9	Pertumbuhan PDRB Perdagangan	%	6,01	6,03	6,26	6,60	7,14	7,61	8,11
10	Indeks Daya Beli (PPP)	Indeks	0,750	0,790	0,795	0,800	0,810	0,815	0,820



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,22	78,27	78,35	78,43	78,51	78,58	78,66
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	145,76	143,33	139,83	136,50	133,33	130,31	127,40
13	Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67
14	Indeks Peranan Sosial	Indeks	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71
15	Indeks Keberdayaan Ekonomi	Indeks	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
16	Indeks Gini	Indeks	0,312	0,310	0,308	0,306	0,304	0,301	0,299
17	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	13,16	13,18	13,20	13,22	13,24	13,26
19	Rata -rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	7,80	7,82	7,84	7,86	7,88	7,90
20	Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai rapor berkategori baik	%	75,68	76,68	77,68	78,68	79,68	80,68	81,68
21	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,13	74,26	74,60	74,93	75,20	75,61	76,20
22	Indeks Pemerintah Digital (a)	Indeks	4,77	4,82	2,08	2,18	2,28	2,38	2,48
23	SAKIP	nilai	90,13	91	92	93	94	95	96
24	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	67,2876	67,287	68,387	69,587	70,887	72,287	73,687
25	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,43	3,45	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
26	Indeks Sistem Merit	Nilai	305	325	330	335	340	345	350
27	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,59	4,5	4,7	4,8	4,9	5	5
28	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	94,87	94,87	94,9	94,9	94,92	94,96	94,98

Keterangan:

Baseline Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 masih Menggunakan Indeks SPBE



Penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD).

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyuwangi 2025-2029

NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi dan Demografi								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,82	85,8	86,02	86,42	86,68	87,67	88,67
2	Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of undernourishmen)	%	5,76	8,03	7,71	7,39	7,07	6,75	6,43
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	31,3	38,78	40,26	41,75	43,24	44,72	46,21
4	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	27,5	30,67	30,87	31,07	31,27	31,47	31,67
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,69	8,41	9,12	9,83	10,54	11,25	11,96
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	22,68	29,67	34,03	38,38	42,74	47,1	50
7	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	92,03	92,32	92,62	92,92	93,21	93,51	93,8
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,72	1,03	1,07	1,11	1,14	1,16	1,18
9	penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	22.671,05	23.124,48	23.586,97	24.058,71	24.539,88	25.030,68	25.531,29
10	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,7100	0,7200	0,7300	0,7400	0,7500	0,7600	0,7700
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
11	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	3,43	3,43	3,44	3,44	3,45	3,45	3,46
12	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,14	13,15	13,17	13,24	13,33	13,39	13,43
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	11,82	8,9	8,95	9,04	9,13	9,44	10,57
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,13	74,26	74,6	74,93	75,2	75,61	76,2
15	Jumlah Kematian Ibu	Orang	28	28	27	27	26	26	26
16	Jumlah Kematian Balita	Orang	172	173	163	153	143	133	123
17	Prevalensi Stunting	%	17,6	16,91	16,3	15,7	15,09	13,01	12,47



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	93,95	94,00	95,00	95,5	96,00	96,5	97
19	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	73	73	74	75,2	76,3	77,4	78
20	Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	%	88,5	90	90	90	90	90	90
21	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88,1	100	100	100	100	100	100
22	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	40	40	42	44	46	48	50
23	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	80,42	95	95	97	98	99	99
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	18,74	27,69	29,02	31,21	32,55	34,73	36,3
25	% Peserta Penyandang Disabilitas bekerja di Sektor Formal	%	0,98	1,21	1,49	1,83	2,25	2,77	3,41
26	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	68,31	69,06	70,45	71,2	72,40	73,00	75,00
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	55	55	57	59	61	63	65
28	Indeks Harmoni	Indeks	7,03	7,05	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
29	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,79	61,79	62	62,5	63	63,5	64
30	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,23	0,226	0,214	0,207	0,201	0,195	0,189
III Aspek Daya Saing Daerah									
31	Rasio Kewirausahaan	%	3,19	3,44	3,7	3,97	4,25	4,54	4,84
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,03	3,95	3,77	3,59	3,41	3,39	3,19
33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	62,87	63,36	63,9	64,42	64,94	65,46	65,98
34	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	31,33	31,89	32,60	33,02	33,45	33,70	33,89
35	Indeks daya Saing Daerah	%	3,68	3,7	3,75	3,8	3,83	3,85	3,9
36	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,05	4,08	4,11	4,13	4,16	4,19	4,20
37	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara yang Menginap	Orang	332.944	349.000	367.000	385.000	404.000	424.000	446.000
38	Realisasi Investasi	rupiah (dalam triliun)	4,5	2,68	2,69	2,69	2,7	2,73	2,73
39	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	%	9,19	9,49	9,8	10,12	10,45	10,79	11,14



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
40	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,14	3,20	3,27	3,34	3,42	3,50	3,59
41	Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan	%	10,64	10,84	10,94	11,04	11,14	11,24	11,34
42	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	81,65	85,43	85,72	85,98	86,24	86,5	86,76
IV	Aspek Pelayanan Umum								
43	Indeks Desa	Indeks	84,3	84,3	84,56	91,09	94,46	96,99	97,88
44	Persentase Desa Mandiri	%	94	94,71	95	96	97	98	99
45	Indeks SPBE	Indeks	4,77	4,82	2,08	2,18	2,28	2,38	2,48
46	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%	74	75	75,5	76	76,5	77	77,5
47	Indeks Demokrasi	Indeks	81,00	81,69	82,12	82,56	82,99	83,42	83,85
48	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	90,19	82	83	84	85	86	87
49	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	70,7	70,8	70,9	71	71,1	71,2	71,3
50	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	98,86	87	88	89	90	91	92
51	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	89,37	89,7	90	90,3	90,6	90,9	91,2
52	Indeks Kinerja Wilayah	Indeks	85	85	86	87	88	89	90
53	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban	Indeks	70	70	71	72	73	74	75
54	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,38	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui indikator kinerja Kunci (IKK).



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Banyuwangi 2025-2029

NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Urusan Pendidikan									
01.01	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57,84	58,84	59,84	60,84	61,84	62,84	63,84	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.02	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	74,07	75,07	76,07	77,07	78,07	78,07	80,07	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.03	Iklim Keamanan SD	Nilai	76,74	77,74	78,74	79,74	80,74	81,74	82,74	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.04	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	70,92	71,92	72,92	73,92	74,92	75,92	76,92	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.05	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,52	99,62	99,72	99,82	99,92	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.06	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	93,31	93,51	93,71	93,91	94,11	94,31	94,51	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.07	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	37,57	38,07	38,57	39,07	39,57	40,07	40,57	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.08	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	85,25	85,45	85,65	85,85	86,05	86,25	86,45	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.09	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	89,32	90	91	92	93	94	95	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.10	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	67,67	68,67	69,67	70,67	71,67	72,67	73,67	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	60,14	61,14	62,14	63,14	64,14	65,14	66,14	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	75,95	76,95	77,95	78,95	79,95	80,95	81,95	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,59	66,59	67,59	68,59	69,59	70,59	71,59	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
01.14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	61,39	62,39	63,39	64,39	65,39	66,39	67,39	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
01.15	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,27	71,27	72,27	73,27	74,27	75,27	76,27	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan"
2	Urusan Kesehatan									
02.01	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	78,21	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.02	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	69,24	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.03	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	66,74	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.04	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	65,93	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.05	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	86,15	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.06	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	84,52	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.07	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.08	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	99,29	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.09	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100,36	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes	%	96,19	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	melitus sesuai standar									
02.11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	88,07	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.12	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,6	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang"
02.13	Prevalensi stunting	%	17,6	16,91	16,3	15,7	15,09	13,01	12,47	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
02.14	Jumlah Kematian Ibu	Orang	28	28	27	27	26	26	26	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan"
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
03.01	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	%	70	71	72	73	74	75	76	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang"
03.02	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	76,41	77,07	77,73	78,4	79,08	79,76	80,44	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang"
03.03	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	97,58	97,6	97,62	97,64	97,66	97,68	97,7	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang"
03.04	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persentase	89,11	89,2	89,4	89,6	89,8	90	90,2	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang"
03.05	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	rob kewenangan Kabupaten/Kota									
03.06	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	54,7	54,75	54,8	54,85	54,9	54,95	55	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
03.07	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses pengolah air limbah domestik	%	0,24	0,3	0,36	0,42	0,49	0,50	0,63	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
03.08	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	90	91	92	93	94	95	96	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
03.09	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	75	80	81	82	83	84	85	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
03.10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	%	25	26	27	28	29	30	31	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
03.11	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	70	71	72	73	74	75	76	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
04.01	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman"
04.02	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	2,71	3,54	4,56	5,45	6,57	7,58	8,59	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman"
04.03	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman"
04.04	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	3	4	5	6	7	8	9	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Kawasan Permukiman"
04.05	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman"
5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat									
05.01	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
05.02	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
05.03	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
05.04	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
05.05	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
05.06	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
05.07	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
05.08	Penyediaan Peralatan	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
05.09	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
05.10	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat"
6	Urusan Sosial									
06.01	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
06.02	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
06.03	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
06.04	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60	60	60	61	62	63	64	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
06.05	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
06.06	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
06.07	Persentase (%) penyandang disabilitas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya									
06.08	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
06.09	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
7	Urusan Tenaga Kerja									
07.01	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	7,59	7,60	7,67	7,75	7,89	7,9	8	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja"
07.02	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	93,91	93,92	94,42	94,69	94,95	95,2	95,6	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja"
07.03	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah /Tenaga Kerja	63.091	63.320	63.731	64.054	64.379	64.705	65.033	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja"
07.04	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja"
07.05	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	81,8	81,9	82,00	82,5	83,00	83,5	84,00	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja"
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
08.01	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,5	87,57	87,74	88,1	88,23	88,39	88,55	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak"
08.02	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Perlindungan Anak"
08.03	Persentase ARG Daerah	%	59	60	60,5	65,5	70,5	75,5	80,5	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
08.04	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak"
9	Urusan Pangan									
09.01	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	(%)	95,61	95,8	96,08	96,36	96,64	96,92	97,2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
09.02	Persentase cadangan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
09.03	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	1,84	2	2	2	1	1	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
09.04	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
10	Urusan Pertanahan									
10.01	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan"
10.02	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	91,66	93,13	94,59	95,94	97,30	98,65	100,00	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan"
10.03	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan"
11	Urusan Lingkungan Hidup									
11.01	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	56	58	60	62	64	65	65	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup"
11.02	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	72,22	78,27	78,35	78,43	78,51	78,58	78,66	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup"
11.03	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	%	73	75	78	80	82,85	83,75	84,71	"Dinas/Badan yang menangani Bidang



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota									Lingkungan Hidup"
12	Urusan Pencatatan Sipil dan Administrasi Penduduk									
12.01	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	95	95	96	97	98	99	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
12.02	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
12.03	Perekaman KTP elektronik	%	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
12,04	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	67,99	69	70	72	74	77	80	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
12,05	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
12,06	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
12,07	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
12,08	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12,09	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
12,10	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	14	14	14,05	14,1	14,15	14,20	14,25	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil"
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
13.01	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	25	25	30	35	40	45	50	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa"
13.02	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	25	25	30	50	70	80	90	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa"
13.03	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	9	1	1	1	1	1	1	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa"
13.04	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	30	30	40	50	60	70	80	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa"
13.05	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	35	35	50	60	70	80	90	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa"
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
14.01	ASFR	Angka	7,7	7,5	6,5	6	5,5	5	5	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana"
14.02	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,86	11,86	11,5	11,2	10,9	10,6	10,3	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Keluarga Berencana"
14.03	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	69,8	71,44	72	73	73,75	74,25	75	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana"
14.04	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,01	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana"
15	Urusan Perhubungan									
15.01	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	%	0,817	0,818	0,819	0,820	0,823	0,825	0,829	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan"
15.02	Kinerja Lalu Lintas	Rasio	0,325	0,372	0,375	0,378	0,380	0,383	0,385	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan"
15.03	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	10	15	20	25	30	35	40	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan"
16	Urusan Komunikasi dan Informatika									
16.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika"
16.02	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika"
16.03	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika"
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
17.1	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	74,07	75	76	77	78	79	80	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah"
17.2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	76,98	17	17,5	18	18,5	19	19	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17,3	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	19,98	19,1	20,3	21,5	22,7	23,7	23,7	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah"
18	Urusan Penanaman Modal									
18,1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	94,54	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal"
18,2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-7,17	2,08	2,1	2,12	2,14	2,16	2,18	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal"
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
19.01	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	16	16	17	18	19	20	21	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga"
19.02	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	3	3,4	3,8	4,2	4,6	5	5,4	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga"
20	Urusan Statistik									
20.01	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,6	2,65	2,7	2,73	2,75	2,8	3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
21	Urusan Persandian									
21.01	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	60	60	61	62	63	64	65	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian"
22	Urusan Kebudayaan									
22.01	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	76,47	88,2	88,23	88,4	88,6	88,8	88,8	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan"
22.02	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	25,51	25,52	25,53	25,55	25,58	25,62	25,67	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan"
22.03	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	7,14	7,15	7,16	7,17	7,18	7,19	7,2	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan"
22,04	Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	%	27,83	27,94	28	28,10	28,15	28,22	28,32	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan"
23	Urusan Perpustakaan									
23.01	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	70,7	70,8	70,9	71	71,1	71,2	71,3	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23.02	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	88,73	88,8	88,9	89	89,1	89,2	89,3	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan"
24	Urusan Kearsipan									
24,1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	75	75	80	83	88	90	95	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan"
25	Urusan Kelautan dan Perikanan									
25,1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	30.047	30.610	30.995	31.200	31.410	31.630	31.792	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan"
25,2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	67.342	61.288	62.514	63.764	65.040	66.340	67.667	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan"
26	Urusan Pariwisata									
26,01	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	3,72	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
26,02	Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Rp	26.512.449.991	26.512.449.991	26.512.449.991	26.512.449.991	26.512.449.991	26.512.449.991	26.512.449.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
26,03	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
27	Urusan Pertanian									
27,01	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	11,54	11,55	11,56	11,57	11,58	11,59	11,6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
27,02	Peningkatan produksi komoditas perkebunan	%	-1,21	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
27,03	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	76,52	76,62	76,72	76,82	76,92	77,02	77,12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
27,04	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78	2,79	2,8	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
27,05	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	59	70	71	73	75	77	79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
27,06	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	-22,57	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
28	Urusan Perdagangan									
28,01	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya	Persentase	20,31	21,40	20,50	20,75	21,00	21,25	21,50	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku									
28,02	Pertumbuhan Izin Usaha Perdagangan	%	17,79	10	10	10	10	10	10	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan"
29	Urusan Perindustrian									
29,01	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	triliun rupiah	3,1	3.102	3.106	3.111	3.116	3.119	3.123	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian"
29,02	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Milyar Rupiah	485,205	485,258	485,315	485,365	485,422	485,491	485,525	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian"
29,03	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	12,94	12,98	13	13,05	13,09	13,12	13,16	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian"
29,04	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP	%	76,53	76,55	76,59	76,65	76,69	76,73	76,77	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian"
29,05	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	7,05	7,06	7,07	7,08	7,09	7,1	7,11	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian"
29,06	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian"
29,07	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	70,252	70,256	70,264	70,281	70,296	70,313	70,328	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian"
29,08	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	10,78	10,84	10,89	10,95	11,00	11,06	11,12	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian"
30	Unsur Sekretariat Daerah									
30,01	Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Orang	19	19	20	20	22	22	22	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah"
30,02	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	3	3	3	3	3	3	3	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30,03	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	28,42	28,43	28,43	28,44	28,44	28,45	28,45	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah"
30,04	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah"
30,05	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah"
30,06	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	93,86	93,88	93,90	93,91	93,92	93,93	93,99	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah"
32	Unsur Perencanaan									
32,01	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
33	Unsur Keuangan									
33,01	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	1,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan"
33,02	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	3,29	3,39	3,49	3,59	3,69	3,79	3,89	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan"
33,03	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	139,39	-10	-11,5	-13	-14	-16	-18	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan"
33,04	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	88,14	89	89,5	90	90,5	91	91,5	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan"
33,05	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	27,24	30	30	30	30	30	30	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan"
33,06	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	53,38	40	40	40	40	40	40	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan"
34	Unsur Kepegawaian									
34,01	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	85,08	86	86,5	87	87,5	88	88,5	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian"
34,02	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	53,36	55	57	60	62	65	68	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian"
35	Unsur Penelitian dan Pengembangan									
35,01	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat,	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan"



NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	TARGET						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Industri, dan Badan Usaha di Daerah									
37	Unsur Pengawasan									
37.01	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3	3,226	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah"
37.02	Level Kapabilitas APIP	Level	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah"
37,03	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah"
37,04	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	89,75	91,55	91,8	92,06	92,31	92,57	92,82	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah"
37,05	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	Indeks	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	"Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah"



BAB V

■ Penutup



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Banyuwangi lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 hingga tahun 2029. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2030-2034 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2029. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2029 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Selain itu, transisi RPJMD pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2030-2035. Pada RPJMD tahun 2026, khususnya target capaian pada tahun 2026 masih menggunakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Banyuwangi berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;



- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 ini;
- f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap PERANGKAT DAERAH di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029;
- h. Beberapa hal mengenai perubahan dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 yang bersifat tidak fundamental cukup ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati. Jika dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terjadi perubahan asumsi atau faktor eksternal yang menyebabkan target IKU/IKD/kinerja program RKPD lebih tinggi atau lebih rendah dari target RPJMD, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap mempertahankan target agregat pada akhir periode RPJMD.



5.3 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025-2030, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2030 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2030. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini dan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2025-2030 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

BUPATI BANYUWANGI



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS